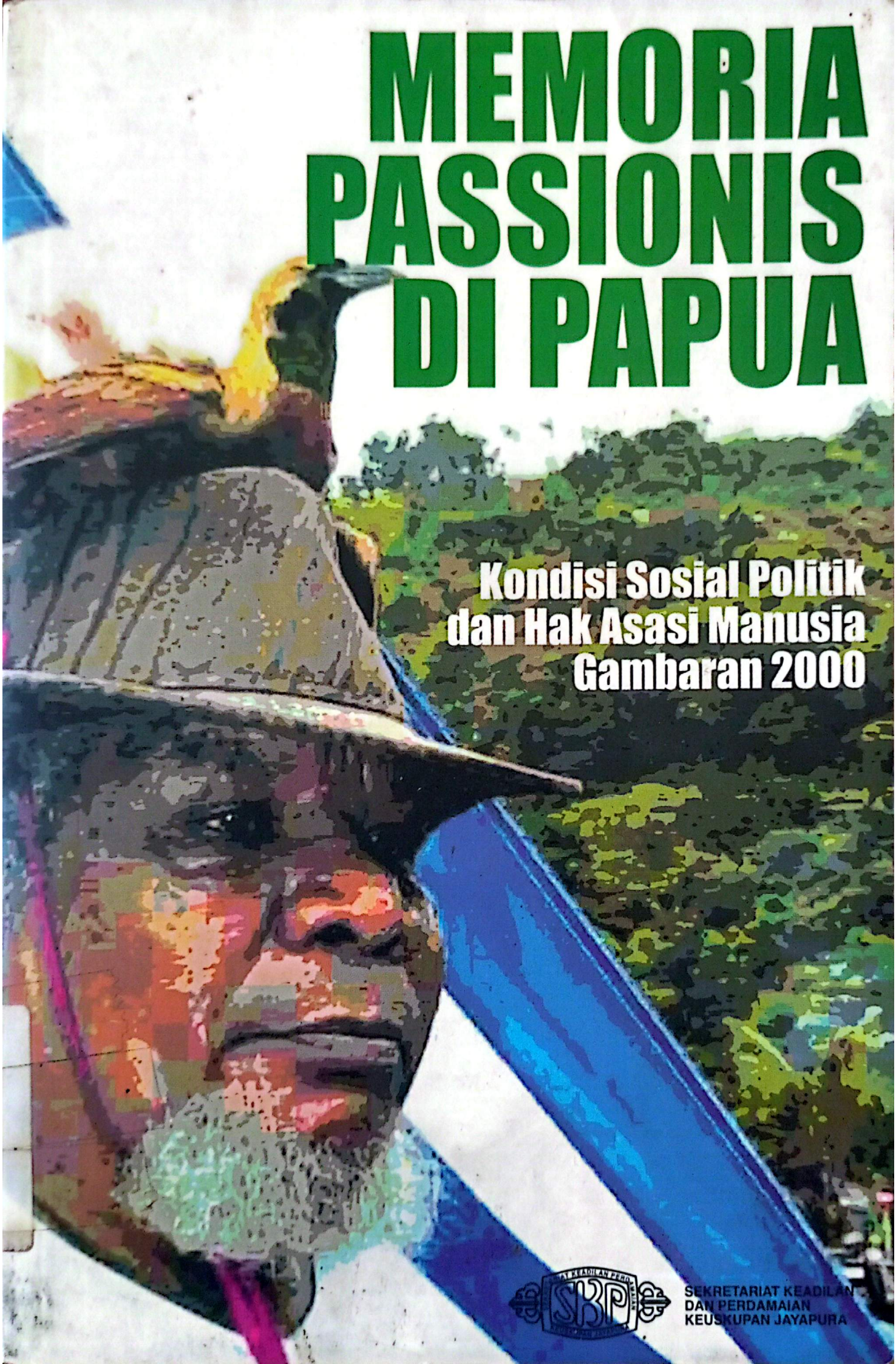
MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA



Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2000

SEKRETARIAT KEADILAN
DAN PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA

I-2-3.

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA

Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia: Gambaran 2000

SEKRETARIAT KEADILAN, PERDAMAIAN DAN KEUTUHAN CIPTAAN
SKPKC
FRANSISKAN PAPUA

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA

Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia: Gambaran 2000

Penulis

Theo P.A. van den Broek ofm
J. Budi Hernawan ofm
Frederika Korain, S.H.
Adolf Kambayong ofm

Penyunting

Darpan Ariawinangun

Diterbitkan atas kerjasama

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP)
Keuskupan Jayapura
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta

Jakarta, 2001

Seri No. 10

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA

Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia: Gambaran 2000

Penulis
Theo P.A. van den Broek ofm, J. Budi Hernawan ofm, Frederika Korain, S.H., Adolf Kambayong ofm

Penyunting
Darpan Ariawinangun

Penata Letak
A'ang

Cetakan Pertama, Desember 2001

Hak Cipta © SKP Keuskupan Jayapura, 2001

Perpustkaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
van den Broek, Theo P.A., *et. al.*
Memoria Passionis di Papua; Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia: Gambaran 2000/Penulis: Theo P.A. van den Broek ofm, J. Budi Hernawan ofm, Frederika Korain, S.H., Adolf Kambayong ofm/Penyunting: Darpan Ariawinangun – cet I – Jakarta: LSPP, 2001
xi +301; 14 x 20,8 cm

ISBN 979-9381-18-5

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura
Jl. Kesehatan No. 4 Dok II Jayapura
Telp./Fax. (62) (967) -534 993
Email: skkp@jayapura.wasantara.net.id

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Jl. Penjernihan I, Komplek Keuangan 12, Pejompongan, Jakarta 10210
Telp. (62) (21) -574 6656, 574 6276; Fax. (62) (21) - 574 6276
Email: lspp@centrin.net.id; lspp@mweb.co.id

Diterbitkan atas kerjasama LSPP dengan SKP Keuskupan Jayapura

Daftar Isi

Kata Pengantar vii
Daftar Singkatan ix
Peta Tanah Papua xi

Pendahuluan 1
Bagian 1: Kronik 2000 3
Bagian 2: Kondisi Sosial-Politik Papua 2000 153
Bagian 3: Kondisi Hak Asasi Manusia 197
Bagian 4: Mencari Jalan Keluar 253
Lampiran 269

Profil SKP Jayapura 295

Kata Pengantar

Pada saat menerbitkan buku *Memoria Passionis di Papua, Gambaran Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999*, kami telah berniat untuk meneruskan usaha mendokumentasikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa terpenting selama tahun 2000. Niat tersebut akhirnya terwujud dengan penerbitan buku ini.

Buku ini merupakan seri "Memoria Passionis" (Ingatan Penderitaan) No. 10 yang merupakan usaha dari Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura untuk terus menyajikan dokumentasi berikut analisis peristiwa sosial politik dan hak asasi manusia kepada khalayak ramai. Tujuan kami tak lain daripada menyumbangkan suatu rangkuman perjalanan sejarah masyarakat di Papua selama 2000, agar kompleksitas masalah Papua makin dipahami secara dinamis dan makin diusahakan tercapainya jalan keluar yang adil, damai, dan manusiawi. Demi pemahaman tersebut, kami menambah satu bagian dalam bidang hak asasi manusia, yakni bidang kesejahteraan umum, untuk memperluas perspektif khalayak bahwa persoalan hak asasi manusia menembus setiap bidang kehidupan, selain bidang sosial dan politik.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa dokumentasi dan kajian di dalamnya tetap tidak mampu menjangkau segala perkembangan di setiap sudut Tanah Papua yang amat luas dan kaya itu. Karenanya kami tetap membuka diri terhadap sumbangan data, analisis, saran, dan kritik dari khalayak agar pemahaman kami semakin diperkaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada mitra-mitra kerja SKP yang selama ini bekerjasama dalam melayani kepentingan masyarakat, dan secara khusus kepada LSPP Jakarta yang tetap bersedia bekerja sama dalam menerbitkan buku ini.

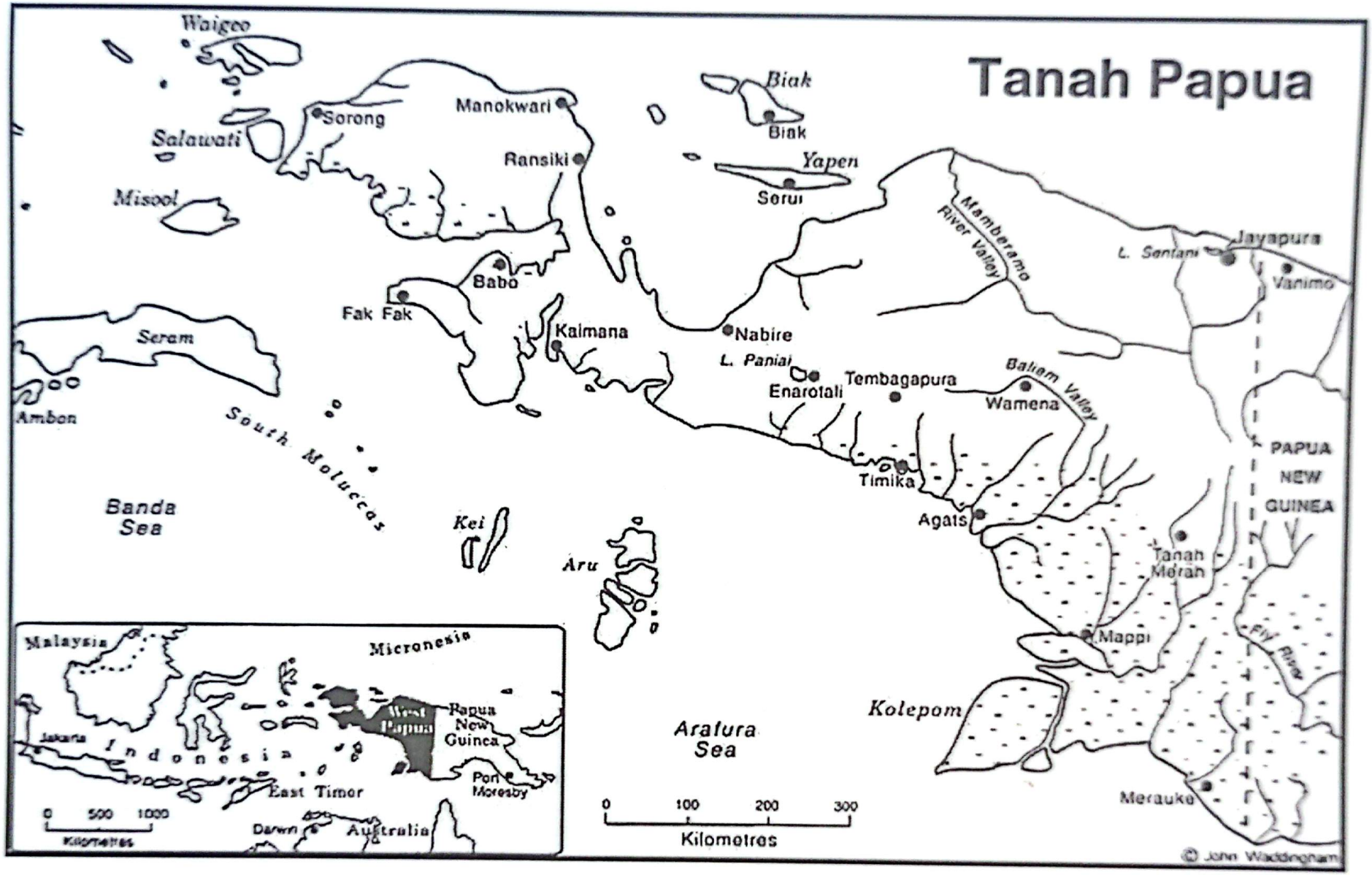
Jayapura, 18 September 2000

Drs. Theo P. A. van den Broek ofm
Kepala SKP Keuskupan Jayapura

Daftar Singkatan

AMP	: Aliansi Mahasiswa Papua
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
DeMMAK	: Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka
DKIJ	: Dewan Kesenian Irian Jaya
DMP	: Dewan Masyarakat Papua
FMA	: Forum Mahasiswa Amber
FNP	: Front Nasional Papua
Foreri	: Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya
Gerasem	: Gerakan Aspirasi Merdeka
GKI	: Gereja Kristen Injili (di Tanah Papua)
GKII	: Gereja Kemah Injil di Irian Jaya
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAMAK	: Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan
HPH	: Hak Pengelolaan Hutan
Irwilprop	: Inspektur Wilayah Propinsi
ISTP	: Institut Sains dan Teknologi Papua
JPKM	: Jaring Pengaman Keluarga Miskin
JPS	: Jaring Pengaman Sosial
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KNPPB	: Komite Nasional Pemuda Papua Barat
Kopermas	: Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat
KRP	: Kongres Rakyat Papua
Lemasa	: Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme
Lemasko	: Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro
LMA	: Lembaga Masyarakat Adat
LP3BH	: Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bantuan Hukum
LPPMA	: Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

LPTQ : Lembaga Pendidikan Tinggi Al-Qur'an
"M" : Merdeka
Mubes : Musyawarah Besar
Muspida : Musyawarah Pimpinan Daerah
OPM : Organisasi Papua Merdeka
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
PDP : Presidium Dewan Papua
Pemda : Pemerintah Daerah
Pepera : Penentuan Pendapat Rakyat
Perda : Peraturan Daerah
PIF : *Pasific Islands Forum* (Forum Kepulauan Pasifik)
PKURP : Pembela Keadilan Untuk Rakyat Papua
PMTAS : Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
PNG : Papua New Guinea
PPKM : Proyek Peningkatan Kesehatan Masyarakat
PTFI : Perseroan Terbatas Freeport Indonesia
RKJ : Rukun Keluarga Jayawijaya
RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah
SP : Satuan Pemukiman (Transmigrasi)
TPN : Tentara Pembebasan Nasional
UEM : *United Evangelical Mission*
Yawa : Yapen Waropen
YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia


Tanah Papua
Waigeo
Salawati
Misool
Sorong
Manokwari
Ransiki
Biak
Biak
Yapen
Serui
Mamberamo River Valley
Jayapura
L. Sentani
Vanimo
Babo
Fak Fak
Kaimana
Nabire
L. Paniai
Enarotali
Tembagapura
Wamena
Baliem Valley
Seram
Ambon
South Moluccas
Banda Sea
Kei
Aru
Timika
Agats
PAPUA NEW GUINEA
Tanah Merah
Mappi
Fly River
Kolepom
Arafura Sea
Merauke
0 100 200 300
Kilometres
Malaysia
Micronesia
West Papua
Papua New Guinea
Jakarta
Indonesia
East Timor
Port Moresby
Darwin
Australia
0 500 1000
Kilometres
© John Waddingham

Pendahuluan

Perjalanan tahun 2000 di Papua ternyata telah diisi dengan berbagai peristiwa yang tak terbayangkan, khususnya dalam ingatan masyarakat Papua. Peristiwa Musyawarah Besar Papua dan Kongres Rakyat Papua II adalah dua tonggak sejarah terpenting dalam tahun tersebut yang telah menyedot perhatian dari segala pihak yang berkepentingan. Mulai dari Papua, Jakarta, hingga dunia internasional. Kedua peristiwa tersebut hanya mungkin terjadi dalam era pemerintahan Indonesia yang sedang bergerak ke sistem yang demokratis.

Namun demikian, di masa yang disebut sebagai masa reformasi, selama tahun 2000 di Papua tercatat pola-pola kebijakan negara yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Kesejahteraan umum masyarakat belum meningkat secara memadai. Rangkaian tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat negara, tetap berlangsung tanpa mampu dijangkau oleh jerat hukum. Dengan demikian kondisi hak asasi manusia (HAM) di Papua tetap harus dinilai secara kritis.

Berdasarkan fakta-fakta peristiwa di bidang sosial-politik dan hak asasi manusia (HAM), kami mencoba menyusunnya menjadi rangkuman data yang bersifat kronologis dan menjadi dasar analisis kami. Secara sistematik, buku ini terdiri dari lima bagian yang sedikit berbeda dengan buku kami terdahulu. *Bagian pertama* berisi kronik peristiwa yang terjadi di Papua. *Bagian kedua* menguraikan analisis situasi sosial-politik di Papua yang berkembang dalam suasana yang amat berbeda antara paruh pertama dengan paruh kedua 2000.

Analisis dilanjutkan dengan *bagian ketiga* yang berisi kondisi hak asasi manusia dengan pemahaman yang menjangkau hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. *Bagian keempat* merupakan rangkuman berbagai perspektif bagi upaya mencari jalan keluar bersama terhadap masalah Papua. Akhirnya seluruh buku diakhiri dengan *lampiran* yang merupakan kumpulan dokumen terpilih yang telah mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat di Papua selama tahun 2000. Dengan sajian semacam itu, kami berharap pembaca dapat memahami seluk beluk perkembangan sosial politik dan hak asasi manusia di Papua secara lebih dekat.

Bagian 1
Kronik 2000

Januari

1 Januari

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pertemuan dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Gedung Negara, Jayapura, pada 1 Januari 2000:

- Tom Beanal (Ketua Tim 100) meminta pemerintah segera mengakui dan mengembalikan hak kemerdekaan bangsa Papua Barat pada 1961. Ia juga meminta Presiden menindaklanjuti dialog nasional dan memprakarsai dialog internasional mengenai proses masuknya Irian Barat ke pangkuan RI. Pengakuan dan pengembalian hak kemerdekaan bangsa Papua harus melalui kesepakatan internasional, bukan melalui keputusan MPR. Selain itu menuntut segala proses penetapan kebijakan pembangunan di Irian Jaya (Irja) harus dikembalikan dan berkiblat pada kedaulatan rakyat Papua Barat. Tom Beanal juga minta kesediaan Presiden untuk membuka Kongres Nasional Papua Barat yang direncanakan berlangsung pada April 2000.
- Ramses Ohee (tokoh masyarakat Jayapura) meminta pimpinan adat diikutsertakan dalam proses pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat di desa-desa dan kampung-kampung.
- A. Nussy (tokoh masyarakat) meminta agar putra-putri Papua diberi kesempatan yang sama untuk menjabat dalam pemerintahan di seluruh Indonesia; meminta penyiaran agama melalui televisi

maupun radio agar proporsional tanpa melihat agama mayoritas atau minoritas.

- Albert Kailele, mantan tapol/napol Papua, minta Presiden memperhatikan nasib tapol/napol Papua dan dalam waktu dekat menyelesaikan penderitaan orang Papua.
- Theys H. Eluay mengatakan bahwa aspirasi merdeka bukan milik segelintir orang tapi merupakan aspirasi mayoritas rakyat Papua; minta penggantian nama Irja menjadi Papua; serta meminta pengembalian kedaulatan Bangsa Papua yang pernah merdeka pada 1 Desember 1961.

2 Januari

- Presiden Abdurrahman Wahid menolak dengan tegas keinginan masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan jika ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendaknya akan berhadapan dengan 'kekuatan' yang dimiliki bangsa Indonesia.
- Theys H. Eluay menyatakan bahwa dirinya menolak jawaban Presiden Abdurrahman Wahid, "Saya membantah jawaban Gus Dur. Saya tidak pernah mendirikan negara dalam negara. Menurut saya justru sebaliknya, Indonesia membuat negara dalam negara Papua. Jadi Pak Gus Dur bicara salah dan keliru besar. Saya tidak terima itu."
- Ketua BP AM Sinode GKI Irja Pdt. Herman Saud, M.Th. menilai jawaban Presiden Abdurrahman Wahid sudah maksimal sesuai kedudukannya sebagai kepala negara. Ia menghimbau semua masyarakat Papua sebagai umat beragama agar menerima jawaban tersebut dengan besar hati. Harapannya agar aspirasi yang sudah disampaikan itu menjadi pertimbangan Presiden dalam memikirkan nasib rakyat Papua.
- Menurut Gubernur Freddy Numberi, perubahan nama Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua atau Papua Barat perlu dibicarakan lagi mengingat negara tetangga (Papua New Guinea – PNG) sudah memakai nama tersebut.
- Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) Ir. F.A. Wospakrik, M.Sc. mengatakan wajar jika mahasiswa melibatkan dirinya dalam kancah politik Irja termasuk mengajukan pendapat mengenai aspirasi "M" (merdeka), asal tidak bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

- Yosepa Alomang dan Pdt. Isak Onawame dinyatakan *bukan* sebagai otak dalam kasus makar pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1-2 Desember 1999 di Timika. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Fak-Fak di Timika, Y.R Micibaroe, "Tidak mungkin Ny. Yosepa Alomang dan Isak sebagai tokoh utamanya. Harus diteliti betul penggeraknya. Kami mendapat kabar kalau perintah penaikan bendera langsung datang dari tokoh OPM Kelly Kwalik."

3 Januari

- Tom Beanal sebagai Ketua Tim 100 mengatakan akan tetap memperjuangkan aspirasi "M" masyarakat Papua. Menurutnya perjuangan akan dilakukan sesuai ketentuan yang ada, baik melalui dialog nasional maupun internasional. Ia menambahkan, penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua tidak akan menghentikan semangat juangnya dan para pendukungnya untuk tetap meminta hak yang sebenarnya, yakni 'merdeka'.
- Jawaban Presiden Abdurrahman Wahid atas permintaan merdeka dari masyarakat Irja dinilai wajar oleh Karel Phil Erari selaku Penasehat Meneg HAM untuk Irja. Menurutnya, "Gus Dur mendapat mandat dari MPR untuk menjaga kesatuan bangsa, sehingga itulah yang harus dia katakan secara hukum dan konstitusional, juga sebagai kepala negara."

4 Januari

- Kapolres Sorong Komisaris Polisi Drs. C.H. Victor Sitorus mengatakan bahwa jajarannya menemukan amunisi yang diselundupkan melalui KM Dobonsolo di pelabuhan Sorong. Amunisi itu terdiri dari peluru jenis M-16 sebanyak 3.250 butir, SS-1 589 butir, dan AK-47 sebanyak 180 butir. Ia menambahkan bahwa jajarannya tetap melakukan pencarian terhadap pelaku yang membawa amunisi tersebut, yang disinyalir telah melarikan diri.
- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan nama Irja menjadi Papua, Drs. Florens Imbiri, mangatakan bahwa DPRD Tk. I akan membahas secara khusus suatu peraturan daerah mengenai pergantian nama Irja menjadi Papua. Hal itu berkaitan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan nama Papua sebagai pengganti Irja. Selanjutnya Perda itu akan dikonsultasikan

kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Presiden.

- Berkaitan dengan maraknya pencalonan gubernur Irja, anggota Fraksi PDI-P Manganju Tambunan mengungkapkan, "Calonnya diusahakan putra daerah, atau bukan putra daerah asalkan telah menetap 20 tahun dan mau mengabdi untuk daerah." Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) Drs. Florens Imbiri mengatakan fraksinya akan mengajukan calon pemimpin yang berkualitas dan dapat diterima masyarakat Papua.

5 Januari

- Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI-P Irja Drs. Ben V. Djeharu mengharapkan para elit politik Papua untuk lebih realistis dalam memperjuangkan aspirasi Papua Merdeka. Menurutnya tawaran otonomi khusus dari pemerintah merupakan salah satu bentuk kemerdekaan yang mulai diberikan kepada Papua agar tidak merasa takut, merdeka dari kemiskinan, kesehatan, dan kebodohan. Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Tk. I Irja Drs. John T. Manurung bahwa otonomi daerah adalah kemerdekaan bagi masyarakat Irja untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.
- Wakil Gubernur I Irja J.R.G. Djopari mengusulkan agar paket transmigrasi di Papua 100% diberikan kepada masyarakat lokal. Tujuannya agar ada pembangunan sarana pemukiman dan perumahan sebagai langkah awal untuk membangun basis pertanian, perikanan, dan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Irja. "Selama ini *kan* masyarakat merasa kurang aman. Orang transmigrasi dari luar diberi paket perumahan yang bagus, sedangkan penduduk setempat tidak. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan harus diantisipasi."
- Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPPMA), Zadrak Wamebu, S.H., membenarkan tindakan masyarakat adat yang menutup wilayah adatnya terhadap operasional perusahaan HPH (Hak Pengelolaan Hutan) akibat meningkatnya konflik hak ulayat. Menurutnya hal ini merupakan akibat dari kebijakan pembangunan pemerintah yang kurang menghargai hak ulayat sehingga kebijakan tersebut perlu diubah.

6 Januari

- Keberangkatan Theys H. Eluay, Tom Beanal, dan Willy Mandowen ke Jakarta dinilai delegasi Papua asal daerah yang sedang berada di Jayapura sebagai misi yang tidak jelas. Mereka diminta agar segera pulang ke Papua.
- Langkah Presiden Abdurrahman Wahid membebaskan tapol/napol Papua, mengganti nama Irja menjadi Papua, dan meminta maaf atas pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua, ditanggapi Ketua Lembaga Masyarakat Adat Sorong Ir. Marthinus Kambu sebagai langkah yang menyejukan hati rakyat Papua. Namun ia menyesalkan pernyataan Presiden yang tidak akan mentolerir siapapun yang ingin mendirikan negara dalam negara. Menurutnya pernyataan itu menyinggung perasaan rakyat Papua.
- Penyidikan kasus makar dalam peristiwa pengibaran bendera 1 Desember 2000 di Sorong untuk sementara dihentikan oleh Polres Sorong sebagai akibat dari pemberian Amnesti dan Abolisi kepada tapol/napol Papua oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Kepres No. 173 tahun 1999.

9 Januari

- Delegasi Papua asal Sorong yang tiba dari Jayapura disambut ribuan massa dengan tari-tarian adat setempat. Pada saat bersamaan massa merusak kios di sekitar pelabuhan, memecahkan kaca mobil, dan melempar botol ke arah aparat yang secara paksa menurunkan bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di geladak KM Rinjani.
- Bendera Bintang Kejora dikibarkan di beberapa tempat:
  - Pada 7 Januari 2000 sehari sebelum perayaan Idul Fitri, bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih oleh masyarakat Desa Wonda, Kecamatan Kemtuk Gresi, Jayapura.
  - Di Serui, pada 8 Januari 2000, bersamaan dengan perayaan Idul Fitri, bendera Bintang Kejora dikibarkan di depan hotel Merpati oleh orang yang tidak dikenal masyarakat sekitar maupun pihak hotel.
  - Di Manokwari, bendera Bintang Kejora dan Merah Putih dikibarkan di rumah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Manokwari, Barnabas Mandacan. "Ini merupakan instruksi dari pemimpin

bangsa Papua Theys H. Eluay supaya bendera dikibarkan di 13 kabupaten dan penurunannya menunggu perintah dari Posko Induk di Jayapura."

- Polres Merauke memanggil dan memeriksa 8 orang warga Merauke dengan tuduhan makar karena diduga terlibat dalam aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1999 di Merauke.

10 Januari

❖ Tokoh pejuang kemerdekaan bangsa Papua, Tom Beanal, menilai aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di sejumlah tempat di Papua akhir-akhir ini tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya tindakan itu justru menciptakan masalah baru. Untuk mencapai kemerdekaan, bangsa Papua tidak hanya memusuhi Indonesia dan rakyatnya, melainkan masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab seperti PBB, Amerika Serikat dan Belanda, serta pihak terkait lainnya. Dengan demikian perjuangan untuk mencapai kemerdekaan masih sangat panjang dan makan waktu yang lama.

❖ Menanggapi permintaan maaf Presiden Abdurrahman Wahid atas pelanggaran HAM di Irja, Supervisor Els-HAM Irja John Rumbiak mengatakan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Permintaan maaf itu harus ditindaklanjuti dengan menyeret para pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan yang jujur dan transparan, mengingat yang terjadi adalah tindak kriminal berskala besar. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.

❖ Enam belas orang perwakilan masyarakat Timika yang dipimpin Pdt. Ishak Onawame menemui Komisi A DPRD Tk. I Irja di Jayapura dan mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Diadakan dialog antara masyarakat, Panglima Kodam, Gubernur, dan Ketua DPRD untuk membahas jawaban Presiden Gus Dur dalam dialog pada 1 Januari 2000 yang dinilai tidak memuaskan.
2. Meminta penarikan seluruh anggota TNI/Polri dari wilayah Timika karena tidak diinginkan rakyat. Keamanan setempat, termasuk di Freeport, akan dijamin oleh Satgas Papua.
3. Bupati dan Sekwilda Timika harus diganti karena tidak

bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

4. Pemda Irja segera memberi jawaban atas aspirasi merdeka dan menolak otonomi daerah.
5. Tom Green (penanggung jawab keamanan PT Freeport Indonesia) ditarik dari tugasnya karena dianggap sebagai pemusnah masyarakat Timika.
6. Operasi PT Freeport harus segera ditutup jika masyarakat Timika ingin hidup tenang.

❖ Forum Kerja LSM Irja mengusulkan diadakan debat publik bagi calon gubernur Irja untuk menghindari mekanisme pemilihan yang selama ini berlangsung tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat, penuh rekayasa, serta bermuatan politis.

12 Januari

❖ Anggota Tim 100 Kabupaten Sorong, Ny. Yakomina Isir, menegaskan bahwa perjuangan Papua merdeka tidak menggunakan kekerasan dengan peluru ataupun senjata, melainkan dengan cara damai. Karena itu, penyelundupan ribuan amunisi yang digagalkan Polres Sorong tidak ada kaitannya dengan perjuangan Papua merdeka.

❖ Bupati Manokwari Drs. Mulyono mengungkapkan, pengibaran bendera Bintang Kejora oleh masyarakat di Manokwari merupakan wujud penyampaian aspirasi masyarakat untuk perbaikan hidupnya, dan merupakan hak asasi rakyat yang dijamin pemerintah.

❖ Anggota Forum Cendekiawan Masyarakat Adat Kabupaten Merauke, Yosep Mahuze, menyatakan penyesalannya atas sikap warga transmigran yang menjual kembali lahannya dan pulang ke daerah asal. Ia menilai tindakan itu menghina dan tidak menghormati tanah adat milik warga Marind yang sudah diserahkan secara cuma-cuma untuk kepentingan transmigrasi dan program pembangunan pemerintah lainnya.

13 Januari

❖ Bupati Sorong John Piet Wanane, S.H. menilai aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Sorong tidak akan berarti apa-apa, dan tuntutan Papua Merdeka di luar kewenangan Pemda. "Kalau mau bicara 'M' silahkan saja, tapi ke Jakarta sana, karena tuntutan 'M'

sepenuhnya merupakan kewenangan MPR. Jadi percuma saja kalau teriak-teriak di sini. Kita di sini membutuhkan ketenangan untuk membangun. Urusan politik adalah urusan pemerintah pusat."

- Warga Adat Koya Timur, Kabupaten Jayapura, menuntut ganti rugi kepada Pemda Kota Jayapura melalui DPRD Kota atas tanaman budi daya di atas lahan seluas 3300 ha yang diserahkan untuk program transmigrasi sejak 1983. Mereka juga menuntut pemerintah melaksanakan pembangunan untuk masyarakat Koya Timur.

14 Januari

- Anggota Tim 100, beberapa LSM, dan perwakilan daerah sepakat untuk mengadakan Kongres Nasional Bangsa Papua pada pertengahan 2000 yang akan didahului dengan kegiatan Musyawarah Daerah Papua.
- Menanggapi maraknya pengibaran bendera Bintang Kejora, Tom Beanal mengimbau masyarakat agar mensakralkan bendera tersebut. Ia berpendapat, "Bendera Papua ini jangan dipermainkan. Kita harus mensakralkannya. Kalau tiap hari atau terus-menerus dinaikkan dan diturunkan, akan membuat orang lain kurang senang dan tidak lagi menghargai bendera kebesaran kita."

16 Januari

- Tim pengacara kasus makar dan pelanggaran HAM Irja menyatakan bersedia untuk melakukan pembelaan terhadap Theys H. Eluay dan kawan-kawannya dalam persidangan kasus makar pada 1 Juli 1998 di Pengadilan Negeri Jayapura.
- Sehubungan dengan tuntutan ganti rugi atas lahan transmigrasi oleh Masyarakat Adat Koya Timur, Anggota Komisi A DPRD Kota Jayapura Gerson Hanueby membenarkan jika lahan tersebut terletak di atas tanah adat yang belum mendapatkan ganti rugi. "Masyarakat merasa belum pernah menyerahkan tanah seluas 3300 ha itu untuk kawasan transmigrasi di Koya Timur. Pada masa Orde Baru, tanah-tanah adat yang diambil oleh pemerintah pusat untuk program transmigrasi tidak diberi ganti rugi, kecuali ganti rugi tanaman budi daya. Selain itu lokasi tersebut bukan untuk transmigrasi lokal, tetapi untuk transmigrasi pendatang."

17 Januari

- Pansus aspirasi "M" DPRD Irja meminta masyarakat Irja agar memahami konsep merdeka macam apa yang mereka inginkan, mengingat otonomisasi yang diprogramkan juga merupakan suatu kemerdekaan bagi rakyat. Atau, apakah rakyat menginginkan kemerdekaan negerinya. Hal ini akan diteliti Pansus dengan menyelami isi hati seluruh rakyat Papua.
- Pendeta M.L. Wanma, tokoh masyarakat Papua asal Sorong, menyatakan penyesalannya atas pernyataan tidak simpatik Bupati Sorong John Piet Wanane, S.H. terhadap aspirasi merdeka masyarakat Papua. Menurutnya, tuntutan merdeka di Irja bukan barang baru, sehingga para pejabat di daerah sudah seharusnya tidak alergi dengan aspirasi "M" tersebut.

18 Januari

- Bendera Bintang Kejora dikibarkan dengan pesta adat oleh masyarakat Kecamatan Teminabuan, Ayamaru, dan Beraur di Kabupaten Sorong. Sementara di Timika massa mengarak bendera Bintang Kejora mengelilingi kota setelah menjemput para wakilnya yang diutus untuk berdialog dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Jayapura.
- Salah satu tokoh yang pro-merdeka, Don Flassy, M.A., dalam tanggapannya terhadap rencana Pansus aspirasi "M" mengatakan bahwa DPRD tidak perlu membentuk Pansus tersendiri, melainkan menjalin kerja sama dengan LSM-LSM (Els-HAM, LBH, Foreri, YPMD, LPPMA) yang sudah lama memiliki bahan-bahan mengenai latar belakang masyarakat menuntut merdeka.

19 Januari

- Tokoh Pemuda Papua Merauke Frans X. Kamepict, B.Sc. menolak tudingan negatif terhadap Satgas Papua dan mengatakan bahwa kehadiran Satgas Papua justru untuk membantu tugas pengamanan polisi dan TNI agar tidak terjadi kekacauan seperti di Ambon dan Aceh.
- Praktisi hukum di Jayapura Zainal Sukri, S.H. menyarankan agar pembentukan Komisi HAM dan Lingkungan Hidup di DPRD Tk. I Irja harus melihat sumber daya yang mempunyai kemampuan lebih dalam bidang HAM dan lingkungan. Sehingga komisi itu

nantinya bisa mengakomodir semua persoalan yang terjadi serta turut mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif.

- Massa di Serui, Ibukota Kabupaten Yapen Waropen, marah dan merusak gedung DPRD setempat karena bupati terpilih, Drs. M. Nawawi, tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Tokoh Papua (Don Flassy, M.A., dkk) kemudian menanggapinya dengan mengeluarkan Komunike Bersama bahwa kekacauan dalam pemilihan bupati Yapen Waropen merupakan wujud konkret situasi Papua dewasa ini. Untuk itu perlu ada proses "papuanisasi" dalam jabatan birokrasi dan politis menuju Papua Baru.

20 Januari

- Menanggapi kerusuhan dalam pemilihan bupati di Serui, Yapen Waropen, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Simon Rumpaisum menilai DPRD setempat bukan wakil rakyat, melainkan hanya provokator, karena tidak menyuarakan aspirasi rakyat.
- Kepolisian Resort Mimika melimpahkan berkas perkara makar atas Mama Yosefa Alomang dan Pdt. Isak Onawame dalam aksi penaikan bendera 10 November 1999 kepada Kejaksaan Negeri Fakfak.

21 Januari

- Ketua Sinode GKI Irja Pdt. Herman Saud, S.Th. menilai anggota DPRD Yapen Waropen bermental Orde Baru karena tidak aspiratif dalam pemilihan bupati Yawa yang dinilai masyarakat penuh dengan praktik *money politics*. "Sebenarnya peristiwa keributan di Serui itu tidak akan terjadi jika pihak DPRD mau menghormati aspirasi rakyat. Di antara calon bupati ada orang Papua, namun justru tidak dipilih. Padahal yang dikehendaki rakyat di sana adalah orang Papua."
- Dalam pertemuan antara aparat Pemda dan LSM bersama panitia *ad hoc* MPR-RI yang dipimpin Drs. Anthonius Rahail di Jayapura, Pimpinan Komite Independen Papua (KIP) Don Flassy, M.A. mempromosikan konsep Papua Baru yang dirumuskannya sebagai acuan dalam kerja sama antar-bangsa dan pemerintahan transisi Papua.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas memperkirakan tingkat

kriminalitas, kejahatan terhadap keselamatan negara, penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta kasus narkoba akan meningkat pada tahun 2000 sebagai akibat dari semakin terbukanya wilayah dan beratnya kebutuhan hidup masyarakat serta maraknya tuntutan merdeka.

24 Januari

Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengatakan bahwa polisi bisa melanggar HAM demi penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal itu dikatakannya dalam acara "Sosialisasi Pola Pendekatan Kasih Sayang" bersama kalangan LSM se-Jayapura.

25 Januari

- Anggota MPR-RI Utusan Daerah Irja, Anthonius Rahail mengatakan, pemerintah perlu mencermati secara arif dan bijaksana aspirasi "M" rakyat Papua. Ia juga menilai positif rencana pelaksanaan Mubes dan Kongres Rakyat Papua.
- Sekitar 30 warga masyarakat Guryad, Kecamatan Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, mengadukan pemegang HPH PT Wapoga Mutiara Timber II kepada DPRD Kabupaten Jayapura dan DPRD Tk. I Irja karena selama tujuh tahun beroperasi di wilayah tersebut tidak memperhatikan hak ulayat mereka. Dalam dialog dengan Komisi B DPRD Tk. I Irja yang dipimpin Ketua Komisi Drs. Paulus Sumino, warga meminta Dewan meninjau kembali semua peraturan daerah tentang pengambilan kayu oleh perusahaan di areal yang merupakan hak ulayat masyarakat adat itu. Sedangkan anggota Komisi B DPRD Tk. I Irja meminta dengan tegas agar PT Wapoga menutup operasinya di seluruh Kabupaten Jayapura, mengingat banyaknya pengaduan masyarakat kepada DPRD menyangkut pola kerja perusahaan tersebut.

26 Januari

Dana Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp 94.000.000 tidak disalurkan kepada sekolah-sekolah di wilayah Puncak Jaya. Dana tersebut hanya disimpan di bank oleh pejabat setempat. Sementara bantuan yang sama untuk Kabupaten Manokwari sebesar Rp 1,7 milyar belum

diturunkan oleh pemerintah pusat.

27 Januari

- Dalam konferensi persnya Els-HAM Irja menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya konflik horizontal akibat derasnya aspirasi "M" rakyat Papua Barat. Selain itu Els-HAM meminta semua pihak agar memahami secara benar akar masalah yang memunculkan aspirasi "M" tersebut.
- Kepala Dinas Sosial Irja Drs. D. Asmuruf menjelaskan, 40% masyarakat Papua hidup dalam kondisi memprihatinkan, terisolasi, terasing, dan berpindah-pindah baik di pedalaman, lembah, maupun pesisir pantai.

28 Januari

- Kelompok mantan tapol/napol OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan Generasi Anak Bangsa Papua menyampaikan aspirasi "M" kepada DPRD Tk. I Irja.
- Kota Fakfak dilanda kerusuhan setelah Satgas Papua mengadakan pemeriksaan tiket dan KTP terhadap warga dari Maluku yang baru tiba dengan kapal motor "Chinta". Pemeriksaan dilakukan dengan alasan bahwa warga khawatir pengungsi yang baru masuk itu bisa menimbulkan konflik di Fakfak seperti yang terjadi di Maluku. Akibat kerusuhan tersebut sejumlah bangunan milik pemerintah seperti RRI, Kantor Pelni, dan Kantor Perhubungan rusak.

30 Januari

- Ribuan massa dari Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong berdemonstrasi di kantor DPRD Sorong. Mereka mengajukan tuntutan agar Bupati Sorong John Piet Wanane, S.H. mundur. Selain itu perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Sorong, seperti Santa Fe, Pertamina, Usaha Mina, dan perusahaan HPH segera ditutup karena selama melakukan kegiatan bisnisnya tidak menghargai hak ulayat masyarakat adat Moi.
- Ketua Lembaga Masyarakat Adat Manokwari Barnabas Mandacan mengatakan, aspirasi merdeka bagi orang Papua adalah harga mati, tapi tidak anti pendatang. Ia mengharapkan pendatang dapat memahami aspirasi "M" itu. Ia juga menyatakan pendapatnya

tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua, "Penerimaan CPNS di seluruh Papua harus ditunda dulu sampai suhu politik di Papua mereda. Mengapa pemerintah pusat memberikan pemaksaan-pemaksaan kepada masyarakat Papua, termasuk dalam penyelenggaraan penerimaan CPNS yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat?"

31 Januari

- Demonstrasi yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Sorong berlanjut dan tetap dengan tuntutan semula agar Bupati Sorong John Piet Wanane, S.H. mundur. Mereka juga menilai bupati telah mengeksploitasi hak rakyat yang membuat masyarakat Moi terpinggirkan di tanahnya sendiri. Sejumlah masalah tanah adat tidak diselesaikan secara baik. Pembangunan fisik di Sorong tidak jelas dan macet di tengah jalan. Melakukan KKN dalam penerimaan CPNS dan pemberian kesempatan studi. Selain itu LMA Malamoi juga meminta penerimaan CPNS untuk Kabupaten Sorong dihentikan karena bermuatan politis untuk menghambat aspirasi "M".
- Kakanwil Departemen Transmigrasi Irja Ir. Budi Sinulingga, M.Sc. menilai program transmigrasi di Irja sukses. "Keberhasilan program transmigrasi ini terjadi di seluruh kabupaten di Irja, termasuk program transmigran lokal yang sudah berjalan selama setahun. Kebutuhan seluruh bahan pokok termasuk pangan, sandang, dan papan bagi para transmigran sudah mencukupi. Sampai sekarang program transmigrasi di Irja sudah membuat 240 unit pemukiman transmigrasi dan sudah menempatkan sebanyak 288.000 jiwa." Ia menambahkan, keberhasilan itu masih diselingi beberapa kekurangan jika ditinjau dari potensi wilayah dan alat-alat mekanis yang dibutuhkan dalam membantu terlaksananya program tersebut. Misalnya infrastruktur yang kurang memadai, kesulitan memasarkan hasil bumi, dan biaya penempatan transmigran yang cukup mahal, yakni Rp 60 Juta/ KK.

Februari

1 Februari

- Terdakwa kasus makar Theys H. Eluay minta mantan Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring, mantan Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. Hotman Siagian, dan Gubernur Irja Freddy Numberi untuk hadir dalam persidangan karena merekalah yang paling bertanggung jawab atas kerusakan di Papua.
- Anggota MPR Utusan Daerah Irja Budi Baldus Waromi mengungkapkan, "Aspirasi merdeka rakyat Papua sudah disalurkan kepada MPR-RI sejak 1998. Tetapi aspirasi itu tidak ditanggapi." Menurutnya, tanggapan pemerintah berupa kebijakan otonomi daerah dan pemaksaan program penerimaan PNS bukan jawaban yang ditunggu masyarakat.

3 Februari

- Ketua DPRD Merauke Drs. Petrus M. Tiniyap mengatakan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan yang transparan atas tuntutan pelurusan sejarah integrasi Papua agar tidak tercipta kekaburan di masyarakat.
- Ketua DPRD Tk. II Manokwari Daud Mandowen meminta Pemda Manokwari menunda penerimaan CPNS mengingat kondisi politik yang sedang berkembang, termasuk penolakan dari masyarakat seperti yang disampaikan kepada DPRD.

6 Februari

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas dalam acara serah terima Kapolres Mimika di Timika mengatakan, "Aspirasi merdeka boleh saja diungkapkan. Namun jika terjadi kekacauan, yang bertanggungjawab adalah polisi dan TNI, bukan Satgas Papua."
- Muncul beberapa tanggapan atas pernyataan pers Els-HAM Irja pada 4 Februari 2000 di Jayapura mengenai masalah Papua Barat yang tidak masuk dalam agenda PBB:
  - Don A.L. Flassy, M.A. menilainya sebagai upaya menakut-nakuti elite Papua yang memperjuangkan kemerdekaan.
  - Menurut Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Irja, Sofyan Yoman, pernyataan itu merupakan misi kemanu-

siaan yang dijalankan Els-HAM untuk mengungkapkan suatu fakta secara benar, adil, dan jujur; sekaligus sebagai upaya menjaga kredibilitas dan reputasi pejuang Papua di mata masyarakat.

7 Februari

Di Sorong massa menyegel 10 kantor milik pemerintah dan perusahaan besar sebagai kelanjutan dari aksi menuntut mundurnya Bupati Sorong, John Piet Wanane, S.H.

8 Februari

Praktisi hukum Jayapura Hendrik Tomasoa, S.H. berpendapat, otonomi khusus berdasarkan UU No. 22/1999 yang akan diterapkan di Irja memiliki pengertian yang tidak jelas. "Kalau bicara otonomi khusus, harus dijelaskan apanya yang khusus. Kepada siapa otonomi itu ditujukan juga tidak dijawab. Untuk itu hukum sementara ini lagi terpasung dan yang muncul adalah kekuasaan dan duit."

9 Februari

- Wagub I Irja Drs. J.R.G. Djopari menjelaskan bahwa Pemda Irja telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar penerimaan CPNS di Irja jumlahnya ditambah menjadi 2.000 hingga 3.000 orang dari jumlah yang sudah diberikan, yakni sebanyak 500 orang. Menurut Djopari, hal itu didasarkan atas pertimbangan banyaknya jumlah pendaftar dan kebutuhan di pemerintahan yang jauh lebih besar.
- Sebanyak 2.000 anggota Satgas Papua di Timika ditugaskan menjaga bandara dan pelabuhan laut untuk mengantisipasi masuknya provokator dari luar.

10 Februari

- Pangdam Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Irja dalam mengungkapkan aspirasi "M" masih wajar dan belum menjadi ancaman yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengatakan bahwa Polda tidak melarang pelaksanaan Mubes Papua, asalkan tidak mengganggu kamtibmas dan melaggar hukum yang berlaku.

- Ratusan warga Lembah Baliem berdemonstrasi di Lapangan Pendidikan Wamena menolak otonomi daerah. Aksi ini membuat suasana kota Wamena mencekam dan sejumlah aktivitas masyarakat seperti di sekolah, pasar, serta perkantoran pemerintah dan swasta terpaksa diliburkan.

11 Februari

- Theys H. Eluay mengatakan bahwa perjuangan Papua merdeka bukan untuk membunuh dan mengusir manusia. Oleh karena itu warga pendatang, termasuk transmigran, dihimbau tetap tinggal di Papua.
- Kapolres Manokwari Mayor (Pol.) Drs. Bambang Budi Santoso mengatakan bahwa keterlibatan Satgas Papua dalam menertibkan miras ikut menurunkan angka kriminalitas di Manokwari.
- Sementara itu di Timika, Bupati T.O. Potereyauw mendukung rencana Satgas Papua Timika yang berkoordinasi dengan aparat keamanan yang berwewenang seperti kepolisian untuk memusnahkan miras yang masuk ke daerahnya. Menurut Bupati, ada pengusaha yang langsung melobi pemda propinsi untuk mendapatkan izin memasukkan minuman keras ke Timika. Akibatnya Pemda Mimika tidak bisa berbuat banyak walaupun banyak miras yang didistribusikan secara ilegal dan angka kriminalitas akibat miras di Timika sangat tinggi.

13 Februari

- Di Jayapura dibentuk Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) Korwil Mamberamo-Tami dengan Ketua Ishaak Yapsenang. Selain itu dibentuk pula Aliansi Perempuan Papua Jayapura yang diketuai Pdt. Ketty Yabansabra dengan tujuan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Pelantikannya dihadiri oleh Kakansospol Kabupaten Jayapura E. Sontani dan unsur Muspida Tk. II Jayapura lainnya.

14 Februari

- Pangdam Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang mengatakan bahwa pembentukan KNPPB Korwil Mamta dan Aliansi Perempuan Papua Jayapura diperbolehkan karena merupakan hak warga negara. Hanya saja jika mereka melakukan kegiatan perlu

dilaporkan kepada pihak kepolisian.

- Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Tk. I, Drs. John T. Manurung, pembentukan Satgas Papua tidak berlandaskan aturan hukum yang berlaku sehingga keberadaannnya sulit dipertanggungjawabkan.
- Menanggapi terbatasnya jumlah penerimaan CPNS di Papua yang diberikan pemerintah pusat, Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Kabupaten Merauke Drs. H.P. Kaisepo berharap pemerintah pusat bijaksana dalam menghadapi kondisi obyektif daerah dengan menambah jumlah penerimaan CPNS. Menurutnya, langkah ini dimaksudkan untuk menghindari gejolak atau keresahan di kalangan masyarakat karena ketidakpuasan mereka terhadap jumlah penerimaan yang sangat kecil dibanding tingginya jumlah peminat.

15 Februari

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menyatakan bahwa rencana pelaksanaan Mubes Papua Barat pada 24 - 26 Februari 2000 belum mendapatkan izin. Namun secara prinsip pihaknya tidak akan melarang pelaksanaan mubes tersebut.
- Ketua Umum Aliansi Perempuan Papua Barat, Josephina Pitjaa, menegaskan bahwa organisasinya akan menyampaikan sikap politik menuju tatanan negara Papua yang merdeka dalam Mubes Papua mendatang.

16 Februari

- Tokoh sejarah Papua Herman Wayoi mengungkapkan harapannya agar Mubes Papua dijadikan forum untuk menyamakan persepsi dan menyatukan semua komponen pejuang Papua Merdeka.
- Ketua STIE Ottow & Geissler Jayapura Drs. G.M. Satya, M.Sc. mengatakan bahwa selain memperjuangkan aspirasi merdeka, semua pihak perlu melihat kenyataan masyarakat yang sungguh membutuhkan suatu pembangunan yang membebaskan mereka dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.
- Di Merauke terjadi kerusuhan yang dipicu oleh kampanye otonomisasi melalui RRI oleh calon Bupati Merauke John Gluba Gebze. Kerusuhan itu mengakibatkan tiga warga mengalami luka tembak (seorang di antaranya yang bernama Paskalis Betayob

tewas), dan 21 orang luka-luka (termasuk anggota polisi). Massa yang marah kemudian merusak stasiun RRI dan kantor bupati.

- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Advokasi HAM Kabupaten Merauke, Herry Mahuze, mengecam keras penembakan oleh aparat di Merauke dan menuntut agar pelakunya ditindak sesuai hukum yang berlaku.
- Menurut Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, penembakan di Merauke merupakan tindakan tegas aparat untuk menegakkan hukum terhadap tindakan brutal dari massa dan untuk mencegah munculnya situasi yang anarkis.

17 Februari

- Praktisi hukum Jayapura Zainal Sukri, S.H. meminta agar peraturan daerah tentang hak ulayat di Papua harus berpihak kepada masyarakat adat, bersumber pada aturan-aturan adat yang mengatur tentang tanah, hutan, laut, dan lainnya.
- Camat Tigi, Kabupaten Paniai, Yan Giyai, S.Sos., mengeluhkan minimnya sarana pendidikan dan kesehatan di wilayahnya sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik.
- Sebanyak 96 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Okbibab, Kabupaten Jayawijaya, mengancam mogok kerja akibat tidak menerima jatah beras untuk bulan Desember 1995 sampai Maret 1996, dan bulan Juli sampai Desember 1999 dari PD Irian Bakti di Jayapura.
- Sebanyak 110 anggota Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat Kabupaten Sorong menandatangani pernyataan penolakan hasil Pepera pada 1969 dan menyatakan mendukung rencana pelaksanaan Mubes serta Kongres Papua 2000. Penandatanganan sikap politik ini dilakukan dalam kegiatan pelurusan sejarah pelaksanaan Pepera yang difasilitasi oleh Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Wilayah Sorong.

18 Februari

- Supervisor Els-HAM Papua John Rumbiak berpendapat, kekerasan yang merebak belakangan ini di Papua seperti bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang melakukan aksi menolak otonomi di Merauke pada 16 Februari 2000 lalu merupakan wujud buntunya semua saluran aspirasi sehingga masyarakat menjadi

frustasi dan mengambil jalan penyelesaian sendiri.

- Masyarakat Adat Moi yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong yang menyegel perkantoran di Sorong, mewajibkan denda adat sebesar Rp 100 juta jika kantor ingin dibuka kembali. Tindakan penyegelan ini dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas hak ulayat masyarakat Moi yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang sedang melakukan usahanya di Sorong. Bupati Sorong John Piet Wanane, S.H. menanggapi tindakan itu sebagai perbuatan melanggar hukum, dan denda adat tersebut tidak berlaku bagi pihak di luar masyarakat hukum adat.
- Bupati Mimika T.O. Potereyauw mengatakan tindakan penyitaan minuman keras oleh Satgas Papua merupakan wujud ketidak-percayaan kepada aparat karena disinyalir aparat sendiri mem-bekingi penyebarannya.

20 Februari

- Masyarakat di Nabire mempersenjatai dirinya menyusul keluarnya radiogram dari Pangdam Trikora yang menetapkan Kota Nabire dalam keadaan Siaga I dan perintah tembak mati bagi para perusuh. Instruksi ini dikeluarkan setelah terjadi penganiayaan terhadap seorang anggota Brimob oleh Satgas Papua di Nabire.
- Sejumlah guru sejarah di Kabupaten Jayawijaya merasa kesulitan mengajarkan pelajaran Sejarah Nasional Indonesia karena tidak ditanggapi para muridnya. Bahkan mereka diancam agar tidak mengajarkan pelajaran tersebut.

21 Februari

- Ketua DPRD Tk. I Irja N. Kaiway, S.H. mengatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua seharusnya dimulai dari daerah pedesaan, kemudian ke tingkat propinsi. Pemekaran itu harus memberikan dampak positif, yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua.
- Kepala Dinas Kehutanan Sorong Ir. M.L. Rumadas mengatakan, tuntutan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong agar HPH (Hak Pengelolaan Hutan) ditutup sulit dipenuhi karena program tersebut merupakan program pemerintah pusat.

22 Februari

- Dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR-RI di Istana Negara Jakarta, Menko Polkam *ad-interim* Soerjadi Soedirdja memperingatkan tokoh Papua agar tidak memproklamirkan Papua merdeka pada 1 Desember 2000. Menurutnya siapa saja boleh mengemukakan pendapatnya tentang kemerdekaan, tetapi jika mau mendirikan negara di dalam negara RI maka akan berhadapan dengan aparat keamanan.

23 Februari

- Musyawarah Besar Rakyat Papua dibuka di Hotel Sentani Indah Jayapura dengan tiga agenda utama: Pelurusan sejarah Papua, Evaluasi perjuangan politik Papua dan strateginya ke depan, serta Konsolidasi komponen Papua. Mubes diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari utusan dari 14 kabupaten dan kodya se-Papua, unsur mahasiswa Papua, utusan warga Papua di Papua New Guinea (PNG), komponen perempuan Papua, tapol/napol Papua, Satgas Papua, perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan peninjau dari berbagai organisasi yang diundang.
- Perwakilan Gereja-Gereja di Jayapura menyerukan agar Mubes Papua harus berjalan secara damai, saling mendengarkan walau ada perbedaan persepsi dan kepentingan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.

24 Februari

- Delegasi dari daerah-daerah menyampaikan laporan dan aspirasi dalam Mubes Papua, yang umumnya menyangkut: keinginan merdeka, kepemimpinan dalam perjuangan Papua harus jelas, membangun nasionalisme dan persatuan rakyat Papua, pemberdayaan Satgas Papua, serta dukungan diadakannya Kongres Rakyat Papua.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Irja Drs. J.P. Letsoin menerangkan bahwa 600 orang guru SD minta dipindahkan keluar Irja dengan alasan memanasnya situasi politik.

25 Februari

- Kapolres Jayapura Letkol (Pol.) Drs. Daud Sihombing, S.H. mengatakan bahwa pihak kepolisian akan mengamankan kegiatan

masyarakat termasuk Mubes Papua sepanjang tidak melanggar hukum.

- ❖ Masyarakat Nabire mengancam akan mengibarkan bendera PBB jika sampai 1 Maret 2000 pemerintah Indonesia tidak menanggapi bendera Bintang Kejora yang sedang dikibarkan di gedung DPRD Tk. II Nabire.

27 Februari

- ❖ Mubes Papua 2000 ditutup dengan menghasilkan Komunike Politik Rakyat Papua.[1]
- ❖ Tom Beanal dan Theys Hiyo Eluay terpilih sebagai Pemimpin Presidium Papua dalam Mubes. Presidium dilengkapi dengan 16 orang anggota pengurus.

28 Februari

- ❖ Di Nabire aparat Brimob menembak mati Wakil Senat Mahasiswa STIA Nabire, Manase Erari, dan melukai seorang warga lainnya. Korban ditembak setelah berusaha menengahi pertengkaran antara warga dan anggota Brimob yang merampas dan mematahkan busur serta anak panah milik warga yang dihadang di tengah jalan. Warga saat itu hendak pergi ke kediaman Bupati Nabire, A.P. Youw, dengan maksud menanyakan tujuan keberadaan Brimob di Nabire yang beberapa hari sebelumnya juga melakukan tindakan serupa. Kepada aparat korban sebenarnya ingin menjelaskan bahwa bagi laki-laki Suku Mee (Pedalaman Paniai) yang juga tinggal di Nabire membawa panah dan busur ke mana saja mereka pergi merupakan simbol indentitas kebudayaan mereka, bukan sebagai senjata tajam sebagaimana yang dikira aparat.
- ❖ Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura mendampingi warga transmigrasi dari SP VIII Bonggo, Jayapura, mendatangi Kanwil Transmigrasi Irja untuk meyampaikan permasalahan yang dialami warga di lokasi tersebut. Yakni kondisi lahan yang tidak layak tanam dan mengakibatkan mereka kekurangan bahan makanan, jalan dan jembatan rusak berat, serta

[1]Teks selengkapnya mengenai Komunike Politik Mubes Papua 2000 dapat dibaca pada bagian lampiran.

tidak tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan.

29 Februari

- Massa di Nabire melakukan protes ke kantor Polres meminta Brimob ditarik dari Nabire. Protes itu berakhir rusuh serta mengakibatkan dua rumah dibakar massa, 11 orang luka-luka, dan tiga orang korban meninggal dunia akibat tembakan aparat (Menase Erari, Maximus Bunay, dan Willem Manimwarba).
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas menerangkan, pihaknya menahan 11 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan di Nabire. Sementara itu Els-HAM Irja memprotes tindakan kekerasan terhadap warga sipil dalam peristiwa di Nabire.
- Sebanyak 32 orang warga transmigrasi SP IV Kaureh, Jayapura, melakukan demonstrasi ke DPRD Tk. I Irja. Mereka menuntut agar dewan melihat langsung bangunan perumahan yang tidak layak dan jalan dan sarana vital lainnya yang rusak, serta mengakibatkan hasil panen mereka tidak bisa dijual dan membusuk.

Maret

1 Maret

Ketua Sinode GKI Irja Pdt. Herman Saud, M.Th. mengatakan bahwa dirinya menghargai keinginan rakyat untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dirumuskan dalam Mubes Papua 2000. Hanya saja aspirasi tersebut perlu disalurkan melalui mekanisme yang resmi, seperti melalui DPR atau MPR. Jika aspirasi itu tidak diperjuangkan untuk disalurkan maka akan sulit berhasil dan akan menelan banyak korban.

2 Maret

- Kepala Kejaksaan Negeri Merauke R. Situmorang, S.H. menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kantor Pemerintahan Masyarakat Desa yang berinisial PS (56 th) karena terlibat dalam kasus korupsi dana Pembangunan Desa (Bangdes) untuk Kabupaten Merauke periode 1996-1998, senilai Rp 1,6 milyar.

- Aparat Brimob dari Polres Nabire dengan menggunakan mobil gudang farmasi Kabupaten Paniai kembali menembak mati seorang warga yang bernama Willem Manimwarba (25 th). Penembakan ini terjadi saat dilangsungkan acara pemakaman jenazah almarhum Maximus Bunay (korban penembakan Brimob dua hari sebelumnya di lokasi pengibaran bendera Bintang Kejora di Taman Gizi Nabire).
- Penasehat Menteri Negara HAM Pdt. Phill Erari mengatakan, penembakan Willem Manimwarba hingga meninggal dunia berpola sama dengan insiden Mapnduma 1996. Sebab, aparat saat kejadian menyamar menggunakan mobil ambulans rumah sakit untuk mencari korban di markas Satgas Papua yang berlokasi di Taman Gizi Nabire.

3 Maret

- Menurut Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, Willem Manimwarba ditembak karena diduga sebagai provokator. Sementara itu pihaknya juga telah menangkap 18 orang warga yang diduga terlibat dalam insiden Nabire.
- Di Jayapura ratusan warga berunjuk rasa ke Polda dan DPRD menuntut Kapolda Irja bertanggung jawab atas insiden Nabire dan tindak kekerasan terhadap warga di Fak-Fak, Sorong, Timika, serta Merauke.

5 Maret

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menegaskan bahwa Brimob tidak akan ditarik dari Nabire karena keberadaan mereka diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menangkap provokator. Bahkan kalau perlu anggotanya ditambah. Lebih lanjut Kapolda mengatakan, tidak ada anggota Brimob yang diperiksa dalam insiden Nabire, karena yang menyerang lebih dulu adalah Satgas Papua, bukan Brimob.
- Tokoh Papua Don A.L. Flassy, M.A. mengatakan, pemerintahan transisi di Papua akan dibentuk paling lambat pada April 2000 setelah pelaksanaan Kongres Papua.
- Anggota DPRD Tk. I Irja John Teman mengusulkan agar otonomi khusus yang mau diterapkan di Irja hendaknya diserahkan kepada kemauan masyarakat dan sesuai dengan mekanisme yang

disepakati bersama. Menurutnya, aparat pemerintah tidak boleh memformulasikan pemikirannya sebagai yang terbaik untuk masyarakat. Sebab, masyarakat belum tentu menerima langkah tersebut. Berbagai perbedaan pemikiran yang ada tetap perlu dihargai karena merupakan esensi demokrasi.

6 Maret

Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap usaha membentuk pemerintahan transisi di Papua karena hal itu merupakan upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7 Maret

- Menanggapi pernyataan Kapolda, Saul Bomay (mantan tahanan politik dari OPM) mengatakan bahwa bangsa Papua bukan PKI yang mau merongrong negara sehingga pantas ditangkap dan diadili. "Kami bangsa Papua bukan kelompok tersebut. Kami tidak mendirikan negara di dalam negara. Kami sudah pernah punya negara. Pengakuan kedaulatan itulah yang kami inginkan."
- Kepala Biro Tatalaksana Sekda Tk. I Irja Drs. Michael Manufandu menjelaskan bahwa Irjen Depdagri Marsekal Pertama TNI Musiran Darmosuwito, S.I.P. diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi *Caretaker* Gubernur Irja dengan tugas menyiapkan pejabat gubernur definitif pengganti Freddy Numberi.
- Bupati Biak Numfor Obed A. Sroyer menonaktifkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Biak, Dra. Ita Ginting, karena diduga menyalahgunakan wewenang.

8 Maret

- Ketua Komite Independen Papua Don A.L. Flassy, M.A. meminta aparat kepolisian memproses secara hukum anggota Satgas Papua yang memang benar-benar bertindak di luar aturan yang berlaku.
- Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Hukum dan Perundang-undangan Irja, Silas Derek Enokh, menyesali banyaknya penipuan yang dilakukan oknum pegawai terhadap CPNS. Oknum itu menjanjikan kelulusan dalam tes penerimaan apabila calon membayar sejumlah uang.

9 Maret

- Sekretaris Komisi F DPRD Irja Anthon Kelanangame mengatakan, aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua demi menegakkan supremasi hukum.
- Praktisi hukum Anton Raharusun, S.H. berpendapat bahwa Papua sangat bobrok dalam penyalahgunaan keuangan negara. Namun, belum ada usaha yang sungguh-sungguh dari pejabat yang berwenang untuk menyelesaikannya secara hukum.
- Pejabat Pemda Tk. I Irja Martinus Ayomi, S.H., menegaskan bahwa kegiatan di lingkungan Pemda Irja saat ini terancam lumpuh akibat kekosongan sejumlah jabatan, termasuk jabatan gubernur yang perlu diisi secepatnya.

10 Maret

- Tom Beanal mengatakan bahwa ia merasa apa yang diperjuangkannya selama ini adalah aspirasi masyarakat Papua, bukan aspirasi merdeka dari elit-elit politik.
- Menurut dosen Sekolah Tinggi Teologia Gereja Kemah Injil di Irian Jaya (STT GKII) Jayapura, Dr. Beny Giay, pemerintah di era reformasi ini belum tahu cara berdemokrasi yang benar dan perlu mempelajarinya dari masyarakat di kampung-kampung. Hal ini dikatakannya ketika menanggapi kecaman terhadap Mubes dan rencana Kongres. Menurutnya, Mubes maupun Kongres merupakan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk merumuskan masa depannya sendiri, karena selama ini hanya dirumuskan oleh pemerintah.

12 Maret

- Anggota Pansus Merdeka DPRD Irja, Abdul Hakim Achmad, menilai keinginan masyarakat untuk melaksanakan Kongres Papua sah-sah saja, apalagi dimaksudkan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

12 - 13 Maret

- Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Irja, Pdt. Sofyan Yoman, B.Sc., menegaskan bahwa ide pembentukan pemerintahan transisi terkesan dipaksakan. Ide itu menurutnya justru merugi-

kan perjuangan bangsa Papua menuju negara merdeka yang berdaulat karena akan membuat masyarakat Papua menjadi korban.

- Anggota Dewan Presidium Papua Pdt. Herman Awom, S.Th. mengatakan, rencana pembentukan pemerintahan transisi bukan merupakan agenda yang diputuskan dalam Mubes Papua, sehingga disinyalir ada permainan elite untuk mengacaukan perjuangan kemerdekaan Papua.
- Menurut penasehat hukum Anton Raharusun, S.H., ide pembentukan pemerintahan transisi Papua bukanlah tandingan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi perlu dilihat sebagai koreksi terhadap pemerintahan yang sekarang berdaulat di Tanah Papua.
- Anggota DPRD Irja Laurens Age Kulalein menyayangkan menurunnya semangat belajar dari anak-anak Papua di salah satu SMA unggulan di Jayapura karena pengaruh aspirasi merdeka. Hal ini tampak dari buku tulis mereka yang hanya penuh dengan gambar bendera Bintang Kejora, Tom Beanal, atau Theys H. Eluay.

17 Maret

- Sekretaris Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (Foreri) Drs. Willy Mandowen menilai pemeriksaan anggota Presidium Dewan Papua (PDP) dengan tuduhan makar pasca-Mubes, merupakan konspirasi politik dan harus dihentikan. Presiden Abdurrahman Wahid sendiri mengatakan bahwa Mubes bukanlah makar.
- Menurut Direktur Els-HAM Irja, Yohanes Bonay, S.H., pemeriksaan anggota PDP oleh Polda Irja itu akan bernasib sama dengan kasus makar 1 Juli 1998 yang diproses di pengadilan tetapi kemudian divonis bebas demi hukum. Menurutnya polisi kurang profesional menilai mana yang merupakan pelanggaran hukum dan mana kebebasan berekspresi.

19 Maret

- Tom Beanal mengemukakan, Kongres Rakyat Papua akan digelar pada April 2000 dengan agenda pokok pelurusan sejarah Papua. Ditegaskan bahwa Dewan Presidium Papua tidak akan membentuk pemerintahan transisi pada 1 Mei 2000.
- Bupati Fakfak Drs. Wahidin Puarada, M.Si. dan ajudannya

dikeroyok massa di Desa Wayati, Fakfak. Insiden itu mengakibatkan seorang warga menderita luka tembak dan 26 orang ditangkap pihak Polres Fakfak. Sementara warga lainnya mengungsi ke hutan karena takut ditindak oleh aparat.

21 Maret

- Theys H. Eluay meminta DPRD Irja menanggapi serius isu adanya penambahan aparat keamanan dari luar Irja. Isu itu sangat meresahkan masyarakat dan nampak sebagai upaya pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) berikutnya di Papua.
- Berkaitan dengan pemilihan Direktur LBH Jayapura yang baru, Anton Raharusun, S.H. berpendapat, "Saya prihatin karena LBH Jayapura dalam perkembangannya dewasa ini sudah keluar dari visi dan misi yang sebenarnya sebagai lokomotif demokrasi, penegak hukum, dan keadilan. Di masa datang para pekerja bantuan hukum harus dapat mengembalikan visi dan misi tersebut, terutama bantuan hukum struktural."

22 Maret

- Ketua Komisi A DPRD Irja Gim Perangin mengatakan, "Konsep otonomi daerah yang disusun Pansus Otonomi DPRD Papua sulit mendapatkan masukan dari masyarakat mengingat tuntutan kemerdekaan semakin kuat dan masyarakat sudah terlanjur tidak menyukai kata 'otonomi'."
- Sementara itu seorang aktivis LSM di Biak Elkanus Rumpaidus menegaskan bahwa pemberlakuan otonomi daerah di Papua jangan dipaksakan karena masyarakat belum memahami isinya. Karena itu ia meminta Pemda untuk menyosialisasikan dahulu dan meminta pertimbangan serta masukan dari masyarakat.

23 Maret

- Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan kesediaannya untuk membuka Kongres Rakyat Papua asalkan situasi dan kondisi keamanan di Tanah Papua memungkinkan.
- Gubernur Irja Freddy Numberi meminta para pejabat di Papua untuk mencontoh sikap demokratis dari Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak alergi terhadap aspirasi merdeka, tetapi belajar menghargai dan menyikapi aspirasi rakyat tersebut melalui dialog.

- Mantan tapol/napol Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendukung pernyataan Theys H. Eluay yang meminta penarikan aparat tambahan dari Irja. "Kami sebagai poros tengah yang memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Papua sangat mendukung pernyataan pemimpin besar bangsa Papua Theys H. Eluay agar pasukan tambahan yang sekarang sudah berada di Papua tersebut segera ditarik. Sebab, wilayah Papua ini bukan daerah operasi militer lagi."
- Kakandepdiknas Jayawijaya Drs. G.W. de Fretes mengatakan bahwa banyak anak sekolah di Wamena meninggalkan kegiatan belajar dan menjadi anggota Satgas Papua.

24 Maret

- Staf Ahli Menteri Negara Otonomi Daerah Andi Malarangeng mengharapkan masyarakat Papua tidak perlu terpikat dengan tuntutan merdeka yang disuarakan kelompok tertentu. Sebab menurutnya, solusi pemerintah tentang otonomi khusus relevan untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Ia mengatakan, "Kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan itu tidak *legitimate*."
- Danrem 171/PVT Sorong Kolonel Infantri T.H. Sinambela bersama Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) setempat mengadakan sarasehan pelurusan sejarah Irja di Manokwari dengan tujuan menjelaskan sejarah yang sebenarnya tentang integrasi Irja ke dalam NKRI demi menjaga keutuhan bangsa.

26 Maret

- Berawal dari perkelahian pribadi, sekitar 300 warga asal Wamena menyerang warga yang bermukim di Terminal Entrop Jayapura. Peristiwa itu mengakibatkan seorang warga tewas, lima luka-luka, serta sejumlah kios dan mobil dibakar.
- Ketua Komisi A DPRD Irja Gim Perangin tidak setuju terhadap usulan pembubaran Kodam dan lembaga di bawahnya. Menurutnya kehadiran TNI sangat diperlukan demi menjaga keamanan dari serangan pihak luar mengingat Irja berbatasan dengan negara lain (PNG).
- Kapendam XVII/Trikora Mayor Infantri R. Siregar menyatakan bahwa kedatangan pasukan TNI bukan dalam rangka pember-

lakuan DOM, melainkan sebagai pergantian reguler dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedalaman.

27 Maret

Sebanyak 27 KK warga transmigrasi SP VII dan SP VIII Kecamatan Bonggo, Jayapura, berunjuk rasa di halaman LBH Jayapura dengan tuntutan utama minta dipulangkan ke daerah asal. Mereka beralasan nasibnya diterlantarkan di lokasi berawa yang tidak bisa ditanami; tidak ada sarana dan prasarana seperti sekolah, puskesmas, obat-obatan, tenaga medis, dan sarana peribadatan, serta tidak diberi jatah hidup oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Jayapura.

28 Maret

- Warga transmigrasi SP VII dan VIII Bonggo dengan didampingi LBH Jayapura, mengadukan masalah mereka kepada DPRD Irja. Ketua Komisi E DPRD Irja Ny. Hulda Wanggober mengatakan, "Keluhan sudah disampaikan kepada Dewan untuk dicarikan jalan keluarnya. Namun kalau mereka mau kembali tentu tidak semudah itu. Sebab bagaimanapun masalah itu harus dibicarakan lagi dengan instansi terkait. Rencananya Dewan akan memanggil Kakanwil Deptrans."
- Menanggapi tuntutan warga transmigrasi Bonggo agar dipulangkan ke daerah asal, Kakanwil Transmigrasi Irja Ir. Budi Sinulingga mengatakan bahwa transmigrasi merupakan program sukarela kemanusiaan. Tidak ada paksaan, dan kalau mau pulang biayanya harus ditanggung sendiri karena pemerintah tidak menyediakan dana untuk keperluan tersebut.
- Ondoafi Bonggo, Seblum Werbabkay, menyesalkan tuntutan yang diajukan warga transmigrasi Bonggo yang menuntut dipulangkan dengan alasan tanah mereka tidak subur. Ia mengatakan, "Tanah di Bonggo itu subur, hanya tidak ada *drainase*. Masyarakat Bonggo tidak mengusir warga trans, sebaliknya akan menerima mereka jika mau kembali, asalkan mau benar-benar berjuang mempertahankan hidup."

30 Maret

- Menanggapi masalah yang dialami warga transmigrasi, Wagub III

Abraham O. Atururi berpendapat sebaiknya program transmigrasi untuk Papua perlu dihentikan sementara selama lima tahun. Hal itu perlu dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang bertanggungjawab melakukan pembenahan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi keberhasilan program tersebut.

- Empat warga pencari gaharu di Kali Kopi -Timika (Abu Rachman, Abu Taris, Fahmi, dan Rizal) ditembak dan dipanah hingga luka-luka. Menurut Komandan Kodim 1710 Mimika, Letkol Infantri Fransen Siahaan, aksi ini kemungkinan dilakukan oleh kelompok Kelly Kwalik yang memang sebelumnya sudah memberikan selebaran yang berisi larangan pencarian gaharu di lokasi tersebut.
- Berkaitan dengan penembakan terhadap warga pencari gaharu di Kali Kopi Timika, Panglima Kodam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang meminta anggota TNI yang melindungi warga pencari gaharu – dengan mengangkutnya ke Mile 38 Kali Kopi, Timika — supaya ditindak tegas.

April

2 April

- Presiden Abdurrahman Wahid mengizinkan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua dan menyatakan dirinya bersedia membuka Kongres tersebut. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama Theys H. Eluay dan Yusuf Tanawani dari LMA Yapen Waropen di Istana Negara, Jakarta.
- Menurut pendukung kemerdekaan Papua yang juga mantan tapol/napol Papua Drs. Filep Karma, isu Papuanisasi atau pemberian jabatan politis bagi orang Papua ibarat "Kuda Troya" pemerintah RI agar bangsa Papua terpecah belah, dan saling bermusuhan satu sama lain. Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan sejumlah pihak bahwa gubernur Irja mendatang harus orang Papua. Ia mengatakan, "Dengan adanya isu itu, kita bisa diadu domba. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Papua, saya usulkan agar gubernur Papua diserahkan kepada orang dari luar Papua. Sedangkan jabatan di bawahnya harus dipegang oleh orang asli Papua."

4 April

- Pangdam Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang meminta semua pihak di Papua agar tidak mencemaskan pelaksanaan Kongres Rakyat Papua. "Saya berharap semua pihak tidak cemas dan khawatir dalam menghadapi Kongres Papua, karena semua akan berjalan lancar. Di samping itu tidak akan terjadi gesekan antara TNI dan Satgas Papua."
- Dari pertemuan antara Komisi VIII DPR-RI dengan Pemda Irja, tokoh lembaga, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan LSM di Gedung Negara, Jayapura, PT Freeport Indonesia diminta tidak boleh menjadikan masyarakat Papua sebagai "boneka" yang hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Sumbangsih yang diberikan PT Freeport kepada masyarakat Papua dinilai belum maksimal, padahal perusahaan itu sudah 30 tahun melakukan produksi di Tanah Papua. Gubernur Irja Freddy Numberi mempertanyakan sejauh mana peran PT Freeport dalam meningkatkan SDM Papua. "Berapa *sih* masyarakat Papua yang masuk dalam kepemimpinan di PT Freeport yang telah beroperasi selama 30 tahun? Kalau memang PT Freeport mau mengembangkan SDM Papua, mengapa tidak ada upaya mengambil sejumlah orang Papua untuk dididik sebagai calon pekerja yang memang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Kalau ada upaya ke sana, masyarakat Papua jelas memiliki kemampuan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki."
- Asisten I Setwilda Irja Anthon Ririhena menegaskan, Pemda Irja menyetujui tuntutan warga transmigrasi SP VII dan VIII Bonggo untuk pulang ke daerah asalnya, asalkan menggunakan biaya sendiri.

6 April

Dalam pertemuan antara Komisi VIII DPR-RI dan masyarakat Timika, Pdt. Ishak Onawame mengajukan permintaan agar: TNI ditarik dan tidak boleh ada lagi di Timika; nama PT Freeport Indonesia segera diganti namanya menjadi PT Freeport Papua Barat; dan perusahaan-perusahaan Kontraktor di bawah PT Freeport agar segera ditutup apabila tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat. Sedangkan Leo (anggota masyarakat) mengemukakan keprihatinannya karena begitu sedikit sekolah-sekolah di Timika yang merupakan sumbangsih dari PT Freeport. "Kita bisa tanya berapa banyak anak Kamoro dan

Amungme yang belajar di luar negeri. Ada yang mau jadi pilot, tapi gagal. Anak-anak di sini mau sekolah tapi sekolahnya jauh, harus *lefter* (mencegat) truk. Bagaimana mau meningkatkan SDM Papua, khususnya di Timika, dalam kondisi semacam ini?"

7 April

- Bertempat di Makodam Trikora Jayapura, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang secara resmi membubarkan Bakortanasda (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah) Papua, berdasarkan Keppres No. 38 tahun 2000 tentang pembubaran Bakorstanas dan Bakorstanasda.
- Pengamat politik Universitas Cendrawasih, Drs. Verry Pioh, menilai Kongres Papua 2000 merupakan forum bagi masyarakat Papua menentukan arah perjuangan Papua ke depan. "Fenomena yang saya lihat, perjuangan dan ideologi Papua kini bukan hanya bagian dari orang tua kita yang pejuang dahulu, tetapi sudah tersosialisasi pada kelompok pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Papua umumnya."
- Dalam dialog interaktif bersama Gubernur Freddy Numberi, Forum Tapol/Napol OPM yang diwakili Filip Karma menyampaikan lima sikap politik:
  1. Mendesak pemerintah RI di bawah Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengakui dan mengembalikan hak kedaulatan atas kemerdekaan bangsa Papua Barat pada 1 Desember 1961.
  2. Secara tegas menolak opsi otonomi, sebab perjuangan bangsa Papua sejak 1963 sampai sekarang adalah untuk sebuah negara Papua Barat yang merdeka, bebas dari penjajahan, sehingga dapat berdiri sejajar dengan Indonesia dan negara lain.
  3. Mendesak TNI/POLRI menarik kembali pasukan yang baru didatangkan ke Papua, karena memberi kesan ada upaya menciptakan DOM kedua.
  4. Mendesak Presiden dan Panglima TNI untuk menindak provokator yang mencoba menciptakan kerusuhan bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) di Papua, seperti yang terjadi di Fakfak.
  5. Mengharapkan Presiden RI dan Pemda Papua Barat memfasilitasi penyelenggaraan Kongres Nasional Papua Barat sebagai tanggung jawab moril kepada rakyat Papua selama 38 tahun

hidup dalam penjajahan.

- Menjawab pernyataan tersebut, Gubernur Freddy Numberi mengatakan bahwa aspirasi merdeka yang dimunculkan masyarakat saat ini merupakan hal yang wajar, sebab masyarakat Papua selama ini belum bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Bahkan sesanti Bhinneka Tunggal Ika di Papua juga telah dikhianati dengan menelantarkan dan menyisihkan masyarakat Papua selama 30 tahun.
- Dalam pertemuan di Timika antara Komisi VIII DPR-RI, Bupati Mimika T.O. Potereyauw dan pihak PT Freeport Indonesia, masyarakat Amungme dari Desa Banti meminta pengembalian identitas sukunya oleh PT Freeport dengan mengembalikan nama-nama lama untuk digunakan di area konsesinya. "Kami minta PT Freeport mengembalikan nama-nama lama kami dan jangan lagi memakai nama ayam hitam, kambing, Surabaya, dan nama lainnya."

10 April

- Wakapolda Irja Kolonel (Pol.) Drs. Thamrin Simanjuntak mengatakan, Polri tidak akan melarang pelaksanaan Kongres Rakyat Papua 2000. Tetapi ia mengingatkan penyelenggara agar meminta izin dari pihak kepolisian sehingga aparatnya bisa melakukan pengamanan.
- Wakil Ketua Badan Pengurus YLBHI, Munir, S.H., saat berkunjung ke Jayapura mengatakan bahwa LBH hendaknya tidak ikut berpolitik, tetapi tetap mendesak adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia di bumi Papua. Menurutnya, aspirasi Papua merdeka adalah hak masyarakat Papua untuk menentukan masa depannya karena realita kehidupan mereka yang tertindas. "Pelanggaran hak asasinya parah. Mereka menjadi masyarakat yang terpinggirkan di tanahnya sendiri. Mereka dimiskinkan, eksistensi politiknya tidak diakui, masyarakat adat dianggap tidak ada, dan itu menimbulkan pilihan-pilihan yang tidak terlalu banyak. Nah, kalau negara dalam proses ke depan tetap mempertahankan ketidakadilan itu dan represi terus menjadi pola dalam masyarakat kecil, inilah yang mendorong masyarakat Papua tidak punya pilihan, kecuali memerdekakan diri."

11 April

- Munir, S.H. (Wakil Ketua Badan Pengurus YLBHI) saat melantik Direktur LBH Jayapura Demianus Wakman, S.H. mengatakan, rangkaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Papua lebih tepat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes againts humanity*). Soalnya, kasus-kasus tersebut terjadi secara terencana dan dengan pola-pola yang sudah tersusun, seperti melalui operasi militer maupun penambahan pasukan.
- Para guru di Jayapura melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Irja dan mengajukan tuntutan agar Pemda menaikkan gaji mereka.
- Menurut Kakanwil Depdiknas Irja Drs. Ismu Handono, tuntutan tersebut wajar bila melihat harga barang yang sangat tinggi di Papua. "Wajar kalau guru menuntut kesejahteraan mereka diperhatikan oleh pemerintah daerah Papua. Saat ini gaji guru sangat rendah jika dibandingkan dengan harga barang yang terus melonjak, apalagi dalam situasi politik dan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini di Papua, ditambah lagi dengan krisis ekonomi di negara kita yang berkepanjangan."

12 April

- Temu Nasional Mahasiswa Papua se-Indonesia di Manado menghasilkan sejumlah pokok pikiran:
  - Mengusulkan Dewan Presidium Papua untuk melacak dokumen internasional yang berkaitan dengan status politik Papua Barat, yang berguna sebagai bahan pengkajian untuk meyakinkan keabsahan status Papua.
  - Menuntut penarikan pasukan non-organik yang ada di Tanah Papua sebab Papua tidak dalam keadaan darurat atau bahaya.
  - Satgas Papua diusulkan agar melepaskan diri dari Lembaga Masyarakat Adat dan membentuk institusi sendiri sehingga memungkinkan adanya pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk memajukan peran anggota Satgas.
- Anggota Satgas Papua dan napol/napol OPM di Jayapura menemui Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Baptis Irja, Pdt. Sofyan Yoman, dan memintanya untuk tidak membicarakan otonomi khusus dalam berbagai pernyataannya di media massa.

- Para guru di Jayapura melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Tk. I Irja. Mereka menuntut agar Pemda menaikan gaji guru di seluruh Irja. Menanggapi aksi tersebut Kepala Kanwil Departemen Pendidikan Nasional Irja Drs. Ismu Handono menilainya wajar karena gaji guru sekarang ini sangat rendah jika dibandingkan dengan harga-harga barang yang terus melonjak.
- Menurut Ketua Ikatan Bidan Indonesia Propinsi Papua, Marthina Carolina Saya, tingkat kematian ibu saat melahirkan di Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia. Dari setiap 100 ribu ibu yang melahirkan terdapat 700 orang yang meninggal akibat tidak memadainya sistem pertolongan secara medis. Menurutnya, hal ini bisa dilihat dari kurangnya tenaga bidan dan gaji bidan yang sangat minim bila dibandingkan dengan tingginya biaya hidup di daerah-daerah terpencil di Papua.

13 April

Presiden Abdurrahman Wahid di Havana, Kuba, mempersilakan dilaksanakannya Kongres Rakyat Papua 2000. "Saya katakan itu kepada tokoh Papua Merdeka yang ingin melaksanakan Kongres Papua dalam waktu dekat. Silahkan omong apa saja, mau merdeka atau apapun juga, bahkan saya lagi mikir-mikir untuk membuka kongres itu."

14 April

- Menanggapi sikap pro-kontra dari masyarakat terhadap upaya pemerintah mengambil dokumen di Belanda dalam rangka pelurusan sejarah Papua, Gubernur Freddy Numberi mengatakan, pelurusan sejarah Papua perlu melibatkan semua pihak termasuk pelaku sejarah, dan kebenaran sejarah yang terungkap perlu diterima semua pihak. "Kalau memang kenyataannya Papua memang tidak dalam rangkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka semua harus menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Sebaliknya, kalau memang dalam sejarah nanti terbukti Papua memang masuk wilayah NKRI, maka masyarakat juga harus menerima dan terus melanjutkan pembangunan berbagai aspek untuk mengejar berbagai ketinggalan yang dirasakan selama ini."
- Ikatan Solidaritas Perempuan Papua Manokwari terbentuk dengan

tujuan membantu memberikan motivasi dan harapan kepada perempuan Papua dalam menjalani hidup di masa mendatang. Ketuanya, Ny. Ferdinanda W. Ibo, mengatakan, "Perempuan Papua ingin bangkit dari rasa keterikatan adat tradisi dan rasa ketertinggalan menuju pada suatu kemajuan yang lebih baik agar tidak lagi merasa minder dan tersisih." Ia menambahkan, perempuan Papua dewasa ini tidak hanya bisa memasak dan menyiapkan segala keperluan suami dan anak-anaknya, tetapi juga sudah dapat tampil dan berbicara di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

16 April

Jabatan Gubernur Irja diserahterimakan dari Freddy Numberi kepada *Caretaker* Gubernur Marsekal (Purn.) Musiran Darmosuwito S.I.P. *Caretaker* bertugas menyiapkan pemilihan gubernur Irja definitif menggantikan Freddy Numberi yang diangkat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

17 April

- Wakil Presidium Dewan Papua (PDP) Sektor Pasifik, Frans Alberth Yoku, menegaskan bahwa yang menentukan Bangsa Papua merdeka atau tidak bukanlah dokumen sejarah yang diambil Pemda dari Belanda, tetapi rakyat Papua sendiri. Menurutnya sejarah Papua ada pada diri pelaku-pelaku sejarah di Papua sendiri.
- Menteri Riset dan Teknologi A.S. Hikam mengatakan, kesenjangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat dan timur, telah memunculkan keinginan sebagian masyarakat termasuk Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Akan tetapi, keinginan tersebut dapat diredam dengan merubah paradigma pembangunan yang selama ini bersifat *top-down* dan karitatif semata serta mengakibatkan adanya upaya untuk meninggalkan keunikan yang dimiliki masyarakat Papua.
- Terdakwa kasus makar 1 Juli 1998, Semuel Yaru dan Don A.L. Flassy, merasa dirugikan karena dibelenggu sebagai tersangka dan terdakwa selama dua tahun tanpa persidangan.

18 April

- Presidium Dewan Papua (PDP) mengumumkan hasil kese-

pakatannya tentang waktu, tema, tempat, peserta, dan kepanitiaan Kongres Rakyat Papua 2000. Ditambahkan bahwa PDP yakin jika masyarakat Papua ingin merdeka. Untuk mencapainya kini orang Papua tidak lagi berjuang dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara-cara damai dan sopan santun. Kebangkitan perjuangan rakyat Papua di penghujung abad XX pada dasarnya hanya menyodorkan satu pilihan politik, yakni tetap bersama NKRI atau merdeka dan berpisah dari Indonesia.

- Anggota Presidium Dewan Papua Tom Beanal dan Dr. Beny Giay membantah isu yang berkembang di tengah masyarakat bahwa 1 Mei 2000 akan dijadikan sebagai puncak perjuangan kemerdekaan Papua. Menurut mereka hal itu diakibatkan oleh belenggu dan penderitaan berkepanjangan yang dialami rakyat, sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih di saat ada ruang untuk berbicara. Tom Beanal mengatakan, "Kita belum berjuang apa-apa. Kita baru mulai kumpul-kumpul untuk berjuang, sehingga tidak tepat jika 1 Mei dijadikan sebagai akhir perjuangan Papua merdeka. Bagi saya merdeka itu masih jauh, dan kita harus mulai melangkah sekarang." Lebih lanjut Dr. Beny Giay menerangkan, isu kemerdekaan pada 1 Mei 2000 merupakan rekayasa yang mau mengacaukan situasi di Papua. Yang sebenarnya, 1 Mei merupakan awal mula rakyat Papua dibelenggu. Oleh karena itu tanggal tersebut diperingati sebagai tanggal pencaplokan wilayah Papua oleh Indonesia.

18 April

- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di bawah pimpinan Panglima Komando Mathias Wenda menyatakan dengan tegas menolak otonomi yang ditawarkan pemerintah RI sebagai jawaban atas tuntutan merdeka rakyat Papua. Ia beralasan, "Pemerintah RI jangan menutup mata terhadap aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebab, aspirasi merdeka itu tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses panjang selama Papua masih berada di bawah kekuasaan pemerintah RI. Rakyat Papua bukanlah orang bodoh yang akan begitu saja menerima apapun yang ditawarkan pemerintah."
- Masyarakat Serui mengibarkan bendera Bintang Kejora di Desa Warari, Kecamatan Yapen Selatan. Ketua Lembaga Masyarakat

Adat Desa Warari L.M. Koyari menyatakan, rakyat Papua yang diwakili tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan wanita menolak Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), pemekaran wilayah, dan otonomisasi. Yang diminta hanya satu, kemerdekaan dan keluar dari NKRI.

19 April

Beberapa hal yang berkembang di Tanah Papua dipertanyakan Komisi I Fraksi TNI/Polri dalam pertemuannya dengan Wagub III Irja, Abraham O. Atururi, di Gedung Negara Jayapura:

- Tentang aspirasi "M", Wagub III menjawab bahwa itu merupakan wujud kekecewaan masyarakat Papua yang sudah tersimpan bertahun-tahun lamanya, karena pembangunan yang diselenggarakan pemerintah hasilnya sedikit sekali yang dinikmati rakyat Papua.
- Tentang macetnya sosialisasi otonomisasi, Wagub mengakui bahwa pelaksanaannya terhalang oleh aspirasi merdeka sebagian rakyat Papua.
- Tentang pemekaran wilayah, Wagub menjelaskan bahwa pemekaran di tingkat propinsi ditolak oleh masyarakat. Pemekaran akan difokuskan pada tingkat kabupaten. Sebanyak 14 kabupaten saat ini akan dimekarkan menjadi 25-30 kabupaten baru, dengan prinsip harus didahului pengakuan dan tidak ada diskriminasi dalam berbagai hal, termasuk dalam peningkatan SDM.

21 April

❖ Presidium Dewan Papua menetapkan lima keputusan untuk merayakan peristiwa 1 Mei tahun 2000:

1. Peristiwa 1 Mei diperingati sebagai hari pelanggaran hak politik bangsa Papua oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia melalui PBB.
2. Rakyat Papua Barat di pelosok Papua Barat maupun di luar tidak diperbolehkan mengibarkan bendera Bintang Kejora dan bendera PBB dengan dalih apapun.
3. Peristiwa 1 Mei diperingati secara sopan, benar, damai, dan penuh cinta kasih dalam bentuk ibadah syukur, aksi pawai tujuh

kali keliling, dan penggalangan dana untuk Kongres Papua yang akan diselenggarakan pada 29 Mei - 3 Juni 2000 di Port Numbay.

4. Menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hidup dan mencari nafkah di Tanah Papua untuk merenungkan peristiwa 1 Mei 1963 dengan nurani yang bersih sesuai dengan tema peringatan, yaitu "Mensyukuri peristiwa pelanggaran hak politik bangsa Papua oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia melalui PBB".
5. Kiranya seluruh rakyat Papua dan pihak-pihak lain dapat memahami pernyataan ini serta melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dan tanpa paksaan.

❖ Wakapolda Irja Kolonel (Pol.) Drs. H. Thamrin Simanjuntak mengatakan bahwa pihak kepolisian pada dasarnya tidak melarang rencana peringatan peristiwa 1 Mei mendatang. Tetapi ia mengharapkan agar penyelenggara meminta izin terlebih dahulu.

❖ Ketua Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) Isak Yapsenang menyatakan kekecewaannya atas keputusan Presidium Dewan Papua yang merubah acara 1 Mei 2000, yakni ditiadakannya pembentukan pemerintahan transisi Papua dan adanya larangan pengibaran bendera Bintang Kejora. Ia menjelaskan pihaknya siap mewujudkan dua keinginan rakyat tersebut pada 1 Mei mendatang, sekalipun dengan risiko ditangkap atau ditahan.

21 April

Tokoh sejarah Papua Herman Wayoi menyayangkan sikap Presidium Dewan Papua maupun elite politik Papua lainnya yang tidak mau melibatkan para pelaku sejarah seperti dirinya dalam upaya pelurusan sejarah yang diinginkan rakyat dewasa ini. Tentang rencana Kongres yang salah satu agendanya adalah pelurusan sejarah Papua, ia menilainya sebagai hal yang positif, asalkan dokumen yang akan digunakan adalah dokumen yang benar.

24 April

❖ Moderator Presidium Dewan Papua (PDP) Pdt. Herman Awom menjelaskan, PDP telah mengeluarkan keputusan agar peristiwa 1 Mei diperingati dalam bentuk ibadah syukur, bukan dengan aksi

besar-besaran seperti isu yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang menegaskan, rencana kegiatan 1 Mei oleh masyarakat Papua jangan dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Oleh karena itu tidak perlu dirisaukan.

- Pasien di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak mengeluhkan kurangnya obat-obatan. Menurut Otto Bukorsyom, salah seorang pasien yang berobat, jenis-jenis obat yang tertulis pada resep dokter biasanya tidak ditemukan di apotik RSUD. Pasien justru disarankan untuk membelinya di apotik swasta yang harganya sangat mahal. "Berobat di rumah sakit bukannya sembuh, tetapi malah stres karena memikirkan harga obat yang mahal. Saya sangat mengharapkan agar masalah ini segera diperhatikan pemerintah."

25 April

Serda DO, Anggota Polisi dari Polres Merauke, tanpa alasan yang jelas menembak dua anggota Satgas Papua, Costan Balagaize dan Bruno Mom Doan, yang sedang melakukan penjagaan di Posko Papua Mopa Lama, Merauke. Akibatnya korban mengalami luka-luka dan patah tulang. Tindakan ini menimbulkan kemarahan warga sehingga terjadi bentrokan antara warga dan aparat kepolisian yang menimbulkan korban luka-luka dan beberapa mobil dibakar massa. Akibat insiden itu suasana kota jadi mencekam.

26 April

Menurut Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Baptis Irja, Pdt. Sofyan Yoman, B.Sc., ada dua kelompok elite politik Papua Barat yang menyuarakan aspirasi 'merdeka' dengan motivasi berbeda. Kelompok yang satu memperjuangkannya berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sedangkan kelompok yang lainnya menyuarakan Papua merdeka demi harta dan jabatan.

27 April

- Ketua III Dewan Adat Mampta Sefnath T. Ohee mengatakan, 1.000 anggota Satgas Papua akan dikerahkan untuk menjaga pawai keliling Kota Jayapura dan pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Mei 2000.
- Tokoh Pemuda Papua Sorong, Melkianus Bleskadit, menilai

pelaksanaan serasehan pelurusan sejarah integrasi Irja oleh anggota pejuang '45, Trikora, dan Dewan Masyarakat Papua (DMP) wilayah Barat bersama Danrem Sorong, hanya merupakan rekayasa pemerintah untuk menekan perjuangan Papua Merdeka.

28 April

- Menurut anggota DPRD Kota Jayapura, Ny. Heemskercke Bonay, perlu dibuat undang-undang khusus untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan yang belakangan ini menimpa beberapa perempuan hingga meninggal dunia. "Jika sekarang orang bicara tentang emansipasi itu nol besar. Kemerdekaan dan penghargaan terhadap perempuan belum diterapkan. Banyaknya kasus seperti ini menjadi bukti kalau emansipasi wanita belum sepenuhnya diterapkan dalam skala nasional."
- Ketua Komisi B DPRD Tk. I Irja Drs. Paul Sumino mengatakan, UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, sudah tidak memadai lagi untuk kepentingan Tanah Papua. Karena itu, berdasarkan TAP MPR-RI No. IV/1999 yang mengatur Otonomi Khusus bagi Papua, DPRD akan menyusun suatu undang-undang baru yang mengatur Otonomi Khusus, berdasarkan aspirasi yang dikumpulkan dari seluruh anggota masyarakat di Papua.
- Sekretaris Umum Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat (Kopermas) Irja, John Kabey, menilai izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang ada selama ini kental dengan kepentingan-kepentingan ekonomi Orde Baru yang sangat sentralistik. "Selama ini izin HPH diterbitkan langsung oleh pusat, sentralistik, banyak terjadi praktik KKN, dan sulit untuk diterobos," katanya. Apabila Kopermas sudah berjalan dengan baik, tambahnya, ia akan mengusulkan agar sistem HPH dicabut karena tidak membawa keuntungan bagi masyarakat pemilik hak ulayat di sekitar hutan. DPRD Tk. I juga dianjurkan menyusun Perda khusus yang mengatur mengenai hak ulayat.

30 April

- Theys H. Eluay kembali menyerukan kepada masyarakat Papua untuk tidak menaikkan bendera Bintang Kejora pada 1 Mei 2000. Yang ada hanya pawai damai dengan puji-pujian mengelilingi pusat

Kota Jayapura dan ibadah syukur yang berpusat di Imbi, Jayapura. Hal yang sama ditegaskan oleh Pdt. Herman Awom di Manokwari. Ia mengatakan, peristiwa 1 Mei akan diperingati sebagai hari pelanggaran HAM bagi orang Papua yang sudah berlangsung sejak 37 tahun lalu, melalui ibadah untuk mendoakan putra-putri Papua yang gugur akibat pelanggaran HAM itu.

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menegaskan, jika kegiatan pawai 1 Mei 2000 menjadi kacau, maka pihaknya tidak akan mengizinkan atau akan menutup Kongres Papua yang direncanakan akan dilaksanakan pada 29 Mei - 3 Juni mendatang. Menurutnya, kegiatan 1 Mei akan dijadikan ukuran kesiapan elite Papua dalam memberikan jaminan keamanan.
- Kapolres Manokwari Mayor (Pol.) Bambang Budi Santoso dalam pesannya yang disampaikan pada acara gelar pasukan mengantisipasi kegiatan 1 Mei 2000 oleh rakyat Papua mengatakan, "Terhadap tuntutan dan aspirasi dari sekelompok saudara kita yang mau merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI hendaknya dihadapi secara arif dan bijaksana. Kita boleh berbeda pendapat, tapi hendaknya perbedaan itu jangan sampai merusak kesatuan dan persatuan."
- *Caretaker* Gubernur Irja Marsekal Pertama (Purn.) Musiran Darmosuwito, S.I.P. menerangkan, Wapres Megawati telah menyetujui diadakannya seminar tentang pelurusan sejarah Papua. Sementara dokumen-dokumen yang dibawa Wagub Djopari dari Belanda akan diterjemahkan oleh tim yang netral dan dimuat di media masa agar bisa dibaca orang banyak.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas menjelaskan, untuk menjaga kamtibmas jajarannya akan menambah 600 personil baru. Menurutnya jumlah yang ada saat ini belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Irja yang semakin bertambah.

Mei

1 Mei

Peringatan Peristiwa 1 Mei 2000 berjalan secara damai di berbagai kota :

- Di Jayapura peringatan itu dipusatkan di Taman Imbi. Massa

melakukan pawai keliling kota dipimpin oleh Theys H. Eluay dan anggota Presidum Dewan Papua lainnya. Acara dilanjutkan dengan ibadah syukur. Dalam sambutannya Theys mengatakan, 1 Mei 1963 merupakan awal terjadinya pelanggaran HAM terhadap bangsa Papua yang dilakukan oleh Belanda, Indonesia, dan Amerika melalui PBB. Bangsa Papua saat itu tidak dilibatkan dalam perundingan yang membahas status politiknya sendiri. Ia juga menjelaskan prinsip perjuangan Papua Merdeka yang penuh damai dan cinta kasih, dan rencana Kongres Rakyat Papua II 29 Mei - 3 Juni 2000 di Jayapura.

- Di Manokwari peristiwa 1 Mei diperingati sebagai hari pelanggaran HAM dan hak politik bangsa Papua. Acara itu dimulai dengan ibadah syukur yang dilanjutkan dengan sosialisasi hasil Mubes Papua 2000 dan rencana Kongres Rakyat Papua II oleh Moderator Presidium Dewan Papua, Pdt. Herman Awom. Acara tersebut dihadiri juga oleh Kapolres Manokwari. Dalam sambutannya Pdt. Herman Awom mengingatkan agar rakyat Papua tidak berpikir bahwa setelah kongres dilangsungkan Papua akan merdeka. Perjuangan Papua masih panjang dan merupakan revolusi damai. "Jadi, perjuangan itu jangan dinodai dengan kekerasan, baik dengan aparat maupun dengan orang non Papua," katanya.
- Sementara di Wamena diadakan kebaktian di lapangan Pendidikan yang dipimpin oleh anggota Panel Pdt. Obet Komba dan Pdt. Yudas Meage. Acara tersebut dihadiri anggota Presidum Dewan Papua: Dr.Benny Giay, Agus Alua, dan Drs. Willy Mandowen. Pendeta Obet Komba dalam khotbahnya juga menjelaskan bahwa Peristiwa 1 Mei diperingati sebagai hari pelanggaran hak politik bangsa Papua oleh Indonesia dan Belanda dengan dukungan PBB. Ia menghimbau masyarakat Papua di Lembah Baliem agar menghindari tindak kekerasan serta harus menghormati norma-norma hukum.
- Di Sorong ibadah bersama dilakukan di lapangan sepak bola Kampung Baru. Kegiatan itu dilanjutkan dengan pawai keliling kota yang diikuti sejumlah pemuda yang membawa keranda sambil melakukan aksi tutup mulut sebagai simbol peringatan berbagai pelanggaran HAM di Tanah Papua. Ibadah dipimpin oleh anggota Tim 100, Pdt. Hans Mobalem, yang dilanjutkan

dengan orasi politik dari semua pilar dalam Panel Papua wilayah Sorong.

- ❖ Di Merauke masyarakat memperingati Peristiwa 1 Mei dengan upacara yang dipusatkan di tengah kota. Suasana kota tegang. Sebagian warga masih trauma dengan penembakan dua anggota Satgas Papua sehari sebelumnya. Mereka memilih tidak melakukan aktivitas di luar rumah.
- ❖ Di Fakfak, Peristiwa 1 Mei tidak diperingati secara khusus. Namun begitu, anggota Polri tetap melakukan patroli lintas desa serta melakukan pengamanan ketat di pemukiman-pemukiman yang warganya dianggap fanatik mendukung aspirasi Papua Merdeka.
- ❖ Di Biak warga melakukan ibadah syukur di tiap gereja yang dilanjutkan dengan pawai keliling kota. Di Kecamatan Warsa dan Desa Inggiri, Biak Timur, warga mengibarkan bendera Bintang Kejora.

1 Mei

Kepala Staf TNI-AD Jenderal TNI Tyasno Sudarto dalam kunjungannya ke Kodam XVII/Trikora mengatakan, aspirasi merdeka yang sedang disuarakan masyarakat Papua hendaknya bukan kemerdekaan mencari tanah air sendiri dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi itu hendaknya berupa tuntutan atas kemerdekaan berpendapat, mencari nafkah, dan peningkatan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan RI.

2 Mei

- ❖ Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menyatakan kelegaannya karena peringatan Peristiwa 1 Mei di seluruh Papua berjalan aman berkat kerja sama antara aparat dan masyarakat. Menurutnya, dalam era demokrasi saat ini, masyarakat Papua dipersilakan menyuarakan aspirasinya dalam berbagai bentuk, termasuk aspirasi "M", asalkan penyampaiannya tidak menganggu hak orang lain.
- ❖ Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta se-Jayapura, melakukan aksi ke DPRD dan mengajukan tuntutan sebagai berikut: meminta

setiap Pangdam bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama masa jabatannya; menuntut pembentukan peradilan koneksitas untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM; ekspansi militer di Papua (dalam bentuk penambahan jumlah tentara) agar segera ditarik; menuntut pembubaran Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa; serta menuntut penyelesaian tuntas atas kasus penembakan mahasiswa Uncen, Steven Suripatty.

- Pengadilan Negeri Fakfak menggelar persidangan kasus penganiayaan Bupati Fakfak, Drs. Wahidin Puarada, pada 19 Maret 2000 dengan menghadirkan delapan orang terdakwa yang masih di bawah umur.

3 Mei

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas mengatakan, pihaknya akan memberi izin kepada elite Papua untuk mengadakan Kongres Papua 2000. Izin itu akan diberikan setelah melihat Peringatan 1 Mei yang dipelopori Presidium Dewan Papua berjalan lancar dan aman.
- Ketua Komisi E DPRD Irja Ny. Hulda Manggober menyatakan, semua RSUD yang berada di Papua saat ini kekurangan obat-obatan. Padahal, pada saat bersamaan pemerintah telah menyalurkan dana JPS Bidang Kesehatan yang bertujuan mencegah ketidakmampuan masyarakat akibat krisis ekonomi.
- Sekitar 200 warga transmigrasi SP VII & VIII Bonggo, Kabupaten Jayapura, kembali melakukan unjuk rasa ke DPRD Irja. Mereka mengajukan tiga tuntutan. *Pertama*, pemerintah melalui Kandep dan Kanwil Transmigrasi harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan warga yang kelaparan di lokasi transmigrasi berupa pemberian makanan, obat-obatan, dan penampungan. *Kedua,* bantuan itu harus segera diberikan dalam waktu satu minggu. *Ketiga,* pemerintah melalui Kanwil dan Kandep Transmigrasi segera memulangkan seluruh warga transmigran umum ke daerah asalnya.

11 Mei

Tanggul Danau Wanagong di Timika yang dijadikan tempat penampungan *over burden* oleh PT Freeport Indonesia jebol. Kejadian itu menewaskan empat orang pekerja PT Freeport yang hilang terbawa

arus, merusak pemukiman dan kebun milik warga Banti, serta menghanyutkan ternak peliharaan milik warga.

14 Mei

- Dari hasil pertemuan antara Presidium Dewan Papua dan Panitia Kongres Papua bersama Presiden Abdurrahman Wahid, Theys H. Eluay menjelaskan bahwa Presiden menyatakan akan memberi bantuan dana sebesar Rp 1 milyar untuk pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II tahun 2000.
- Menurut Moderator Presidum Dewan Papua, Pdt. Herman Awom, ada pihak-pihak yang berniat menggagalkan pelaksanaan Kongres Papua dengan berupaya memblokir dana bantuan presiden untuk kongres. Panitia kongres memohon kepada Pemda agar hal itu diperhatikan. Herman juga meminta perhatian Pemda mengenai penambahan pasukan militer ke daerah-daerah di Papua sejak 1 Mei sampai menjelang kongres, yang telah menciptakan suasana ketakutan di tengah masyarakat Papua.
- Kapendam XVII/Trikora Mayor Infantri Drs. R. Siregar menjelaskan, pihaknya telah melengkapi para prajurit di lingkungan Kodam Trikora dengan buku saku yang berisi motto serta visi dan misi prajurit profesional untuk mengurangi dan menghindari terjadinya pelanggaran HAM.

15 Mei

- *Careteker* Gubernur Marsekal Pertama Musiran Darmosuwito, S.I.P. mengatakan, Pemda tidak akan menggagalkan pelaksanaan Kongres Papua karena merupakan hak masyarakat untuk mengungkapkan aspirasinya. Hal senada ditegaskan Kapendam XVII/Trikora bahwa penambahan pasukan merupakan rotasi rutin untuk menjaga perbatasan RI-PNG. Penambahan itu menurutnya merupakan program internasional bagi tiap negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.
- Rektor Universitas Cendrawasih Ir. Frans Wospakrik, M.Sc. menilai Kongres Papua sebagai bagian dari aspirasi masyarakat dalam era reformasi dan demokrasi yang sedang berkembang dewasa ini. Hanya saja pelaksanaannya perlu memperhatikan rambu-rambu yang ada mengingat kongres dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18 Mei

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengatakan, pelaksanaan Kongres Papua 2000 tidak perlu meminta izin kepada kepolisian karena merupakan kegiatan masyarakat Papua dalam menyampaikan aspirasinya untuk membangun Tanah Papua di masa mendatang.
- Menurut cendekiawan Muslim Dr. Nurcholis Madjid, kemungkinan untuk merdeka bagi bangsa Papua sangat kecil dan sulit. Presiden Gus Dur juga tidak semudah itu melepaskan Propinsi Papua menjadi sebuah negara.

18-21 Mei

Wapres Megawati Sukarnoputri bersama 11 menteri melakukan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten di Irja:

- *Merauke*: Wapres menegaskan bahwa kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan merupakan hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini. Ia menambahkan bahwa kunjungannya ke Irja tidak disertai target politik.
- *Wamena*: Kedatangan Wapres di bandara disambut aksi demonstrasi ribuan massa yang mengibarkan bendera Bintang Kejora serta menggelar spanduk dan poster yang umumnya berisi aspirasi Papua Merdeka. Dalam pidatonya di depan massa, Wapres mengatakan bahwa maksud kunjungannya adalah untuk melihat secara jelas kondisi masyarakat dan hal-hal yang terjadi di Papua selama ini. Sementara Pdt. Obeth Komba dalam orasinya mengungkapkan, besarnya jumlah massa yang hadir menunjukkan bahwa keinginan untuk Merdeka bukanlah kehendak segelintir orang. Oleh karena itu menurutnya Kongres Rakyat Papua akan dimanfaatkan untuk melakukan dialog dengan pemerintah pusat. "Kami menginginkan merdeka lewat dialog. Kami tidak ingin merusak dan tidak ingin ada yang jadi korban," katanya. Sebagian warga yang menginginkan dialog terbuka dengan Wapres namun gagal, melampiaskan kemarahannya dengan merusak rumah dan kendaraan dinas milik Bupati Jayawijaya, David Hubi.
- *Jayapura*: Warga merasa kecewa karena tidak bisa bertatap muka dan berdialog langsung dengan Wapres. Wapres hanya melakukan dialog bersama Muspida Tk. I dan beberapa warga yang diundang secara terbatas. Dialog itu berlangsung di Tugu McArthur, dekat

halaman Rindam XVII/Trikora, dan hanya berlangsung 10 menit. Wapres mengakui jika kesejahteraan masyarakat Papua masih rendah. Dengan demikian banyak kebijakan yang harus dibuat atau diperbaiki untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat.

- *Timika*: Masyarakat Desa Nayaro telah mempersiapkan aksi demo untuk menyambut kunjungan Wapres. Namun sebelumnya spanduk maupun poster yang disiapkan warga dirampas oleh aparat keamanan.
- *Sorong*: Masyarakat merasa kecewa karena tidak bisa berdialog langsung dengan Wapres Megawati. Akibatnya mereka melakukan demo dengan menggelar orasi politik seputar Papua Merdeka. Sebagian di antara mereka melampiaskan kemarahannya dengan merusak rumah dinas dan kendaraan milik Bupati Sorong, John Piet Wanane, S.H.
- *Biak*: Masyarakat kecewa karena tidak ada dialog dengan Wapres. Mereka lalu menyandera mobil Ketua DPRD Biak, Hengky Satsoetoeboen. Menurut Ketua DPRD Biak, seharusnya Megawati sebagai Wapres melakukan dialog untuk mendengarkan jeritan hati masyarakat. Ia menilai kunjungan Wapres di Papua terkesan tidak jelas dan hanya untuk jalan-jalan saja.

19 Mei

- Anggota DPRD Irja Gerits Erens Waimuri menyatakan kekecewaannya karena kunjungan Wapres bersama rombongan ke Papua terkesan hanya berpiknik. "Kalau mengunjungi tiap daerah di Papua masing-masing hanya dua jam saja, ini sama saja dengan membuang-buang waktu dan uang negara. Masyarakat sama sekali tidak merasakan manfaat dari kunjungan tersebut. Masyarakat mengharapkan adanya komunikasi yang baik. Mereka juga ingin mendengar tanggapan dari Wapres tentang aspirasi dan keinginan mereka, atau harapan dari Mega untuk mensejahterakan masyarakat Papua ke depan. Atau, bagaimana membangun daerah ini dengan menjawab segala tantangan yang ada. Mega bisa juga mengungkapkan secara langsung kepada orang Papua apakah dirinya setuju dengan Kongres Papua mendatang atau tidak. Hal seperti ini yang dibutuhkan orang Papua saat ini, bukan sekedar melihat pejabat."
- Menurut Menteri Negara HAM Hasballah M. Saad, aspirasi mer-

deka rakyat Papua tidak perlu diredam. Pemerintah harus mengelola aspirasi itu untuk menemukan jalan keluar tanpa menimbulkan disintegrasi. "Aspirasi rakyat Papua untuk merdeka belum menampakkan motivasi yang jelas. Apakah memang merupakan kemauan politik atau sebagai wujud kekecewaan yang terlalu lama dan mendalam," katanya. Menanggapi Kongres Papua, Ia menilai positif sebagai wadah untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat Papua dan sebagai arena dialog untuk menemukan solusi terbaik yang dibutuhkan semua pihak. Oleh karena itu, Kongres Papua tidak boleh dilarang.

20 Mei

Kunjungan Wapres Megawati ke Enarotali, Paniai, disambut aksi unjuk rasa massa yang membawa bendera Bintang Kejora dan sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan Papua Merdeka. Aksi ini dipimpin Tadeus Yogi, anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang sering melakukan "kegiatan" di sekitar Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya. Mereka berunjuk rasa dengan alasan keinginan Yogi untuk berdialog dengan Wapres Megawati tidak dikabulkan Pemda Paniai. Menurut Pemda, Wapres tidak datang untuk mengurus kegiatan politik bangsa Papua. Akibat unjuk rasa itu, keesokan harinya pasukan TNI dari Yonif 753 Nabire melakukan penembakan dan merendam dua orang aparat Desa Madi, Paniai (daerah asal Tadeus Yogi) di kolam ikan. Pihak keamanan juga menuntut denda dari masyarakat berupa hewan peliharaan.

21 Mei

- Panglima TNI Jenderal Widodo A.S. mengatakan, pelaksanaan Kongres Papua tidak akan dilarang asalkan dalam pelaksanaannya berjalan dengan aman, tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. "Mengenai pelaksanaan Kongres telah dibicarakan, dikomunikasikan, dan dikoordinasikan oleh panitia dengan pemerintah. Dari sisi keamanan tidak ada masalah, sepanjang itu semua dilakukan tanpa memberikan implikasi terganggunya keamanan publik."
- Menteri Negara HAM Hasballah M. Saad menilai, dari sisi HAM hanya hak asasi masyarakat Papua yang belum dipenuhi. "Di Jakarta kebanyakan orang hidup dalam *kapsul* yang penuh AC. Sementara banyak saudara kita di Papua berbaju lumpur dan

menutup auratnya hanya dengan ilalang kering. Sebagai bangsa seharusnya kita malu dengan kondisi demikian. Namun kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam waktu sekejap sangat terbatas," katanya. Tentang pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Papua, akan diselesaikan oleh pemerintah melalui mekanisme rekonsiliasi. Soalnya, fakta hukum dari setiap peristiwa tidak bisa dibuktikan, sehingga menyulitkan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan.

22 Mei

Ketua Solidaritas Perempuan Papua Manokwari Ny. Ferdinanda W. Ibo mengatakan, perempuan Papua Manokwari bertekad mengangkat harkat dan martabat perempuan Papua dan tetap meminta kemerdekaan Papua yang telah diproklamasikan 38 tahun lalu. Menurutnya tekad itu akan disampaikan dalam Kongres Rakyat Papua II di Jayapura. Alasan yang melatar-belakanginya adalah karena selama 38 tahun perempuan Papua banyak diperkosa, diintimidasi, dan ditindas. Sementara tidak ada pihak yang berupaya membelanya, bahkan malah menambah penindasan dengan mendirikan banyak bar dan menutup sekolah keterampilan wanita. Selain itu banyak perempuan Papua yang menjadi janda karena suaminya dibunuh dan mengakibatkan anak-anaknya tidak bisa sekolah.

23 Mei

- Pemimpin besar bangsa Papua, Theys H. Eluay, mengancam akan mengambil alih pemerintahan di Papua kalau Pemda sebagai pelayan masyarakat tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan rakyat Papua. Misalnya tidak menghadiri Mubes Papua 2000 atau Kongres Pemuda Papua, walau undangan telah diberikan oleh panitia.
- Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, Erna Witoelar, menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 187 milyar untuk kegiatan pembangunan di wilayah khusus Papua, seperti di Kapet Biak. Ia mengakui jika di masa lalu ada kesalahan dalam pembangunan infrastruktur karena semuanya dikendalikan dan dirancang dari pusat. Akibatnya pembangunan itu menimbulkan biaya tinggi dan peruntukannya tidak tepat.

24 Mei

- Sekretaris Umum Gereja Baptis di Irja Pdt. Sofyan Yoman menilai ancaman Theys untuk mengambil alih pemerintahan tidak rasional dan bertentangan dengan motto perjuangan Papua yang damai dan kasih. Namun di sisi lain ia menilai ancaman tersebut ada benarnya. Menurutnya ancaman itu adalah koreksi terhadap pemerintah agar bersikap proaktif dalam menyikapi aspirasi merdeka yang terus mengkristal di Tanah Papua Barat. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang tidak mau berdialog dengan rakyat Papua Barat sebagaimana terwujud dalam kunjungan Wapres Megawati ke Papua.
- Presidium Dewan Papua mengundang warga pendatang yang berada di Jayapura untuk terlibat dalam Kongres Rakyat Papua sebagai peninjau. Sementara Ketua Kerukunan Toraja Martin G. mengatakan, sudah diputuskan oleh pimpinan paguyuban yang ada di Jayapura bahwa warga pendatang tidak akan terlibat dalam Panel Papua, melainkan hanya akan bertindak sebagai peninjau. Karena, yang berhak menentukan masa depan rakyat Papua adalah rakyat Papua sendiri.

25 Mei

Mengomentari penilaian *Caretaker* Gubernur Irja, Musiran Darmosuwito, S.I.P., bahwa mutu pendidikan di Papua sangat rendah, Ketua KNPI Papua Drs. Origenes Nauw mengatakan, "Ini adalah akibat dari sistem politik pendidikan yang sangat sentralistik yang diterapkan pemerintah pusat. Semua kebijakan datang dari pusat, sedangkan daerah hanya dijadikan obyek. Sistem tersebut tidak menyentuh langsung kebutuhan pendidikan masyarakat Papua. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merusak sistem nilai dan tatanan masyarakat yang ada." Sementara menyangkut kebijakan *caretaker* gubernur untuk membebaskan biaya SPP dari SD hingga SMU di Papua, dengan mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 17 milyar ke Pemerintah Pusat, menurutnya hanya merupakan aksi insidentil. Yang perlu dirubah adalah sistemnya, bukan pada alokasi dana.

26 Mei

Kongres Pemuda Papua I yang diselenggarakan di Jayapura dan

dihadiri oleh delegasi dari seluruh kabupaten se-Papua, menghasilkan tiga keputusan:

- *Pelurusan sejarah*: Pemuda Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbukti dari tidak adanya perwakilan pemuda Papua dalam Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. New York Agreement dinyatakan tidak sah karena dibuat tanpa melibatkan orang Papua. Oleh karena itu, Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) juga dinyatakan cacat dan gugur demi hukum.
- *Agenda politik*: Pemuda Papua umumnya memilih merdeka dan menyatakan keluar dari NKRI.
- *Konsolidasi komponen*: Dibentuk satu wadah bersama Pemuda Papua yang diberi nama Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP) dengan badan pengurus yang terdiri dari delegasi tiap kabupaten.

28 Mei

❖ Sekretaris Eksekutif Foreri (Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya) Drs. Willy Mandowen menjelaskan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid tidak bisa menghadiri Kongres Papua 2000 di Jayapura, untuk menghindari tafsiran lain terhadap pemerintah. Penjelasannya itu didasarkan pada hasil pembicaraann dengan Sekretaris Negara, Bondan Gunawan. Menurut Bondan, kehadiran Gus Dur dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap aspirasi Papua Merdeka. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan rapat dengan beberapa menteri.

❖ Menanggapi tidak bisa hadirnya Presiden Abdurrahman Wahid dalam Kongres Papua, Tom Beanal menilainya tidak menjadi masalah. Karena menurutnya yang melakukan Kongres adalah rakyat Papua sendiri. Namun, adanya sumbangan untuk pelaksanaan kongres sebesar Rp 1 milyar, menurutnya menunjukkan itikad baik dari Presiden terhadap aspirasi rakyat Papua dan merupakan wujud dukungan moril terhadap pelaksanaan Kongres Papua.

29 Mei

❖ Kongres Rakyat Papua II 2000 dibuka oleh Theys Hiyo Eluay. Kongres dihadiri oleh 25.000 peserta yang terdiri dari delegasi

masyarakat Papua dari seluruh kabupaten di Irja, perantauan di luar Papua dan luar negeri, serta undangan lainnya. Hadir pula aparat Muspida Irja yang terdiri dari *Caretaker* Gubernur Marsekal Pertama Musiran Darmosuwito, S.I.P dan wakilnya, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwan, Kapolda Irja Brigjen (Pol,) Drs. S.Y. Wenas, serta Rektor Uncen Ir. Frans Wospakrik, M.Sc.

- Ketua Panitia Kongres Papua, Agus A. Alua, dalam sambutannya mengatakan, "Selama 38 tahun bangsa Papua berjuang di negeri orang, dari lereng gunung, lembah, hingga rawa, untuk mengembalikan hak dan kedaulatan politiknya. Kongres ini merupakan puncak perjalanan patriotis yang panjang dan melelahkan sehingga harus membawa kemenangan. Sekarang merupakan saat yang tepat bagi orang Papua untuk menata diri dan mengambil bentuk perjuangan secara politis melalui Presidium dan Panel Papua." Ia juga mengemukakan bahwa tujuan kongres adalah untuk menyatukan visi dan misi perjuangan, menata perjuangan agar semakin rapi, terarah, dan terfokus, serta memantapkan seluruh agenda perjuangan dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap komponen perjuangan Papua.
- Panitia juga menjelaskan ada tiga agenda utama yang akan dibahas dalam Kongres Papua 2000. Yakni aspek pelurusan sejarah, konsolidasi organisasi, serta agenda politik berupa dialog politik yang membicarakan status politik Papua Barat dan hak-hak dasar rakyat Papua.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menjelaskan, Kongres Papua yang dilaksanakan masyarakat Papua tidak melanggar hukum karena masih sebatas penyampaian aspirasi. Secara bersamaan Pangdam XVII/Trikora mengharapkan agar pelaksanaan Kongres tidak mengganggu stabilitas keamanan di seluruh Papua.

30 Mei

- Gubernur Propinsi Sandaun yang juga anggota Parlemen Nasional Papua New Guinea (PNG), John Tekwi, dalam sambutannya mengatakan ikut mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Ia mengingatkan masyarakat Papua agar dalam perjuangan harus tetap bersatu dalam berbagai perbedaan jiwanya, serta

mampu menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan.

- Menurut Moderator Presidium Dewan Papua, Pdt. Herman Awom, saling curiga di antara para peserta kongres merupakan hal yang wajar. Karena, selama 38 tahun masyarakat Papua tidak pernah dilibatkan dan didengar suaranya dalam pengambilan keputusan yang menentukan kehidupannya sendiri. Mekanisme demokratis seperti kongres kali ini hanya pernah berlangsung pada Kongres Rakyat Papua I pada 19 Oktober 1961 di Holandia. Saat itu terpilih 17 anggota Komite Nasonal Papua yang telah menghasilkan Manifes Papua tentang persiapan kemerdekaan Papua, lengkap dengan atribut kenegaraannya seperti bendera nasional Papua Bintang Kejora, lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", lambang negara Burung Mambruk, serta batas wilayah.

Juni

1 Juni

- Delegasi Kongres Papua dari Belanda, Viktor Kaisepo, menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan nasib Papua hingga ke PBB. Menurutnya untuk mengetahui apa dan bagaimana politik internasional bukanlah hal yang mudah. Namun, masyarakat Papua berhak atas tanahnya sebagai warisan leluhur yang harus diperjuangkan. Ia mengakui jika dalam Komisi Dekolonisasi PBB nama Papua memang tidak tercantum sebagai wilayah yang akan diberi kemerdekaan. Tetapi peluang untuk merdeka tetap ada. Masyarakat Papua dihimbau tidak perlu putus asa dan tetap memperjuangkan hak-haknya melalui jalur yang ada, termasuk di PBB.
- Prof. William Liddle dari Ohio State University mengaku khawatir atas masa depan Papua daripada Aceh sebagai bagian dari Indonesia. "Kalau pemerintah Indonesia lalai dan benih persaudaraan tidak ditanam dari sekarang, Papua hampir dipastikan lepas apabila OPM menjadi cukup kuat," kata Liddle.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas meminta Panitia Kongres Papua memulangkan anggota Parlemen Nasional sekaligus Gubernur Propinsi Sandaun PNG, John Tekwi, karena pernyataan-

nya yang mendukung perjuangan kemerdekaan Papua dalam Kongres dinilai melanggar hukum. Ia beralasan, John Tekwi bukan warga negara Indonesia dan hanya berstatus sebagai peninjau kongres yang tidak punya hak bicara.

❖ Bersamaan dengan berlangsungnya Kongres Papua di Jayapura, tiga pesawat tempur F-16 diterbangkan ke Biak dari pangkalannya di Madiun. Menurut Komandan Lanud 3 Iswahyudi Madiun, Letkol Penerbang Moch. Syaugi, kedatangan pesawat tersebut tidak membawa misi khusus selain pengenalan daerah serta memperkenalkan kedirgantaraan kepada pelajar Biak dan daerah lainnya di Irja agar mau bergabung sebagai penerbang TNI-AU.

1 Juni

Dinamika dalam Kongres Papua 2000:

- Tom Beanal menghimbau masyarakat luas, khususnya warga pendatang, agar tidak perlu khawatir apalagi takut tentang keselamatan mereka sehubungan dengan pelaksanaan kongres yang merupakan pesta akbar orang Papua. Kongres berjalan aman, lancar, dan tertib.
- Peserta kongres dari Komisi Pelurusan Sejarah, Drs. Martinus Ayomi, M.A., menilai kongres sebagai babak baru dalam sejarah perjuangan Papua, sekaligus sebagai wujud jatidiri bangsa sehingga perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat Papua.
- Peserta kongres menolak presentasi Don A.L. Flassy, M.A. mengenai gagasan pembentukan pemerintahan transisi di Papua dengan sejumlah alasan. *Pertama,* gagasan itu sama dengan otonomi luas. *Kedua,* rakyat mau merdeka, bukan pemerintahan transisi. *Ketiga,* gagasan itu dinilai menyalahi hukum sehingga akan berhadapan dengan pemerintah Indonesia.
- Ketua YLBHI Bambang Widjojanto, S.H. dalam ceramahnya mengatakan, yang menentukan hitam-putihnya Papua adalah rakyat Papua sendiri. Kongres merupakan kesempatan baik bagi rakyat untuk merumuskan cita-citanya secara bersama-sama. "Kongres ini harus menjadi kongres yang representatif bagi bangsa Papua untuk merumuskan berbagai kehendak yang diinginkan bersama. Selain itu, sikap-sikap yang partisipatif dari seluruh komponen dan elemen yang ada di sini harus didukung.

Kalau tidak demikian, kita hanya bermimpi dalam khayalan."

- Pengamat Politik Universitas Cendrawasih (Uncen) Very P. Pioh menilai, Kongres Papua II merupakan sarana dalam mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan setelah selama ini terjadi perang antara ideologi Pancasila dan ideologi Papua Merdeka. Tetapi ia menyarankan agar rakyat Papua dalam perjuangannya tidak memakai kekerasan untuk menghindari jatuhnya korban di pihak rakyat kecil.

2 Juni

❖ Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak dalam siaran persnya mengatakan, pemerintah pusat menganggap Kongres Rakyat Papua II 2000 tidak representatif. Karena, kongres itu menghadirkan pihak asing dan tidak menghadirkan kelompok pro-otonomi. Pemerintah Pusat tidak akan mengakui hasil-hasil yang dicapai dalam kongres tersebut.

❖ Beberapa tanggapan atas pernyataan Marsilam Simanjuntak:

- Tom Beanal menegaskan, jika tidak mengakui hasil Kongres berarti pemerintah telah menginjak-injak hukum, terutama UUD 1945. "Pemerintah jangan menghambat proses demokratisasi di Papua, karena yang berbicara dalam kongres kali ini adalah rakyat. Kalau memang masyarakat Papua menghendaki merdeka, jangan dilarang. Ini *kan* bukti dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri."
- Menurut Sekjen Presidium Dewan Papua, Thaha M. Alhamid, pernyataan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperkecil makna kongres yang dianggap sebagai aspirasi segelintir orang. Padahal fakta sebenarnya jauh berbeda. "Kami tidak menghalang-halangi orang pro-otonomi untuk hadir dalam kongres, tapi kenyataannya mereka tidak datang. Kami akui bahwa yang datang dalam kongres hanyalah yang membawa suara rakyat, yaitu merdeka. Kalau mereka merasa tidak membawa suara rakyat pasti tidak mau datang," katanya.

❖ Salah satu pelaku sejarah, Herman Wayoi, mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah Papua setelah kongres harus dilakukan dialog nasional maupun internasional. Menurutnya banyak pihak yang terkait dengan Papua, baik itu pemerintah

Indonesia, Amerika Serikat, maupun Belanda. "Untuk menyelesaikan masalah Papua, selain melalui diaog nasional dan internasional, juga perlu dilaksanakan dengan cara-cara kekeluargaan. Kita harus menempuh cara-cara yang demokratis berdasarkan norma sopan santun, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan penuh kedamaian."

4 Juni

- Kongres Rakyat Papua II 2000 menghasilkan keputusan-keputusan yang dirumuskan dalam Resolusi Kongres.[2]
- Ketua DPR-RI Akbar Tandjung meminta Presiden Abdurrahman Wahid dan Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. agar tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas apabila Kongres Rakyat Papua menyatakan kemerdekaan Papua. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Ketua DPP PDI-P Theo Syafei mengatakan, kalau rakyat Papua mau memisahkan diri dari NKRI, terlebih dahulu harus minta persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia. Paling tidak melalui MPR yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Kongres Papua tidak dapat begitu saja memproklamasikan Papua Merdeka. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari kader PDI-P di Irja, Kongres Papua II 2000 tidak mewakili aspirasi seluruh rakyat Irja.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menilai hasil Kongres Papua 2000 masih sebatas aspirasi, belum ada upaya untuk membentuk negara. Oleh karena itu pihaknya belum melihat adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kongres tersebut.
- Tokoh wanita Papua, Ny. Beatrix Koibur, mengatakan bahwa kaum perempuan Papua yang dipimpinnya siap mendongkrak perjuangan Papua Merdeka. Yakni dengan membina dan menyiapkan seluruh wanita Papua sebagai wanita yang berkepribadian. Keterbelakangan dan kebodohan yang dirasakan selama ini merupakan kendala majunya wanita Papua.

---

[2] Isi Resolusi Kongres Rakyat Papua II 2000 dapat dilihat pada bagian lampiran.

5 Juni

- Menurut *Caretaker* Gubernur Marsekal Pertama Musiran Darmosuwito S.I.P., hasil Kongres Papua 2000 yang dituangkan dalam resolusi tidak memuat pernyataan merdeka ataupun pembentukan pemerintahan transisi. Semuanya masih sebatas aspirasi. Oleh karena itu, Pemda tidak akan melarang jika Presidium Dewan Papua akan melakukan sosialisasi hasil kongres kepada masyarakat di daerah-daerah.
- Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan kecewa terhadap pelaksanaan Kongres Papua 2000. Pasalnya, kongres dihadiri oleh warga asing dan tidak menghadirkan warga Papua yang pro-integrasi. Untuk itu pemerintah tidak mengakui hasil kongres tersebut.
- Sementara itu, Kapuspen TNI Marsekal Muda Graito Usodo menegaskan bahwa TNI masih bisa memahami jika keinginan Papua melepaskan diri dari NKRI masih berupa wacana. Tetapi pihaknya akan mengambil tindakan apabila upaya itu sudah mengarah pada tindakan bersenjata atau pemberontakan.

6 Juni

- Anggota MPR-RI Utusan Daerah Irja Budi Baldus Waromi berpendapat, kemungkinan rakyat Papua merdeka dan melepaskan diri dari NKRI sebagaimana tersirat dalam Resolusi Kongres Papua 2000 masih tetap ada dan tidak bisa diduga oleh siapapun. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan terobosan dalam menyikapi fenomena yang terjadi di Papua.
- Pelaku sejarah Terry Teopilus Aronggear mengatakan bahwa penentuan status Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan merupakan wewenang MPR karena hanya diatur dengan Keputusan Presiden. "Dengan hanya berdasarkan Keppres itu, berarti hanya menyangkut hak prerogatif (hak mutlak) dari Presiden saja. Oleh karena itu persoalan Papua Barat tidak boleh dipaksakan atau dibawa ke MPR, atau dibicarakan di tingkat kabinet. Cukup Presiden saja yang memberikan jawabannya karena Papua Barat masuk ke Indonesia hanya melalui sebuah Keppres," katanya.
- Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang menilai Resolusi Kongres Papua 2000 belum membahayakan. "Kami

menganggap tidak ada masalah, karena yang terpenting mereka masih berada dalam bingkai NKRI. Kecuali kalau mereka sudah membentuk pemerintahan, maka akan berhadapan dengan TNI dan Polri."

- Menteri Luar Negeri Dr. Alwi Shihab mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap keinginan rakyat Papua untuk melepaskan diri dari NKRI. Sebab dari hasil penjajakan keinginan tersebut tidak mendapat dukungan dari dunia internasional.

7 Juni

Anggota DPR-RI asal Papua, Lukas Karl Degey, mengingatkan pemerintah Abdurrahman Wahid agar jangan menganggap remeh hasil Kongres Rakyat Papua 2000 yang memutuskan Papua bukan bagian dari NKRI. Menurutnya jika penanganannya tidak tepat Papua bisa saja lepas dari Indonesia. Ia juga menghimbau pemerintah agar segera melakukan dialog nasional dengan tokoh-tokoh Papua.

8 Juni

- Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa dirinya membutuhkan dukungan moral dari semua pihak agar bisa menangani konflik politik yang lahir menyusul deklarasi Papua Merdeka dalam Kongres Papua pada Juni 2000 di Jayapura. Hal itu disampaikan Kepala Litbang PGI, Pdt. Phil Erari, setelah bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Ia juga menjelaskan kesediaan Presiden untuk bertemu dengan para pimpinan rakyat Papua guna mendengarkan hasil-hasil Kongres.
- Tom Beanal mengecam pernyataan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Baron S. Van Heemstren, yang mengatakan bahwa pemerintahnya tidak ikut campur dalam masalah Papua Merdeka. "Pernyataan Dubes Belanda itu seperti ayam yang bertelur, tetapi tidak menjaga telurnya," katanya.
- Ketua Lembaga Masyarakat Adat Manokwari, Barnabas Mandacan, menegaskan bahwa pihaknya menolak permintaan Presiden Gus Dur agar bendera Bintang Kejora dikibarkan dengan ukuran yang kecil dan posisinya lebih rendah dari bendera Merah Putih. "Ukuran bendera dan letak pengibarannya tidak akan kami ubah, yakni seperti posisi ketika bendera tersebut dikibarkan untuk pertama kali, sejajar dengan Merah Putih."

12 Juni

- Dalam pertemuannya dengan Menteri Negara HAM Hasballah M. Saad di Jayapura, Pdt. Herman Awom menyatakan penyesalannya atas kunjungan Wapres Megawati ke Papua. Kunjungan itu menurutnya terkesan dilakukan sembunyi-sembunyi. Ia juga menuntut pengembalian kedaulatan Papua Barat pada 1961. "Sudah banyak pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua dan tidak bisa diselesaikan sepotong-sepotong. Kami membutuhkan jawaban menyeluruh, yaitu kembalikan kedaulatan Papua," katanya.
- Menurut Sekjen Presidum Dewan Papua, Thaha Alhamid, yang terpenting bagi rakyat Papua saat ini adalah penegakan hukum dan HAM. "Jangan lagi menipu masyarakat dengan kunjungan-kunjungan dari pusat. Masyarakat Papua saat ini sudah bosan dengan janji-janji. Yang terpenting adalah tindakan nyata dari pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Masyarakat Papua juga menginginkan agar identitas dirinya yang sudah lama hilang akibat adanya pelanggaran HAM dikembalikan," katanya.
- Wakil Ketua DPRD Tk. I Irja Drs. John Ibo mengungkapkan bahwa otonomi khusus untuk Irja akan tetap dijalankan walaupun sebagian masyarakat menolaknya. Otonomi khusus merupakan program pembangunan dari pemerintah pusat yang harus dijalankan Pemda. Namun jika dinilai tidak sesuai dengan kebutuhannya, masyarakat berhak menyampaikan protes kepada pemerintah.

13 Juni

- Thaha Alhamid diperiksa oleh Polda Irja dan dituduh makar karena telah melaksanakan Kongres Papua II 2000. Tapi Thaha mengatakan, "Yang perlu diperhatikan adalah apakah dapat dibuktikan bahwa kongres tersebut makar? Jadi ini soal pembuktian saja. Kami dari Presidium mempunyai statemen bahwa aspirasi ini adalah soal politik, sehingga penyelesaiannya juga melalui jalur politik. Silahkan proses hukum dijalankan, tetapi persoalan politik Papua juga akan tetap berjalan."
- Kedatangan 400 delegasi kongres asal Biak disambut warga Biak dan diarak berkeliling kota secara tertib sambil mengibarkan bendera Bintang Kejora. Selain itu juga digelar orasi politik seputar Papua Merdeka.

- Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Leslie A. Rowe, dalam kunjungannya ke Sorong mengatakan bahwa masalah politik Papua sepenuhnya adalah urusan pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua. Australia tidak akan pernah ikut campur tangan.
- Ketua DPRD Jayawijaya Budiman Kogoya, B.A. menegaskan bahwa dirinya akan mengajukan permintaan kepada Kapolda Irja dan Pangdam Trikora agar menambah pasukan keamanan di Jayawijaya untuk memberi ketenangan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya menanggapi pengusiran yang dilakukan oleh warga Kecamatan Makki, Pirime dan Tiom, terhadap Muspida Jayawijaya yang dipimpin Bupati David Hubi ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.

15 Juni

- Polda Irja memanggil tiga anggota Presidium Dewan Papua (PDP): Theys Hiyo Eluay, Thaha Alhamid, dan Agus Alua. Mereka diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Papua II 2000.
- Theys H. Eluay menolak tegas pemeriksaan terhadap anggota PDP. Ia mengatakan, "Pemeriksaan yang dilakukan Polda Irja itu sangat kontroversial, karena Presiden Abdurrahman Wahid sendiri sudah menyetujui pelaksanaan Kongres Papua II. Jadi kalau mau memeriksa Presidium Papua dalam kaitannya dengan Kongres, lebih baik periksa dulu Gus Dur yang sudah memberikan izin, bahkan ingin membuka kegiatan tersebut."
- Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen, Apolos Mora, menolak tegas semua pernyataan 'miring' dari elite pemerintah di Jakarta terhadap hasil Kongres Papua 2000. Menurutnya masalah pelurusan sejarah Papua Barat tidak perlu dipersoalkan dan dicari ke mana-mana sebab sejarah itu ada di Papua, dan pelaku yang memutarbalikkan sejarah adalah Indonesia.

17 Juni

- Wakapolda Irja Kolonel (Pol.) Drs. H. Thamrin Sianipar mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan melarang pengibaran bendera Bintang Kejora selama kegiatan tersebut hanya sebatas aspirasi serta tidak mengandung unsur kriminal dan makar.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi seruan dari Komite Independen Papua agar masyarakat mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Papua mulai 1 Juli 2000.

- Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dalam jumpa persnya di Kantor Keuskupan Jayapura mempertanyakan tindak lanjut penyelesaian kasus "Nabire Berdarah" pada 28 Februari 2000 yang menewaskan tiga warga sipil dan melukai sejumlah warga lainnya. SKP meminta keterbukaan dari semua pihak yang terlibat, terutama aparat keamanan, untuk mengakui kesalahannya dan meyelesaikan kasus ini secara tuntas agar menjadi jelas apakah kasus ini merupakan kasus kriminal murni atau pelanggaran HAM.
- Masyarakat di Kecamatan Biak Barat, Biak Timur, dan Numfor Barat diresahkan oleh angket 'politik' yang disebarkan anggota Koramil setempat. Isi angket yang ditujukan kepada warga Papua itu berbunyi "pilih 'O' atau 'M'". Sedangkan untuk warga pendatang disebarkan pula angket yang berbunyi "pilih pulang atau tinggal di Papua".

19 Juni

Lima anggota Presidium Dewan Papua (PDP): Thaha Alhamid, Pdt. Herman Awom, John S. Mambor, Drs. Don A.L. Flassy, M.A., serta Drs. Agus Alua, M.A., secara resmi dijadikan tersangka kasus makar oleh Polda Irja. Tuduhan makar itu berkaitan dengan rangkaian kegiatan politik sejak 12 November 1999 hingga pelaksanaan Kongres Rakyat Papua II tahun 2000.

20 Juni

- Menanggapi proses hukum terhadap lima anggota PDP, Pdt. Willem Rumsarwir menilainya sebagai langkah yang tidak tepat karena kasus yang dituduhkannya bernuansa politik. Karena itu, jalan penyelesaiannya adalah dialog bersama pemerintah. Menurutnya anggota PDP hanya merupakan fasilitator dalam mengangkat aspirasi rakyat Papua yang selama ini tidak tersalurkan di lembaga-lembaga resmi pemerintah. Jadi, kalau mau menuduh makar seharusnya semua rakyat Papua yang berteriak "merdeka" juga diperiksa dengan tuduhan yang sama.
- Sekretaris Umum Gereja Baptis di Irja Pdt. Sofyan Yoman, merasa

prihatin atas langkah yang ditempuh Polda Irja terhadap lima anggota PDP. Menurutnya stigma tersangka atau makar bukan solusi untuk tuntutan Papua Merdeka, melainkan bentuk tekanan penguasa yang justru memperkeruh masalah dan membuat rakyat Papua marah.

- Menurut Direktur LBH Jayapura Demianus Wakman, S.H., keliru jika Polda menilai pelaksanaan Mubes dan Kongres Papua adalah makar. Kegiatan tersebut merupakan alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya."

21 Juni

- Direktur LBH Jayapura Demianus Wakman S.H. menilai wajar rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh Papua. Menurutnya hal itu merupakan bagian dari penyampaian ekspresi masyarakat Papua dalam suasana demokrasi dewasa ini. Namun ia juga menghimbau masyarakat agar menyadari batasan dari Presiden Abdurrahman Wahid mengenai ukuran dan letak pengibaran bendera Bintang Kejora yang harus lebih rendah dari Merah Putih.
- Warga Desa Wambena, Kecamatan Depapre, Jayapura, menuntut penarikan pasukan nonorganik Satgas TNI 515/Kostrad yang ditempatkan di desa tersebut. Menurut Kepala Desa Wambena, Benyamin Yerisetouw, oknum-oknum Kostrad banyak melakukan tindakan tidak terpuji, seperti tindak asusila, pemusnahan satwa/burung di sekitar hutan Wambena, pencemaran air sungai, serta sering mengganggu aktivitas masyarakat.

22 Juni

Kakanwil Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Irja, H. Raja Bukit, S.H., mengatakan bahwa pengibaran bendera memang tidak diatur dalam Undang-undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat. Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua belum bisa dikatakan melanggar hukum, apalagi disebut makar.

23 Juni

- Front Nasional Papua (FNP) dibentuk dan diketuai oleh tokoh sejarah Herman Wayoi. Pembentukan FNP dimaksudkan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat jika hasil Kongres

Rakyat Papua 2000 mengalami kebuntuan. Kebuntuan itu mungkin akan menimbulkan benturan hingga menimbulkan jatuh korban di pihak rakyat. Menurut Ketuanya, FNP mendukung Presidium Dewan Papua dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua.

- Para pejuang '45 di Biak digiring masyarakat ke kantor Polres akibat pernyataannya yang menolak aspirasi Papua Merdeka. Mereka mengemukakan penolakannya dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Korem dan Kodim Biak. Wakil Ketua DPRD Biak, Willem Rumpaidus, dan tokoh masyarakat lainnya menyesalkan tindakan tersebut karena dianggap berpotensi menciptakan perpecahan dan konflik antar masyarakat.

26 Juni

Drs. Ishak Tabuni, anggota DPRD Tk. I Irja, menanggapi maraknya penolakan masyarakat Papua di beberapa kabupaten terhadap pelaksanaan Sensus Penduduk 2000. Ia mengatakan bahwa selama 38 tahun kurang sekali perhatian pemerintah pusat bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Wajar jika kemudian program-program pemerintah pusat ditolak. "Mereka berpendapat buat apa sensus penduduk dilaksanakan padahal kita mau merdeka," katanya. Menurutnya ada tiga elemen yang membuat masyarakat Papua enggan melaksanakan program pemerintah. *Pertama*, elemen birokrat yang selama ini mematikan kreativitas serta menciptakan kebodohan dan kemiskinan bagi masyarakat Papua. *Kedua*, elemen aparat keamanan yang di masa-masa lalu telah melakukan tindakan-tindakan yang menindas dan membunuh masyarakat Papua. *Ketiga,* elemen pengusaha yang tidak menghormati hak ulayat masyarakat Papua dalam menjalankan usahanya. Jalan keluar dari masalah ini adalah melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Papua.

27 Juni

Permintaan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys H. Eluay agar polisi menghentikan pemeriksaan terhadap anggota PDP berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Papua 2000, ditolak oleh Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas. Menurut Kapolda, pemeriksaan tidak akan dihentikan karena pelaksanaan Kongres tidak sesuai dengan

tujuan semula, yaitu mendiskusikan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Kongres justru dijadikan forum untuk membicarakan negara dalam negara.

27 - 28 Juni

Muncul berbagai tanggapan terhadap rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua pada 1 Juli 2000 yang diserukan Don A.L. Flassy:

- *Caretaker* Gubernur Irja Marsekal Pertama Musiran Darmosuwito, S.I.P. mengatakan, Pemda tidak akan melarang pengibaran bendera karena sudah mendapat restu dari Presiden Gus Dur. Namun ia mengingatkan agar pengibarannya harus sesuai dengan syarat yang ditentukan Presiden, yakni dikibarkan bersama bendera Merah Putih dengan ukuran bendera lebih kecil serta letaknya lebih rendah dari Merah Putih.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menyatakan rencana pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Juli 2000 boleh-boleh saja dilakukan, asalkan sesuai dengan aturan dan tetap mengacu pada pernyataan Presiden Gus Dur. Tapi ia mengingatkan apabila pengibarannya melanggar ketentuan dan syarat dari Presiden, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
- Menurut Tom Beanal kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora harus jelas tujuan dan maknanya bagi perjuangan kemerdekaan Papua. Ia juga mengingatkan bahwa bendera Bintang Kejora bukanlah mainan yang sebentar-sebentar dinaikkan lalu diturunkan kembali, tetapi perlu diberi makna yang mendalam oleh seluruh rakyat Papua.

29 Juni

❖ Wakil Ketua Komisi A DPRD Irja John Manurung dan anggotanya Frans Alex Koromat meminta ketegasan sikap dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap rencana pengibaran bendera Bintang Kejora. Jika memang benar-benar diizinkan, maka jangan lagi diikuti oleh proses hukum terhadap elite Papua atau para pelaksananya. "Pernyataan 'izin' seperti yang diungkapkan Presiden Gus Dur, Kapolda, maupun Pejabat Gubernur, menimbulkan kecemasan, keragu-raguan, serta ketidakpastian bagi masyarakat."

- Sementara itu Tim Advokasi HAM untuk Rakyat Papua menilai seruan Don A.L. Flassy mengenai pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh Papua merupakan pernyataan pribadi. Karena itu Presidium Dewan Papua diminta mengambil sikap tegas dan tidak keluar dari keputusan Kongres Rakyat Papua 2000. Tim juga menghimbau kepada seluruh rakyat Papua agar berhati-hati dan secara jernih menilai seruan itu serta menilai sikap para pejabat. Karena pada akhirnya masyarakat juga yang sering dijerumuskan ke dalam proses hukum.

Juli

1 Juli

- Sebanyak 29 anggota Brimob melakukan penganiayaan terhadap sejumlah warga sipil di pasar Hamadi, Jayapura. Para korban mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Jayapura. Menurut keterangan Dansat Brimob Polda Irja, Mayor Drs. Fachrudin, tindakan ini merupakan wujud kemarahan atas pemukulan yang menimpa salah satu anggotanya di pasar tersebut, yang belum jelas siapa pelakunya. Menurutnya, 29 anggotanya yang terlibat sedang ditahan dan akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan secara hukum. Sementara itu keluarga korban bersama warga Hamadi melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Tk. I Irja. Mereka menuntut penyelesaian kasus itu secara hukum, termasuk pemecatan para pelaku dari keanggotaan Brimob.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas dalam peringatan hari Bhayangkara menegaskan, gangguan Kamtibmas di wilayah Irja umumnya berkaitan dengan semakin gencarnya tuntutan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu pelanggaran HAM, lingkungan hidup, kemiskinan, dan keterbelakangan masih akan tetap dijadikan komoditi politik oleh para elite Papua Barat Merdeka.

1 Juli

Pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan di sejumlah tempat:

- *Jayapura*: Bendera Bintang Kejora dikibarkan bersama bendera Merah Putih di Desa Sabron, Sentani, oleh Dewan Adat

Mamberamo-Tami (Mamta). Ketua Umum Dewan Adat Mamta John Max Nepo dalam sambutannya mengatakan, "Presidium harus menjalankan tugas untuk menyelenggarakan sembilan keputusan Kongres. Puncaknya, yakni pada 1 Desember 2000, Papua sudah merdeka dan berdaulat penuh. Namun jika realisasi ketetapan Kongres meleset dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Presidium Dewan Papua, maka pada saat itulah rakyat harus bertindak agar pendekar-pendekar bangsa Papua tersebut diganti." Sementara di Kota Jayapura, bertempat di Gedung Kesenian Irian Jaya, diadakan doa bersama yang dipelopori oleh Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) dan dihadiri ratusan warga lainnya.

- *Biak*: Di Desa Adadikam, Kecamatan Biak Barat, bendera Bintang Kejora dan bendera Merah Putih dikibarkan bersamaan serta dihadiri ribuan warga. Menurut rencana, pengibaran di kecamatan lain akan dilakukan berurutan sampai akhirnya terjadi pengibaran menyeluruh di Kabupaten Biak pada 14 Juli 2000 mendatang.
- *Merauke*: Bendera dikibarkan di halaman Posko Induk Papua Kelapa Lima Merauke, dilanjutkan dengan pertunjukan seni tari dari berbagai suku se-Merauke.
- *Manokwari*: Masyarakat mengibarkan bendera di lapangan Doreri, dipimpin oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Manokwari, Barnabas Mandacan. Dalam sambutannya Barnabas mengingatkan warga supaya tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora di fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah, seperti kantor bupati, camat, atau lurah. Bupati Manokwari Drs. Mulyono mengatakan bahwa pemerintah masih mentolerir kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora sepanjang tidak mengganggu keamanan warga lainnya, dan tidak dikibarkan di gedung-gedung atau sarana milik pemerintah.
- *Sorong*: Bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih di lapangan Sorpus. Acara pengibaran bendera itu dijaga oleh Satgas Papua.

3 Juli

- Sekjen Presidium Dewan papua (PDP) Thaha Alhamid mengemukakan, bangsa Papua adalah korban dari konspirasi politik internasional di masa perang dingin di bawah pimpinan Amerika.

Akibatnya selama 38 tahun rakyat Papua menjadi manusia yang hidup tanpa hak ekonomi dan hak atas emansipasi sosial. Bahkan sebagai masyarakat pribumi terpaksa harus kehilangan jati diri dan hak-hak budaya karena adanya rekayasa integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengingatkan, sebelum presidium bertemu dan menyerahkan laporan hasil Kongres Papua kepada Presiden Abdurrahman Wahid, PDP menolak kunjungan kerja menteri-menteri ke Papua karena masalah Papua Barat tidak bisa diselesaikan secara parsial menurut kehendak pemerintah semata.

- Sekitar 200 mahasiswa di Jayapura memperingati peristiwa tertembaknya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih (almarhum Steven Suripaty) pada 1998 yang belum diselesaikan hingga kini. Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Uncen, Kaleb Imbiri, mengatakan bahwa pihaknya akan mempertanyakan kepada Pangdam Trikora dan Kapolda Irja, sejauh mana kasus yang terjadi dua tahun lalu ini diselesaikan secara hukum.

4 Juli

- Ketua MPR-RI Amien Rais di Jakarta meminta aparat yang berwenang agar menyelidiki pihak-pihak yang disinyalir memasok 12.000 pucuk senjata api ke Papua untuk mempersenjatai rakyat sipil.
- Theys H. Eluay membantah ucapan Amien Rais. Menurutnya isu pemasokan senjata sengaja dihembuskan untuk memperkeruh keadaan di Papua yang akhir-akhir ini rakyatnya sedang gencar menyuarakan aspirasi Papua Merdeka.
- PDP dan Panitia Kongres Rakyat Papua 2000 melakukan pertemuan dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta. Mereka melaporkan hasil Kongres dan menyampaikan rasa penyesalan dari PDP serta rakyat Papua atas sikap dari pejabat tinggi negara yang kurang menghargai demokrasi dengan mengeluarkan komentar yang bukan-bukan tentang kongres sebelum mendapat informasi yang sebenarnya dari PDP maupun panitia Kongres.

5 Juli

Presiden Abdurrahman Wahid tidak keberatan terhadap rencana PDP untuk melakukan safari keliling pelurusan sejarah Papua yang akan

dimulai pada 14 Juli di Kabupaten Merauke. Menurut keterangan Sekjen PDP, Thaha Alhamid, Presiden mempersilahkan penyampaian aspirasi apa saja, asalkan dijalankan dalam suasana yang damai, tanpa kekerasan dan intimidasi, serta tidak menimbulkan perpecahan.

6 - 10 Juli

Muncul berbagai tanggapan terhadap rencana safari pelurusan sejarah Papua oleh PDP:

- *Caretaker* Gubernur Irja, Marsekal Pertama Musiran Darmosuwito, S.I.P., mengatakan bahwa Pemda tidak keberatan dengan rencana safari pelurusan sejarah Papua oleh PDP. "Kalau memang PDP berniat mengadakan pelurusan sejarah, yang akan dimulai dari Kabupaten Merauke dan akan berlanjut ke daerah-daerah lainnya, silahkan saja. Itu haknya. Itu urusan Presidium, bukan urusan pemerintah. Jadi biarlah dilakukan Presidium. Kita tidak punya sangkut paut dengan mereka."
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengatakan, pihaknya tidak keberatan terhadap rencana tersebut, asalkan hanya sekedar sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan sejauh tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- Wakil Ketua DPRD Irja Drs. John Ibo menegaskan bahwa DPRD tidak akan mengintervensi rencana safari pelurusan sejarah tersebut. Rencana itu merupakan agenda PDP, bukan agenda pemerintah.

6 Juli

Ketua LPPMA (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat) Papua, Zadrak Wamebu, S.H., menanggapi niat pemerintah yang akan menempatkan 15.000 KK transmigran baru ke Papua – 60% di antaranya penduduk lokal. Menurutnya niat tersebut harus dikaji dan dipertimbangkan lagi. Pengertian transmigrasi juga harus diperjelas. "Kalau dikatakan 60% penduduk lokal, siapa sebenarnya yang hendak ditransmigrasikan? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk antar pulau. Lalu apa pengertian dari transmigrasi lokal? Pemahaman dari kebijakan ini sangat rancu. Jika mereka dijadikan sasaran transmigrasi berarti sama saja dengan tidak mengakui masyarakat asli sebagai yang punya hak atas tanah ini," tuturnya.

7 Juli

- Ketua Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) Benny Yantewo menyatakan bahwa rakyat Papua akan mengibarkan bendera Bintang Kejora secara serentak di Papua pada 14 Juli. Namun pihaknya akan mematuhi kebijakan dari Presiden Abdurrahman Wahid.
- Keputusan politik pemerintah yang membiarkan pengibaran bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih di Papua, dinilai Ketua MPR-RI Amien Rais dan Ketua DPR-RI Akbar Tanjung justru akan menyuburkan benih-benih separatisme di Papua. Menurut kedua tokoh ini, pemerintah seharusnya mencari penyebab mengapa mayarakat Papua menuntut merdeka. Bukan 'memanjakan' masyarakat Papua dengan membiarkan berkibarnya bendera Bintang Kejora.
- Koordinator Tim Advokasi HAM Rakyat Irja Bernard Akasian menilai rencana pengibaran bendera Bintang Kejora pada 14 Juli nanti berpotensi menciptakan konflik horizontal di masyarakat. Walaupun pemerintah mengizinkan, tapi izin itu penuh dengan syarat-syarat yang jika dilanggar akan menjadi alasan aparat untuk mengambil tindakan. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mencari tahu latar belakang kenapa orang Papua *ngotot* mau merdeka, ketimbang menghibur mereka dengan mengizinkan pengibaran bendera. Sementara masalah pokok seperti ketidakadilan hukum, kesenjangan ekonomi, pelanggaran HAM dan kasus-kasus lainnya sengaja dilupakan.

9 Juli

Pejabat Sekwilda Tk. I Irja Sabirin Harahap meminta Pemda Irja secepatnya memperhatikan hak-hak ulayat rakyat Papua dengan menginventarisasi hak tersebut dan membuat Perda khusus untuk mengaturnya. Hal itu perlu dilakukan karena walaupun tercantum di dalam hukum agraria nasional tetapi pengaturannya tidak jelas dan tidak tegas. Sementara pada kenyataannya banyak muncul tuntutan mengenai hak ulayat.

11 Juli

Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang menerangkan, Presidium Dewan Papua (PDP) berjanji akan tetap menjaga keamanan

dan tidak akan menimbulkan instabilitas di saat melakukan safari pelurusan sejarah Papua. Menurut Pangdam, hal tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan antara PDP, Pangdam dan Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas pada 7 Juli 2000 di Jakarta.

12 Juli

Bupati Merauke Drs. John Gluba Gebze dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Kimaam, Kabupaten Merauke, mengakui jika keinginan 'merdeka' rakyat Papua yang marak belakangan ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dihindari. Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa masyarakat menuntut merdeka. Menurutnya, isu merdeka merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah di masa lalu.

13 Juli

Pemerintah pusat memutuskan akan melaksanakan *crash program* di bidang kemanusiaan untuk rakyat Papua. Menurut Mendagri Soerjadi Soedirdja, program ini dilakukan setelah mempelajari situasi di Papua. Menurutnya masyarakat Papua selama ini merasa diperlakukan tidak adil. Kemiskinan masih terjadi di mana-mana. Akibatnya mereka memunculkan berbagai tuntutan, seperti melakukan kongres, dan berkeinginan membentuk pemerintahan sendiri.

14 Juli

- Safari pelurusan sejarah Papua dimulai di Merauke dengan menghadirkan Ketua Dewan Presidium Papua, Theys H. Eluay, dan Sekjennya, Thaha Alhamid. Kegiatan ini ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora setengah tiang berdampingan dengan bendera Merah Putih. Juga dilakukan rekonstruksi Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilakukan oleh dua pelaku sejarah, Rosa Tambaip dan Efraim Tomi. Keduanya meminta maaf atas keteledoran yang terjadi di masa lalu dan mengaku ditodong, dipaksa, dan diintimidasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerima Pepera.
- Bendera Bintang Kejora dikibarkan oleh masyarakat di berbagai kota di Papua untuk mendukung kegiatan safari pelurusan sejarah Papua.
- Gabungan mahasiswa Papua se-Jayapura bersama masyarakat melakukan aksi damai ke kantor DPRD Irja. Mereka memprotes

pelaksanaan Pepera pada 1969 dan hasil-hasilnya yang dinilai cacat hukum. Frits Ramandey yang memimpin aksi menyampaikan pernyataan sikap bahwa Pepera pada 1969 berlangsung penuh intimidasi, rekayasa, dan tidak jujur, serta merupakan pelanggaran HAM terhadap bangsa Papua. "Melalui aksi ini kami menyampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui DPRD bahwa kami hendak menolak hasil Pepera tersebut," katanya.

16 Juli

- Ketua Ikatan Usaha Informal Indonesia, Safari A.N.S., dalam kunjungannya ke Papua mengatakan bahwa keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan refleksi kekecewaan masyarakat atas ketidakadilan dan ketidakjujuran pejabat pemerintah, baik di daerah maupun di pusat. Menurutnya, pola pendekatan pembangunan di Papua selama ini lebih bersifat sentralistik dan monolitik serta penuh KKN. Akibatnya, masyarakat Papua yang dewasa dan semakin cerdas menuntut 'penipuan' publik tersebut dihapus dan haknya yang hilang dikembalikan.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas memerintahkan Kapolres Manokwari, Mayor (Pol.) Bambang Budi Santoso, untuk menangkap dan memeriksa Satgas Papua di Manokwari karena mengibarkan bendera Bintang Kejora tanpa bendera Merah Putih.

18 Juli

Tokoh masyarakat dan para pejuang Trikora yang dipimpin Elias Paprindey menemui Wapres Megawati. Mereka minta pemerintah mempertegas berbagai kebijakan yang telah diambil agar masyarakat di Irja tidak semakin terpecah-belah dan saling menuduh penghianat.

19 Juli

Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang, dalam pertemuannya dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Wamena, menghimbau masyarakat Papua agar dalam menyampaikan aspirasi tidak menggunakan kekerasan dan tetap hidup berdampingan dengan warga lain demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia meminta masyarakat untuk belajar dari pengalaman suku Indian di Amerika dan suku Aborigin di Australia yang musnah akibat

selalu melakukan perlawanan terhadap suku pendatang.

20 Juli

Warga transmigrasi SP VII dan VIII Bonggo, Jayapura, yang eksodus dan mengungsi di LBH Jayapura, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Irja sambil mengusung jenazah Sahri A. (51 th.), salah satu warga yang meninggal dunia. Dalam pertemuannya dengan Ketua DPRD Irja T.N. Kaiway, Wagub III Irja Abraham O. Atururi, dan Kakanwil Deptrans Irja Budi Sinulingga, warga mengajukan pernyataan sikapnya. Mereka mengatakan bahwa jenazah baru dapat dimakamkan apabila pemerintah memenuhi tuntutan mereka untuk dipulangkan ke daerah asal dan diberi ganti rugi selama diterlantarkan di lokasi transmigrasi.

23 Juli

Dalmas Polres Jayapura mengambil secara paksa jenazah Sahri A. yang sedang disemayamkan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Jayapura dan memakamkannya tanpa dihadiri oleh keluarga almarhum maupun warga transmigrasi lainnya.

24 Juli

Caretaker Gubernur Irja Musiran Darmosuwito, S.I.P. menyatakan, Pemda tidak mempunyai wewenang untuk memulangkan warga transmigrasi dari SP VII dan VIII Bonggo ke daerah asalnya, sebagaimana dituntut warga yang saat ini mengungsi di halaman LBH Jayapura. Ia mengatakan bahwa program transmigrasi diatur dengan keputusan presiden dan keputusan menteri. Namun pihaknya akan mencarikan jalan keluar yang lain dengan membujuk warga agar kembali menempati lokasi transmigrasi semula.

24 Juli

Presiden Abdurrahman Wahid — ketika berbicara di depan para komandan batalyon Brigif Kopassus dan Kostrad di Malang — menegaskan bahwa pemerintah akan menghindari penggunaan kekerasan di Irian Jaya termasuk membiarkan berkibarnya bendera Bintang Kejora sampai berlangsungnya sidang umum MPR 2000. Setelah itu semua bendera yang dikibarkan akan diturunkan.

25 - 26 Juli

Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengizinkan bendera Bintang Kejora dikibarkan memunculkan berbagai tanggapan:

- Menurut Ketua Komisi A DPRD Irja, Gim Perangin, pernyataan Presiden perlu dicermati secara hati-hati dan bijaksana oleh rakyat Papua karena dinilai mengandung unsur politik tersembunyi. Menurutnya, perlu dipertanyakan batasan waktu yang ditentukan Presiden. "Kata-kata biarkan hingga sidang umum dan akan dilarang lagi, itu perlu dicermati. Ada rencana apa sebenarnya di balik pembiaran menaikkan bendera Bintang Kejora di Papua? Kenapa Presiden tidak mengatakan agar bendera dikibarkan untuk seterusnya? Ini semua penuh dengan permainan politik."
- Wakil Ketua DPR-RI A.M. Fatwa berpendapat, tindakan Presiden yang mengizinkan pengibaran bendera selain Merah Putih adalah kecelakaan politik, dan sebagai wakil rakyat ia sangat menyayangkan sikap tersebut. "Harus dicari jalan untuk mengakhiri pengibaran bendera Bintang Kejora. Bila tidak, maka akan terus memotivasi Papua Merdeka."

26 Juli

Els-HAM Papua dalam jumpa persnya mengatakan bahwa potensi konflik di Papua sangat tinggi. Hal ini bisa disaksikan dari berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini banyak meresahkan masyarakat. Misalnya pemblokiran, penagihan liar dengan paksaan, serta merajalelanya permainan judi di mana-mana yang terkesan dibiarkan oleh aparat. Sementara pola "Pendekatan Kasih Sayang" yang diterapkan Polda Irja mengandung dualisme. Di satu sisi aparat melakukan pendekatan dialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, tapi di sisi lain aparat juga sewenang-wenang melakukan kekerasan yang turut membangun ketegangan di tengah masyarakat.

28 Juli

- Warga Sorong menolak untuk menerima pengungsi Ambon yang diangkut KM Dobonsolo. Mereka khawatir konflik yang terjadi di Maluku merembet ke Papua. Kapal pengungsi itu akhirnya tidak diizinkan merapat di pelabuhan dan para penumpangnya tidak bisa diturunkan.

- Polisi menembak lima warga sipil di pelabuhan Sorong hingga luka-luka. Peristiwa tersebut berawal dari bentrokan yang terjadi antara polisi dan warga yang sedang melakukan aksi damai untuk menolak pengungsi di pelabuhan bersamaan dengan tibanya KM Dobonsolo.
- Polisi melanjutkan tindakannya di malam hari dengan menurunkan semua bendera Bintang Kejora yang sedang dikibarkan, termasuk memporak-porandakan Posko Papua yang ada di komplek Yohan Sorong.

29 Juli

Warga Manokwari melakukan aksi unjukrasa dan menyatakan sikap menolak pengungsi. Mereka membentangkan spanduk di pelabuhan ketika kapal Dobonsolo hendak merapat. Mereka beralasan bahwa warga Manokwari merasa takut jika ada di antara pengungsi menyebarkan konflik Maluku di Manokwari atau Papua secara umum. Pihak Muspida bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat kemudian menyepakati untuk tidak menurunkan pengungsi di Manokwari.

30 Juli

- Seperti halnya di Sorong dan Manokwari, masyarakat di Jayapura juga menolak pengungsi Ambon dengan alasan yang sama.
- Kepala Litbang PGI Pdt. Phil Erari mengatakan bahwa PGI mengharapkan Pemda Papua, tokoh adat, dan agama agar membantu dan menerima para pengungsi Ambon demi pertimbangan kemanusiaan tanpa membedakan suku, agama maupun ras, sebagaimana yang diajarkan dalam iman Kristiani. Menurutnya para pengungsi itu telah menjadi korban dari sebuah konflik politik yang bernuansa agama dan etnik. Ia juga mengatakan bahwa PGI sangat memahami pergumulan masyarakat Papua dengan tuntutannya untuk merdeka dan keluar dari NKRI. Termasuk memahami peristiwa penembakan yang baru saja terjadi di Sorong, yang dinilainya sebagai sikap yang tidak menghargai demokrasi dan kebebasan menyatakan pendapat.

30 Juli

- Polres Sorong menahan tiga orang pendukung Papua Merdeka sebagai buntut dari peristiwa penembakan warga oleh polisi di

pelabuhan Sorong. Mereka ditangkap untuk dimintai keterangan. Ketiganya adalah Apolos Sewa, S.H. (Ketua Panel Papua Sorong), Alfaris Labagu (anggota Panel), dan Andi Way (Komandan Satgas Papua).

- Dalam kegiatan pelurusan sejarah Papua di Manokwari yang juga dihadiri oleh anggota Muspida Kabupaten Manokwari, masyarakat Manokwari menyatakan sikap menolak hasil Pepera pada 29 Juli 1969. Mereka menilai Pepera penuh rekayasa politik, intimidasi, dan intervensi.

Agustus

1 Agustus

- Akhirnya 1.248 orang pengungsi dari Ambon diterima dan diperbolehkan turun dari kapal setelah dilakukan pembicaraan yang alot. Herman Awom, baik sebagai moderator Presidium Dewan Papua (PDP) maupun sebagai Wakil Ketua Sinode GKI, menyatakan setuju dan menilai keputusan ini sebagai wujud sikap terbuka dan kasih.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas di Jayapura menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghukum anggota polisi yang mengeluarkan tembakan di Sorong dan mengakibatkan enam orang terluka. Menurutnya tembakan yang dikeluarkan oleh anggotanya itu masih tetap dalam kerangka tindakan keras yang terukur ketika menghadapi keadaan yang sangat terdesak.
- Penikaman terhadap anggota kompi Brimob Mimika, Bratu Yacob Seipon, yang diduga dilakukan puluhan oknum TNI di Timika, menyebabkan bentrokan antara Brimob dan TNI. Akibat bentrokan itu tujuh orang mengalami luka tembak. Di antaranya adalah seorang komandan Kodim dan dua anggota Kostrad.
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua, Marsono, mengatakan bahwa ada kurang lebih 80.000 orang angkatan kerja di Papua yang belum mendapatkan pekerjaan.
- Anggota Presidium Dewan Papua (PDP), Melkias Mandosir, mengimbau pemerintah Indonesia agar bertindak sportif untuk segera mengembalikan hak dan kedaulatan bangsa Papua.

2 Agustus

- Yohanes Ronsumbre, Sekretaris Panel Papua Biak Numfor, menyampaikan pesan dari Agus Alua (Sekretaris PDP) kepada masyarakat bahwa perjuangan bangsa Papua Barat tinggal selangkah lagi.
- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Tyasno Sudarto — melalui sambutan tertulis di Manokwari — menegaskan bahwa setiap prajurit TNI-AD yang berada di lingkup Kodam XVII/ Trikora agar tidak memberikan peluang terhadap upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya eksistensi NKRI dari Sabang sampai Merauke adalah keputusan bangsa yang final.

3 Agustus

- Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys H. Eluay menjelaskan bahwa lawatan sejumlah anggota PDP telah membawa hasil. "Pada 29 Juli 2000, kami melakukan pembicaraan konsolidasi antara PDP dengan pimpinan tertinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM), Zeth Yakop Pray, yang selama ini tinggal di luar negeri. Dari pertemuan itu kami punya komitmen yang sama yakni perjuangan kami tidak lagi menggunakan kekuatan fisik semata, tetapi akan terus dibangun melalui dialog, terutama untuk memperoleh pengakuan dan rekonsiliasi internasional," ujarnya.
- Acara penutupan kegiatan Safari Pelurusan Sejarah dan Peringatan 31 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilakukan di Jayapura. Kegiatan yang dihadiri sekitar 2000 orang itu menghasilkan pernyataan politik yang berisi tiga penolakan. Yakni: (a) menolak pelaksanaan dan hasil Pepera 1969, (b) menolak seluruh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pribadi dan kelompok yang mengikat bangsa Papua pada Indonesia, dan (c) menolak dengan tegas seluruh program pemerintah RI mengenai otonomi khusus bagi Tanah Papua.
- Masyarakat Kayu Pulau menggelar unjuk rasa di gedung DPRD untuk memprotes surat yang ditandatangani anggota dewan yang isinya mengatur penyelesaian hak ulayat kepunyaan mereka (antara lain menyangkut tanah yang ditempati gedung DPRD).
- Insiden di pelabuhan Sorong yang sedikitnya menimbulkan lima korban luka-luka dikecam Lembaga Independen Peduli Hak Asasi

Manusia Kabupaten Sorong. Menurut pendirinya, Agus Isir, penembakan itu adalah tindakan melanggar HAM yang mutlak mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait, karena telah menimbulkan korban di pihak yang tidak bersalah. Insiden itu juga dinilai ironis karena aparat keamanan sampai merangsek ke lingkungan perumahan warga, padahal insiden bermula di pelabuhan.

4 Agustus

Bendera Bintang Kejora yang semula dikibarkan setengah tiang di Lapangan Pendidikan Wamena akhirnya dinaikkan satu tiang penuh, sejajar dengan bendera Merah Putih.

5 Agustus

Pengungsi Ambon masih menyibukkan banyak masyarakat. Sebanyak 124 orang pengungsi itu diberangkatkan ke Tual. Muncul pula isu mengenai "pasukan jihad" yang masuk ke Jayapura. Namun isu itu berhasil diredakan oleh pernyataan Kapolda, Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas, bahwa tidak ada pasukan jihad yang menumpang di KM Rinjani.

7 Agustus

- PDP melalui Sekjennya, Thaha Moh. Alhamid, menolak memenuhi undangan untuk menghadiri pertemuan dengan presiden. Alasannya, selain agenda pertemuan itu tidak jelas, juga untuk menghindari kemungkinan "persoalan Papua" dijadikan komoditi politik.
- Dalam suatu pertemuan di Jayapura, Sekjen Menko Polkam R. Karyono menyatakan, "Dialog merupakan salah satu cara untuk menindaklanjuti masalah yang terjadi di daerah-daerah."
- Komandan Satgas Papua di Wamena, Elias Baminggem, ditangkap polisi setelah dua kali menolak surat panggilan. Akibatnya Kota Wamena menjadi tegang hingga banyak kegiatan masyarakat sempat terhenti.
- Usai menerima jabatan baru sebagai Kepala Kanwil Depperindag Papua, Yusuf Wally, S.E. menyatakan tekadnya untuk segera memberdayakan pengusaha lokal, dalam hal ini putra daerah Papua.
- Satu kompi (100 anggota) Brimob BKO (Bawah Kendali Operasi) tiba di Kota Rusa Merauke. Mereka didatangkan dari Sulawesi Tenggara.

8 Agustus

- Filep Karma, mantan tapol/napol Papua, mengecam Presidium Dewan Papua (PDP) karena ketuanya mengatakan bahwa bangsa Papua tetap mendukung Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Selain itu Ketua PDP juga menyatakan bahwa niat kelompok tertentu untuk menurunkan presiden di tengah jalan perlu dicegah agar tidak terjadi gejolak yang hebat, termasuk di Papua. Apabila ini terjadi, maka bersamaan dengan itu rakyat Papua menyatakan lepas dari NKRI atau merdeka penuh. Pernyataan tersebut menurut Filep tidak menghormati amanat rakyat Papua mengenai aspirasi "M". "Pertanyaannya, apakah Papua 'batal' merdeka bila Gus Dur tetap jadi Presiden?" kata Filep.
- Penurunan bendera Bintang Kejora di Kota Singkong Nabire, dinilai sangat arogan oleh masyarakat suku Mee di Jayapura, serta tidak sesuai dengan konsep "Kasih Sayang" Kapolda Irja. Mereka juga mempertanyakan penangkapan lima anggota Satgas Papua di Nabire.

9 Agustus

Setelah Presidium Dewan Papua (PDP) mendapat kecaman, Pdt. Herman Awom menjelaskan bahwa dukungan PDP pada Gus Dur bersifat politis. Dikatakannya bahwa tugas yang diberikan oleh kongres kepada PDP yang harus dijalankan terus-menerus adalah memajukan dialog. Menanggapi harapan masyarakat, Pdt. Herman menegaskan, "Jangan ada yang beranggapan bahwa pada 1 Desember 2000 bangsa Papua sudah merdeka. Ini tidak benar. Yang benar adalah apa yang sudah diamanatkan kepada PDP melalui Kongres akan dipertanggungjawabkan. Sejauh mana PDP telah menjalankan tugas-tugasnya."

10 Agustus

- Musyawarah Daerah I Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP) berakhir dan menghasilkan beberapa program jangka pendek. Yakni, menolak UU Otonomi Daerah di Papua, merealisasikan UU/Perda tentang perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, klarifikasi sejarah Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada 1969, serta pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh pelosok Papua. Sedangkan program jangka panjangnya adalah pemberdayaan SDM generasi muda melalui pendidikan pola asrama, beasiswa,

dan kurikulum muatan lokal.

- Komandan Korem 172/PWY Kolonel Infantri S.K. Ginting Munthe menyatakan bahwa pihaknya akan *memback-up* polisi untuk mengamankan tiga daerah perbatasan. Namun pihaknya tetap akan mendahulukan pendekatan dialogis. Ditanya tentang situasi politik di Jayawijaya yang akhir bulan Juli sempat menghangat akibat ulah oknum Satgas Papua yang sering melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap warga sipil, Danrem menjawab bahwa saat ini situasi di Jayawijaya sudah relatif aman dan kondisi politiknya sudah cukup kondusif.
- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Mimika, ada lima oknum anggota Kostrad Yonif 412 yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Bratu Yacob Seipon, anggota kompi Brimob Mimika.

11 Agustus

- Aksi *long march* yang dilakukan sejumlah pemuda yang tergabung dalam Satgas Merah Putih di Jayapura dan Argapura ditanggapi serius oleh masyarakat Jayawijaya yang tergabung dalam Satgas Koteka. Satgas Koteka melakukan konvoi menggunakan lima truk di sekitar Jayapura, dan berhenti di Posko Induk Satgas Papua di Gedung Dewan Kesenian Irja. Setelah melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian, mereka memutuskan untuk kembali ke markasnya di Angkasapura. Dalam perjalanan pulang, Satgas Koteka mengalami kecelakaan mobil di tikungan Angkasa. Peristiwa itu berbuntut pengeroyokan sopir truk oleh massa hingga tewas karena dianggap bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut.
- Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat Manokwari, Barnabas Mandacan, kedatangan satu kompi pasukan Brimob dari pusat ke Manokwari sebenarnya ditolak oleh masyarakat. Penolakan itu sudah disampaikan kepada Muspida, khususnya kepada Kapolres. Namun pasukan sudah dalam perjalanan sehingga tidak mungkin lagi ditolak.

12 Agustus

- DPRD Tk. I Irja sudah berminggu-minggu sibuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan gubernur baru.
- Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid (yang disampaikan

dalam sidang MPR di Jakarta) yang memberi izin pengibaran bendera Bintang Kejora untuk meredam timbulnya kekacauan di Papua mendapat tanggapan cukup kritis dari sejumlah tokoh Papua. Menurut salah seorang anggota DPRD Tk. I Papua, Ny. Deborah Muabuay, pernyataan semacam itu justru akan menimbulkan kekacauan.

13 Agustus

❖ Pernyataan dan pandangan umum fraksi-fraksi dalam Sidang Tahunan (ST) MPR yang intinya (a) pemerintah harus menindak tegas setiap gerakan separatis, (b) tidak merubah nama Irian Jaya menjadi Papua, dan (c) menurunkan bendera Bintang Kejora setelah ST, membuat banyak orang marah termasuk Presidium Dewan Papua (PDP). Buntutnya Ketua PDP, Theys H. Eluay, bersama Wakil Ketua PDP, Tom Beanal, merencanakan akan memimpin aksi ke kantor DPRD dan gubernur pada 15 Agustus 2000. Mereka juga meminta agar semua Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kantor. Melalui konferensi pers, PDP juga menyampaikan tujuh pernyataan:

1. Pengalaman penderitaan selama 38 tahun.
2. Pandangan umum fraksi-fraksi dalam ST MPR telah menunjukkan bahwa lembaga tertinggi negara itu telah merubah misinya dari gerbong demokrasi menjadi 'gerbong provokasi'.
3. Pengungsi Maluku yang tersebar di Papua harus diperhatikan oleh pemerintah pusat.
4. Petinggi-petinggi militer diminta untuk menarik semua pasukan non-organik, dan menghentikan segala provokasi melalui kekuatan kontra Satgas Merah Putih yang identik dengan milisi di Timor Timur.
5. Sesuai dengan keputusan Kongres Papua 2000, Papua Barat dimerdekakan dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Merupakan sesuatu yang wajar dalam tata krama internasional jika perjuangan bangsa Papua yang menuntut pengembalian hak dan kedaulatan politik 1 Desember 1961 mendapat dukungan dari negara-negara serumpun Melanesia.
7. Segenap rakyat Papua agar menjaga ketenangan dan keamanan.

- Theys H. Eluay menjelaskan bahwa perjuangan bangsa Papua didukung penuh dua negara di Pasifik, Vanuatu dan Nauru. Sementara menanggapi kritik terhadap PDP yang dinilai hanya jalan-jalan dan enak-enak saja, Herman Awom menyatakan bahwa mereka tidak main-main dan telah bekerja keras untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh kongres.
- Kapolda Irja mengumumkan bahwa program sosialisasi pelarangan membawa senjata tajam dimulai minggu ini. Hal itu disampaikannya untuk menindaklanjuti tragedi di Lembah Sunyi Angkasa, Jayapura, yang menewaskan sopir truk karena dikeroyok massa. Kapolda juga meminta dukungan dari PDP.

14 Agustus

- Sekelompok orang Papua mengadakan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR Jakarta. Sementara di Jayapura, menanggapi rencana aksi unjuk rasa besar-besaran, Kapolda menyatakan bahwa pihaknya siap bertindak jika nanti terjadi keributan.
- Keprihatinan terhadap perkembangan akhir di Papua diungkapkan oleh lembaga-lembaga agama bersama LSM di Papua. Dalam analisanya dijelaskan bahwa 'persoalan Papua' sudah dijadikan komodoti politik oleh para elit di Jakarta untuk memojokkan Presiden Abdurrahman Wahid. Selain itu, kemungkinan besar pemerintah pusat akan memberi akses pada militer untuk menangani masalah Papua secara militer. Di bawah ini pernyataan mereka yang disampaikan dalam sebuah siaran pers:
  1. Nama Papua merupakan identitas kultural penduduk asli Tanah Papua, dan bendera Papua yang dikibarkan adalah simbol ungkapan aspirasi yang terpendam selama rezim Orde Baru. Segala bentuk represi diprotes secara tegas.
  2. Menolak amandemen terhadap pasal 29 UUD 1945 agar tidak memungkinkan bagi negara mengintervensi kebebasan beragama dan konflik agama.
  3. Pemerintah dan lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah, diminta menghormati dialog. Menuntut agar pasukan non-organik dari TNI/Polri segara ditarik kembali.
  4. Keinginan MPR untuk menetapkan UU Otonomi Khusus bagi Papua diminta untuk ditunda.
  5. PDP, tokoh agama, tokoh adat, Satgas Papua, Satgas Merah

Putih, dan masyarakat umum dihimbau agar mengutamakan dialog secara mendasar dalam penyelesaian konflik di Papua.

15 Agustus

- Unjuk rasa besar-besaran diadakan untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat Papua. Kota Jayapura menjadi tegang. Banyak toko ditutup dan kantor gubernur nampak sangat sepi. Namun tidak terjadi insiden dalam peristiwa itu. Pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Irja, Drs. John Ibo, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Papua bukan menghendaki otonomi, melainkan ingin merdeka.
- Aksi unjukrasa serupa dilakukan masyarakat Papua di Biak dan Manokwari dengan tujuan menolak otonomi dan tetap pada aspirasi Papua Merdeka.
- Koordinator Kontras Papua Petrus Ell, S.H. mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai ditemukannya tiga kuburan misterius di SP VI Bonggo, Kabupaten Jayapura.
- Menurut Bupati Timika, T.O. Potereyauw, banyak guru meninggalkan tempat tugasnya. Sebab utamanya adalah lambannya pengiriman gaji bulanan mereka. Ia juga menegaskan, situasi pendidikan di Papua sangat kurang memuaskan karena kurangnya tenaga pengajar yang dikirim ke desa-desa terpencil.

16 Agustus

Setelah melalui pembahasan alot, DPRD Tk. I Papua akhirnya menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Selain itu disetujui pula pembentukan 14 kabupaten baru dan tanggal 5 Februari sebagai "hari libur daerah" (tanggal masuknya misionaris Kristen Protestan yang pertama di Papua). Rapat dihadiri oleh semua anggota DPRD, Muspida Tk. I, dan anggota PDP. Di antaranya Theys H. Eluay, Tom Beanal, dan Pdt. Herman Awom.

17 Agustus

- HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dirayakan di berbagai tempat secara sederhana. Perayaan kali ini tidak ditandai kegiatan pesta rakyat seperti perlombaan dan pertandingan, pertujukan seni budaya, ibadah, dan yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

- Untuk meningkatkan kelancaran pembangunan di Propinsi Papua dicanangkan suatu program pembangunan cepat *(crash program)*. Program ini akan menelan dana sebesar Rp 1 trilyun yang dipusatkan di setiap daerah tingkat II dengan alokasi dana Rp 28 milyar per kabupaten. Menurut *Caretaker* Gubernur Marsekal (Purn.) Musiran Darmosuwito, S.I.P. dan Wagub I Papua J.R.G. Jopari, *crash program* yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat menyelesaikan setiap masalah pembangunan yang terjadi di Papua.

18 Agustus

- Satgas Papua menyelenggarakan lokakarya selama tiga hari di Gedung Sarinah Jayapura untuk membenahi diri. Acara pembukaannya dihadiri anggota PDP, Kapolda, Pangdam, dan Wagub III Abraham O. Atururi. Ketiga tokoh ini juga menjadi penyaji makalah sabagai bahan diskusi.
- Sidang Tahunan MPR yang berlangsung di Jakarta ditutup. Pembacaan hasilnya diinterupsi salah seorang anggota majelis yang memprotes dipertahankannya jatah kursi anggota TNI/Polri hingga 2009.
- Kapendam XVII/Trikora, Mayor Infantri R. Siregar, M.Pd., menegaskan bahwa untuk menjaga nama baik lembaga maka anggota TNI tidak diperbolehkan melakukan bisnis dengan membawa atribut korpsnya.
- Menurut koordinator pengungsi Jayapura, Drs. Max W. Mandang, sebanyak 637 orang pengungsi asal Maluku masih tertampung di berbagai tempat di Jayapura. Mereka masih menunggu proses pemulangan ke daerah asalnya karena dana penanggulangan pengungsi belum turun.

19 Agustus

- Satgas Papua mengakhiri lokakarya dan menghasilkan keputusan untuk memantapkan organisasi. Ketua PDP, Theys H. Eluay, menilai penting hasil itu karena Satgas Papua harus ikut ambil bagian dan bertanggungjawab terhadap masa depan perjuangan Papua.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas juga meyambut baik keputusan Satgas Papua untuk menjadi organisasi yang indepen-

den, mandiri, dan kuat. "Boleh-boleh saja, dan keberadaannya tidak lain sebatas organisasi kemasyarakatan," katanya.

- Ketua Pengurus Satgas Papua Boy Eluay menyatakan bahwa bukan maksud Satgas menjadi tandingan aparat keamanan, melainkan hanya sebagai mitra.
- Sementara Presiden Abdurrahman Wahid melakukan syukuran setelah berakhirnya Sidang Tahunan MPR, rombangan masyarakat Biak yang dipimpin anggota DPRD, Willem K. Rumpaidus, menyerahkan pernyataan kepada DPRD Tk. I di Jayapura. Pernyataan tersebut berisi tuntutan: [1] Mendesak pemerintah RI untuk mencabut kembali sikap diskriminatif dan totaliter yang tercermin dalam pandangan fraksi-fraksi MPR; [2] Mendesak pemerintah RI untuk menarik kembali pasukan non- organik yang meresahkan masyarakat dan hanya menimbulkan konflik; [3] Menuntut hak politik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional; [4] Menolak otonomi daerah dalam bentuk apapun; [5] Pemerintah agar konsisten dengan sikap awalnya, yakni mempersilakan pengibaran bendera Papua berdampingan dengan bendera Merah Putih.
- Sebuah pertemuan massal yang direncanakan oleh Muspida Jayawijaya dan dihadiri 20.000 orang di Wamena sempat terhambat. Pasalnya jalan-jalan menuju tempat pertemuan diberi penghalang oleh Panel Jayawijaya dan Satgas Papua yang tidak setuju dengan pertemuan tersebut. Akhirnya pertemuan dapat berlangsung dengan hanya dihadiri 200 orang saja, serta mengeluarkan lima pernyataan: [1] Pemerintah daerah melarang keras masyarakat membawa senjata tajam, termasuk panah dan busur di jalan-jalan; [2] Pemerintah daerah melarang keras pihak Panel maupun Satgas untuk melakukan kegiatan apapun di Jayawijaya; [3] Pemerintah daerah mengharapkan pihak keamanan bertindak tegas atas segala tindakan penghalangan jalan dan penindasan dalam bentuk apapun; [4] Pemerintah daerah akan mengadakan razia penduduk, menangkap, serta memulangkan penduduk non lembah ke daerahnya masing-masing tanpa terkecuali (karena ada sebagian penduduk yang membuat onar di Wamena); [5] Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keamanan untuk bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini membuat onar.

- Nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani pada 5 Juli 2000 di New Orleans antara pihak Freeport dan masyarakat Kamoro serta Amungme mengenai sumberdaya sosio-ekonomi, HAM, hak ulayat, dan lingkungan akhirnya diumumkan di Jayapura. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Tom Beanal, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa), Yakobus Owamena, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), dan James Moffet, Presiden PT Freeport.

21 Agustus

- Kapolda Irja S.Y. Wenas mengatakan, karena Papua kaya dengan sumberdaya alam, wajarlah jika dunia internasional sangat tertarik pada Papua. Tetapi hal itu perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan keamanan.
- Menanggapi keberadaan Satgas Papua, *Caretaker* Gubernur Irja Marsekal (Purn.) Musiran Darmosuwito, S.I.P. menyatakan bahwa adanya Satgas tidak menjadi masalah dan harus menjadi contoh yang baik. Sementara Kapolda Irja S.Y. Wenas menilai baik keberadaan Satgas jika bisa menjaga lingkungan masing-masing, sehingga masyarakat tidak merasa takut atau resah. "Namun perlu diingat bahwa Satgas hanya boleh bertindak dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya," katanya.
- Drs. Willy Mandowen, mediator PDP, menilai pemakaian kata 'separatis' sebagai ungkapan yang sangat diskriminatif bagi orang Papua. "Ini merupakan ucapan dari orang-orang pusat yang tidak mengerti persoalan dan sejarah Papua," katanya.
- Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Sofyan Yoman, menyatakan penyesalannya atas sikap Satgas dan Panel Papua yang telah memboikot pertemuan yang diprakarsai Muspida Jayawijaya.
- Selain memperingatkan agar dana *crash program* diawasi secara ketat, *Caretaker* Gubernur Irja menegaskan pentingnya peranan TNI-AD dalam pelaksanaan pembangunan di Papua karena keterampilan dan peralatan yang dimilikinya.
- Ketua DPRD Tk. I Papua T.N. Kaiway, S.H. menjelaskan bahwa usulan perubahan nama Propinsi Irja menjadi Papua siap diserahkan kepada MPR/DPR-RI.

22 Agustus

- Terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Gereja Emmanuel Sorong. Pengibaran yang dilakukan pada subuh hari itu mengakibatkan bentrokan antara sekelompok masyarakat dengan aparat. Sedikitnya tiga orang tewas, delapan mengalami luka tembak, dan tiga orang lagi mengalami luka bacok. Terjadinya kekerasan dan penembakan itu sangat disayangkan oleh mahasiswa Sorong yang ada di Jayapura. Mereka menilai pola "Pendekatan Kasih Sayang" yang sering diungkapkan Kapolda sangat diragukan penerapannya di lapangan.
- Giliran Kodam XVII/Trikora, melalui Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) R. Siregar, M.pd., menyerukan kewaspadaan terhadap incaran pihak luar, termasuk dunia internasional, pada kekayaan Papua. Menurutnya hal itu dapat memanaskan situasi di Papua.
- Satgas Papua di Wamena menuntut murid-murid untuk memberi hormat kepada anggota Satgas. Jika tidak, maka murid-murid itu disuruh merayap. Para orangtua murid merasa keberatan dan meminta aparat untuk membubarkan posko Satgas.
- Brimob di Timika dijadikan batalyon. Berarti kini Papua memiliki dua batalyon Brimob. Satu di Jayapura dan satu lagi di Timika.

23 Agustus

- Mahasiswa dan DPRD memprotes tindakan aparat dalam insiden pengibaran bendera di Sorong. Protes juga datang dari Komando Strategis TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi papua Merdeka). Sementara itu pihak keamanan telah menahan 36 orang warga. Berbagai pihak minta agar dibentuk tim investigasi. Namun Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, menegaskan bahwa aparat tidak bersalah dalam insiden itu. Menurutnya dari awal justru massa yang bersalah.
- Manuel Kaisiepo terpilih menjadi Mentri Muda Urusan Percepatan Pengembangan Wilayah Timur Indonesia. Sedangkan Freddy Numberi lengser dari Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid.
- Dana *crash program* tetap hangat dibicarakan. Menurut Sekjen PDP, Thaha Moh. Alhamid, dana itu perlu dijaga baik-baik, mengingat dana tersebut adalah hak rakyat dan bukanlah suatu pemberian.
- Sejumlah wakil masyarakat mengecam keras militerisasi di Timika

untuk melindungi perusahaan Freeport.

- Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen), Frans Wospakrik, menyatakan bahwa tinggal selangkah lagi bagi Faperta Manokwari menjadi Universitas Papua (Unipa).

24 Agustus

Tim Investigasi insiden Sorong telah terbentuk dan dipimpin oleh Wagub III Irja, Abraham Atururi. Sementara itu Kota Sorong masih tegang. Sofyan Yoman, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Irja, meminta pihak Kapolda agar jangan hanya menerima laporan sepihak dan jangan terburu-buru menyimpulkan hanya untuk membela anggotanya. "Semua perlu dibuktikan, dan yang salah tetap harus ditindak," katanya. Pernyataan Kapolda bahwa anggotanya tidak perlu diperiksa lagi, dinilai Sofyan sangat ironis, tidak profesional, serta menunjukkan sikap arogan dari pimpinan penegak supremasi hukum.

25 Agustus

- Walaupun aksi pengibaran bendera di Sorong dilakukan tanpa sepengetahuan PDP, namun PDP tetap mengutuk tindakan aparat dalam insiden itu. Sementara itu 28 warga telah diarahkan menjadi tersangka berkaitan dengan insiden tersebut.
- Kapolres Jayapura, Daud Sihombing, mengemukakan bahwa keberadaan Satgas Papua hingga saat ini belum sah. Menurutnya hanya ada lima organisasi keamanan yang sah saat ini, yaitu Satpam (Satuan Pengamanan), Kamra (Keamanan Rakyat), Polsus (Polisi Khusus), PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan Kamling (Keamanan Lingkungan).

26 Agustus

- Kabinet baru RI (pasca Sidang Tahunan MPR) dilantik dan diberi kesempatan 100 hari untuk membuktikan diri.
- Ir. Abraham Kaya, Kepala Seksi Konservasi Kanwil Dephutbun Papua, menilai wajar jika para Jagawana (penjaga hutan) dilatih semi-militer selama enam bulan, karena tugas mereka di lapangan sangat beresiko.
- Karena diancam akan di-PHK (pemutusan hubungan kerja) ratusan karyawan PT Sele Raya (perusahaan perminyakan) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sorong.

27 Agustus

Presidium Dewan Papua (PDP) memulai lawatannya ke luar negeri. Kali ini mereka berkunjung ke Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat untuk melakukan lobi internasional. Antara lain agar mereka bisa menghadiri sidang tahunan PBB.

28 Agustus

- Ratusan senjata tajam (sajam) disita dari tangan warga di Wamena dalam sebuah operasi. Kapolres Jayawijaya D. Suripatty menjelaskan bahwa operasi tersebut dilakukan dengan bantuan TNI dan sesuai dengan perintah Kapolda Irja No. 1044/2000, tanggal 14 Agustus 2000. Menurut Kapolres, sambutan dari masyarakat umum sangat antusias.
- Tokoh pemuda di Sorong meminta klarifikasi dari Muspida mengenai insiden berdarah pada 22 Agustus 2000. Di samping itu mereka menyatakan penolakannya terhadap masuknya pasukan Polri/TNI dan menuntut agar Pangdam dan Kapolda menyeret para pelaku peristiwa 27 Juli dan 22 Agustus ke pengadilan. Selain itu mereka juga menuntut anggota Muspida Sorong meletakkan jabatannya. Mereka menilai peristiwa 22 Agustus itu adalah hasil konspirasi para pejabat lokal untuk meredam aspirasi masyarakat yang ingin merdeka.

29 Agustus

- Lawatan elite PDP ke luar negeri ditanggapi Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diinginkan masyarakat hanya akan menguntungkan para pemimpinnya serta tidak akan membawa keuntungan bagi masyarakat yang ada di bawah. "Masyarakat Papua tidak boleh dibodohi terus," katanya. Namun Sekjen PDP, Thaha Alhamid, membantah persepsi seperti itu dan menjelaskan bahwa apa yang diperbuat PDP tidak lain menjalankan amanat yang diberikan rakyat melalui Mubes dan Kongres Rakyat Papua, bukan untuk kepentingan pribadi.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas menegaskan bahwa pengamanan di perbatasan sudah tidak lagi menjadi tanggungjawab polisi. Pihak TNI yang menggantikan dan memiliki peranan di sana," ujarnya.

- Menurut Kapolres Jayapura, Daud Sihombing, apa yang diduga sebagai tiga kuburan misterius di Bonggo hanyalah gundukan tanah. Mungkin sengaja dibuat. Yang jelas bukan kuburan tiga warga yang dinyatakan hilang. Namun Koordinator Kontras Papua, Petrus Ell, S.H. berpendapat, "Apapun isi di dalamnya, gundukan itu harus dibongkar, sehingga tidak lagi menjadi pertanyaan bagi semua pihak."

30 Agustus

- Keberangkatan sejumlah anggota PDP ke luar negeri yang dipimpin Theys H. Eluay (yang juga melibatkan Tom Beanal, Willy Mandowen, Yorris Rawayai, Frans A. Yoku, Herman Awom, Beatrix Koibur, dan Nick Messet) mendapat reaksi keras dari Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK). Protes keras ini ditunjukkan dengan pemalangan kantor sekretariat PDP.
- Pernyataan Kapolda bahwa keberadaan Satgas Papua hanya menyenangkan para pemimpinnya dan tidak membawa keuntungan bagi masyarakat Papua ditanggapi dengan keras oleh Komandan Satgas Papua, Boy Eluay. Menurutnya pernyataan Kapolda itu sengaja dibuat untuk meredam aspirasi dan perjuangan bangsa Papua.
- Ketua Sinode GKI, Pdt. Herman Saud, M.Th., mengatakan bahwa peluang intervensi dari pusat dalam pemilihan gubernur Papua dan wakilnya masih tetap ada.
- Ketua Bappeda Papua Frans R. Kristantius mengatakan bahwa dukungan TNI dalam pelaksanaan *crash program* senilai Rp 410 milyar tidak disertai misi lain, kecuali misi kemanusiaan.
- Sikap ngotot sebagian anggota parlemen Belanda untuk membawa konflik horisontal di Maluku ke sidang PBB mulai mereda. Menurut Menlu Alwi Shihab sikap parleman Belanda itu melunak setelah mendapat penjelasan darinya soal kerugian-kerugian yang bisa timbul jika mereka *ngotot* mengajukan kasus itu ke sidang PBB. "Intinya kita tidak ingin hubungan Belanda dengan Indonesia retak karena persoalan ini," katanya.

September

1 September

- Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha M. Alhamid menerangkan, sebuah tim yang dipimpin langsung Ketua PDP, Theys H. Eluay, bersama anggota PDP lainnya telah bertemu dengan Dewan Uskup PNG dan Solomon Island pada 26 Agustus 2000. Lalu pada 27 Agustus 2000 bertemu juga dengan pemimpin-pemimpin Lutheran di PNG. Ikut dalam pertemuan Frans Alberth Joku dan Pdt. Herman Awom, S.Th. (Moderator PDP), Ny. Bertriks Koibu (anggota PDP), Simon Nick Meset, Rex Rumakiek dan Andi Ayamiseba (anggota Panel Pasifik). Dalam pertemuan tersebut Dewan Uskup PNG maupun Pemimpin Gereja Lutheran turut mendukung kebenaran dan keadilan yang sedang diperjuangkan rakyat Papua di Papua Barat. Mereka juga mendorong dilakukan-nya dialog terbuka dan demokratis sebagai pendekatan perjuangan rakyat di Papua.
- Kasus korupsi merupakan kasus dominan yang ditangani Pengadilan Tinggi Irja selama 2000, walaupun skala masih kecil. Menurut Kepala Pengadilan Tinggi Irja, Armulan Siregar, S.H., uang negara yang dirugikan masih tergolong kecil, atau masih di bawah Rp 50 juta. Tapi ia belum mengetahui apakah kejaksaan sudah menelitinya secara terperinci, sehingga semua kasus uang negara yang disalahgunakan dapat diketahui seluruhnya. Saat ini kasus korupsi yang sudah diputuskan hampir mencapai 23 kasus. "Namun semuanya masih dalam kelas ringan dan belum dapat dikategorikan sebagai kasus korupsi kelas atas," katanya.

3 September

Sekjen PDP Thaha Alhamid menerangkan bahwa delapan Anggota Kongres Amerika Serikat telah menyurati Presiden Bill Clinton untuk mendesak PBB meninjau kembali Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1961, sesuai dengan hasil Kongres Papua 2000 lalu di Jayapura. Anggota Kongres juga meminta aparat keamanan Indonesia untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi tuntutan rakyat. Surat dengan tembusan kepada Sekjen PBB Kofi Anan dan sejumlah instansi resmi pemerintah Amerika lainnya itu, salinannya

diberikan kepada Wakil Ketua PDP Tom Beanal, dan Mediator PDP Willy Mandowen.

4 September

- PDP dengan dipimpin ketuanya, Theys H. Eluay, melakukan sosialisasi hasil Mubes dan Kongres Papua 2000 serta agenda perjuangan Papua kepada masyarakat Papua di Canbera, Australia. Menurut Sekjen PDP, Thaha Alhamid, rombongan selanjutnya akan berangkat ke New York untuk menghadiri sidang tahunan PBB. Di New York mereka juga merencanakan melakukan pertemuan dengan delegasi negara-negara Pasifik untuk meminta dukungan agar masalah Papua dibicarakan dalam sidang PBB.
- Drs. Verry Pioh, dosen Universitas Cendrawasih (Uncen), menanggapi positif surat desakan dari anggota Kongres Amerika Serikat. Surat desakan itu menurutnya merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan PDP dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat Papua seperti yang diamanatkan dalam Mubes serta Kongres Rakyat Papua 2000.
- Bupati Merauke John Gluba Gebze mengungkapkan bahwa kebutuhan akan otonomi daerah tidak dapat ditawar-tawar lagi dan sesegera mungkin harus diwujudkan. Menurutnya, berbagai fenomena dan gejolak yang terjadi akhir-akhir ini di sejumlah daerah di tanah air menyadarkan kita bahwa otonomi menjadi prasyarat penting dalam mendukung terciptanya reformasi total.

5 September

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengatakan bahwa ia tidak yakin jika delegasi Presidium Dewan Papua (PDP) bisa masuk dalam forum sidang tahunan PBB karena mereka tidak mendapat undangan resmi. Hal itu disampaikannya menanggapi keberangkatan rombongan PDP yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Theys H. Eluay, ke New York untuk mengikuti sidang tahunan PBB.
- Di Manokwari pasukan Brimob secara paksa menurunkan bendera Bintang Kejora yang dikibarkan masyarakat di kawasan Rendani, Sanggeng. Penurunan bendera itu disertai tembakan sehingga membuat warga Manokwari marah. Warga kemudian memblokir jalan-jalan protokol dengan menggunakan pohon, drum, batu-batuan, dan benda-benda lain. Akibatnya aktivitas masyarakat

terhenti total. Warga juga melakukan aksi ke kantor DPRD Tk. II Manokwari menuntut pasukan Brimob ditarik dari Manokwari.

- Don A.L. Flassy yang dituduh terlibat kasus makar penaikan bendera Bintang Kejora pada Juli 1999 yang sama, divonis bebas dari semua tuntutan hukum oleh majelis hakim yang mengadili perkaranya di Pengadilan Negeri Jayapura. Sebelumnya Sem Yaru, tertuduh dalam kasus yang sama, juga dibebaskan demi hukum.

6 September

- Ketegangan antara Brimob dan masyarakat Manokwari yang terjadi sehari sebelumnya, mendorong mahasiswa asal Manokwari di Jayapura melakukan aksi ke gedung DPRD Tk. I Irja. Mereka menuntut pasukan Brimob ditarik dari Manokwari karena selama ini dinilai banyak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengatakan bahwa kondusifnya suasana kota Fakfak saat ini adalah buah dari kerja sama antara aparat dan kelompok Merah Putih yang disebutnya sebagai *silent majority*. Menurutnya kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Fakfak masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak ingin memisahkan diri. "Mulai saat ini kota Fakfak harus bersih dari bendera Bintang Kejora dan pemakaian atribut Bintang Kejora lainnya, seperti baju atau kaos. Jika masih ditemukan, aparat tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan," katanya. Ia menambahkan, kelompok masyarakat yang menuntut pemisahan Papua dari NKRI-lah yang selama ini menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

7 September

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menilai telah terjadi banyak pelanggaran terhadap kesepakatan penaikan bendera Bintang Kejora di Papua, yang ujung-ujungnya menimbulkan bentrokan antara warga dan aparat, seperti yang terjadi di Sorong dan Manokwari. Oleh karena itu Kapolda meminta PDP untuk menertibkan para pendukungnya.
- Anggota DPRD Kabupaten Fakfak, Isak Bahama, yang melakukan kunjungan kerja ke Desa Kwagas, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, dipukuli massa karena dianggap akan menyosialisasikan otonomi.

8 September

Sebanyak 27 orang warga Desa Kwagas, Kokas, ditangkap pihak Polres Fakfak untuk diproses secara hukum, menyusul kasus penganiayaan yang menimpa anggota DPRD Fakfak, Isak Bahama.

10 September

Lokakarya HAM Internasional di Biak, yang diselenggarakan oleh Sinode GKI Irja bekerjasama dengan United Evangelical Mission (UEM), mengeluarkan Deklarasi HAM Biak 2000. Deklarasi itu memuat seruan agar UEM dan jaringannya mengagendakan advokasi HAM di Papua. Antara lain berupa seruan kepada lembaga-lembaga internasional untuk mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan Papua Barat, terutama menyangkut Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada 1969 serta kejahatan kemanusiaan yang terjadi di sana. Berbagai topik aktual di Papua juga dibahas dalam forum ini. Misalnya soal pengembangan kesejahteraan, lingkungan hidup, penentuan nasib sendiri, kejahatan melawan kemanusiaan, serta soal rekonsiliasi dan perdamaian.

11 September

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemda Irja Drs. Suryanto Sriwardoyo menuding pers yang terbit di Papua pemberitaannya lebih condong membela perjuangan aspirasi kemerdekaan Papua Barat dan mendiskreditkan pemerintah RI. Menurutnya tindakan tersebut sangat tercela karena mendukung disintegrasi bangsa dan mengkhianati bangsa dan negara RI.

12 September

- Tudingan Kepala Biro Humas Pemda Irja bahwa pers di Papua mengkhianati negara RI, dinilai Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Papua, Kris Ansaka, merupakan penilaian yang subyektif dan tidak didasari pemahaman mengenai kemerdekaan dan fungsi pers yang sesungguhnya. Ia menambahkan bahwa pernyataan itu merupakan intervensi terhadap kemerdekaan pers dan merupakan upaya mempertahankan rezim Orde Baru di Papua.
- Bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di Posko Satgas Papua Wilayah X Hamadi, diturunkan oleh serombongan pasukan penga-

manan yang terdiri dari semua Kasat, Kapolres Jayapura, dan tiga truk pasukan Brimob.

13 September

- Aksi penurunan bendera Bintang Kejora yang terus dilaksanakan oleh aparat dan pemerintah ditanggapi tokoh masyarat Jayawijaya, S. Sofyan Yoman. Ia menghimbau, untuk menghindari jatuhnya korban masyarakat sebaiknya membiarkan Bintang Kejora diturunkan. "Bintang Kejora yang berkibar di udara bisa diturunkan pemerintah RI, namun Bintang Kejora yang berkibar secara abadi di hati dan pikiran rakyat Papua tidak akan pernah diturunkan," katanya. Baginya ini merupakan kenyataan sejarah dan nasionalisme yang telah terpatri di jiwa rakyat Papua. Langkah penting yang mesti diambil pemerintah sekarang adalah menyelenggarakan dialog nasional.
- Tiga pesawat tempur Hawk 200 yang siap digunakan untuk kunjungan operasi Alpa dan Omega 2000, tiba di bandara Biak. Komandan Skadron I Lanud Supadio mengatakan bahwa pihaknya datang ke Biak untuk menbantu operasi Alpa dan Omega. Sementara itu Kapten Elias mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir melihat kehadiran tiga pesawat itu.

15 September

Perkelahian terjadi di Jayapura antara anggota Brimob dan Kopassus. Akibatnya satu orang mengalami luka tembak dan satu lainnya terkena benturan hingga luka di kepala.

17 September

Danramil Jayapura Utara tewas akibat penganiayaan dalam pekelahian antara anggota Brimob dan Kopassus. Lima belas anggota Dalmas yang diduga terlibat dalam kasus perkelaian itu diinterogasi oleh provost.

18 September

- Para pejabat teras Kodam dan Polda Irja mengadakan tatap muka untuk membahas kasus perkelaian yang melibatkan kedua lembaga. Kapolda menjelaskan bahwa Kodam dan Polda akan menyelesaikan kasus perkelaian ini menurut jalur hukum.
- Perkelaian antara anggota polisi dan TNI menurut Wakil Ketua

DPRD Papua, John Ibo, menunjukkan bahwa keduanya belum dewasa dalam melaksanakan fungsinya.

19 September

- Presidium Dewan Papua (PDP) telah mengagendakan kunjungan diplomasi internasional ke beberapa negara Pasifik seperti PNG, Australia, dan berakhir di New York, Amerika Serikat. Untuk keperluan itu moderator PDP, Pdt. Herman Awom, telah berangkat ke Amerika mendahului para tokoh PDP yang lain.
- Sebanyak 86 orang pelintas batas dipulangkan ke keluarganya masing-masing setelah sebelumnya untuk sementara ditampung di Gedung Irianita Wamena. Mereka dipulangkan dengan dibekali alat-alat pertanian dan bahan makanan.

21 September

- Theys H. Eluay dan rombongan kunjungan diplomasi internasional tiba di Jayapura serta menyampaikan hasil kunjungannya kepada masyarakat Papua. Disebutkan bahwa rombongan PDP telah mengunjungi Vanuatu, negara anggota PBB, dan dengan surat keputusan resmi Perdana Menteri Barak Sope, tiga anggota PDP dapat mengikuti Sidang Umum PBB.
- Johan Sawaki, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang baru diwisuda, ditikam dengan sangkur milik aparat TNI hingga meninggal dunia. Oknum TNI dituding sebagai pelaku penikaman tersebut. Atas kejadian itu mahasiswa kemudian menutup ruas jalan Abepura - Sentani.
- Polemik tentang penggunaan dana *crash program* untuk studi banding tidak menemukan penyelesaian. Namun tim studi banding tetap berangkat menjalankan rencananya.

22 September

- Jenazah Johan Sawaki diusung dari rumah duka ke tempat pemakaman dalam satu barisan panjang massa mahasiswa dan keluarga korban.
- Kepala Kanwil Departemen Hukum, Perundang-undangan dan HAM Irja, M.B. Aronggear, B.A., menghimbau agar Polri dan TNI bijaksana. Ia mengatakan, sudah tepat jika dibentuk tim independen untuk mengusut kasus Johan sampai tuntas. Tim independen

itu penting untuk mengembalikan kepercayaan mahasiswa dan masyarakat dalam mengungkapkan kebenaran dalam peristiwa berdarah tersebut, serta untuk mengindari kecurigaan atas validitas hasil analisa. Dalam pengungkapan kasus ini pelakunya harus dapat terungkap dan diseret ke kursi pesakitan untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

24 September

- Theys H. Eluay menghimbau para calon gubernur Irja agar memperhatikan aspirasi merdeka yang sekarang justru menjadi masalah fundamental di papua. Theys juga meminta agar para calon harus kritis, tegas, dan bersikap bijaksana.
- Pengamat politik dari Universitas Cendrawasih (Uncen), Efraim Kambu, mengatakan bahwa walaupun UU No. 22/1999 mewajibkan calon gubernur terpilih harus berkonsultasi ke pusat, namun bukan berarti pejabat pusat punya hak untuk mengintervensi dan menentukan gubernur terpilih.
- Senat Mahasiwa Uncen mengeluarkan seruan politik berkaitan dengan proses pemilihan gubernur Irja. Seruan politik itu berisi empat butir. *Pertama*, kepada para calon gubernur Papua periode 2000-2005 dan wakilnya yang bersaing dalam bursa 12 besar, agar tetap bersaing dalam koridor demokrasi dan reformasi, serta saling menghargai sesuai tatanan nilai budaya orang Papua. *Kedua,* kepada segenap masyarakat Papua perlu disampaikan bahwa ke-12 calon gubernur dan wakilnya yang tersaring adalah putra-putra terbaik. Oleh karena itu perlu dihormati dan dihargai sesuai dengan mekanisme yang telah ditempuh DPRD Papua. Masyarakat dihimbau agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu karena hal itu akan membuat konflik di antara sesama warga. Masyarakat juga dihimbau agar bersama-sama menjaga stabilitas daerah, agar proses demokrasi menjelang suksesi gubernur dapat berjalan dengan baik. *Ketiga*, kepada seluruh mahasiswa agar tetap mempertahankan independensi dengan lebih mengedepankan rasionalitas dan obyektifitas dalam mencermati dan menyikapi proses yang sedang berlangsung. Dengan demikian agenda reformasi yang telah diperjuangkan tetap dapat dipertahankan. *Keempat*, kepada seluruh anggota DPRD Papua dalam mengemban amanat rakyat harus menghindari praktek-praktek

kolusi, *money politics*, dan kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi. Dalam mengemban aspirasi rakyat harus mengedepankan kejujuran dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan.

25 September

Kasus Manokwari berdarah pada 25-26 September 1999 lalu, kembali diangkat oleh Direktur Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Ch. Warinussi. Menurutnya, setelah dilakukan investigasi, telah terjadi pelanggaran yang cukup berat. Pelaku penembakan dan mantan Kapolres Manokwari, Letkol R.E. Hutabarat, agar segera diadili sesuai dengan hukum.

26 September

Petugas kepolisian dari Polsek Onggaya, Merauke, menembak seseorang yang bernama Paskalis karena diduga sebagai pembuat keonaran. Saat ditembak, korban sedang dalam keadaan mabuk.

Oktober

1 Oktober

- Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Irja, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa ada indikasi 'permainan uang' dalam pemilihan gubernur Irja. Buktinya ada cek senilai Rp 25 juta yang diberikan kepada tiga angota DPRD Tk. I Irja dari PDI-Perjuangan untuk memenangkan salah satu calon. Selain itu mereka juga dijanjikan akan diberi mobil, rumah, dan fasilitas lainnya.
- *Careteker* Gubernur Irja Marsekal Pertama (Purn.) Musiran Darmosuwito, S.I.P. mengatakan bahwa pengucuran dana *crash program* tahap II akan terhambat akibat penggunaan dana tahap I yang tidak tepat sasaran. Karenanya ia menghimbau kepada setiap Kepala Daerah Tk. II agar melaksanakan *crash program* dengan baik sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan, kemelaratan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
- Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi) Irian Jaya dalam

pemeriksaannya menemukan penyimpangan penggunaan dana Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Dari 22 Puskesmas yang diperiksa di Kabupaten Manokwari terdapat empat Puskesmas yang menggunakan dana tersebut dengan tidak tepat sasaran. Sebagian dana itu oleh penanggungjawabnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Para pelaku penyalahgunaan dana tersebut berjanji akan segera mengembalikannya. Sementara sisanya malah ditumpuk dan tidak digunakan.

- Anggota Badan Pekerja MPR-RI dari Papua, Antonius Rahail, mengatakan bahwa otonomi khusus yang akan dijalankan di Papua harus benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat Papua. Oleh karena itu dalam pembahasan tentang otonomi perlu melibatkan komponen masyarakat, dan perlu keterbukaan dalam pelaksanaannya. "Dalam suasana demokrasi ini saya berharap masyarakat di negeri ini lebih sejahtera, agar tidak ada pemikiran seolah-olah mereka menjadi tamu di negerinya sendiri," katanya.

2 Oktober

- Praktisi hukum di Jayapura, Bernard Akasian, S.H. dan James Simanjuntak, S.H., mengatakan bahwa jika memang ada indikasi kuat adanya *money politic* dalam pemilihan gubernur maka bisa langsung dilaporkan kepada polisi. Pernyataan itu merupakan tanggapannya terhadap dugaan *adanya money politics* di DPRD dalam proses pemilihan gubernur Irja. Menurutnya *money politic* merupakan tindak pidana penyuapan dan harus diproses secara hukum.
- Menanggapi penyalahgunaan dana JPS Bidang Kesehatan di sejumlah Puskesmas di Manokwari, yang pelakunya hanya diminta mengembalikan dana yang disalahgunakan, menurut Direktur LBH Jayapura, Demianus Wakman, S.H., harus diproses secara hukum demi tegaknya supremasi hukum, apapun alasannya. Karena, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang banyak. Menurutnya jika seseorang melakukan perbuatan yang diduga korupsi lalu berjanji segera mengembalikannya, jangan terlalu gampang dipercaya.

3 Oktober

- DPRD Tk. I Irja memilih Drs. J.P. Solossa, M.Si. sebagai gubernur

Irja periode 2000-2005 dan Constant Karma sebagai wakilnya.

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menegaskan bahwa pihaknya akan menurunkan bendera Bintang Kejora yang sedang berkibar di seluruh Irja jika sampai batas waktu 19 Oktober 2000 masih dikibarkan. Menurutnya kebijakan itu diambil berdasarkan keputusan Sidang Tahunan MPR-RI 2000 dan perintah Kapolri yang juga disetujui oleh Wapres Megawati.
- Menanggapi pernyataan Kapolda, Presidium Dewan Papua (PDP) berinisiatif melakukan pertemuan dengan Muspida Tk. I Irja di Gedung Negara, Jayapura[3]. Moderator PDP, Pdt. Herman Awom, menerangkan bahwa dalam pertemuan itu pihaknya meminta kelonggaran untuk mempertanyakan kebijakan tersebut secara langsung kepada Presiden Abdurrahman Wahid. "Instruksi untuk pengibaran bendera Bintang Kejora datang dari Presiden pada rapat kabinet terbatas dua bulan lalu dan diumumkan kepada masyarakat luas oleh Menteri Sekretaris Negara, Marsilam Simanjuntak. Oleh karena itu, kami minta waktu pada Polda untuk berbicara langsung dengan Presiden, termasuk kepada Menko Polsoskam dan Kapolda sendiri yang sudah menyetujuinya," kata Herman Awom. Permintaan kelonggaran waktu juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat Papua di daerah-daerah guna menghindari jatuhnya korban di pihak rakyat yang tidak berdosa.

4 Oktober

Kepala Dinas Kesehatan Tk. I Irja dr. A.J. Dimpudus diperiksa Inspektorat Wilayah Propinsi (Irwilprop) Tk. I Irja atas dugaan korupsi senilai ratusan juta rupiah di instansinya. Menurut Ketua Tim Pemeriksa Irwilprop M.F. Renyaan S.E., di depan tim pemeriksa dr. Dimpudus mengakui secara terbuka keterlibatannya dalam kasus ini.

5 Oktober

- Ketua PDP Theys H. Eluay menilai perintah penurunan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua yang dikeluarkan Kapolda Irja bukan merupakan kebijakan daerah. Kebijakan itu merupakan perintah dari pemerintah pusat di Jakarta yang sebetulnya

[3] Hasil kesepakatan Muspida dengan PDP dapat dibaca pada bagian lampiran.

bertentangan dengan sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang mengizinkan pengibaran bendera tersebut. "Kami punya pemikiran bahwa penurunan bendera ini bukan salah TNI atau POLRI. Mereka hanya melakukan tugas. Walaupun demikian kami tetap akan berjuang secara damai dan penuh cinta kasih. Kami berjuang dengan tetap sopan dan bukan untuk saling membenci. Kami akan ke Jakarta untuk bertanya kepada Presiden, dan Presiden tidak boleh menipu rakyat Papua," ungkapnya.

- Sementara itu Kapolda mengatakan bahwa sesuai hasil rapat antara jajaran Muspida Tk. I dan PDP di Gedung Negara malam sebelumnya, upaya penurunan bendera masih harus menunggu hasil pertemuan antara PDP dengan Menko Polsoskam atau Presiden.

6 Oktober

- Berdasarkan perintah dari Kapolda Irja, aparat Brimob dari Polres Wamena dengan dibantu TNI menurunkan bendera Bintang Kejora secara paksa di sejumlah tempat. Tindakan itu menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan 34 orang meninggal dunia, 88 orang luka-luka, sejumlah lainnya ditangkap dan ditahan polisi, serta menyebabkan sebagian besar warga mengungsi ke lokasi yang dianggap aman. Bahkan di antara mereka ada yang keluar dari Wamena, menuju Jayapura dan Merauke.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menegaskan, Presidium Dewan Papua (PDP), terutama Panel Wamena, harus bertanggung jawab atas peristiwa Wamena berdarah. Menurutnya, masyarakat yang mengibarkan bendera di Wamena juga terlalu berlebihan karena bendera yang berkibar di kota sangat banyak, tidak seperti yang disetujui oleh Presidium. Padahal Presidium telah menetapkan hanya ada satu bendera Bintang Kejora yang berkibar di setiap kabupaten.
- Irwilprop Irja menyerahkan berkas pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Tk. I Irja, dr. Dimpudus, dan enam orang stafnya dalam kasus dugaan korupsi kepada Wagub I Irja Drs. J.R.G. Jopari, M.A. Setelah menerima berkas pemeriksaan Wagub menegaskan bahwa dirinya juga telah menandatangani surat penyerahan berkas itu kepada Kejaksaan Negeri Jayapura melalui Kejaksaan Tinggi Irja untuk segera ditindaklanjuti ke tingkat pengadilan. Untuk mempermudah proses hukum, pihak-pihak yang diperiksa

akan dinon-aktifkan dari tugasnya untuk sementara waktu.

7 - 8 Oktober

Muncul berbagai pendapat mengenai insiden Wamena pada 6 Oktober 2000:

- Direktur LBH Jayapura Demianus Wakman, S.H., mengatakan bahwa polisi harus bertindak profesional dan tidak semata-mata menjadi alat politik dan kekuasaan. "Yang terjadi adalah rakyat melawan pemerintah karena ada ketidakpuasan di pihak rakyat. Seharusnya aparat menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat, bukan jadi alat politik dan kekuasaan. Kalau aparat ada di pihak pemerintah dan melakukan perlawanan terhadap rakyat, lalu rakyat harus berlindung ke mana?"
- Anggota MPR-RI dari Papua, Aleks Hesegem, mengatakan bahwa dia sebagai wakil rakyat asal Jayawijaya sangat menyesalkan munculnya bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. "Yang saya ketahui, ada pertemuan antara Presidium dan Kapolda yang membahas soal penurunan bendera. Tapi mengapa Kapolres Jayawijaya sudah bertindak duluan, padahal hasil pertemuan itu belum ada. Apakah pihak keamanan bertindak berdasarkan komando dari pimpinannya? Karena itu saya minta agar PDP dan Kapolda bertanggung jawab atas peristiwa di Wamena. Selain itu, pelaku penembakan harus diadili di pengadilan Wamena, jangan dibawa keluar," tegasnya.
- Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua, Yan Ayomi, B.A., mengatakan bahwa polisi perlu mengendalikan dirinya dalam menghadapi massa. Rakyat bukan musuh negara, dan tidak bisa ditembak begitu saja. Seharusnya polisi bertindak dengan baik dan benar serta memahami psikologi masyarakat Papua terhadap bendera Bintang Kejora. Polisi juga harus memahami dengan benar latar belakang historis rakyat Papua agar dalam bertindak tidak sewenang-wenang.

8 Oktober

❖ Pemda Jayawijaya minta bantuan dokter sukarela untuk merawat korban kerusuhan dan penderita penyakit lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena. Menurut Sekretaris Daerah

Jayawijaya, Drs. Yason Mabuay, saat ini RUSD hanya punya dua orang dokter karena dokter lainnya menyelamatkan diri dan keluar dari Wamena setelah terjadi kerusuhan.

- Ketua Sinode GKI Irja Pdt. Herman Saud, M.Th. menilai dana *crash program* tahap I sebesar Rp 410 milyar yang diberikan pemerintah untuk pembangunan di Irja merupakan bentuk perhatian yang patut dihargai dan perlu dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan adanya *crash program,* terutama yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, masyarakat Papua diharapkan bisa bebas dari ketertinggalan dan keterbelakangannya selama ini.

9 Oktober

- Menurut Ketua DPR-RI Akbar Tanjung, kerusuhan Wamena dipicu oleh pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengizinkan pengibaran bendera selain Merah Putih di Irja. Ia mengimbau aparat untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengibarkan bendera selain bendera Merah Putih. "Aparat negara harus menjaga simbol-simbol kenegaraan. Pengibaran bendera selain Merah Putih jelas tidak bisa kita setujui," ujarnya.
- Ratusan masyarakat dan mahasiswa mendatangi rumah Ketua PDP, Theys H. Eluay, di Sentani, untuk menyampaikan pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya mereka meminta pertanggungjawaban PDP dan Polri atas peristiwa Wamena berdarah. Pemda Tk. I dan Pemda Jayawijaya harus segera mengupayakan penarikan pasukan organik dan non-organik dari Wamena. Terakhir mereka meminta Kapolres Jayawijaya agar dicopot dari jabatannya. Massa melanjutkan aksinya menuju DPRD Irja di Jayapura sambil membentangkan spanduk dan panflet yang berisi berbagai tuntutan.
- Para pimpinan Gereja di Jayapura mengeluarkan penyataan sikap dan seruan bersama sebagai tanggapan terhadap tragedi kemanusiaan di Wamena dan sekitar Lembah Baliem.[4]

10 Oktober

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menegaskan, Kepala Suku Muai dan Pikey telah meminta Satgas dan Panel Papua di

[4] Isi pernyataan Pimpinan Gereja-Gereja dapat dilihat pada bagian lampiran.

Wamena untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang mereka lakukan, menyusul terjadinya kerusuhan Wamena yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Menurutnya permintaan kedua kepala suku tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan pemeriksaan Panel dan Satgas Papua di Wamena oleh aparat.

- James Simanjuntak, S.H. dan Zainal Sukri, S.H. (pengacara di Jayapura) mengatakan bahwa dari sisi hukum baik anggota polisi yang melakukan penembakan maupun anggota masyarakat yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, dan pembakaran dalam kerusuhan Wamena sama-sama telah melanggar hukum. Keduanya harus diproses secara jujur dan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia menyarankan agar polisi tidak sekedar menyelesaikan konflik secara politis, misalnya dengan menurunkan bendera, melainkan juga harus menindak mereka yang melanggar hukum.
- Bupati Manokwari, Mulyono, memberikan hukuman kepada enam camat di wilayahnya yang menyalahgunakan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp 334.66 juta. Sedianya dana itu harus disalurkan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu dalam bentuk penyaluran beras murah (beras operasi pasar khusus). Hukuman yang dijatuhkan berupa penurunan jabatan, dan uang yang disalahgunakan diperintahkan untuk dikembalikan melalui pemotongan gaji.

11 Oktober

- Ketua Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia non-Papua (GSINP) Wamena, Fitra Tudin, mengungkapkan penyesalannya terhadap sikap Pemda Jayawijaya yang menelantarkan nasib para pengungsi pasca kerusuhan. Ia mengatakan pihaknya sudah hampir satu minggu ditampung dan diselimuti ketakutan. Tapi tidak ada tanda-tanda dari Pemda Jayawijaya untuk mengulurkan bantuan. Bahkan menengokpun belum pernah.
- Sementara itu, bertempat di gedung DPRD Jayawijaya, GSNP menyampaikan tuntutannya. Mereka minta Pemda Jayawijaya mengevakuasi perempuan dan anak-anak warga non-Papua keluar dari Wamena karena mereka sudah tidak merasa aman lagi. Mereka juga menuntut Pemda memberikan jaminan makanan dan keamanan bagi warga yang sedang mengungsi. Menjawab tuntutan

tersebut Ketua DPRD Jayawijaya, Budiman Kogoya, mengatakan bahwa Pemda tidak merencanakan membawa pengungsi warga non-Papua keluar dari Wamena. Menurutnya para pengungsi itu bagian dari warga negara RI yang berhak tinggal di Wamena dan mendapatkan jaminan keamanan yang layak.

- Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, seusai bertemu dengan Wapres Megawati, menegaskan bahwa pemerintah RI tidak akan memberi toleransi lagi kepada aksi-aksi separatis di Irian Jaya. Termasuk kepada Satgas Papua, Presidium Dewan Papua, dan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora. Menurutnya niat baik pemerintah yang mengizinkan pengibaran bendera yang tidak memanifestasikan kedaulatan politik, ternyata mengalami distorsi dan dianggap sebagai lambang kedaulatan Papua. Sementara keberadaan PDP menurutnya akan ditinjau kembali dan diatur secara jelas. Karena, tidak ada satupun organisasi di negeri ini yang memiliki kedaulatan sendiri dan bisa berkomunikasi dengan dunia luar untuk mencari dukungan politik atau rencana lain yang diduga kuat bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12 Oktober

- Menanggapi pernyataan Menko Polsoskam, Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti sikap pemerintah dengan menurunkan semua bendera Bintang Kejora yang sedang berkibar di seluruh Tanah Papua serta membubarkan posko-posko Satgas Papua. Pihaknya telah memerintahkan semua Kapolres, pertama-tama agar menulis surat pemberitahuan kepada seluruh pemimpin dan Panel Papua.
- Menindaklanjuti perintah Kapolda Irja, Kapolres Jayapura, Superintendent Daud Sihombing, S.H. mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat peringatan kepada Ketua PDP, Theys H. Eluay. Surat itu memerintahkan Ketua PDP agar segera membubarkan Satgas Papua dan Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang sedang berlatih perang-perangan di Bonggo, Jayapura. PDP juga harus segera membubarkan posko-posko Satgas Papua sampai batas waktu 16 Oktober 2000. Apabila PDP tidak menghiraukan perintah ini,

jajaran Polres Jayapura akan melakukan pembersihan posko dan membubarkan Satgas Papua.

13 Oktober

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengemukakan bahwa saat ini PDP sudah dicap "merah" dan seluruh anggotanya tidak boleh keluar dari Indonesia. Pernyataannya itu didasarkan pada pernyataan pemerintah pusat yang akan meninjau kembali keberadaan PDP. Ia menegaskan, PDP hanya punya dua pilihan: sebagai wadah aspirasi merdeka dan harus dibubarkan, atau tetap berjalan sebagai wadah untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Papua.
- Menanggapi suasana pasca insiden Wamena, Wakil Ketua DPRD Irja Ben Vincent Djeharu meminta supaya pihak penguasa dan elite politik harus mengenyampingkan kepentingannya masing-masing. Menurutnya yang perlu diutamakan adalah menolong para korban yang sedang menderita. Ia juga meminta pihak kepolisian membuka kembali isolasi wilayah di Wamena untuk memudahkan penyaluran bantuan kemanusiaan.

15 Oktober

- Sekjen PDP Thaha Alhamid mengemukakan bahwa perubahan peran PDP ditentukan oleh mekanisme pembentukan badan tersebut. "PDP mau dirubah atau tidak, kita kembalikan lagi pada mekanismenya, yakni lewat Mubes dan kemudian Kongres. Sebab di sanalah badan ini dibentuk. Keputusannya ada pada masyarakat. Tanya pada mereka. Tetapi kalau kita menggunakan kekuatan untuk membubarkan presidium, maka tindakan itu sama saja tidak menghargai demokrasi," ujarnya.
- Dalam kunjungannya ke Wamena bersama jajaran Muspida Tk. I, *Caretaker* Gubernur Musiran Darmosuwito, S.I.P., menegaskan bahwa mulai saat ini tidak ada lagi gerakan-gerakan yang berbau separatis, seperti gerakkan Papua Merdeka. Jika tetap dilakukan, maka tidak akan dibiarkan oleh aparat keamanan.

17 Oktober

Berkaitan dengan kebijakan Kapolda Irja yang akan menurunkan

bendera Bintang Kejora di seluruh Papua, telah dicapai kesepakatan bersama antara Presidium Dewan Papua (PDP) dan Muspida Tk. I Irja dalam pertemuan di Gedung Negara Jayapura. Isi kesepakatannya: rencana tersebut ditunda sampai ada hasil pembicaraan antara PDP dan Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta; bendera yang masih berkibar di setiap kabupaten hanya dipusatkan di kediaman ketua LMA setempat. Selebihnya harus diturunkan dan PDP sendiri akan melakukan penurunan sejumlah bendera yang dinilai berlebihan di Merauke dan Serui.

18 Oktober

- Untuk mengetahui situasi politik yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, lima anggota DPR-RI yang dipimpin A.M. Fatwa melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Tk. I Irja di Jayapura. Pada pertemuan tersebut beberapa anggota DPRD mengemukakan alasan mengapa masyarakat Papua menuntut merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan itu, menurut mereka, seharusnya didialogkan antara tokoh-tokoh Papua dan pemerintah pusat di Jakarta.
- *Caretaker* Gubernur Irja Musiran Darmosuwito, S.I.P. mengaku pasrah atas penggunaan dana *crash program* yang tidak sesuai peruntukannya. Karena, dana itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemda Tingkat II dan belum adanya sistem pengawasan yang baik. Ia memberi contoh pemanfaatan dana *crash program* yang tidak benar, seperti yang digunakan anggota DPRD Kota Jayapura untuk melakukan studi banding ke luar Papua.
- Menteri Pertahanan Muhammad Mahfud M.D., dalam rapat kerjanya dengan Komisi I DPR-RI, mengatakan bahwa pemerintah harus menindak tegas gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka karena aktivitasnya sudah tergolong makar. Ia menambahkan, pihaknya banyak mendapat masukan dari para tokoh agama dari berbagai daerah bahwa gerakan seperti di Irja merupakan fenomena yang secara hukum agama dapat dianggap melawan pemerintah yang sah dan hukumannya berat.
- Wakil Ketua DPRD Irja John Ibo menghimbau masyarakat Papua agar menilai secara proporsional keputusan penurunan bendera Bintang Kejora untuk menghindari jatuhnya korban di pihak warga

yang tidak berdosa. Menurutnya, apa untungnya jika tetap mempertahankan bendera Papua berkibar dan korban berjatuhan, sementara perjuangan belum selesai. Atau lebih baik bendera diturunkan dan tetap berkibar di dalam hati setiap orang Papua serta perjuanganpun tetap berjalan.

- Ketua Komisi E DPRD Irja Ny. Hulda Wanggober mengungkapkan bahwa penggunaan dana *crash program* selama dua bulan ini tidak sesuai dengan tujuannya. Menurutnya dana itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, agama, sosial, dan perekonomian rakyat. Tapi dalam pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan. Bahkan ada yang digunakan untuk pembangunan fisik. "Apakah sebuah bangunan bisa diselesaikan dalam jangka waktu hanya dua bulan?" katanya.

19 Oktober

- Berkaitan dengan kerusuhan Wamena pada 6 Oktober 2000, seorang anggota PDP dan empat orang anggota Panel Jayawijaya, masing-masing Pdt. Obet Komba, Murjono Murip, Yafet Yelemaken, Amelia Yigibalon, dan Herson Wenda, dipanggil dan diperiksa Polres Jayawijaya.
- Berkaitan dengan maraknya aksi penyegelan terhadap berbagai sarana fisik yang ada di Jayapura oleh masyarakat pemilik tanah adat, anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Habel M. Suwae, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan menanggapinya secara serius dengan menganggarkan dana khusus untuk ganti rugi kepada masyarakat adat. Diusulkan juga agar dibentuk panitia penyelesaian sengketa tanah adat yang beranggotakan dari unsur pemerintah, legislatif, LSM, adat, agama, dan kepolisian.

22 Oktober

- Menanggapi perkembangan politik di Papua dewasa ini, Anggota Pokja Hubungan Sipil-Militer, Pdt. Phil Erari, menyarankan lembaga agama, LSM, dan kaum intelektual harus berperan aktif membantu menciptakan suasana yang kondusif. Selain itu otonomi khusus yang diperuntukkan bagi Papua perlu diberi muatan lokal sehingga aspirasi rakyat yang berkembang bisa terakomodasi dengan baik. Ia juga menghimbau aparat Brimob untuk berhenti

menggunakan cara-cara militer dalam mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat. Sebaliknya kepada masyarakat Papua ia meminta agar memperjuangkan aspirasinya melalui jalan dan jalur yang benar dan menghindari cara-cara yang tidak simpatik.

- Rukun Keluarga Jayawijaya (RKJ) di Jayapura menolak jika masyarakat Wamena dicap sebagai penjahat perang, pembunuh, dan anggapan negatif lainnya oleh warga lain menyusul terjadinya insiden Wamena pada 6 Oktober 2000. Sesepuh RKJ, Demas Patty, S.Pd., mengatakan bahwa insiden Wamena memang merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan oleh siapapun dan pelakunya harus dihukum. "Tetapi insiden itu bukan tindakan warga Wamena secara keseluruhan, karena kami juga bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai serta saling menghargai," ujarnya. Drs. Thadeus Mulait, tokoh Jayawijaya lainnya yang juga dosen STFT Fajar Timur, menambahkan bahwa orang Wamena memang suka berperang. Tetapi perlu dipahami, apa latar belakang mereka berperang. Biasanya mereka berperang karena adanya ketidakadilan, ketidakbenaran, atau ada tindakan yang merendahkan harkat dan martabat mereka.

23 Oktober

- Pernyataan Anggota Pokja Hubungan Sipil-Militer, Pdt. Phil Erari, tentang prilaku aparat Brimob, ditanggapi Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas. Menurut Kapolda apa yang dilakukan Brimob selama ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau Brimob harus mengurangi kekuasaan, maka kejahatan akan merajalela. Apa yang dilakukan setiap anggotanya sudah sesuai perintah, dan Brimob bukanlah militer. Siapa saja yang mau berbicara masalah tugas, wewenang, dan kekuasaan kepolisian, termasuk Brimob di dalamnya, menurutnya harus mengetahui peraturan yang ada dan tidak *asbun* (asal bunyi). "Kalau Brimob harus *menyetop* kekuasaan yang diberikan, berarti sama saja dengan Hansip," tegasnya.
- Setelah melakukan kunjungan kerja di Papua, anggota DPR-RI A.M. Fatwa meminta Presiden Abdurrahman Wahid bersikap tegas terhadap masalah Irian Jaya. Menurutnya sikap tegas ini diperlukan agar pernyataan-pernyataan para pejabat tidak saling dipertentangkan. Misalnya pernyataan Wapres dan Kapolri dipertentang-

kan dengan pernyataan Presiden yang sebelumnya telah mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

25 Oktober

Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dukungan Partai Buruh Australia (ALP) terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat — yang diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Presiden ALP dan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jakobus Rumbiak — semakin mempersulit normalisasi hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Ia menegaskan, Papua Barat atau Irian Jaya adalah wilayah RI yang disahkan oleh hukum internasional. Jika Partai Buruh dan Dewan Buruh Australia menggugatnya, maka itu merupakan bentuk campur tangan atas kedaulatan Indonesia.

26 Oktober

Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menerangkan, dalam pertemuan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan Presidium Dewan Papua yang diwakili They H. Eluay, yang dihadiri juga oleh Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang dan Kapolda sendiri, secara jelas Presiden telah melarang bendera Bintang Kejora berkibar di seluruh Tanah Papua. Maka bendera akan tetap diturunkan.

27 Oktober

- Seusai shalat Jumat di Mesjid Baiturahman Istana Negara, Presiden Abdurrahman Wahid menjelaskan hasil pertemuannya dengan tokoh Papua Merdeka, Theys H. Eluay. Menurut Presiden, Theys telah gagal karena mempolitisir bendera Bintang Kejora dari simbol kultural menjadi simbol politik. Ia mengizinkan bendera Bintang Kejora dikibarkan sebatas untuk menghormati aspirasi masyarakat Papua, dan pengibarannya hanya sebagai simbol kultural, bukan sebagai simbol politik yang menjurus pada disintegrasi bangsa.
- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura, Demianus Wakman, S.H., mengingatkan pemerintah sebagai pelaksana mandat rakyat seharusnya bertanggungjawab tehadap aspirasi apa saja yang berkembang. Pemerintah jangan hanya menuduh separatis dengan tanpa bukti hukum yang jelas. Hal itu diungkapkannya menanggapi sikap Pemda Irja yang akan menindak tegas

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat gerakan separatis, seperti gerakan Papua Merdeka. Menurutnya istilah separatis merupakan stigma penguasa yang diberikan kepada setiap bentuk aksi yang dilakukan masyarakat, termasuk kepada PNS yang melawan ketidakadilan. Oleh sebab itu, pribadi atau kelompok yang diberi cap tersebut perlu dimusnahkan.

30 Oktober

- Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono di Jayapura menegaskan kembali bahwa pemerintah telah melarang pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh Irja. Pemerintah juga menolak keinginan masyarakat untuk merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Alasannya, baik pengibaran bendera Bintang Kejora maupun nama Papua mengandung makna politik dan telah diposisikan sebagai simbol kedaulatan bangsa.
- Kapolres Jayapura Superintendent Daud Sihombing, S.H. memerintahkan Satgas Papua mengosongkan Gedung Kesenian Irja Jayapura (yang selama ini dijadikan Posko Induk Satgas Papua) dalam waktu 3 x 24 jam. Menurut Kapolres, perintah itu dilakukan semata-mata untuk mengembalikan fungsi yang sebenarnya dari gedung tersebut yang merupakan aset pemerintah daerah. Jika perintah ini tidak ditaati maka pihaknya akan mengambil alih gedung secara paksa.
- Sekjen PDP Thaha Mohammad Alhamid menjelaskan bahwa Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang melangsungkan pertemuannya yang ke-31 di Kiribati, secara khusus telah memasukan masalah Papua Barat dalam komunike bersama 16 kepala negara anggota forum. Dalam Komunike itu diserukan kepada pemerintah RI dan pihak yang mau memisahkan diri dari NKRI supaya menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai melalui dialog dan konsultasi. Selain itu PIF juga mendesak agar semua pihak dapat menahan diri dan menghormati hak asasi manusia semua penduduk Papua Barat.

31 Oktober

- Theys H. Eluay bersikeras tidak mau bertemu dengan Muspida untuk membicarakan rencana penurunan bendera Bintang Kejora sebelum pelantikan gubernur definitif dilakukan. Sebaliknya

Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas menegaskan bahwa pertemuan itu tidak dapat ditunda-tunda lagi dan harus dilaksanakan pada 1 November 2000.

- Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua ditolak oleh Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) atas nama Bangsa Indonesia. Penolakan itu membuat berang anggota DPRD Papua. Menurut mereka, yang berwenang merubah nama itu adalah Mendagri dan Presiden, bukan Menko Polsoskam.
- Anggota DPRD Jayawijaya kecewa dengan kunjungan Menko Polsoskam dan Staf TNI ke Wamena karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan satu katapun.

November

1 November

- Pertemuan antara Muspida Tk. I Irja, PDP, dan Kapolda yang membahas rencana penurunan bendera dianggap tidak mencapai hasil yang diharapkan, sehingga masih harus dilanjutkan pada 9 November 2000.
- Sejumlah ibu-ibu melakukan unjukrasa di Mapolres Jayapura menuntut agar rencana pengosongan Gedung Kesenian Irja Jayapura (DKIJ) ditinjau kembali.
- Korban banjir di Perumnas IV Padang Bulan menilai bantuan yang seharusnya diberikan kepada mereka belumlah diberikan secara tuntas. Mereka menggelar unjukrasa di kantor Departemen Sosial untuk menuntut penjelasan.
- Latihan penerbangan tiga pesawat tempur TNI-AU jenis Sky Hawk A-A4, yang sementara bermarkas di Biak, menimbulkan kegelisahan masyarakat Biak.
- Polres Jayapura menangkap tujuh oknum yang diidentifikasi sebagai anggota Satgas Papua. Mereka berusaha merampas uang milik sebuah perusahaan yang dikawal oleh dua anggota polisi dalam suatu perjalanan.

2 November

- Pernyataan Gubernur Papua yang akan menindak para PNS yang terlibat gerakan "M" membuat marah Ketua PDP, Theys H. Eluay.

Theys menegaskan, jika penindakan itu benar-benar dilakukan maka PDP akan mengambil sikap.

- PT Hendrison Iriana dan PT Yotefa Sarana Timber menyatakan telah menyerahkan ganti rugi eksploitasi dalam kegiatan pengusahaan hutan kepada 18 suku di Kecamatan Bintuni pada 31 Oktober 2000.

3 November

- Pemerintah Indonesia menyatakan penghargaannya kepada Forum Kepulauan Pasifik (PIF) atas pernyataan dukungan bahwa Indonesia berdaulat atas Papua.
- Mahasiswa, pemuda, dan ibu-ibu mengadakan aksi mendukung gerakkan cinta damai anti kekerasan di depan Hotel Mutiara Sanggeng Manokwari.
- Pdt. Obet Komba, anggota PDP Kabupaten Jayawijaya, mengajak seluruh penduduk Jayawijaya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah Papua, agar bersedia melakukan perdamaian dengan masyarakat setempat menurut adat istiadat suku Dani.

5 November

Kerusuhan meletus di Kabupaten Merauke dan mengakibatkan lima orang tewas tertembak, 18 orang luka-luka, dan warga lainnya mengungsi.

6 November

- Menyusul insiden Merauke yang menimbulkan korban jiwa, tokoh masyarakat mengecam dan meminta Kapolres serta Wakapolres Merauke segera keluar dari Merauke.
- Koordinator Pusat Krisis Indonesia Timur, Karel Phil Erari, mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan masalah bendera Bintang Kejora di Papua pemerintah perlu memberlakukan *status quo*. Artinya tidak ada lagi keputusan untuk menurunkan bendera secara paksa sambil menunggu hasil dialog yang akan dilakukan.
- Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu mengemukakan bahwa penyelesaian kasus bencana banjir Perumnas IV Padang Bulan menjadi tanggung jawab Pemda Tk I, Pemda Kota, Perumnas, dan Masyarakat. Para korban akan didata ulang untuk menerima

bantuan pemerintah.

- Forum Mahasiswa Amber (FMA) Papua mengadakan dialog di gedung Lembaga Pendidikan Tinggi Qur'an (LPTQ) Kotaraja. Dalam dialog itu disepakati bahwa persoalan Papua hendaknya diselesaikan dalam wacana demokrasi, dilakukan dengan dialog yang dilandasi prinsip cinta damai dan cinta kasih, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas semua kepentingan.
- Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (Foreri) Biak, bekerja sama dengan Pemda Biak-Numfor, mensosialisasikan UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah untuk mengantisipasi isu 1 Desember. Menurut Ketua Foreri Biak–Numfor, Decky Iwanggin, pihaknya akan memberi pemahaman bahwa 1 Desember 2000 bukan hari Papua akan merdeka, melainkan hari dilakukannya evaluasi dan pertanggunganjawaban PDP kepada rakyat Papua.

7 November

- Melalui Wily Mandowen, PDP mengecam pengunduran jadwal pertemuan antara PDP dan pemerintah hingga 9 November 2000. "Kami telah mengambil keputusan untuk tidak menghadiri pertemuan, atau kalaupun harus menghadiri kami tetap tidak akan menyepakati hasil pertemuan itu sebelum adanya pemerintahan yang definitif," tegasnya.
- Pelantikan Gubernur Irja terpilih Drs. J.P. Solossa mengalami pembatalan beberapa kali karena adanya isu keterlibatan Salossa dalam Foreri dan dalam keanggotaan Tim 100 yang mendukung "M". Isu tersebut dibantah oleh Sekretaris Eksekutif Foreri, Drs. Willy Mandowen.
- Komandan Satgas Papua Port Numbay Alex Baransano ditangkap aparat Polres Jayapura dengan alasan terlibat dalam kasus pemerasan.

8 November

- Kota Manokwari rusuh. Suasana mencekam. Empat orang ditembak dan dilarikan ke RSUD Manokwari.
- Anggota DPRD Tk. I Irja yang juga anggota Panitia Pemilihan Gubernur Irja, Abdul Hakim Achmat Aiturrauw, meminta kepada masyarakat agar persoalan pelantikan gubernur tidak perlu dipersoalkan dan tidak dihubungkan dengan aspirasi "M".

- Warga Skouw Yambe suku Rollo menyegel Bendungan Tami dan menuntut pelunasan sisa pembayaran ganti rugi sebesar Rp 100 juta yang pernah disepakati.
- Polda Irja melakukan peragaan penjinakan bom di Kota Jayapura dalam suasana berbagai kesibukan dan deruan kendaraan. Menurut Kadispen Polda Irja, Asisten Superintendent Drs. Zulkifly, peragaan tersebut merupakan gambaran sekilas cara menanggulangi isu peledakan bom dan cara kepolisian mengatasinya sampai tuntas.

9 November

- Dalam pertemuan antara Muspida dan PDP disepakati bahwa batas waktu pengibaran bendera Bintang Kejora hanya sampai 2 Desember 2000 dengan sejumlah catatan. Setelah 2 Desember 2000 hanya ada lima bendera yang dikibarkan di seluruh Tanah Papua yang didampingi dengan bendera Merah Putih. Bendera hanya boleh dikibarkan di kediaman ketua Lembaga Masyarakat Adat, masing-masing di rumah Theys H. Eluay (Jayapura), Kabupaten Yapen – Waropen, Puncak Jaya, Merauke, dan Manokwari.[5]
- Dalam konfrensi pers – seusai dilangsungkannya pertemuan antara Muspida dan PDP – Wakil Sekjen PDP Agus Alua mengemukakan bahwa dalam melakukan kegiatan pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Pemda. Namun hal itu tidak berarti perjuangan Papua berakhir. Prinsipnya PDP tetap berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat.

10 November

- Merauke kembali tegang setelah seorang anggota Satgas Papua ditembak dan meninggal di tempat.
- Wakil Ketua dan Sekjen PDP dalam jumpa persnya mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Muspida pihaknya mengusulkan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh kabupaten se-Papua setelah 2 Desember 2000. Jadi bukan hanya di lima kabupaten saja.
- DPRD Tk. I Irja mengadakan pertemuan dengan para akademisi, LSM, lembaga adat, dan Gereja Papua untuk mendapat masukan

---

[5]Teks selengkapnya mengenai kesepakatan ini dapat dibaca pada bagian lampiran.

mengenai rancangan Otonomi Khusus Papua yang rencananya akan diajukan ke pusat pada 16 November 2000.

- ❖ Tim penyidik Polres Jayawijaya menyerahkan berkas acara pemeriksaan (BAP) 17 tersangka kasus Wamena berdarah kepada Kejaksaan Negeri Wamena. Para tersangka diduga melakukan perlawanan terhadap petugas keamanan yang menurunkan bendera Bintang Kejora di Pikhe, Wamena.
- ❖ Tim Advokasi Peduli HAM Merauke menyampaikan pernyataan sikap atas peristiwa berdarah di Merauke. Pernyataan sikap tersebut berbunyi: Perlu adanya penghargaan dan perlindungan HAM di Merauke; Mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi terhadap peristiwa penembakan rakyat dari Okotober 1999 hingga November 2000 di Merauke; Menyesalkan dan mengutuk tindakan represif aparat Polres Merauke yang jelas–jelas melanggar HAM; Mengimbau kepada semua pihak baik aparat keamanan maupun masyarakat untuk menghentikan semua tindakan yang melanggar HAM.

12 November

- ❖ Kapolda Irja membantah keras tudingan yang menyatakan bahwa pihaknya yang melakukan penembakan terhadap Thomas Tonde di Merauke. "Saat itu tidak ada korban tewas karena aparat tidak melakukan penembakan terhadap anggota Satgas. Jadi, korban meninggal bukan karena ulah anggota saya. Justru anggota saya yang diserang dengan menggunakan anak panah," tegasnya.
- ❖ Pangdam Trikora Mayjen TNI Albert Inkiriwang dilantik oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Theys H. Eluay, sebagai panglima perang Papua. Pada kesempatan itu Ketua LMA membacakan surat keputusan penobatan, yang antara lain menyatakan bahwa penobatan itu didasarkan pada pertimbangan dan penilaian warga masyarakat Papua terhadap Pangdam selama melaksanakan tugas di Papua.
- ❖ Kepala Direktorat Sosial Politik Irja Wempi Wolla mengatakan bahwa adanya aspirasi merdeka dari rakyat Papua harus diakui. Menurutnya, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan untuk melihat hal ini. Apabila keinginan masyarakat ini tidak diakomodir dengan baik, maka jangan kaget bila berbagai kerusuhan terjadi di mana-

mana.

- Terjadi perkelahian massal antara kelompok penghuni pasar dan kelompok warga di sekitar pasar Abepura. Dalam perkelahian itu warga menggunakan berbagai senjata seperti badik, sumpit, dan sejenis alat peledak.
- Mengomentari perkelahian massal itu, Koordinator Kontras Papua, Petrus Ell, S.H., mengatakan bahwa masyarakat nampaknya sudah mempersiapkan diri untuk berkelahi dan mempersenjatai dirinya dengan alat-alat yang sengaja dibuat. Ini menunjukkan bahwa potensi konflik sangat tinggi, terutama konflik horisontal antara masyarakat Papua dan non Papua.
- Posko-posko Papua pasca kerusuhan Merauke dibongkar dan diduduki oleh pasukan Brimob.
- Upacara serah terima jabatan Pangdam Trikora dari Mayjen TNI Albert Inkiriwang kepada Mayjen TNI Tonny A. Rompis yang dipimpin oleh Kasad Jendral TNI Endriartono Sutarto dilangsungkan di Jayapura.

15 November

- Sosialisasi untuk mengantisipasi isu 1 Desember 2000 kembali digelar di gedung Yosukabi Biak. Sosialisasi itu dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, Panel dan Satgas Papua. Agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah: *pertama,* dinamika politik perjuangan elite bangsa Papua pasca Kongres Papua II; *Kedua*, fenomena yang dihadapi bangsa Papua di berbagai daerah di Tanah Papua dalam kaitannya dengan perjuangan Papua; *Ketiga,* antisipasi perayaan 1 Desember. Pada kesempatan itu Ketua Foreri perwakilan Biak–Numfor, Decky Iwanggin, kembali mengatakan bahwa 1 Desember merupakan hari pertanggungjawaban PDP kepada rakyat Papua atas mandat yang diberikan rakyat kepadanya.
- Direktur LBH Jayapura Demianus Wakman mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap Komandan Satgas Papua, dan mempertanyakan status dan alasan penahanan. Menurut Damianus, Alex (Komandan Satgas) jangan dijadikan komoditi atau jaminan politik di luar proses dan aturan hukum yang berlaku. Awalnya, Kapolres mengatakan bahwa Alex ditahan dengan alasan kriminal murni, yakni diduga melakukan pemerasan. Tetapi

kemudian Alex dikait-kaitkan dengan kesepakatan politik. "Ini sudah tidak benar," katanya.

- Asisten III Setda Papua, Drs. A.S. Soepardi menegaskan dukungannya pada rencana pemekaran Papua menjadi tiga propinsi. Menurutnya pemekaran itu akan mempermudah rentang kendali pemerintahan yang sangat luas.

16 November

- Pasar Abepura, yang beberapa hari ditutup karena perkelahian massa, dibuka kembali meskipun masyarakat masih nampak waswas dan berjualan di luar.
- Tokoh masyarakat Jayawijaya, Sofyan Yoman, S.Th., menolak rencana pemekaran Papua menjadi tiga propinsi. "Apakah dengan tiga propinsi permasalahan di Papua bisa langsung selesai? Justru kemungkinan besar akan menambah permasalahan baru yang lebih rumit," kata Sofyan.
- Menurut Kapolres Merauke, Agus Mulyono, pembongkaran Posko Papua di Merauke bukan atas perintahnya, tetapi mungkin karena emosi pribadi aparatnya.

17 November

- Isu 1 Desember 2000 menimbulkan kegelisahan di masyarakat, terutama bagi warga pendatang. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Papua, Benny Yantewo, menegaskan bahwa pada 1 Desember 2000 tidak akan terjadi apa-apa, kecuali peringatan besar-besaran sebagai tanda rasa syukur.
- Kepala Biro Kepegawaian Papua Drs. W.D. Ochmbair mengatakan bahwa pemekaran propinsi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan di Papua. Tetapi diterima atau tidaknya rencana itu, akan dikembalikan kepada masyarakat.

19 November

- Peringatan Hari Internasional Papua di Jayapura dan sekitarnya berlangsung di Genyem dengan tertib dan aman. Tema peringatan adalah "Mari Kita Internasionalisasikan Papua", dengan subtema "Dengan persatuan dan kesatuan kita tingkatkan perjuangan Papua di dalam dan di luar negeri". Pada kesempatan itu Sekjen PDP, Thaha Alhamid, berpidato dan mengatakan bahwa perjuang-

an Papua tidak mengada-ada, tetapi mempunyai latar belakang politik yang jelas. Bangsa Papua sejak awal telah dipersiapkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, yakni sejak 1 Desember 1961.

- Hari Internasional juga diperingati di Biak. Pada kesempatan tersebut Sampari Bintang Kejora dikibarkan selama satu jam. Neles Sroyer, salah seorang bekas tapol/napol Papua, dalam pidatonya mengatakan bahwa niat Papua untuk merdeka dengan berbendera Bintang Kejora telah resmi terdaftar pada Komisi Dekolonisasi PBB.
- Bupati Jayapura Yan Pieter Karafir, dalam kunjungannya ke daerah transmigrasi Bonggo SP VII - VIII, mengatakan bahwa perusahan yang diberi kepercayaan untuk mempersiapkan lokasi bagi warga tidak bekerja dengan benar. Namun ia juga menyesalkan tuntutan warga transmigrasi Bonggo yang dinilainya terlampau berlebihan.
- Polisi menembak tangan Akom Korwa di Desa Sorido, Biak. Korban dilarikan ke RSUD.
- Tim penyidik kasus Wamena Berdarah dari Polres Jayawijaya menyerahkan 17 tersangka serta berkas acara pemeriksaannya kepada Kejaksaan Negeri Wamena.

20 November

- Menanggapi ketakutan masyarakat menjelang 1 Desember 2000, Sekjen PDP Thaha Alhamid meminta masyarakat tidak perlu merasa khawatir dan takut, sebab tanggal tersebut adalah hari perayaan perdamaian.
- Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan kabinetnya agar selama bulan Desember tidak ada yang bepergian ke luar negeri. Presiden meminta agar para menteri berkosentrasi penuh pada masalah-masalah di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menambahkan, masalah-masalah dalam negeri yang menuntut perhatian penuh antara lain Papua dan Aceh.
- Sekretaris Panel Dewan Papua Mimika, Decky Mirino, dalam rangka mengantisipasi peringatan 1 Desember, menghimbau kepada masyarakat agar tidak emosional dan menghindari kekerasan karena hal itu justru dapat merugikan perjuangan bangsa Papua.

21 November

- Frans Albert Joku, Mediator Urusan Luar Negeri PDP, mengada-

kan kunjungan ke New Zealand untuk menjalankan tugasnya mencari dukungan internasional. Rencananya ia akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.

- Konferensi pengkaderan perempuan Papua berlangsung di gedung Sarinah Jayapura. Ketua Aliansi Papua Laurina Monim mengatakan bahwa tujuan konferensi tersebut adalah untuk mengkonsolidasikan organisasinya dalam menopang perjuangan Papua. Selain itu untuk membangun komitmen bahwa kemerdekaan yang diperingati pada 1 Desember merupakan hari kedaulatan Papua yang harus dirayakan dengan penuh damai dan cinta kasih.
- Koordinator Kontras Papua, Petrus Ell, mempertanyakan kasus pembunuhan Johan Sawaki yang sedang ditangani polisi. Menurutnya polisi terkesan akan mempetieskan kasus Johan seperti kasus Steven Suripatty.
- Sebanyak 650 personil pasukan Kostrad 431 Makassar datang ke Kabupaten Merauke dengan menggunakan KRI Teluk Langsa 501.
- Keluarga Besar Papua bagian Barat (Sorong, Manokwari, dan Fakfak) yang terdiri dari kelompok pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat mengirim surat kepada Mendagri yang berisi desakan untuk segera memproses pemekaran wilayah propinsi Papua.

22 November

- Isu disintegrasi bangsa di Indonesia, seperti di Papua dan Aceh, ditanggapi Menlu Alwi Shihab. Ia mengatakan belum ada negara besar, terutama Amerika dan Australia, yang menyatakan dukungannya terhadap wilayah yang ingin memisahkan diri. Komitmen Australia sendiri terhadap keutuhan wilayah Indonesia tidak perlu diragukan, dan diyakini tidak akan berubah.
- Menurut Ketua Pansus Perubahan Nama Papua DPRD Tk. I, Florens Imbiri, perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua telah disepakati pada 23 Oktober 2000 dan akan diumumkan pada Desember 2000.

23 November

- Jaap Salossa dan Constant Karma dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Surjadi Soedirdja.
- Pasukan Kostrad tiba di Jayapura dengan menggunakan KRI Teluk

Bone. Menurut Pangdam Tirkora, Mayjen TNI Tonny Rompis, kedatangan pasukan Kostrad itu untuk mengganti pasukan pengamanan di perbatasan.

- Sebanyak 192 personil Kostrad 330 Cicalengka, Jawa Barat, tiba di Wamena dan mengadakan demostrasi terjun payung di atas Desa Aikama.

24 November

- Mediator Urusan Luar Negeri PDP, Alberth Joku, mengatakan bahwa perayaan 1 Desember bukan saja akan dilakukan di Papua, tapi juga akan dilakukan di luar negeri di mana orang-orang Papua berada. Misalnya di Australia, Swiss, Belanda, PNG, dan di tempat lainnya.
- Kasad TNI Jenderal Endriartono Sutarto menegaskan bahwa TNI tidak akan mentolelir keinginan sekelompok masyarakat yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Menurutnya kalau dibutuhkan – berdasarkan keputusan politik yang dihasilkan Presiden dan DPR– maka pasukannya melalui perintah panglima TNI siap melakukan setiap perintah bangsa.

25 November

Pimpinan Gereja di Papua (Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar ofm, Ketua Sinode GKI Papua Pdt. Herman Saud, M.Th., dan Ketua Sinode GKII Pdt. John Gobay, S.Th.) melaporkan keadaan masyarakat Paniai yang mengalami tindakan kekerasan TNI kepada Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Tonny A. Rompis.

26 November

- Gubernur Irja J.P. Solossa meminta PDP dan Muspida Papua agar jangan mengingkari kesepakatan yang telah diputuskan bersama.
- Aliansi Perempuan Port Numbay melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura. Mereka menuntut agar kekerasan di Papua, baik kekerasan yang dilakukan di luar rumah maupun di dalam rumah, atau yang dilakukan oleh kaum sipil maupun militer, segera dihentikan
- Menurut Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, aspirasi "M" akhir-akhir ini telah dipaksakan dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. "Sepanjang tuntutan merdeka masih bersifat aspirasi,

menurutnya bukanlah suatu masalah. Tetapi kalau sudah mengarah pada pelanggaran hukum, maka pihaknya akan bertindak tegas.

27 November

- Kapolda Irja mengklarifikasi isu 1 Desember. Ia menegaskan bahwa tidak ada kemerdekaan pada 1 Desember 2000, dan yang ada hanyalah doa bersama. "Jangankan kemerdekaan, bendera saja dianjurkan agar tidak dikibarkan saat massa berkumpul," katanya.
- Sekretaris Eksekutif Foreri Drs. Willy Mandowen mengemukakan bahwa setiap orang yang ada di Papua perlu bercermin pada nilai-nilai dasar budaya dan agama. Yakni, nilai kebenaran dan keadilan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan golongan. Ia menekankan, nilai tersebut seharusnya menjadi dasar manusia di Tanah Papua.

28 November

- Sekjen PDP Thaha Alhamid ditangkap jajaran Polda Irja untuk diminta keterangannya atas dugaan keterlibatanya dalam deklarasi 12 November 1999 dan Kongres Papua pada 29 Mei 2000.
- Menanggapi komentar Kapolda Irja tentang isu 1 Desember, Marthinus Ayomi (staf Inspektorat Wilayah Propinsi Irja) mengatakan bahwa Kapolda telah berlaku arogan, dan menganggap seakan-akan rakyat Papua adalah musuh. Ia juga mempertanyakan banyaknya personil keamanan yang terus didatangkan ke Papua.

29 November

- Ketua PDP Theys H. Eluay dan Sekjennya, Thaha Alhamid, resmi menjadi tahanan polisi dan dikurung di Polda Irja.
- Kapolda Irja mengatakan bahwa penangkapan dan pengurungan Theys H. Eluay dan Thaha Alhamid tidak ada kaitanya dengan isu 1 Desember. Mereka ditangkap karena diduga merencanakan makar.
- Operasi Oscar dan Alfa digelar di Lapangan Udara Manuhua Biak dengan melibatkan tiga pesawat tempur jenis Skyhawk A-4. Menurut komandan Lanud Manuhua, Letkol Penerbang Andri Iskandri, operasi tersebut dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan. Ia menambahkan bahwa pesawat tempur itu bukan untuk menakut-nakuti warga masyarakat, melainkan melakukan

operasi untuk menjaga keamanan seluruh warga dari kemungkinan ancaman udara yang dilancarkan pihak-pihak asing yang sengaja usil terhadap Indonesia.

- Salah seorang anggota Satgas Papua tewas. Korban diduga ditembak oleh anggota Polsek Nambay, Merauke.

Desember

1 Desember

Peringatan Hari Kemerdekaan Papua ke-39 dilaksanakan di berbagai tempat di Papua.

- Di depan Gedung Dewan Kesenian Irian Jaya (DKIJ), Jayapura, sekitar pukul 05.50 WIT dilaksanakan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dan Merah Putih tanpa lagu 'Indonesia Raya' dan 'Hai, Tanahku Papua'. Upacara itu di antaranya dihadiri Tom Beanal dan Drs. Willy Mandowen. Upacara didahului dengan serangkaian ibadah yang dimulai pukul 03.00 WIT. Kegiatan tersebut diisi pula dengan berbagai nyanyian rohani dan orasi politik. Beberapa tokoh Papua dalam orasinya menyampaikan keinginan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora, sampai masalah Papua dituntaskan melalui dialog nasional dan internasional, dan sampai Theys dan kawan-kawannya dibebaskan. Wakil Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Tom Beanal tidak memberikan pidato. Ia hanya memberikan beberapa informasi mengenai kegiatan PDP selama setahun terakhir. Sempat muncul ketegangan antara aparat Polres Jayapura dengan warga yang ingin mempertahankan pengibaran bendera. Baru pada pukul 22.45 WIT bendera Bintang Kejora diturunkan setelah dicapai kesepakatan bahwa penurunan akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara itu suasana kota pada pagi hari lengang karena semua toko dan kantor tutup. Tetapi pada siang harinya semua berjalan normal kembali.
- Di Fak-fak, pengibaran bendera dilakukan pada pukul 05.30 WIT di lapangan Kampung Sungai Gawerpe. Pengibaran dilakukan oleh pemuda dan Satgas Papua yang berjumlah sekitar 300 orang, tanpa sepengetahuan penanggung jawab Lembaga Masyarakat Adat, Mbaham Matta. Sekitar pukul 08.00 WIT bendera diturunkan tanpa kekerasan oleh jajaran Polres Fak-fak yang dipimpin

Kapolres Superintendent Totok Kasmiarto, S.H. dengan dukungan satuan Kostrad. Namun penurunan itu diprotes oleh sekitar 40 orang massa yang dipimpin Apolonarius Krisput. Massa kemudian bergerak ke Kampung Sungai Gewerpe dan berhadapan dengan pihak kepolisian sesampainya di Brongkendik. Bentrokan tak terhindarkan dan mengakibatkan dua orang tewas karena tembakan polisi, yakni Apolonarius Krisput dan Safrudin Hindom. Dua korban lainnya dirawat di rumah sakit dan tujuh orang ditahan aparat Polres Fak-fak. Suasana kota sepi karena toko-toko, pusat perbelanjaan, dan perkantoran tutup.

- Di Biak, peringatan dilaksanakan di lapangan Cenderawasih yang berhadapan dengan markas TNI-AU Manuhua Biak. Peringatan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT dengan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora diiringi lagu 'Hai, Tanahku Papua'. Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih. Acara juga diisi dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Decky Iwanggin (anggota PDP). Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan "Kilas Balik Perjuangan Papua selama 39 Tahun". Usai upacara, massa menggelar tarian *yospan* dan berarak menuju rumah Decky Iwanggin, sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan Papua. Situasi kota Biak tetap normal karena pasar Inpres, pertokoan, dan perkantoran tetap buka.
- Di Manokwari, peringatan dilaksanakan di lapangan Doreri Fanindi, Manokwari, pada pukul 11.00 WIT. Acara itu dipimpin oleh Drs. B. Ramar (anggota Panel Papua). Hadir dalam peringatan tersebut antara lain Bupati Manokwari, Drs. D. Mandacan dan regu Senat Faperta Universitas Cendrawasih Manokwari. Dalam peringatan tersebut juga dikibarkan bendera Bintang Kejora yang diiringi lagu "Hai, Tanahku Papua". Kemudian dilakukan pembacaan Manifesto Politik Tahun 1961 oleh Otis Meidodga (anggota Panel), serta pembacaan Deklarasi Pengembalian Kemerdekaan dan Kedaulatan 1 Desember 1961 oleh Ferdinanda Yatipai (anggota Panel Papua). Setelah acara selesai, massa membubarkan diri sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan dalam bahasa daerah, diiringi suling dan tambur. Suasana kota berjalan normal.
- Di Wamena, peringatan dilaksanakan di sejumlah gereja dalam bentuk ibadah, seperti di Gereja GKII Jl. Trikora Wamena dan Gereja Baptis Wailani Wesaput. Tidak ada pengibaran bendera Bin-

tang Kejora dan Merah Putih. Suasana kota pada umumnya sepi karena kantor-kantor tutup dan pasar Jibama menjadi lengang.

- Di Timika, peringatan dilaksanakan di halaman kantor Dewan Panel di Kwamki Baru, karena lapangan Timika Indah dibentengi oleh aparat keamanan. Pengibaran bendera Bintang Kejora berlangsung pada pukul 08.00 WIT dan pada pukul 10.00 WIT diturunkan oleh jajaran Polres Mimika dengan merobohkan tiangnya. Kapolres Mimika, Asisten Superintendent Drs. Rudi Juliantoro, kepada warga yang ada di Kwamki Baru menjelaskan bahwa upacara itu sudah melangkahi kesepakatan yang ditandatangani PDP dan Muspida Tk.I pada 9 November 2000. Menurut kesepakatan itu bendera hanya boleh dikibarkan di lima kabupaten, tidak termasuk Mimika. Suasana kota sepi karena toko, kios, dan pasar tutup.
- Di Merauke, peringatan dilaksanakan di Lapangan Pemda Merauke. Menurut kesepakatan antara Muspida, Dewan Panel, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat keamanan, tidak boleh ada pengibaran bendera dan yang ada hanya doa adat. Tetapi massa yang berjumlah sekitar 2.000 orang bersikeras untuk mengibarkan bendera yang akhirnya menimbulkan ketegangan. Bupati Merauke John Gluba Gebze, Kapolres Superintendet Agus Mulyono, dan Anggota Panel Januarius Wiwaron, mencoba meredam suasana yang tegang. Akhirnya massa membubarkan diri. Sementara itu masyarakat adat Marind mencabut *kao* (tiang adat) dan berarak ke arah Desa Nazem. Situasi kota Merauke lengang karena perkantoran, toko-toko, dan pasar tutup.
- Mahasiswa Papua yang sedang belajar di Jakarta melakukan demonstrasi di halaman Kedutaan Besar Belanda dan Amerika Serikat.
- Lima berkas BAP anggota Panel dan PDP Jayawijaya dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Wamena kepada tim penyidik Polres Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya, Superintendent D. Suripatty, menyatakan bahwa berkas tersebut dikembalikan karena ada hal yang perlu diperbaiki. Pihaknya berjanji akan melengkapi dan mengembalikannya ke kejaksaan.

2 Desember

- Di Kampung Arowi, Kecamatan Pasir Putih, Manokwari, satu regu

polisi dan Brimob menurunan bendera Bintang Kejora di Posko Satgas Papua yang berada di depan rumah Guru D. Asariab (anggota Panel Papua). Penurunan ini terjadi pukul 09.30 sampai 11.00 WIT dengan cara memotong tali pengikat bendera. Peristiwa itu menimbulkan ketegangan antara aparat dengan sebagian masyarakat Kampung Arowi. Namun tidak sempat terjadi bentrokan karena sebagian warga lainnya berusaha menenangkan warga yang marah.

- Empat orang Satgas Papua pengibar bendera Bintang Kejora di depan gedung DKIJ, yakni Hery Pele (23 tahun), Jimmy Doyapo (19), Yunus Hujabi (24), dan Yehuda Sorontow (41), ditangkap Polres Jayapura. Kapolres Jayapura, Superintendent Daud Sihombing, S.H., belum menjelaskan alasan penangkapan tersebut. Di samping itu enam anggota Satgas Papua lainnya juga ditangkap karena membawa senjata tajam.
- Di Merauke, terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di lapangan Pemda Merauke pada pukul 06.00 WIT oleh sekelompok massa. Karena dinilai telah melanggar kesepakatan, aparat kepolisian berusaha menurunkan bendera tersebut. Massa kemudian menurunkan sendiri bendera itu sekitar pukul 08.45 WIT, dan berangsur-angsur membubarkan diri. Namun sekitar 100 orang massa dari Kampung Kuda Mati yang dipimpin Thomas Kurumanop Amot (tokoh *sigo-sigo/kepecayaan kargoisme*), mendatangi Kantos Dinas Pariwisata Merauke dengan bersenjatakan busur, tombak, parang. Mereka merobek bendera Merah Putih yang sedang dikibarkan di depan kantor tersebut. Mereka juga menyerang aparat kepolisian yang sedang berjaga di depan Kantor Bupati. Aparat kemudian mengeluarkan tembakan yang mengakibatkan tujuh orang tewas seketika, dua orang dianiaya dan meninggal di RSUD, tiga orang luka berat, termasuk seorang anggota Dalmas. Kapolres Merauke, Superintendent Drs. Agus Mulyono, mengatakan bahwa situasi akhirnya bisa dikendalikan dan 12 orang anggota Satgas Papua dan Ketua Panel Merauke, Januarius Wiwaron, ditahan. Dalam peristiwa itu terjadi pula pengungsian. Warga Desa Kuda Mati misalnya mengungsi ke PNG. Orang Asmat yang sedang tinggal di daerah Gudang Arang (Merauke) kembali ke Asmat. Begitu pula orang Mappi, kembali ke Kepi.
- Sekitar 100 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang

tergabung dalam 'Solidaritas Mahasiswa Papua Barat' melakukan penyegelan Kampus Lama Uncen di Jalan Raya Sentani, Abepura. Mereka menuntut agar pemerintah menyelesaikan masalah Papua, terutama menyangkut aspirasi merdeka. Dalam peristiwa itu dibacakan pula pernyataan politik oleh Cornelis Kambu, S.Sos.

3 Desember

❖ Pukul 03.30 WIT, Aparat Polres Jayapura yang dipimpin langsung Kapolres Superintendent Daud Sihombing, S.H., dengan *diback-up* satuan Brimob dan TNI, mengambil alih gedung Dewan Kesenian Irian Jaya Jayapura (DKIJ) yang selama ini difungsikan sebagai Posko Satgas Papua. Dalam operasi tersebut 30 orang anggota Satgas Papua ditangkap, termasuk komandannya, Michael Eluay. Selain itu aparat juga menangkap Philep Karma (tokoh pejuang 'M') dan Oswald Iten Josef (warga asing asal Swiss). Polisi juga menyita berbagai dokumen, senjata tajam, bom molotov, dan sebuah mobil dinas Pemda Irja dengan Nopol DS-5015-A yang sedang digunakan Philep Karma. Menurut Kapolres, Oswald Iten Josef ditangkap berdasarkan UU No. 9/1992 karena menyalah-gunakan visa turis untuk meliput kegiatan 1 Desember 2000. "Karena terbukti bersalah, *ya* kita masukkan saja ke dalam sel. Apalagi yang diliput saat ini bukanlah kegiatan biasa. Dia hanya memiliki visa sebagai turis, tapi bertingkah seperti wartawan yang lengkap dengan kamera," ujar Kapolres.

❖ Donatus Mote, S.E., salah seorang tokoh suku Mee, meminta kepada masyarakat, khususnya dari Pegunungan Tengah, agar berpikir jernih dalam menyikapi keinginan merdeka. Sehingga, tidak timbul korban sia-sia khususnya dari kalangan masyarakat. Ia juga mempertanyakan banyaknya Satgas Koteka yang hadir dalam peringatan 1 Desember 2000 di Taman Imbi. "Kenapa masyarakat Koteka yang paling banyak menghadiri acara penurunan bendera Bintang Kejora? Apakah itu sikap protes mereka terhadap pembangunan yang sudah berjalan, ataukah justru mereka senang dengan pembangunan yang ada?"

4 Desember

❖ Sekitar pukul 22.30 WIT, Moderator PDP Pdt. Herman Awom, ditahan Polda Irja setelah menjalani pemeriksaan yang didampingi

oleh kuasa hukumnya, Anton Raharusun. Menurut Kadit Serse Polda Senior Superintendent Drs. Tukarno, Awom hadir sendiri ke Mapolda atas itikad baiknya dan bukan karena ditangkap polisi.

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas mengatakan bahwa penjagaan gedung DKIJ yang dilakukan pihak keamanan tidak ditentukan batas waktunya. Bahkan seandainya gedung tersebut diserahkan kepada Pemda Irja, pihak kepolisian akan tetap melakukan penjagaan.
- Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen TNI Tony Rompis, mengatakan bahwa keberadaan TNI yang ikut berjaga-jaga bersama Polri di Jayapura dimaksudkan untuk membantu aparat kepolisian, sesuai permintaan Kapolda Irja. Pangdam membantah jika telah dilakukan penambahan pasukan pasca peringatan 1 Desember. "Pasukan dari Kostrad 433 yang datang kemarin itu untuk mengganti pasukan Kostrad 411. Bukan penambahan, tapi hanya pergantian," ujarnya.
- Gubernur Irja J.P. Solossa mengharapkan agar seluruh masyarakat Papua tetap menjaga kestabilan dan keamanan bersama seperti selama ini. Menurutnya saat ini situasi di Papua secara keseluruhan cukup aman dan damai. Oleh karena itu masyarakat tidak usah terlalu tegang dan resah. "Saya harap masyarakat tetap mempertahankan kondisi saat ini agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk tercapainya tujuan itu, semua ada di tangan seluruh rakyat Papua," ujarnya.
- Masalah penjualan *mi instan* bantuan untuk korban kerusuhan Wamena pada 6 Oktober 2000, ditanggapi Sekretaris II Satlak PB Jayawijaya, Sukardi Jaelani, B.A. Ia menjelaskan bahwa penjualan *mi instan* itu dilakukan sesuai kewenangan Satlak karena stok yang tersisa — sebanyak 730 dus – berkadaluarsa pada Januari-Februari 2001. Oleh karena itu Satlak berinisiatif menjualnya kepada CV. Wijaya Kusuma dengan harga Rp 30.000/dus. Ia juga mengungkapkan bahwa bantuan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah untuk pengungsi sebesar Rp 100 juta, yang diterima Dandim 1702 Jayawijaya, hingga kini belum diserahkan dan dilaporkan kepada Satlak.

5 Desember

- Danlantamal V Jayapura, Brigjen TNI (Mar.) Solichien M., Ph.D.,

mengakui jika wilayah hukumnya saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia juga membenarkan kalau pihaknya dibantu 37 kapal perang untuk mengangkut sekitar 2000 prajurit marinir, guna mengamankan wilayah hukum perairan Irian Jaya. Tapi pihaknya membantah kalau kehadiran 37 KRI itu ada kaitannya dengan peristiwa 1 Desember 2000. Sementara itu Kadispen Koartim, Letkol Laut Ditya Soedarsono, menegaskan bahwa sebetulnya 37 kapal perang dari berbagai jenis itu sedang terlibat dalam kegiatan Latdalla (Latihan Pengendalian Laut) 2000. Kapal itu juga disiapkan untuk membantu polisi dalam operasi penurunan bendera Bintang Kejora.

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil tokoh-tokoh lain, termasuk Wakil Ketua PDP Tom Beanal. "Kita pasti akan memanggil semua orang yang terlibat dalam dugaan makar ini. Termasuk Tom Beanal yang akan kita panggil untuk dimintai keterangan," tegasnya.
- Tim Pembela Keadilan Untuk Rakyat Papua (PKURP) dibentuk oleh para pengacara profesional di Jayapura, dengan Hendrik Tomasoa, S.H. sebagai koordinator dan Anton Raharusun, S.H. sebagai sekretaris. Menurut Koordinatornya, pembentukan PKURP dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas pengacara yang ada di Jayapura, terutama menyangkut kasus makar dan penurunan bendera Bintang Kejora. Dengan adanya tim ini, maka Tim Advokasi HAM untuk rakyat Papua dibubarkan. "Tim ini independen dan tidak terikat dengan LSM-LSM manapun, termasuk dengan Els-HAM Papua," kata Anton Raharusun.
- Hiskia Mararabuyan, salah satu tokoh politik aspirasi "M", ditahan Polres Mimika di Timika, dengan tuduhan melakukan pelanggaran hukum terhadap ketertiban umum dalam peristiwa 1 Desember 2000.
- Wakil Ketua Komisi F DPRD Tk. I Irja, Ny. Pdt. A.W. Iwanggin, mengaku prihatin atas terjadinya bentrokan di Merauke yang menewaskan delapan orang dan tiga lainnya luka berat. Pihaknya merencanakan membentuk tim investigasi untuk melihat kemungkinan adanya pelanggaran HAM. Sementara itu Sekretaris Komisi F, Anton Kelanangame, menjelaskan bahwa kasus Merauke akan memberatkan apàrat. Kasus tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat karena ada strategi dan rencana

dari aparat.

- Kapolres Merauke Superintendent Y. Agus Mulyono menjelaskan bahwa pihaknya telah menahan tiga tersangka pelaku perobekan bendera Merah Putih, pembunuhan sopir taksi, dan perusakan mobil di Mopah Lama, Merauke. Ketiga tersangka yang berinisial JBB, MG, dan PK itu berada dalam tahanan Polres Merauke untuk dimintai keterangan. Sementara empat tersangka lainnya masih dalam pengejaran.
- Gubernur Irja J.P. Solossa menanggapi serius dugaan kasus korupsi di Bapedalda Irja. Ia mengatakan bahwa dalam setiap kasus korupsi yang terbukti dalam pemeriksaan, siapapun pelakunya, tetap akan ditindak berdasarkan proses hukum yang berlaku.

6 Desember

- Tom Beanal, Wakil Ketua PDP, menyatakan bahwa dirinya tak gentar menghadapi pemeriksaan Polda Irja. Ia menyatakan bahwa langkah pemerintah Indonesia menangkapi para pemimpin perjuangan Papua adalah sesuatu yang memalukan dunia internasional. Penangkapan itu menurutnya serupa dengan sistem hukum yang digunakan pemerintah Indonesia pada 1969, ketika saat itu belum ada hukum dan tentara masih menjadi segala-galanya.
- Ketua PDP Theys H. Eluay menulis surat kepada media massa. Surat ini menyatakan bahwa perjuangan Soekarno dan teman-temannya dalam memperjuangkan Indonesia merdeka di masa lalu dengan kata-kata 'merdeka' atau 'mati' sebagai semboyannya, tidak berbeda dengan perjuangan Theys dan kawan-kawannya untuk Papua merdeka. Yakni sama-sama menuntut kemerdekaan.
- Gubernur Irja J.P. Solossa menyatakan bahwa untuk sementara gedung Dewan Kesenian Irian Jaya (DKIJ) akan dibiarkan ditangani oleh aparat kepolisian sampai situasi dan kondisi keamanan benar-benar terkendali. Setelah itu pihaknya akan mengevaluasi keberadaan gedung tersebut dan menurutnya bisa saja diserahkan kepada Dinas Kebudayaan yang selama ini membantu program kesenian melalui DKIJ.

7 Desember

- Pada pukul 01.30 WIT Polsek Abepura diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Penyerangan itu mengakibatkan Bripka Petrus

Epaa meninggal dunia dan tiga anggota polisi lainnya luka-luka. Di samping itu juga terjadi penyerangan Kantor Dinas Otonom Kotaraja dan pembakaran ruko di Abepura.

- Pukul 02.00 WIT dilakukan operasi pengejaran di bawah pimpinan Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H. Tiga asrama mahasiswa di Abepura (Asrama IMI, Asrama Ninmin, Asrama Yapen-Waropen) serta pemukiman penduduk di Jl. Baru Kotaraja, Skyline, dan Abe Pantai menjadi sasaran operasi. Dalam operasi tersebut puluhan orang ditangkap, ditahan, dan disiksa di Polres Jayapura dan Polsek Abepura, karena dituduh sebagai pelaku penyerangan. Akibatnya dua orang pelajar, Joni Karunggu dan Orry Doronggi, meninggal dunia dalam tahanan Polres Jayapura. Seorang pelajar lainnya, Elkius Suhuniap, ditembak mati oleh satuan Brimob di Skyline.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas ketika berada di Sorong menegaskan bahwa jajarannya telah diperintahkan untuk terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan Polsek Abepura. Ia juga mengatakan, 64 orang telah ditahan aparat keamanan. "Saya sudah memerintahkan satu pasukan Brimob yang dibantu TNI untuk mengejar para pelaku penyerangan Polsek Abepura serta pelaku pembakaran dan pengrusakan itu," katanya.
- Ketua Komisi A DPRD Tk. I Irja, Gim Perangin, ketika menanggapi peristiwa Abepura mengatakan bahwa kalangan pejuang HAM selama ini selalu bersuara keras jika ada rakyat yang terbunuh, namun mereka diam ketika yang terbunuh adalah aparat. "Bagaimanapun juga aparat memiliki HAM yang sama dengan kita, yang tentu tidak boleh diinjak-injak," katanya.
- Sekitar 2000 orang massa, pada pukul 12.00 WIT, melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Tk. II Manokwari. Mereka menyampaikan aspirasi: menolak pemberlakuan otonomi dan menuntut pembebasan para pemimpin PDP. Unjuk rasa damai itu dipimpin oleh anggota Panel Papua, TH. Krey, Ketua Umum DPD Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) John Warijo, S.Sos, serta Dansatgas Papua Jan Kafiar. Dalam aksinya pengunjukrasa membawa bendera Bintang Kejora, spanduk, dan pamflet.
- Direktur LBH Jayapura dan Koordinator Bagian Hukum Tim Kemanusiaan Wamena, Demianus Wakman, S.H., menyatakan bahwa pihaknya tidak sempat mengajukan pra-peradilan atas

prosedur penangkapan 17 orang tersangka insiden Wamena yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Namun, ia akan memasukkannya dalam eksepsi.

- Wakil Ketua PDP Tom Beanal berpendapat bahwa dalam kasus Merauke II yang terjadi pada Desember 2000 itu belum bisa dipastikan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak. Menurutnya dalam peristiwa itu telah terjadi permainan yang melibatkan dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok garis keras yang pendidikan dan pengetahuan politiknya kurang serta mau cepat-cepat merdeka. Sedangkan kelompok kedua sedikit terpelajar dan memperjuangkan kemerdekaan Papua secara pelan-pelan. Kelompok pertama itulah yang dimanfaatkan untuk membuat kekacauan.

8 Desember

- Ketua DPP KNPP, Benny Yantewo, menyatakan bahwa insiden "serangan fajar" Abepura pada 7 Desember 2000 besar kemungkinan dilakukan oleh kelompok yang tidak puas dengan hasil kesepakatan di Gedung DKIJ, yang mendorong aparat keamanan mengosongkan gedung itu.
- Kapolres Jayapura AKBP Daud Sihombing, S.H. menerangkan bahwa ketiga korban tewas dalam peristiwa Abepura pada 7 Desember 2000 telah menyerang petugas ketika mereka hendak ditangkap. Mereka tewas karena tertembus peluru nyasar dari petugas.
- Koordinator Kontras Papua Peter Ell menyatakan rasa penyesalannya atas peristiwa Abepura. Ia menilai tindakan oknum aparat dan oknum masyarakat yang terlibat dalam peristiwa itu menimbulkan keresahan dan ketakutan. Sementara itu Koordinator PMES Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Riswan Lapagu, berpendapat bahwa peristiwa Abepura tidak terlepas dari keterlibatan penguasa di Jakarta yang ikut memicu ketegangan dengan mengeluarkan kebijakan keamanan.

9 Desember

- Tim kuasa hukum lima pemimpin PDP yang jadi tersangka kasus makar, mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dengan istri para tersangka sebagai penjamin. Penangguhan penahanan ini didasarkan atas dua pertimbangan. Yang *pertama*

alasan kemanusiaan, karena Theys H. Eluay dan kawan-kawannya harus berada di tengah keluarga masing-masing saat Natal dan Lebaran. Yang *kedua* adalah alasan hukum, karena semua proses pemeriksaan untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara sudah terpenuhi dan mereka bisa keluar dari tahanan. Selain itu ada alasan tambahan untuk Pdt. Herman Awom, karena sejak terpilih sebagai wakil ketua Sinode GKI Papua di Sorong, ia belum pernah dilantik. Permohonan penangguhan penahanannya diajukan juga untuk kepentingan tersebut.

- Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, ketika menanggapi permohonan penangguhan penahanan para tersangka, menyatakan bahwa penangguhan bisa dilakukan jika ada perintah dari presiden. "Tapi hingga saat ini saya tidak menerima perintah apapun. Jadi pemeriksaan akan terus berlangsung dan para tersangka tetap berada di penjara sesuai peraturan," katanya.
- Di Desa Skouw, Kecamatan Muara Tami, yang terletak di perbatasan RI-PNG, terjadi pembunuhan dan penganiayaan terhadap penduduk setempat. Akibatnya dua orang meninggal dunia, dua luka berat, satu luka ringan, dan satu orang hilang. Korban meninggal adalah Zakaria Sogi (31 tahun, warga Koya Barat yang menderita 10 luka tusukan panah dan kapak) serta Udin (30 tahun, warga Skamto yang menderita sembilan luka tusukan panah dan tombak). Sementara yang mengalami luka berat adalah Sukarji (40 tahun, warga Arso VIII yang terkena celurit di bagian perut) dan Murdianto (22 tahun, warga Arso I menderita luka di punggung kanan akibat terkena panah). Korban yang mengalami luka ringan adalah Parto, dan korban yang hilang adalah Ahmat (19 tahun, warga Waena, yang tercatat sebagai mahasiswa ISTP Jayapura semester III).
- Dalam peristiwa Skouw, TNI telah menangkap dua tersangka, yakni Askombo dan Yomi. Mereka ditangkap saat hendak menyebrang ke PNG. Setelah diinterogasi, keduanya oleh anggota Satgas Tribuana dan Serda Paulus dari Yonif 433 diserahkan kepada Polsek Abepura. Berita penangkapan itu dibenarkan oleh Wakapolres Jayapura, AKP Alex Sampe. Wakapolres juga menyatakan bahwa di antara keduanya ada yang mengaku telah memecahkan kaca markas Polsek Abepura ketika terjadi penyerangan.
- Ketua Komisi A DPRD Tk. I Irja, Gim Perangin, menilai aksi unjuk

rasa menolak otonomi di Manokwari sebagai bentuk ketidaktahuan masyarakat mengenai maksud otonomi. "Kalau mereka pelajari apa itu otonomi, maka sebenarnya lebih mendekati merdeka dalam arti luas," ujarnya.

- ❖ Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Manokwari, Drs. H.M. Soegestiono mengatakan bahwa setelah mencermati penggunaan dana *crash program* yang tidak tepat sasaran, pihaknya telah mempersiapkan diri untuk mengevaluasi penyaluran dana tersebut dengan membentuk tim pengawas.
- ❖ Menanggapi insiden Abepura dan Skouw, Ketua DPRD Tk. I Irja, Nataniel Kaiway, membentuk tim terpadu yang terdiri dari anggota DPRD Tk.I, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Tim itu akan bekerja sama untuk mencari data untuk menjelaskan kesimpang-siuran jumlah korban, jumlah orang hilang, dan jumlah kerugian yang diderita masyarakat.

10 Desember

Pertemuan bersama untuk menanggapi insiden Abepura antara Ketua Kerukunan Keluarga Jayawijaya (RKJ) Philipus Halitopo, Bupati Jayawijaya Drs. David Hubi, tokoh Gereja Pdt. Sofyan Yoman, tokoh pemuda Paskalis Kosay, tokoh intelektual Agus Alua, anggota MPR-RI Alex Hesegem, dan anggota DPR-RI utusan Jayawijaya Izak Tabuni, dilangsungkan di Jayapura. Pertemuan itu menghasilkan seruan:

1. Perjuangan orang Papua menuntut keadilan, kebenaran, kejujur-an, dan demokrasi (merdeka) sejak 1961 sampai sekarang adalah persoalan seluruh rakyat Papua, baik yang ada di pedalaman maupun yang berada di pesisir pantai, dan bukan milik orang Jayawijaya saja. Oleh karena itu, setiap orang yang ada di pedalaman Jayawijaya harus mewaspadai dan menahan diri serta menghindari konflik horisontal yang sedang diterapkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
2. Hentikan segala bentuk propaganda dan saling curiga antara sesama orang Papua untuk kepentingan sesaat. Tumbuhkan iklim persaudaraan dan saling melindungi dengan menciptakan sua-sana aman dan kondusif. Jaga solidaritas dan kesatuan serta persatuan yang kokoh dalam seluruh komponen masyarakat Papua maupun non-Papua pada umumnya, khususnya masyara-kat Jayawijaya.

3. Hentikan segala bentuk skenario dan rekayasa yang dibangun secara sistematis dan terencana untuk memusnahkan etnis Papua, khususnya di pedalaman Jayawijaya, dengan kekerasan, pengejaran, penangkapan, penganiayaan, pembantaian, intimidasi, teror, diskriminasi hukum, atau dengan stigma OPM, GPK, dan separatisme.
4. Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera menarik pasukan TNI dan Polri non-organik yang didatangkan ke Tanah Papua dalam jumlah besar.
5. Mendesak Els-HAM, Lembaga Bantuan Hukum, Gereja, dan Komisi HAM DPRD Papua untuk segera melakukan investigasi pelanggaran HAM dalam peristiwa Abepura pada 7 Desember 2000. Selain itu mendesak dilakukannya tindakan konkret untuk membebaskan masyarakat, pelajar, dan mahasiswa, yang kini masih berada dalam tahanan kepolisian.

11 Desember

❖ Panglima Komando Pertahanan (Kodap) V Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi papua Merdeka (TPN/OPM), Kolonel Willem Onde, mengemukakan pendapatnya di Jayapura mengenai berbagai hal di Papua:

- Merasa prihatin atas terjadinya insiden Abepura dan Skouw. Tindakan tersebut dinilainya betul-betul brutal karena bukan saja aparat yang dibunuh tetapi juga masyarakat sipil. Menurutnya tindakan itu merupakan ulah provokator untuk merusak nama TPN/OPM dan menginginkan dampak buruk bagi pihaknya.
- Tentang hubungan antara OPM dan TNI, ia menjelaskan telah dilakukan perdamaian antara TNI dan OPM dari Selatan, sejak 5 Juni 1997. Tidak ada lagi kontak senjata, dan pihaknya tetap akan memperjuangkan aspirasi merdeka secara dialogis dengan dasar saling menghormati.
- Mengenai PDP, menurutnya lembaga tersebut seperti telur yang baru saja menetas kemarin sore. Sementara pihaknya sudah 39 tahun mempertahankan perjuangan. Bahkan ia menilai PDP telah menodai perjuangannya, seperti mensabotase perjuangan dengan menyingkirkan pihaknya. "PDP tidak pernah ada dalam

rangkaian perjuangan kami. Dalam Mubespun kita tidak diundang untuk duduk bersama membicarakan perjuangan kemerdekaan. Kitalah para pejuang murni yang memang berjuang untuk kemerdekaan Papua," tegasnya.

- ❖ Pengurus Ikatan Mahasiswa Yapen-Waropen (Imayawa) dengan dipimpin oleh ketuanya, Martinus Werimon, mendatangi Wakil Gubernur Irja, Costant Karma. Mereka melaporkan penyerangan asrama Yapen-Waropen oleh aparat keamanan pada 7 Desember 2000, sekaligus meminta jaminan keamanan bagi mereka dan masyarakat.
- ❖ Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., menyatakan bahwa Asgombo yang ditangkap pasukan TNI ketika melintasi perbatasan bersama penyerang Skouw, sudah dijadikan tersangka dan ditahan di Polres sejak 10 Desember 2000. Namun Kapolres belum bisa memastikan apakah tersangka terlibat dalam perusakan, pembakaran toko, atau terlibat dalam kerusuhan di Skouw.
- ❖ Berkaitan dengan pemeriksaan kasus dugaan korupsi di Bapedalda Irja, Irwilprop Irja, M.F. Renyaan, menyatakan bahwa pihaknya kekurangan tenaga pemeriksa karena banyaknya kasus yang muncul. Tenaga pemeriksa dan Inspektur Pembantu (Irban) di lembaganya hanya berjumlah 30 orang saja. Sementara kasus Bapedalda Papua terjadi di sejumlah kabupaten/kota dan memerlukan pemeriksaan yang cepat.

12 Desember

- ❖ Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., menyatakan bahwa upaya aparat mengejar para pelaku penyerangan Abepura masih dilakukan di kawasan Sentani. Di antaranya, aparat membongkar Posko Satgas di depan jalan masuk menuju rumah Theys H. Eluay. Dalam pengejaran itu aparat juga harus mengeluarkan tembakan karena Frits Gombo dan anggota Satgas lainnya yang jadi buronan menembak terlebih dahulu. Ditambahkannya bahwa Polres telah menangkap 64 orang. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya hanya tiga orang saja yang ditahan, yakni Asgombo, Yomi Tabuni, dan Manu Tabuni.
- ❖ Ahmat (19 tahun), korban yang dinyatakan hilang dalam peristiwa Skouw, jenazahnya ditemukan dalam keadaan terpotong-potong di hutan Skouw, Kecamatan Mura Tami.

- Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, mengeluarkan Maklumat No. Pol: MAK/02/XII/2000 yang berisi larangan terhadap berbagai bentuk organisasi bersenjata yang mengarah pada tindakan separatis, seperti Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan sejenisnya. Maklumat ini dikeluarkan atas pertimbangan perkembangan situasi kamtibmas di wilayah hukumnya pasca 1 Desember 2000. Situasi tersebut ditandai dengan penyerangan pos-pos aparat keamanan dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan kelompok separatis terhadap warga sipil dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan berat, dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat.
- Direktur LBH Jayapura Demianus Wakman, S.H., menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk menangani peristiwa 'serangan fajar' Abepura pada 7 Desember 2000. Ia juga mengaku bahwa pihaknya telah menerima 32 laporan dari korban. Tim tersebut terdiri dari 10 karyawan yang akan melakukan investigasi, serta pendampingan di tingkat penyidikan dan pengadilan.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, saat berada di Timika menegaskan bahwa Tom Beanal tidak ikut diperiksa oleh polisi. Yang diperiksa hanya Theys H. Eluay sebagai Ketua PDP. Theys tetap ditahan dan pemeriksaannya dipercepat untuk diproses lebih lanjut.
- Koordinator Tim Advokasi Peduli HAM Merauke, Paskalis Letsoin, S.H., menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya tim adalah untuk mengadvokasi korban yang dirugikan oleh oknum aparat keamanan dan oknum masyarakat pada kerusuhan Merauke 2 Desember 2000. Ia menyebutkan, sudah dilakukan pendataan terhadap 55 orang korban, baik dari warga Papua maupun non-Papua, yang mengalami tindak kekerasan oknum aparat keamanan, anggota masyarakat, maupun anggota Satgas Papua.
- Direktur LBH Jayapura, Demianus Wakman, S.H., diinterogasi polisi tanpa surat pemanggilan, berkaitan dengan pendapatnya di harian *Papua Post* mengenai tindakan polisi dalam peristiwa penyerangan sejumlah asrama mahasiswa di Abepura.

13 Desember

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura

mendapat laporan penyalagunaan dana bagi pengembangan pelayanan kesehatan di Kecamatan Okbibab. Kasus tersebut oleh masyarakat diminta untuk diteruskan kepada pihak terkait yang berwenang, dalam hal ini Kanwil Dinas Kesehatan Tk. I sebagai penaggungjawab.

14 Desember

- Els-HAM Papua mengadakan konferensi pers, menanggapi peristiwa Abepura pada 7 Desember 2000. Konferensi pers itu dipimpin oleh direkturnya, Yohanis Bonay, S.H. dan Supervisor John Rumbiak. Dalam keterangannya Els-HAM menyatakan bahwa aparat Brimob dan Polisi diduga sebagai penyebab terbunuhnya Elkius Suhuniap secara kilat. Polisi juga telah menyebabkan meninggalnya Joni Karunggu dan Orry Doronggi di dalam tahanan akibat penyiksaan, selain telah melakukan perampasan harta milik mahasiswa dan penduduk sipil. Atas kenyataan tersebut, pihaknya menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM. Pihaknya telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Komans HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Anak untuk mengadakan penyelidikan dan memberikan perlindungan kepada korban.
- Menanggapi pernyataan Els-HAM, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., menyatakan bahwa apa yang dilakukan anak buahnya sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan apabila masih memberi informasi salah dan mengada-ada, pihaknya justru yang akan memeriksa Els-HAM.
- Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H., menyatakan sikap kepolisian terhadap rencana peringatan HUT Kemerdekaan Melanesia Barat pada 14 Desember 2000. Ia mengatakan, pihaknya tidak memberi izin untuk kegiatan itu dan meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak hadir dalam acara yang kabarnya akan digelar di Lapangan Mandala Kota Jayapura. Ia menambahkan, anggotanya sudah siap mengamankan daerah tersebut dari ujung ke ujung dengan bantuan seluruh masyarakat. Berkaitan dengan itu pula pihaknya telah menggiring enam orang yang diduga memimpin sekitar 100 orang massa yang melakukan *long march* dari gedung DPRD Irja ke Taman Imbi. Keenam orang itu adalah Dr. Albert Kaliele dan istrinya Ny. Khalik, Noni Mosso, Hari Wainggai, Edison Waromi, dan Yordan Iek.

- Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terhadap PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Direktur LBH Jayapura, Demianus Wakman, menyatakan bahwa mendapatkan pelayanan terbaik adalah hak konsumen PDAM. Jika ada keluhan maka pelanggan dapat mengadukannya ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tapi karena di Jayapura YLKI belum terbentuk, maka konsumen dapat mengadukan persoalan ini kepada lembaga hukum lainnya seperti LBH dan praktisi hukum.

15 Desember

- Direktur Els-HAM mendapat surat penangkapan dirinya dengan No. Pol. SPP/456/XII/2000/Serse, tertanggal 15 Desember 2000 dari Polres Jayapura dengan tuduhan telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik. Dia diperiksa sejak pukul 16.00 hingga 03.00 WIT berkaitan dengan isi konferensi pers Els-HAM mengenai peristiwa Abepura pada 7 Desember 2000. Polisi baru melepaskannya sekitar pukul 16.00 WIT hari berikutnya.
- Kopda Sahrudin, anggota TNI Yonif 713 yang bertugas di Pos Tiom bersama tiga anggota lainnya, yakni Kopda Zulkifli, Pratu Nasir, dan Pratu Asril, diserang massa sesudah menurunkan bendera Bintang Kejora di Kirime, Tiom, Kabupaten Jayawijaya. Korban diserang ketika menggiring 13 orang penjaga bendera ke Koramil terdekat. Ketika mencari taksi, tiba-tiba ratusan massa dengan bersenjatakan kapak, tombak, panah, dan parang menyerang mereka. Akibatnya, Kopda Sahrudin meninggal seketika dan ketiga temannya luka-luka. Jenazah Kopda Sahrudin langsung diterbangkan ke Makassar pada Sabtu, 16 Desember 2000, setelah diadakan upacara pelepasan di bandara Sentani yang dipimpin Dandim 1701, Letkol Infantri Santoso, mewakili Danrem 172/PWY.
- Wakil Gubernur Irja, Costant Karma, mengatakan bahwa rencana pembubaran Satgas Papua — seperti yang pernah disampaikan Gubernur Papua, Drs. J.P. Solossa, M.Si., kepada Presiden Abdurrahman Wahid — tetap akan ditindaklanjuti. Alasannya, seperti yang disampaikan gubernur, Satgas Papua tidak mampu lagi menciptakan ketertiban.
- Tiga tokoh yang memprakarsai kegiatan peringatan berdirinya Negara Melanesia Barat, yakni Dr. Albert Kaliele, Yordan Iek, dan Hari Wainggai, resmi menjadi tersangka dan ditahan oleh Polres

Jayapura. Hari Wainggai dan Jordan Iek dituduh telah melanggar pasal 368 KUHP mengenai pemerasan. Sementara Albert Kalele dituduh melanggar pasal 55 dan 56 KUHP karena diduga turut serta melakukan kegiatan tersebut.

16 Desember

Gereja-Gereja Papua di Jayapura mengeluarkan dan mengirim surat permohanan kepada Komnas HAM agar peristiwa 7 Desember segera diperiksa.

17 Desember

- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, menyatakan telah mengeluarkan surat perpanjangan penahanan No. 16/T.1.1/T/12/ 2000 untuk Theys H. Eluay dan Thaha Alhamid atas permintaan Kejaksaan Tinggi Irja. Pihaknya menegaskan bahwa perpanjangan ini tidak berdasarkan kepentingan lain, selain untuk memperlancar pemeriksaan dan kepentingan penyidikan. Lamanya perpanjangan penahanan adalah 20 hari, atau sampai 27 Desember 2001. Theys H. Eluay dituduh melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1), pasal 106 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, subsider pasal 169 ayat (1) KUHP, lebih subsider pasal 155 (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, serta sesuai LP Pol. No. Pol. LP/53/XI/ 1999/Dit. Serse (25 November 1999) dan LP Pol. No. Pol. LP/602/XII/Smpt/ tanggal 1 Desember 1999, LP Pol. No. Pol. LP/06/II/2000 Dit. Serse (28 Februari 2000), juga LP Pol. No. Pol. LP/15/VI/2000 (4 Juni 2000).
- Kapolres Jayapura, Superintendent Drs. Daud Sihombing, membenarkan bahwa pihaknya telah melepaskan Direktur Els-HAM, Yohanis G. Bonay, S.H., pada Sabtu, 16 Desember 2000, sekitar pukul 16.00 WIT. Menurutnya Els-HAM seharusnya menjadi lembaga yang benar-benar mampu memberikan informasi yang benar, bukan untuk menghasut atau memanas-manasi rakyat.
- Theys H. Eluay menyatakan keberangannya atas rencana pembubaran Satgas Papua seperti diungkapkan Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas dan didukung Wagub Irja, Costant Karma. "Wagub Karma terlampau tergesa-gesa mengomentari rencana pembubaran Satgas Papua. Satgas Papua berada dalam

kewenangan Lembaga Adat Papua. Ketuanya adalah saya, Bapak Ondofolo Theys H. Eluay, bukan di bawah Wagub Karma. Saya menolak dengan tegas kalau Wagub Karma menilai Satgas Papua tidak mampu lagi membuat ketertiban," ujarnya.

- Sekretaris Urusan RI — PNG, Drs. F.X. Suryanto S.W., mengungkapkan bahwa pemerintah PNG di Sandaun Province, telah menyatakan kesediaannya untuk menampung 287 orang pengungsi yang telah berada di Vanimo sejak 1 Desember 2000. Salah seorang pengungsi yang bernama James Gombo, telah dikembalikan ke Jayapura atas inisiatif pemerintah PNG. Para pengungsi itu ditampung dan diurus oleh pemerintah Sandaun. Namun pihaknya akan bertemu kembali dengan pemerintahan PNG untuk membahas dan mencari solusi pemulangan mereka.
- Panglima Operasi Umum TPN/OPM, Kolonel Willem Onde, mengaku kecewa dan tersinggung atas maklumat Kapolda Irja No.Pol. Mak/02/XII/2000 tanggal 12 Desember 2000, yang tegas-tegas melarang keberadaan TPN (Tentara Pembebasan Nasional). Ia menyatakan akan segera mengungsi dan akan segera kembali masuk hutan bila dikehendaki. "Saya dan pasukan serta rakyat Papua siap mundur. Kalau kami mundur, berarti hubungan komunikasi antara pemerintah dan TPN (Tentara Pembebasan Nasional) putus, dan kegiatan-kegiatan seperti pada masa lalu akan timbul kembali," tegasnya.

18 Desember

- Humas Protokol Kejaksaan Tinggi Irja, Thamrin, membantah jika pihaknya telah meminta perpanjangan penahanan terhadap dua tokoh PDP, Theys H. Eluay dan Thaha Alhamid. Permintaan perpanjangan itu menurutnya datang dari pihak Polda, bukan dari pihak Kejaksaan. Karena, berkas perkara yang diajukan pihak Polda pada 10 Desember 2000 perlu dilengkapi oleh penyidik. Namun karena masa penahanan 20 hari terhadap tersangka sudah habis, maka atas permintaan Polda pihak Kejaksaan memberikan perpanjangan penahanan.
- Kapolda Irja Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas mengungkapkan bahwa aparat keamanan dan pemerintah telah merebut momentum terbaik di Papua, yakni diprosesnya pemeriksaan terhadap pimpinan PDP serta dikeluarkannya maklumat polisi untuk

pembubaran organisasi TPN/OPM dan sejenisnya. Menurutnya, pola *offside* yang dipergunakan dalam menangani sepak terjang kelompok yang ingin merdeka tidak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan situasi kamtibmas di Papua.

- Wagub Irja Costant Karma, mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi tidak pernah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran Satgas Papua. Namun karena terikat kedinasan selaku Wakil Gubernur, ia harus mendukung segala kebijakan gubernur, termasuk rencana pembubaran Satgas Papua.
- Anggota Komisi A DPRD Tk.I Irja, Yance Kayame, berpendapat bahwa jika aparat keamanan tidak melakukan pendekatan, maka hampir dipastikan akan timbul reaksi dari masyarakat karena mereka masing-masing punya keinginan yang harus dipahami. Menurutnya pendekatan dapat dilakukan melalui agama dan LMA yang melibatkan semua komponen masyarakat.
- Musa Jan Youwe, S.H., M.Si., koordinator pendaftaran dan pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2000, mengatakan bahwa pelaksanaan tes di Jayapura berlangsung tertib, meski banyak peserta bingung mencari lokasi tes dan karena adanya pengunduran waktu tes dari pukul 11.00 menjadi pukul 12.00 WIT.
- Di Manokwari terdapat 4.316 orang peserta tes CPNS dari berbagai jenjang pendidikan yang memperebutkan jatah yang hanya 119 orang.

19 Desember

- Jabatan Kapolda Irja dari Brigjen (Pol.) Drs. S.Y. Wenas, diserah-terimakan kepada Irjen Drs. F.X. Soemardi, M.A., S.H. Kapolda baru berpendapat bahwa adanya aspirasi "M" bukanlah masalah asalkan dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan. Namun ia menegaskan bahwa Irian Jaya (Papua) tetap bagian dari NKRI, seperti Jawa, Minahasa, Sumatera, Ambon dan sebagainya, dari Sabang sampai Merauke.
- Kepala Kejaksaan Tinggi Irja, Bismar Mannu, S.H., menyatakan bahwa berkas perkara Theys dan kawan-kawan penyelesaiannya tergantung kepada pihak kepolisian. Kalau pemeriksaannya dapat diselesaikan dengan cepat, maka pihaknya juga akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Pihaknya juga menyiapkan tiga tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, yakni tim

penyidik, tim pemeriksa, dan tim peneliti.

- Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Tony Rompis, menegaskan bahwa TNI tidak akan segan-segan menyikat Tentara Pembebasan Nasional (TPN) yang bersenjata jika masih berkeliaran di Irian Jaya. "Dulu ada Operasi Sinar 2000. Itu saya akan lanjutkan. Kalau dia mau angkat senjata, *ya* saya layani. Tapi kalau dia mau berdialog, saya terima juga," tegasnya. Mengenai adanya tiga anggota TPN dari Merauke yang datang menemuinya, ia menjelaskan bahwa mereka hanya menyampaikan aspirasi dan membawa proposal untuk bupati agar bisa mendapatkan pekerjaan. Ia menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan kepada Gubernur jika banyak anggota TPN yang ingin bekerja dan ingin dimukimkan kembali.
- Menanggapi rencana kenaikan gaji PNS sebesar 200-300%, Gubernur Irja J.P. Solossa menyatakan bahwa rencana tersebut menjunjukkan perhatian pemerintah terhadap pegawainya. Berkaitan dengan rencana itu, Gubernur telah memerintahkan instansi terkait agar segera melakukan operasi pasar untuk mengantisipasi adanya spekulasi dari orang-orang tertentu yang menaikkan harga-harga barang kebutuhan sehari-hari.
- Neles Sroyer, Komandan Provost Satgas Papua Biak Numfor yang juga mantan tapol/napol peristiwa Biak berdarah, menanggapi rencana pembubaran Satgas Papua oleh Gubernur Irja dan wakilnya. Ia menyayangkan rencana itu dan menegaskan bahwa jika yang terlebih dahulu dibubarkan adalah Satgas Papua di Biak, maka dialah orang pertama yang akan menyatakan 'perang' terhadap kebijakan tersebut.

20 Desember

- Kapolda Irja Irjen F.X. Soemardi menyatakan bahwa proses pemeriksaan dugaan makar terhadap Theys H. Eluay dan kawan-kawan sudah diserahkan tim penyidik kepada Kejasaan. Pihaknya sedang menunggu apakah berkas tersebut masih perlu dilengkapi atau tidak. Tapi diakuinya bahwa kelima tersangka belum diserahkan ke Kejaksaan.
- Kuasa hukum Theys dan kawan-kawan, Hendrik Tomasoa, S.H., menanggapi pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Irja, Bismar Mannu, S.H., yang menyatakan bahwa sidang dugaan kasus makar

yang melibatkan ketua dan anggota PDP kemungkinan akan digelar di Jakarta. Hendrik menegaskan, jika perkara itu benar-benar digelar di Pengadilan Negeri Jakarta, berarti pihak kejaksaan sudah melanggar azas hukum *locus delicti*, yakni kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri di mana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 84 (1) KUHAP. Tentang alasan yang dikemukakan Kajati — yakni karena alasan keamanan — pihaknya berpendapat alasan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu.

- Kapolres Jayapura Superintendent Drs. Daud Sihombing, S.H. menegaskan bahwa tiga tokoh Melanesia Barat yang berada dalam tahanan Polres Jayapura, yakni Dr. Albert Kailele, Hari Wanggai, dan Yordan Iek, terlibat aksi 14 Desember 2000. Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk sementara mereka masih bebas dari jeratan makar. Ketiganya hanya terjerat kasus pemerasan melalui pembuatan surat yang isinya meminta sumbangan kepada masyarakat untuk keperluan HUT Kemerdekaan Melanesia Barat XII pada 14 Desember 2000.
- Gubernur Irja J.P. Solossa, M.Si. mengatakan, berbagai aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu ditanggapi dengan melakukan berbagai dialog yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Propinsi Papua. Baik itu aspirasi Papua Merdeka maupun aspirasi lainnya yang selama ini terus diperjuangkan oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk soal pelanggaran HAM di Papua. Menanggapi rencana kunjungan anggota Komnas HAM untuk menyelidiki peristiwa Abepura dan Desa Pa'pang, Jayapura, dinilai wajar oleh Gubernur karena sudah menjadi tugas dari institusi tersebut.
- Komunitas Muslim Asli Irian Jaya yang diwakili oleh H. Sofyan Wanggai (Koordinator), Muzakir Asso, Felix Fernando Wanggai, Said Asso, dan Tony Victor Wanggai, mengadakan pertemuan dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut disampaikan pokok-pokok pikiran alternatif dalam menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi di Irian Jaya. Komunitas Islam Asli Irian Jaya memandang bahwa kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Irian Jaya sudah berlangsung begitu lama sehingga proses penyelesaiannya harus dilaksanakan dengan hati-hati, bertahap, humanis, dan persuasif.[6]

21 Desember

- Kakanwil Kehakiman dan HAM Irja, M.B. Aronggear, mengatakan bahwa untuk menyambut Hari Raya Natal dan Lebaran, sebanyak 408 narapidana di Papua mendapatkan remisi, serta 15 orang di antaranya dinyatakan bebas. Keputusan tersebut didasarkan pada SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No. W 19-PS.01.04-52/53 tahun 2000. Perinciannya sebagai berikut: Jayapura: 48 remisi dan 1 bebas, Merauke: 76 remisi dan 5 bebas, Sorong: 52 remisi dan 3 bebas, Manokwari: 26 remisi dan 4 bebas, Biak: 13 remisi dan 1 bebas, Nabire: 20 remisi dan 1 bebas.
- Kapolda Irja Irjen Drs. F.X. Soemardi, bersama Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen TNI Tony Rompis, mengadakan pertemuan dengan para perwira TNI-Polri. Mereka mengevaluasi berbagai peristiwa yang terjadi di Abepura, Tiom, Wamena dan daerah lain yang mengakibatkan anggota Polri, TNI-AD, dan warga sipil tewas di tangan massa maupun Aparat Keamanan. Menurut kedua perwira tinggi tersebut, dalam mempertahankan dan mengembalikan situasi kamtibmas di Papua yang kondusif, program turun bersama ke lapangan antara Polri dan TNI dinilai menjadi kunci sukses. Ditegaskan juga bahwa TNI dan Polri harus tetap sehati dalam melaksanakan pertahanan keamanan sampai lapisan terbawah. Untuk itu para Danrem, Kapolres dan Dandim, Danramil dan Kapolsek, serta semua jajaran yang ada, harus saling mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai hal tentang pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Papua.
- Kepala Kejaksaan Tinggi Irja, H. Bismar Mannu S.H., membenarkan jika pihaknya telah menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Theys H. Eluay dan kawan-kawannya pada Rabu, 20 Desember 2000. Pihaknya kini sedang melakukan penelitian terhadap berkas tersebut, dan berupaya bisa selesai dalam waktu seminggu. Ia menambahkan, dalam perkara Theys dkk. persidangannya bisa saja dilakukan di Jakarta berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- Tiga pejabat di lingkungan Pemda Fak-fak, yakni mantan Camat Fakfak Barat, Pimpinan Proyek Pendidikan Berpola Asrama, dan Staf Kecamatan Fak-fak Barat dijatuhi hukuman masing-masing sembilan bulan penjara dipotong masa tahanan, serta denda Rp 1

[6] Teks selengkapnya dapat dibaca pada bagian lampiran.

juta. Ketiganya terbukti melanggar pasal 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 1973 tentang korupsi karena menggelapkan uang senilai Rp 31 juta yang merupakan dana Proyek Pendidikan Berpola Asrama di Desa Purwasak, Kecamatan Fakfak Barat.

22 Desember

- *Caretaker* Sekwilda Tk. I Irja, Ir. Sabirin Harapan, M.M.T., mengumumkan bahwa dalam kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid di Jayapura pada 25 Desember 2000 tidak ada dialog. Kunjungan itu semata-mata untuk menghadiri perayaan Natal yang akan dilangsungkan di Gedung Olah Raga Cenderawasih.
- Meski Menteri Pertahanan Mahmud M.D. telah mengumumkan bahwa anggota Kamra akan mendapat pesangon sebesar empat kali gaji (dengan total Rp 1 juta), namun di Jayapura pesangon itu tidak diberikan. Akibatnya 541 orang bekas anggota Kamra marah dan berunjukrasa ke kantor DPRD Papua. Menanggapi hal itu, baik Kapolres Jayapura Superintendent Drs. Daud Sihombing maupun Kapolda Irja Irjen Drs. F.X. Soemardi, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima perintah dari pusat mengenai pembayaran uang pesangon seperti diberitakan di media massa.
- Ketua Panel Papua Merauke, Drs. Januarius Wiwaron, sudah 21 hari mendekam dalam tahanan Polres Merauke karena aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Merauke pada 2 Desember 2000. Wakapolres Merauke Senior Inspektur Herman mengatakan, "Sementara ini yang bersangkutan memang masih kita tahan dan dalam proses pemeriksaan."

25 Desember

- Sekitar pukul 22.30 WIT sekelompok massa yang berjumlah sekitar 30 orang menyerang Pos Polisi di Tor Atas dan melakukan penyergapan terhadap Serda Gustam dan Serda Ever Sardi yang sedang melakukan pengamanan di gereja. Akibat aksi penyergapan itu dua pucuk senjata api Polri, Mouser No. 4158 R dengan 60 butir amunisi dan US Carabine No. 169804 dengan 26 amunisi, dirampas. Namun kedua anggota polisi tersebut berhasil menyelamatkan diri.
- Dalam perayaan Natal Oikumene di GOR Cenderawasih, Jayapura, Presiden Abdurrahman Wahid menolak dengan keras tindakan-tindakan untuk memerdekakan Papua dan lepas dari Kedaulatan

Republik Indonesia. Tetapi ia memberikan hak pada siapapun untuk menyatakan pikiran. "Hanya saja jika pernyataan pendapat dan kehendak itu disertai dengan kekerasan, atau untuk mempersiapkan kemerdekaan, maka sebagai orang yang mengabdi pada UUD '45 dan kedaulatan negara, mau tidak mau saya harus mengambil tindakan," tegasnya. Presiden juga menyerukan agar seluruh masyarakat tetap menegakkan citra hukum yang berdasarkan perikemanusiaan. Dicontohkannya, pada waktu Kapolda yang dulu meneleponnya bahwa Theys ditahan, ia meminta agar penahanan itu jangan lebih dari tanggal 5 Desember 2000. Namun jika Theys oleh aparat dianggap melanggar hukum, maka pihaknya tidak boleh ikut campur tangan.

- Di Timika, Presiden Abdurrahman Wahid dengan keras mengingatkan perusahaan asing, termasuk PT Freeport Indonesia, untuk tidak berpolitik. Sebagai perusahaan, mereka lebih baik memberikan perhatian terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, perbaikan penanganan pengelolaan sumber daya alam, serta tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Mengenai penanganan lingkungan, ditegaskannya bahwa kasus seperti yang terjadi di perusahaan emas PT Newmont Manado yang sempat ditutup karena merusak alam di sekitarnya, tidak boleh terjadi di Papua.
- Dalam pertemuannya dengan masyarakat Timika di Gereja Tiga Raja, Timika, Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui nama 'Papua' digunakan sebagai nama Propinsi Irian Jaya, termasuk penyebutan Tanah dan Bangsa Papua. Dalam pertemuan itu hadir antara lain Ketua Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (HAMAK) Mama Yosepha Alomang, Ketua Panel Mimika Pdt. Isak Onawame, dan Wakil Ketua PDP Tom Beanal.
- Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan untuk Kawasan Indonesia Timur mengatakan, saat ini sedang dirumuskan otonomi daerah dan otonomi khusus yang menjabarkan perlakuan-perlakuan khusus untuk Irian Jaya. Menurutnya otonomi tersebut merupakan salah satu solusi yang paling realistis saat ini. Program pertamanya adalah mengadakan diskusi dan dialog untuk mengisi draft UU Otonomi Khusus yang melibatkan LSM, tokoh agama, tokoh adat, kaum perempuan, mahasiswa, dan pemuda.
- Sekretaris Umum Persatuan Greja-Greja Indonesia (PGI), Pdt. I.

P. Lambe, S.Th., menanggapi penahanan yang dilakukan Polda Irja terhadap Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Herman Awom. Menurutnya Awom ditahan dalam kapasitasnya sebagai anggota PDP. Dalam kedudukannya sebagai warga negara, apa yang dilakukan Awom adalah sah. "Kami, atas dasar kemanusiaan, telah mengusulkan kepada aparat agar Awom dan juga beberapa rekannya diberi kesempatan untuk merayakan Natal dan Idul Fitri bersama keluarga masing-masing. "Tapi kalau menurut pertimbangan hukum aparat tidak mengizinkan, saya tidak tahu itu," katanya.

- Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar ofm, mengatakan bahwa di antara sesama manusia harus saling belajar untuk menghormati perbedaan, meskipun di antara manusia itu berbeda suku, warna kulit, dan kebudayaan. Mengenai peristiwa pemboman di beberapa gereja di Jakarta, ia berpendapat, "Saya harap kita jangan terpancing. Sekarang ini kita sedang dihasut supaya kita juga membalas dengan keras."

27 Desember

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara PT Freefort Indonesia dengan masyarakat adat Desa Waa, Desa Arwanop, dan Desa Tsinga yang tertunda beberapa waktu lalu akhirnya dilaksanakan. Isi dari Nota Kesepahaman sebenarnya mengenai persetujuan penggunaan Danau Wanagong sebagai tempat pembuangan limbah. Tetapi oleh PT Freeport, saat berunding dengan masyarakat, dikaburkan dengan hanya menekankan segi pembangunannya saja. Dengan MOU ini PT Freeport IndonesiaI memiliki bukti legal seperti yang dituntut oleh Departemen Lingkungan Hidup, selain tuntutan adanya penelitian ilmiah terhadap lingkungan hidup.

Bagian 2
Kondisi Sosial-Politik Papua 2000

Di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan sosial-politik di Papua yang juga berkaitan erat dengan sejumlah kebijakan nasional, seperti otonomisasi, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), suasana transisi menuju demokrasi, dan dinamika perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan di Jakarta.

INTRODUKSI DAN RANGKUMAN

Ada sejumlah perkembangan inti yang sangat mewarnai kehidupan sosial-politik di Papua pada 2000. Tahun tersebut dimulai dengan kehadiran Presiden Abdurrahman Wahid di Jayapura untuk menyambut tahun baru, hingga diberikannya lampu hijau kepada Propinsi Irian Jaya untuk boleh menggunakan nama Papua pada hari pertama milenium baru. Selain itu, bendera Bintang Kejora dibiarkan berkibar di berbagai tempat di Papua. Kedua peristiwa itu membuat suasana di awal tahun relatif tenang dan santai, serta umumnya memberikan semangat dan harapan kepada masyarakat Papua.

Dalam suasana seperti ini, para pemimpin Gerakan Aspirasi Merdeka (Gerasem) mulai merencanakan penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua, yang akhirnya berlangsung pada akhir Februari 2000. Salah satu hasil penting Mubes adalah terbentuknya Presidium Dewan Papua (PDP). Mubes dilanjutkan dengan suatu pertemuan besar-besaran, yakni Kongres Papua II, yang

berlangsung pada akhir Mei 2000. Melalui kedua pertemuan akbar ini, perjuangan bangsa Papua mulai terungkap secara bebas di depan umum, dan hasilnya disosialisasikan melalui safari pimpinan Gerasem ke berbagai daerah di wilayah Papua.

Kalau selama paruh pertama 2000 Gerasem masih diberi angin, atau sekurang-kurangnya ditolerir oleh pihak yang berwajib, suasana sosial-politik mulai mengalami perubahan drastis selama paruh kedua tahun itu. Kritik hebat dari sejumlah tokoh politik nasional pasca Kongres Papua II mulai muncul. Suara resmi pemerintah terhadap Gerasem juga semakin negatif. Bahkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Kongres dan Mubes dituduh telah melanggar hukum. Kegiatan mereka dinilai makar dan separatis sehingga perlu ditindak dengan tegas.

Perubahan suara serta penilaian tersebut tidak lepas dari perebutan kekuasaan di tingkat nasional, ketika kedudukan Presiden Abdurrahman Wahid mulai dirongrong secara terang-terangan. Dalam perebutan kekuasaan ini, persoalan Papua dijadikan 'komoditi politik' oleh para pemain politik di tingkat nasional. Perkembangan ini semakin hari semakin terasa oleh masyarakat, dan puncaknya terjadi pada Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada pertengahan Agustus di Jakarta. Dengan demikian 'masa toleransi' bagi Gerasem serta pimpinannya menemui titik akhir.

Ketika perubahan kebijakan nasional terhadap Gerasem ditetapkan secara resmi, pelaksanaannya menjadi nyata di tengah masyarakat Papua. Misalnya dengan ditambahnya jumlah personil pasukan keamanan, pelarangan pengibaran bendera Bintang Kejora, penangkapan dan penahanan sejumlah pemimpin Gerasem, serta pengejaran anggota Panel dan Satgas Papua. Peristiwa-peristiwa itu juga memunculkan insiden-insiden berdarah di Wamena, Merauke, dan Abepura. Akibatnya, pada akhir 2000 suasana sosial-politik di Papua berubah menjadi sangat tegang. Masyarakat luas mulai merasa sangat kecewa, takut, dan tertindas seperti tahun-tahun sebelumnya. Angin kebebasan sudah tidak bisa dihirup lagi.

Di bawah ini merupakan paparan sejumlah unsur dalam perkembangan yang telah digambarkan di atas secara ringkas, dengan memberikan perhatian pada peranan sejumlah unsur penentu sejarah pada 2000. Uraian ini dibagi menjadi dua bagian: (1) paruh pertama 2000, dan (2) paruh kedua 2000, mengingat suasana kemasyarakatan

selama kedua periode itu sangat berbeda.

PARUH PERTAMA 2000

1. Gerakan Aspirasi Merdeka dan Pimpinannya

Dinamika Gerakan Aspirasi Merdeka (Gerasem) pada bulan-bulan awal 2000 paling jelas terungkap dalam persiapan dan pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Papua. Para pemimpin Gerasem merasa perlu adanya usaha untuk menkonsolidasikan perjuangannya secara lebih jelas dan rapi.

Rencana penyelenggaraan Mubes diumumkan ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengunjungi Papua pada 31 Desember 1999. Tujuan Mubes dirumuskan sebagai berikut:

> "Di masa lampau, keputusan-keputusan politik selalu diambil tanpa melibatkan bangsa Papua. Sejalan dengan era reformasi serta keterbukaan politik di Indonesia, bangsa Papua menjadi sadar akan perlunya pemberlakukan keadilan dan pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran perlu dijalankan melalui suatu dialog politik, dan sejarah bangsa Papua perlu diluruskan seperlunya. Maka, Mubes perlu diselenggarakan".

Mubes dibuka pada 23 Februari 2000 di hotel Sentani Indah, Sentani. Di depan hotel tempat pertemuan, bendera Merah Putih dikibarkan. Sementara di dalam ruang pertemuan yang dikibarkan adalah bendera Bintang Kejora dalam jumlah besar. Para tokoh Pemda (Muspida) diundang menghadiri pembukaan Mubes, namun mereka memilih untuk tidak memenuhi undangan tersebut.

Sekitar 400 orang berkumpul selama Mubes, termasuk 10 wakil dari setiap kabupaten, beberapa wakil dari organisasi-organisasi perjuangan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan beberapa tokoh setempat. Lokasi pertemuan juga didatangi banyak simpatisan yang mengikuti proses pertemuan melalui sistem pengeras suara. Pengamanan Mubes dilakukan oleh Satgas Papua yang telah mendapat izin dari pihak kepolisian.

Untuk pertama kalinya, Mubes juga dihadiri oleh sejumlah wakil dari PNG (Papua New Guinea). Dari satu sisi, kelompok ini membawa gagasan dan sejarahnya sendiri, misalnya menekankan adanya satu

wawasan Melanesia atau Pasifik. Di sisi lain, mereka kehilangan penghayatan dan buta soal perkembangan di Papua selama dua tahun terakhir. Kenyataan ini seringkali memunculkan diskusi hangat di arena Mubes. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Papua dapat mendiskusikan isi hatinya secara terbuka tanpa diganggu siapapun.

Mubes ditutup pada 26 Februari 2000. Bagi masyarakat Papua, tanggal tersebut mempunyai arti penting karena genap setahun sebelumnya perwakilan bangsa Papua (Tim 100) menghadap Presiden B.J. Habibie untuk menyatakan bahwa mereka ingin agar pemerintah Indonesia mengakui kedaulatan bangsa Papua.

Selama Mubes, ada tiga pokok pembahasan yang menjadi inti perhatian para peserta:[1]

1. Perlu adanya pelurusan sejarah.
2. Perlunya penyusunan suatu agenda politik.
3. Perlunya pemantapan gerakan.

1.1. Pelurusan sejarah

Topik diskusi yang paling dominan dalam Mubes adalah soal pelurusan sejarah Papua. Unsur-unsur yang dibahasnya berkisar seputar:

- Perlunya evaluasi terhadap proses integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.
- Perlu adanya penilaian secara khusus terhadap pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, yang akhirnya menentukan status politik Papua.
- Pemaknaan historis 1 Desember 1961 sebagai hari pertama kalinya bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda, hari peresmian lagu kebangsaan Papua, dan hari pengangkatan anggota-anggota Dewan *Nieuw Guinea* untuk pertama kalinya, yang 50% terdiri dari orang Papua.

1.2. Agenda politik

Diskusi mengenai agenda politik sebenarnya tidak pernah menjadi jelas. Pembahasan meninggalkan berbagai kekosongan sehingga perlu ada pembahasan ulang di masa mendatang. Kongres Papua II diharapkan akan membahas kembali agenda politik ini

---

[1] Hasil Mubes berupa komunike resmi dilampirkan pada bagian akhir buku ini.

sampai menghasilkan suatu program kerja yang jelas.

Dalam mendiskusikan agenda politik, pembentukan suatu pemerintahan transisi diangkat dan ditanggapi secara sangat emosional. Namun pembahasan yang sistematis tidak tercapai sehingga persoalan ini ditinggalkan sebagai 'pokok pembahasan yang masih terbuka'.

1.3. *Pemantapan organisasi*

Untuk memantapkan pengorganisasian, perlu dibentuk Presidum Dewan Papua (PDP). Pembentukan PDP dimaksudkan untuk memberikan arah gerakan serta menentukan pimpinan Gerasem di masa mendatang. PDP terdiri dari 18 orang anggota inti dan sejumlah unsur masyarakat yang masing-masing diwakili dua orang. Unsur-unsur tersebut adalah wakil dari kalangan adat, pelaku sejarah, cendekiawan, politisi, perempuan, mahasiswa, tokoh agama, pemuda dan mantan tahanan politik (tapol). Dalam konsep awalnya, juga disarankan agar diberi tempat bagi tokoh Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional (OPM/TPN) dan Satgas Papua. Namun setelah ada pembahasan yang hangat, saran ini ditinggalkan.

Kemudian diangkatlah orang-orang yang akan duduk di PDP. Mereka adalah Theys Hiyo Eluay (tokoh adat) dan Tom Beanal (politisi) sebagai dua ketua; Herman Awom (tokoh agama), Benny Giay (cendekiawan), dan Frans-Albert Joku (tokoh adat) sebagai moderator. Sementara yang duduk sebagai anggota adalah Beatriks Koibur dan Ketty Yabansabra (tokoh perempuan), Isack Ayomi (politisi), Don Flassy (cendekiawan), Martinus Werimon dan Leo Imbiri (tokoh mahasiswa), Elieser Awom dan John S. Mambor (mantan tapol), Fred Suebu dan Melkias Mandosir (pelaku sejarah), Andi Manobi dan Yakob Kasima (tokoh pemuda), serta H. Muh. Said Sabuku (tokoh agama).

PDP ditugaskan untuk: [1] menindaklanjuti keputusan-keputusan Mubes, [2] menyiapkan pembahasan lanjutan sejumlah masalah penting yang belum dapat dibahas secara tuntas, dan [3] menyiapkan Kongres Papua II.

2. Beberapa Unsur Refleksif Berkaitan dengan Gerasem Selama Paruh Pertama 2000

2.1. *Lobi internasional* (going international)

Sebelum Mubes diadakan, para pemimpin Papua telah mendis-

kusikan adanya dukungan luar negeri terhadap Gerasem. Konferensi pers Els-HAM (suatu lembaga aktivis HAM di Papua) pada 4 Februari 2000 yang menyatakan bahwa "persoalan Papua belum ada dalam agenda PBB "ditanggapi dengan emosional oleh orang yang percaya bahwa Gerasem telah memperoleh dukungan berarti dari luar negeri. Isi pernyataan itu dinilai melawan informasi yang sudah tersebar luas di masyarakat Papua, bahwa perjuangan Papua mendapat dukungan PBB dan sejumlah pemerintah luar negeri.

Walau beberapa pengamat kritis sudah berulang kali menyangkal dukungan itu, masyarakat luas tetap memilih untuk percaya pada informasi tersebut. Setelah Els-HAM membuat pernyataan pers, masyarakat Papua sangat ditantang untuk menyadari dan menerima kenyataan bahwa sejumlah pemimpin mereka tidak memberikan informasi yang lengkap selama ini.

Sementara itu, sejumlah tokoh pemerintah pusat di Jakarta (termasuk para pejabat tinggi) terkesan tidak terlalu dipusingkan oleh gerakan kemerdekaan di Papua. Mereka menganggap gerakan tersebut "akan mati dengan sendirinya karena konflik-konflik intern. Ada banyak suku di sana dengan kepentingannya masing-masing, sehingga tidak mungkin terbentuk suatu kesatuan yang kuat".[2] Namun demikian, mereka takut dan khawatir jika persoalan Papua dijadikan "isu internasional". Ketakutan seperti itu menjelaskan kenapa pemerintah begitu ketat mengawasi media massa internasional pada awal 2000 di Papua.

Berlawanan dengan 'harapan pemerintah pusat', masyarakat Papua terus mencari jalan agar perjuangannya memperoleh perhatian dari dunia internasional. Karena itulah para pemimpin Gerasem berusaha mendorong terlaksananya:

(1) penelitian ilmiah mengenai apa yang persis terjadi pada 1969, khususnya dalam pelaksanaan Pepera, yang ditinjau dari segi hukum; serta
(2) pendokumentasian yang rinci mengenai pelanggaran HAM selama kurun waktu 38 tahun terakhir.

Berbagai pelanggaran HAM di Papua diharapkan mendapat perhatian serius dari PBB. Sekjen PBB sendiri, Kofi Annan, dalam sebuah wawancara pada 13 Februari 2000 di Jakarta, menyatakan

---

[2] Kesan ini diperoleh dari sejumlah pembicaraan pribadi dengan beberapa tokoh di Jakarta selama bulan-bulan pertama 2000.

bahwa pihaknya mendukung perjuangan masyarakat Papua "dalam kerangka HAM". Namun menurut sejumlah pengamat, selama Mubes berlangsung pembahasan persoalan HAM hampir tidak mendapat tempat. Hal ini cukup mengherankan.

Sedangkan yang menyangkut penelitian Pepera, suatu langkah penting telah diambil oleh pemerintah Belanda dengan membentuk sebuah tim penelitian. Penelitian ilmiah yang dijalankan atas permintaan resmi pemerintah Belanda itu dapat menjadi langkah awal penginternasionalisasian perjuangan masyarakat Papua. Di samping itu kehadiran wakil-wakil dari PNG dan Pasifik selama Mubes berlangsung, dapat turut meningkatkan perhatian dunia internasional terhadap persoalan Papua.

2.2. *Lobi nasional* (going national)

Pemerintah Indonesia sering dinilai tidak pernah menanggapi secara serius pernyataan Tim 100, serta tidak pernah menanggapi secara serius "gerakan kemerdekaan". Dari satu sisi hal ini mungkin benar karena pemerintah banyak menunjukkan sikap "tidak mau tahu". Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa pemerintah (lebih-lebih pemerintah pusat) mau memahami kenapa gerakan kemerdekaan, yang sekaligus menjadi ungkapan penderitaan masyarakat, muncul dengan kuat. Pemerintah juga menunjukkan sikap tidak peduli terhadap penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM. Namun, sekurang-kurangnya Presiden Abdurrahman Wahid telah membuat pernyataan yang sangat jelas ketika bertemu dengan para pemimpin Gerasem pada 31 Desember 1999. Presiden menyatakan, "Tidak ada ruang bagi bangsa Papua untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia". Dengan demikian, senang atau tidak, tanggapan pemerintah adalah jelas: menolak kemerdekaan.

Yang mengherankan, masyarakat Papua tidak pernah menerima jawaban Presiden sebagai suatu jawaban final. Selama Mubes, tanggapan Presiden tidak dibahas. Peserta Mubes tidak terangsang memikirkan kelanjutan perjuangan atas dasar jawaban Presiden. Mungkin para peserta menganggap ada banyak hal mendasar yang lebih penting untuk dibicarakan dalam Mubes dan Kongres daripada mengurusi jawaban Presiden.

Perlu juga dicatat bahwa seusai Mubes anggota PDP tetap mengunjungi Presiden untuk memberikan keterangan mengenai hasil-

hasil yang dicapai selama Mubes. Mereka juga kembali menyampaikan keinginannya agar Presiden mau mengakui hak dan kedaulatan bangsa Papua. Seolah-olah mereka berusaha menanggapi sikap masa bodoh pemerintah terhadap penderitaan bangsa Papua selama 38 tahun.

Pola kegiatan ini mengherankan banyak pengamat. Kenapa para pemimpin Papua tidak memperhitungkan keadaan politik yang sebenarnya? Ini bukan soal menolak keinginan untuk membebaskan diri, melainkan untuk menghindari mimpi dan harapan yang terlampau tinggi dari masyarakat. Mubes justru tidak dimanfaatkan untuk merefleksikan kenyataan dan mengirim pesan yang lebih jelas kepada masyarakat.

Namun bagaimanapun, para pemimpin Papua telah berusaha memperkuat 'lobi nasional' sambil berusaha memberi pemahaman kepada warga (baik Papua maupun non-Papua) mengenai latar belakang perjuangan Papua untuk mencari simpati dan dukungan. Mereka juga berupaya mencari peluang-peluang politik untuk mengadakan suatu dialog terbuka.

2.3. *Lobi lokal* (going local)

Selama ini di Papua banyak masyarakat yang bingung, dan menerima informasi hanya sepotong-sepotong saja. Salah satu kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan adalah dilakukannya dialog terbuka yang berbobot antara pemimpin Papua dengan masyarakatnya sendiri. Tujuannya agar masyarakat luas betul-betul memperoleh suatu gambaran mengenai situasi yang sebenarnya, termasuk mengenai perbedaan pendapat yang muncul di kalangan pimpinan maupun masyarakat.

Muncul kesan dari sejumlah warga Papua yang merasa 'diabaikan' karena tidak dimintai pendapat, 'dicap' pro-otonomi, atau dinilai setengah-setengah dalam mengikuti gerakan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan keterbukaan untuk menjabarkan gerakan menjadi sejumlah kebijakan serta strategi konkret dalam suatu program terperinci, yang dapat menyatukan seluruh komponen perjuangan.

3. Beberapa Hambatan Intern dan Ekstern

Di samping sejumlah catatan refleksif di atas, juga tercatat faktor-faktor yang menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor itu berasal dari dalam dan luar gerakan.

3.1. Dari dalam

Pertama, ada kekaburan mengenai siapa sebenarnya pemimpin PDP. Di dalam tubuh PDP ada dua ketua, yakni Theys Eluay dan Tom Beanal. Namun pada 1 Maret 2000, beberapa hari setelah Mubes, sebuah harian lokal mengutip komentar Theys yang mengatakan, "Sayalah pemimpin PDP, bukan Tom."

Kedua, selama beberapa minggu harian lokal memberikan tempat yang luas untuk diskusi-diskusi di antara anggota PDP berkaitan dengan rencana pembentukan pemerintahan transisi. Jelas di situ ada pro-kontra. Namun diskusi publik tersebut tidak membantu masyarakat luas untuk memahami apa sebenarnya *policy* PDP.

Ketiga, melalui sebuah rapat kerja, PDP memutuskan untuk menunda pelaksanaan Kongres Papua II. Alasannya: (1) agar persiapannya lebih mantap, (2) karena muncul kebingungan berkaitan dengan pembentukan pemerintahanan transisi, dan (3) karena banyak anggota PDP disibukkan oleh polisi yang terus melakukan interogasi terhadap mereka. Pada saat penundaan diumumkan, belum ditetapkan kapan Kongres II akan dilaksanakan karena para anggota PDP sendiri tidak mencapai kesepakatan.

Keempat, muncul isu "1 Mei". Banyak orang percaya bahwa kemerdekaan Papua akan terwujud pada 1 Mei 2000, atau sekurang-kurangnya pada tanggal itu pemerintahan transisi sudah terbentuk. Laporan-laporan dari Paniai dan Jayawijaya memberikan kesan bahwa isu itu sudah tersebar luas di kalangan masyarakat pedalaman. Isu ini sangat mengganggu, karena [1] dari satu segi mengakibatkan banyak orang (terutama yang berasal dari luar Papua) menjadi takut, dan [2] dari segi lain mempertebal 'kepercayaan diri yang berlebihan' (*overacting)* sejumlah warga Papua yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan arogan. Misalnya tindakan penyegelan, pemungutan liar, pengganggguan sopir-sopir angkutan umum, dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kekecewaan masyarakat (yang sudah dapat diramalkan) jika isu tersebut tidak terwujud. Sulit untuk mengetahui apa akibat dari kekecewaan itu.

3.2. Dari luar

Pertama, walaupun Mubes sudah mendapat izin dari pihak

keamanan, Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, mengeluarkan pernyataan yang membingungkan. Seusai Mubes ia mengatakan bahwa pihaknya belum tahu harus bagaimana menilai hasil Mubes tersebut. Ia juga belum dapat memastikan apakah Mubes melanggar hukum dan dinilai sebagai subversif atau tidak.[3] Pernyataan ini disusul dengan tindakan penginterogasian terhadap hampir semua anggota PDP. Tindakan ini sangat membingungkan masyarakat dan korban yang diinterogasi. Aparat keamanan terkesan sengaja memilih cara untuk memupuk kebingungan di tengah-tengah masyarakat sambil menciptakan "sesuatu yang misterius".

Wakapolda Irja kemudian mengeluarkan pernyataan susulan. Ia mengatakan bahwa anggota PDP yang dipanggil memang berstatus "tertuduh", namun interogasi terhadap mereka 'hanya untuk meminta keterangan saja'. Yang aneh, tuduhan tersebut hanya disuarakan pers asing, dan tidak mendapat perhatian pers setempat. Apakah hal ini juga sengaja dilakukan untuk menciptakan kebingungan? Apakah aparat kepolisan sedang berusaha meng-*counter* sukses Mubes yang memberikan semangat baru pada masyarakat Papua? Apakah ini sebuah cara yang digunakan agar para pemimpin Papua tidak dapat menyiapkan Kongres Rakyat Papua dengan tenang dan baik?

Kalau para pemimpin Papua terus-menerus direpotkan dan tidak dapat menangani hal-hal yang penting, maka bisa dipastikan masyarakat Papua akan kehilangan arahan yang dibutuhkan. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang sabar dan kurang terbuka menerima tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Jika sudah demikian, harapan masyarakat bisa langsung dikubur dengan sebuah tindakan represif besar-besaran dari aparat keamanan. Tindakan represif ini tidak mustahil akan dilakukan.

Kedua, kebingungan masyarakat semakin bertambah dengan munculnya peristiwa Nabire, pada 28 Februari – 4 Maret 2000. Ketika masyarakat masih menikmati rasa puas atas terselenggaranya Mubes, tiba-tiba tiga orang Papua dibunuh di Nabire dan banyak yang lainnya dipanggil untuk diinterogasi. Menurut laporan yang diperoleh, seluruh proses ini juga disertai tindakan intimidasi dan penganiayaan.

Ketiga, terjadi juga kekacauan di Fakfak pada 19-20 Maret 2000, akibat bentrokan antara Satgas Papua dengan Barisan Merah Putih.

---

[3] Harian *Cenderawasih Pos,* 28 Februari 2000.

Muncul sebuah pertanyaan di benak banyak orang: apakah di Tanah Papua juga muncul kegiatan milisi seperti di Timor Timur? Siapa yang berada di belakang semu ini?

Keempat, adanya kabar mengenai penambahan jumlah personil Polri dan TNI juga turut menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan. Informasi mengenai penambahan jumlah pasukan mulai diangkat oleh harian *Cenderawasih Pos* pada pertengahan Maret 2000. Pada 30 Maret 2000, pimpinan TNI menyatakan bahwa tidak benar ada penambahan personil. Menurut pihak TNI, personil yang didatangkan hanya mengganti pasukan yang dipulangkan. Tidak dijelaskan mengapa pimpinan TNI membutuhkan waktu begitu lama untuk memberikan keterangan. Ada apa di belakang semua ini? Pertanyaan tersebut muncul di benak banyak masyarakat.

Begitulah suasana kehidupan sosial-politik di Papua. Menyadari perkembangan seperti ini, kita tidak dapat menghindari kesimpulan bahwa konsentrasi serta refleksi terbuka atas apa yang berkembang di Tanah Papua perlu diprioritaskan. Lobi lokal perlu diutamakan. Prioritas itu mencakup penyajian informasi yang lengkap serta arahan yang jelas kepada masyarakat luas.

4. Beberapa Pokok Khusus

4.1. Apa makna "kemerdekaan" bagi masyarakat?

Sering terdengar ungkapan dari masyarakat: "kemerdekaan adalah harga mati". Kemerdekaan yang dimaksud masyarakat biasa itu, memang tidak sulit ditafsirkan: mereka menginginkan suatu negara tersendiri. Sudah tentu pemerintah menyatakan bahwa mimpi seperti itu tidak mungkin didiskusikan. Segala kegiatan ke arah itu akan berhadapan dengan pihak keamanan. Pesan seperti ini juga dengan jelas telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan para pejabat tinggi negara. Tak heran ketika diskusi di arena Mubes Papua mulai menyentuh soal pembentukan pemerintahan transisi, suasana menjadi sangat emosional, walaupun isu pembentukan pemerintahan transisi sebenarnya bukanlah barang baru. Isu tersebut sudah menjadi salah satu pokok pernyataan yang dibacakan Tim 100 di depan Presiden B.J. Habibie pada 26 Februari 1999.

Sementara itu, di dalam Mubes salah seorang anggota DPRD menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan transisi adalah suatu

tindakan makar. Menurutnya, rencana tersebut lebih baik ditinggalkan saja. Pernyataan itu membuat banyak orang berpikir dua kali. Sebelumnya banyak masyarakat berpikir bahwa pembentukan pemerintahan transisi berarti suatu pilihan untuk membentuk negara tersendiri. Maka diskusi mengenai pembentukan pemerintahan transisi pada dasarnya merupakan diskusi mengenai "negara tersendiri". Karena itu pertanyaannya adalah: mau memilih negara tersendiri atau tidak? Akhirnya pertanyaan ini tetap ditinggalkan terbuka tanpa jawaban.

Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa banyak orang menjadi bingung dengan pertanyaan mengenai "kemerdekaan". Walaupun mereka dalam hatinya menginginkan suatu negara tersendiri, tapi akhirnya mereka menjadi sangat hati-hati. Sebagian di antara mereka lebih memilih jalan yang lebih panjang untuk mencapai cita-citanya. Dalam kerangka ini pula, sejumlah orang akhirnya memberi tempat pada konsep "otonomi khusus".

Ada juga sejumlah orang yang berusaha memaknai "kemerdekaan" sebagai: "membebaskan diri dari segala bentuk penindasan, ketakutan, intimidasi, penahanan semena-mena, stigmatisasi, kecurigaan, bebas untuk bicara, bebas menyelenggarakan diri sendiri, bebas mengungkapkan identitas budaya sebagai bangsa, bebas dari tindakan yang meremehkan, bebas dari tindakan sewenang-wenang, bebas untuk menentukan gaya pembangunannya sendiri, bebas dari penyingkiran dalam proses pengambilan keputusan, dan seterusnya".

Makna "kemerdekaan" tersebut masih dapat diperpanjang. Namun yang jelas, pemaknaan itu tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diartikan oleh Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas. Menurutnya, makna sesungguhnya dari kemerdekaan adalah bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari keterbelakangan.[4] Tentu saja rumusan itu ditolak, karena masyarakat Papua tidak merasa dirinya bodoh, miskin, dan terbelakang. Tafsiran yang diungkapkan Kapolda dinilai lebih mencerminkan sikap orang yang menganggap dirinya superior. Dalam rumusannya hampir tidak ada ruang bagi unsur-unsur yang mau diperjuangkan Gerasem. Bahkan mungkin di dalamnya tidak ada ruang untuk memperjuangkan keadilan dan

---

[4] "Mereka bicara tentang pemerintahan transisi", dalam *Tifa Papua*, No. 11 Tahun 44, 20-25 Maret 2000, hlm. 5.

kebenaran, melainkan hanya untuk "mendapatkan belas kasihan".

Perbedaan dalam tafsiran ini memperlihatkan betapa penting dan mendesaknya perumusan konsep 'kemerdekaan' yang jelas, rinci, dan mudah dimengerti masyarakat luas. Bukan rumusan ideal yang dibutuhkan, melainkan suatu rumusan yang mengandung rincian mengenai jalan mana yang dapat mengantar masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya. Setelah Mubes, masyarakat mengharapkan adanya jawaban yang membantu mereka dalam memaknai persoalan kemerdekaan pada Kongres Papua II.

4.2. Apakah perkembangan Gerasem sudah membuka dialog?

Pada bagian ini pembahasan akan ditekankan pada sejumlah unsur yang turut mewarnai kehidupan masyarakat Papua, seperti (1) sosialisasi hasil Mubes di kalangan pemerintah pusat, (2) peristiwa Nabire yang disusul dengan peristiwa di Fakfak, dan (3) peranan Satgas Papua.

4.2.1. Sosialisasi hasil Mubes di kalangan pemerintah pusat

Sejumlah kegiatan untuk mensosialisasikan hasil Mubes memang dijalankan. Tapi kegiatan itu menimbulkan pertanyaan. Untuk apa? Apakah untuk melegitimasi Mubes? Mungkin tidak, mengingat para pejabat (lebih-lebih aparat keamanan) setempat semakin cenderung menyatakan bahwa Mubes tidak sah.

Gubernur Irja Freddy Numberi sempat menyatakan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid telah bersedia untuk membuka Kongres Papua II. Namun apakah kesediaan itu juga menunjukkan suatu kemauan politik (*political will*) dari pemerintah untuk membuka dialog yang sungguh-sungguh? Kurangnya pemahaman, keterbukaan, dan kemampuan berdialog sebagaimana ditunjukkan pemerintah selama ini dinilai sangat memprihatinkan. Pemerintah dianggap tidak mampu memperlihatkan sikap yang lebih terbuka. Bahkan pemerintah dengan keras berusaha menjual konsepnya sendiri, yakni otonomi. Selain itu, secara sepihak pemerintah memaksakan rencana pemekaran Papua menjadi tiga propinsi. Bukti yang paling jelas bisa dilihat dalam pengangkatan secara diam-diam dua gubernur tambahan untuk mengelabui masyarakat Papua.

Kenapa pemerintah, apalagi pemerintah daerah, tidak bisa bersikap terbuka? Apakah mereka tidak mampu atau merasa tidak tahu harus bagaimana menangani konflik, karena selama puluhan tahun tidak pernah dituntut untuk bersikap kreatif dan mandiri dalam mengambil kebijakan?

Yang jelas, bukan rahasia lagi jika aparat TNI dan Polri lebih berkuasa dalam mengambil kebijakan. Merekalah yang mengisi berita-berita di halaman pertama harian setempat. Akhirnya sering terdengar keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan peran gubernur dan wakil mereka di DPRD. Sikap masa bodoh pemerintah sipil memang sangat mengganggu. Namun mungkin kita dapat melihatnya dari sisi lain dan tidak bisa berharap banyak dari mereka karena kedudukannya yang terjepit.

Seorang aktivis HAM di Papua berpendapat bahwa selama pemerintah tidak menunjukkan kemauan sejati untuk menanggapi secara serius kasus-kasus pelanggaran HAM, tidak mendengarkan keluhan, perasaan ketidakberdayaan, dan gagasan-gagasan bangsa Papua, serta tidak melibatkan masyarakat Papua di dalam proses pengambilan keputusan mengenai pola pembangunan di Papua, maka pemerintah akan selalu dianggap sebagai pelaku penindasan, pelanggar HAM, dan tidak layak untuk dijadikan mitra dialog.[5]

Apakah kesediaan Presiden Gus Dur untuk membuka Kongres Papua II menunjukkan perubahan sikap pemerintah? Apakah ia mampu melibatkan elit pemerintahan dalam pendekatannya yang baru itu? Juga apakah ia mampu membebaskan diri dari tekanan pihak keamanan yang biasanya menentukan?

4.2.2. Insiden Nabire berdarah

Mubes Papua baru saja ditutup ketika masyarakat dikejutkan dengan adanya bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan di Nabire yang mengakibatkan tiga orang tewas. Banyak pertanyaan muncul dari kasus tersebut. Apakah kebetulan saja bahwa insiden berdarah itu terjadi setelah Mubes berakhir? Apakah polanya sama dengan insiden berdarah di Timika yang terjadi genap sehari setelah pesta 'pengibaran bendera' pada 1 Desember 1999? Apakah peristiwa

---

[5] "No letup in security approach spells trouble in Irian Jaya", dalam *The Jakarta Post*, 24 Maret 2000.

itu menunjukkan dukungan luas pada gerakan aspirasi merdeka dan menjadi pola gerakan yang baru? Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab.

Insiden Nabire ternyata tidak berkaitan dengan kegiatan penurunan bendera Bintang Kejora.[6] Polanya memiliki kesamaan dengan sebuah peristiwa di Sorong pada 5 Juli 1999. Ketika itu kegiatan penaikan bendera Bintang Kejora dijadikan alasan pihak keamanan untuk mengejar sejumlah aktivis yang berkumpul dalam sebuah posko. Padahal mereka pada hari itu tidak melakukan kegiatan penaikan bendera dan lazimnya mengungkapkan aspirasi secara damai.

Apakah insiden di Nabire sebenarnya dimaksudkan untuk menumpas Satgas Papua yang perannya dikritik hebat oleh pihak keamanan? Ataukah insiden itu dimunculkan untuk memberi lampu kuning kepada siapa saja yang masih berniat mendukung Gerasem? Pendek kata, insiden berdarah di Nabire menyisakan banyak pertanyaan yang harus dijawab.

Sejak awal Februari pihak keamanan di Nabire (dan Jayapura) memang mulai menunjukkan pendekatan gaya baru dengan menambah 100 personil Brimob. Pengawasan ketat dimulai dan diarahkan kepada orang yang dianggap "mengganggu kehidupan masyarakat". Aparat polisi di Nabire menyusun daftar panjang dosa-dosa kriminal Satgas Papua. Daftar itu dikirim ke Polda Irja, DPRD Tk.I di Jayapura, dan Komnas HAM di Jakarta.[7] Isi laporan ini dijadikan legitimasi utama bagi tindakan kepolisian selanjutnya.

Dalam sebuah pertemuan antara delegasi masyarakat Papua dan Kapolda di Jayapura, Kapolda Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas menggambarkan suasana masyarakat di Nabire yang menurutnya semakin hari semakin menunjukkan sifat kriminalnya. Ia menegaskan kondisi seperti itu merupakan tanggungjawab Satgas Papua.[8] Kapolda juga menjelaskan bahwa aparat tidak dapat membiarkan adanya suatu

---

[6] Bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di Nabire sejak 1 Desember 1999 tidak diturunkan selama peristiwa berdarah ini. Bendera baru diturunkan pada 25 Juli 2000.

[7] Laporan pertama, "Dampak negatif yang dilakukan Satgas Papua di wilayah hukum Polres Paniai telah meresahkan masyarakat dan melanggar HAM", Nabire, 9 Februari 2000. Disusul laporan kedua, "Laporan Pelanggaran Hukum/Tindak Pidana dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang dilakukan oleh Satgas Papua", Nabire, 4 Maret 2000.

[8] Pertemuan antara delegasi masyarakat Papua dengan Kapolda Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, di Jayapura pada 1 Maret 2000.

kekuatan tandingan. Karena suasana seperti inilah, tidak mengherankan jika insiden sekecil apapun dapat memicu tindakan pembersihan dari aparat keamanan. Juga tidak mengherankan jika korban-korban yang jatuh dalam bentrokan 28 Februari 2000 adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Satgas Papua.

Selama ini peristiwa Nabire tidak pernah diinvestigasi secara resmi. Namun jelas dalam peristiwa itu terjadi penembakan dan sejumlah orang ditahan serta dianiaya selama dalam tahanan.[9] Tidak ada alasan untuk meragukan bahwa di sana telah terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, suatu investigasi independen sangat dibutuhkan.

Peristiwa Nabire belum lagi dingin, muncul pula bentrokan di Fakfak antara pendukung Gerasem dengan pendukung bupati setempat. Kunjungan mendadak bupati ke Desa Wayati di pinggiran Kota Fakfak pada 19 Maret 2000, memicu bentrokan ini. Awalnya cuma kejadian kecil saja, namun kemudian menjadi alasan massa Barisan Merah-Putih (pendukung bupati) untuk menyerang Satgas Papua. Operasi kepolisian menyusul esok harinya dengan melibatkan orang-orang Barisan Merah-Putih yang sangat menonjol.

2.4.2.3. Peran Satgas Papua yang membingungkan

Perlu ditambahkan di sini beberapa catatan mengenai munculnya kelompok keamanan masyarakat yang lazim disebut Satuan Tugas (Satgas) Papua. Asal-usul "kelompok keamanan masyarakat" ini tidak mudah untuk dijelaskan.

Berita pertama mengenai adanya suatu "kelompok penjaga keamanan masyarakat" terdengar menjelang Pemilu 1999 (Juni 1999).[10] Munculnya rencana pembentukan kelompok tersebut sempat menjadi polemik nasional karena banyak warga khawatir akan ekses negatif yang ditimbulkannya, selain adanya kenyataan bahwa kelompok tersebut dilatih oleh aparat keamanan. Walaupun muncul banyak protes, sejumlah kelompok tetap dilatih, termasuk di wilayah

---

[9] Ada satu kasus yang konkret didokumentasikan. Kasus-kasus lain dilaporkan oleh wakil-wakil LSM setempat. Lihat laporan SKP Keuskupan Jayapura "Laporan situasional Nabire Kabupaten Paniai: peristiwa 28 Februari serta sebelum dan sesudahnya", Jayapura, Juli 2000.

[10] Lazimnya disebut Kamra (Keamanan Rakyat).

Papua. Tidak jelas bagaimana nasib kelompok keamanan itu seusai Pemilu. Namun, kehadiran kelompok penjaga keamanan masyarakat sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Papua.

Lalu dibentuk juga sebuah kelompok keamanan untuk menjaga rumah seorang pemimpin Papua, Theys H. Eluay. Kelompok ini sangat menonjol ketika ikut menertibkan upacara kenaikan bendera Bintang Kejora di Jayapura pada 1 Desember 1999. Sejak saat itu kelompok yang dinamai Satgas Papua ini dikenal baik oleh masyarakat, dan dihormati karena jasanya dalam menertibkan upacara.

Satgas Papua kemudian dibentuk di mana-mana hingga ke daerah-daerah pelosok di Papua. Mungkin dapat dikatakan bahwa proses pembentukan Satgas Papua sudah dimulai seusai pertemuan Tim 100 dengan Presiden B.J. Habibie pada 26 Februari 1999 untuk melindungi anggota Tim 100 dan posko-posko yang muncul di mana-mana. Memang, setelah melakukan pertemuan dengan Presiden, sejumlah anggota Tim 100 merasa dirinya terancam dan diintimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Dalam setahun Satgas Papua berkembang menjadi suatu 'organisasi longgar' yang terus membesar dan sulit diidentifikasikan dengan tepat. Kelompok ini mengambil tanggungjawab dalam berbagai kegiatan Gerasem. Namun tidak dapat dipungkiri jika Satgas Papua kadang-kadang mulai menunjukkan sikap yang kurang diterima masyarakat, terutama karena arogansi dan tindakan-tindakan kriminalnya. Organisasi ini ternyata tidak dapat dikendalikan dari dalam dan seringkali melewati batas-batas wewenangnya.

Arogansi Satgas Papua misalnya terlihat dalam aksi pemeriksaan yang dilakukan anggota Satgas terhadap para penumpang kapal laut di Manokwari, Sorong, dan Fakfak pada 1999. Satgas juga pernah menghancurkan pangkalan ojek di Sentani pada Januari 2000. Mereka juga terlibat kasus pembunuhan terhadap seorang warga yang mabuk di Merauke pada Januari 2000. Satgas Papua juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk membasmi praktik-praktik yang dinilainya tidak baik; seperti praktik penjualan minuman keras oleh aparat keamanan dan mengungkap keterlibatan aparat dalam kegiatan perdagangan kayu gaharu yang eksploitatif di pedalaman.

Pendek kata, Satgas Papua ternyata sulit dikontrol. Bahkan boleh dikatakan tidak jelas siapa sebenarnya yang bertanggungjawab mengontrol kelompok ini. Juga tidak jelas ada di bawah otoritas siapa

kegiatan mereka."[11] Kebingungan juga bertambah karena Satgas Papua menempatkan dirinya dalam status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, padahal mereka direkrut dari kalangan tuna kerja dan kurang berpendidikan. Selain itu seringkali mereka mengambil inisiatif sendiri dalam bertindak sehingga pola kegiatannya sulit diramalkan."[12]

Melihat gejala seperti itu — di samping adanya kabar mulai dibentuknya satgas-satgas lain (antara lain Barisan Merah Putih) — berkembangnya kelompok-kelompok semacam ini tampaknya sudah waktunya diwaspadai jika masyarakat Papua ingin perjuangannya tetap bernuansa damai. Karena jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan muncul kembali konflik antar kelompok atau antar milisi seperti yang terjadi di Fakfak pada Maret 2000. Perjuangan masyarakat Papua tentu akan lebih terarah jika pembentukan satgas dihindari, atau bahkan ditiadakan. Kita sebaiknya memetik pelajaran dari pengalaman pahit Timor Timur karena munculnya banyak milisi.

PARUH KEDUA 2000

1. Catatan Pendahuluan

Peristiwa yang paling penting selama kurun waktu tujuh bulan terakhir 2000 adalah berlangsungnya Kongres Rakyat Papua II (KRP II) pada 29 Mei – 4 Juni . Setelah Kongres, suasana di Papua berubah secara signifikan dan jauh lebih dipengaruhi oleh perkembangan politik di tingkat nasional. Dalam uraian ini perkembangan di tingkat nasional tidak diberi banyak tekanan, walaupun sudah tentu membawa pengaruh dominan dalam perkembangan selanjutnya di Papua.

---

[11] Pada awalnya Satgas Papua ada di bawah wewenang Lembaga Masyarakat Adat setempat. Namun dalam perkembangannya terdapat banyak perubahan/ penyimpangan (lihat juga catatan kaki no. 12).

[12] berdasarkan informasi dari sumber di Nabire yang dapat dipercaya, Satgas Papua merupakan kelompok campuran. Tiga unsur kelompok tersebut bisa diindetifikasi sebagai: (1) kelompok yang murni berkaitan dengan Gerasem dan dimaksukan untuk membela bendera yang sedang berkibar di tengah-tengah kota Nabire; (2) kelompok 'ikut-ikutan', serta (3) sekelompok orang yang diperalat/disusupi dan dibayar aparat keamanan. Karena unsur-unsurnya itu tentu saja terdapat berbagai 'kepentingan' yang berbeda, sehingga masyarakat meragukan perannya. Pola yang dilaporkan dari Nabire, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kami perhatikan di Timika pada akhir 1999.

Bahkan boleh dikatakan 'isu Papua' telah dijadikan komoditi politik oleh para politisi di tingkat nasional. Namun pembahasan akan lebih difokuskan pada kongres serta dampaknya terhadap masyarakat di Papua.

2. Menuju Kongres

Sebenarnya waktu untuk menyiapkan Kongres Rakyat Papua II (KRP II) sangat singkat, yakni dari awal Maret sampai akhir Mei 2000. Selama masa persiapan itu ada dua kebijakan politik yang saling bertentangan, yang menyangkut kegiatan Gerasem dan pihak yang sedang berkuasa saat itu, yakni:

1. Pihak kepolisian di Polda Irja merepotkan orang-orang penting dalam gerakan Papua, dengan memanggil mereka untuk diperiksa (diminta keterangan) sampai menuduh orang-orang itu telah melakukan kegiatan makar;
2. Pemerintah pusat (khususnya Presiden) menunjukkan minatnya pada permasalahan di Papua dengan menjalin hubungan baik dengan elite gerakan Papua. Para elit itu diundang ke Jakarta untuk melakukan diskusi secara langsung dengan Presiden.

Perubahan bahasa juga terjadi di kalangan orang-orang kunci gerakan Papua. Bahasa yang lebih retoris dan menumbuhkan polarisasi (seperti: "perjuangan menuju Papua merdeka") sementara waktu ditinggalkan. Dalam sejumlah pernyataan publik, mereka lebih suka mengungkapkan inti perjuangannya dalam istilah-istilah seperti "perjuangan menuju Papua Baru, adil, dan damai". Dalam sejumlah tulisan, istilah "Papua Baru" lebih dominan digunakan oleh para pembuat opini.[13] Perubahan ini tercermin pula dalam sub-tema KRP II yang berbunyi *"Rakyat Papua bertekad menegakkan demokrasi dan hak-hak azasi manusia berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan menuju Papua Baru".*

Muncul kesan bahwa makin banyak pembuat opini di dalam gerakan Papua yang mulai menunjukkan kesiapannya menerima perjuangan sebagai suatu proses yang sangat panjang. Namun sikap realistis ini hanya diterima dan dimengerti di dalam kalangan terbatas saja.

---

[13] Bandingkan buku karangan Dr. Benny Giay, yang diterbitkan menjelang Kongres dengan judul: *Menuju Papua Baru*, Jayapura, Mei 2000.

Tanda-tanda awal rasionalisasi perjuangan juga dapat dilihat dalam usaha mengadakan dialog dengan pihak penguasa, walaupun ada pula sosialisasi gerakan aspirasi merdeka yang berkembang di tingkat akar rumput. Namun sosialisasi tersebut dinilai kurang efektif dan kurang konstruktif. Usaha meningkatkan rasionalisasi perjuangan juga tercermin dalam sejumlah lokakarya yang diadakan di kalangan Gereja Protestan (GKI).[14] Lokakarya tersebut dinilai sangat konstruktif dalam menanggapi perkembangan-perkembangan yang sedang menjadi pusat perhatian dan emosi masyarakat Papua dewasa ini.

Kongres semakin dibicarakan sebagai "jalan normal untuk membahas aspirasi-aspirasi yang ada". Penyelenggaraan Kongres juga nampak semakin diterima – walaupun dengan hati-hati — oleh penguasa, misalnya diungkapkan dengan bantuan finansial dari Presiden. Kongres akhirnya dapat disiapkan dalam suasana yang tenang, walaupun ironisnya sejumlah pemimpin Gerasem masih terus diinterogasi oleh Polda Irja.

Muncul kesan yang kuat saat itu bahwa Papua sedang menuju "puncak baru", walaupun masih ada alasan-alasan untuk mempertanyakan apakah kongres akan mampu menjawab semua harapan masyarakat Papua. Soalnya, sasaran-sasaran kongres sendiri tidak dijelaskan secara memadai dan terbuka, sementara harapan yang muncul sangat beraneka ragam.

3. Berlangsungnya Kongres

Rupanya, sekali diberi keleluasaan, masyarakat Papua langsung berharap agar "permasalahan Papua perlu diselesaikan saat itu juga". Kelompok yang paling vokal dan dominan di dalam Kongres menuntut supaya "kemerdekaan diberikan sekarang juga". Harapan-harapan seperti ini terungkap secara jelas, sangat emosional, dan nampak tanpa banyak perhitungan.

Gambaran ini misalnya terungkap dalam acara pembukaan KRP II. Selama berlangsungnya acara nampak suasana yang mengawinkan antara "penghormatan" dan "sambutan agresif". Kepada Muspida Tk.I Irja yang secara lengkap hadir baik dalam acara pembukaan maupun penutupan kongres, disampaikan ucapan terima kasih karena telah

---

[14] Lokakarya diadakan baik di Sentani, Biak, maupun Sorong, serta sempat mengumpulkan para pendeta di wilayah Papua untuk bersama-sama merefleksikan perkembangan-perkembangan yang terjadi di tengah-tengah umatnya.

menghadiri acara tersebut, sekaligus mereka dipersalahkan karena terjadinya berbagai ketidak-beresan di propinsi ini. Lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' dinyanyikan oleh paduan suara dan didengarkan para peserta, tapi kemudian disusul oleh lagu kebangsaan Papua yang dinyanyikan hadirin dengan semangat yang besar. Kepada Presiden juga disampaikan rasa terima kasih karena telah menyumbang satu milyar rupiah untuk penyelenggaraan kongres, tapi juga dipersalahkan karena tidak menghadiri acara tersebut. Kegembiraan juga muncul atas kehadiran sejumlah warga non-Papua. Sebaliknya, bangsa Indonesia dinilai sebagai 'bangsa setan'.

Pada hari kedua kongres, John Tekwi, Gubernur Propinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG), diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato sebelum ia meninggalkan kongres. Walaupun ia berbicara atas nama pribadi, tidak diragukan bahwa ia oleh peserta kongres dinilai sebagai wakil pemerintah PNG. Dalam pidatonya ia mengutarakan dukungannya terhadap gerakan kemerdekaan dan disambut dengan sangat hangat oleh hadirin. Tentu saja peristiwa ini oleh pemerintah Indonesia dengan mudah dijadikan alasan untuk menyerang balik, bahwa kongres telah melibatkan hubungan internasional. Departemen Luar Negeri kemudian mengambil langkah serius dan mengumpulkan informasi mengenai John Tekwi. Akhirnya pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran Gubernur Sandaun itu lebih sebagai pribadi dan tidak mengganggu hubungan baik Indonesia dengan PNG.[15]

Ketika upaya-upaya untuk menetapkan tata tertib kongres dilakukan, seperti menetapkan wewenang dan hak suara para peserta, nampak pula upaya-upaya perebutan kuasa yang didominasi oleh kelompok garis radikal. Dengan jelas terlihat bahwa kongres yang mengumpulkan begitu banyak orang dengan beranekaragam niat menjadi sangat sulit diatur dan dikendalikan. Untunglah panitia, terutama para pemimpin pertemuan, tampil luar biasa dan pantas mendapat pujian.

Dari segi penyelenggaraan ekstern, apalagi dengan jaminan ketertiban dari ratusan anggota Satgas Papua, persiapan kongres

---

[15] Lihat Nota Dinas dengan No: 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000, tertanggal 8 Juni 2000. Dari faksimili Puskom Deplu RI pada bagian lampiran dijelaskan bagaimana latar belakang John Tekwi, kapasitas kehadirannya dalam kongres, dan saran dari Puskom Deplu.

nampak benar-benar mantap. Namun jika dilihat dari penyelenggaraan intern, kongres kelihatan kurang meyakinkan karena tidak solidnya penampilan Presidium Dewan Papua (PDP). Tidak ada suatu konsep atau visi yang dapat ditawarkan kepada para peserta untuk dibahas. Hal ini menjadi mata rantai yang paling lemah selama kongres berjalan, dan memberikan peluang kepada kelompok radikal untuk menguasai jalannya kongres tanpa suatu konsep, strategi, atau garis kebijakan yang bisa dikembangkan.

Selain mampu mengatur jalannya kongres, prestasi panitia juga perlu dicatat dalam membulatkan hasil kongres ke dalam suatu pernyataan politik yang relatif moderat, memberi tempat bagi aspirasi masyarakat, dan mengutamakan damai dalam perjuangan. Jalan dialog baik di tingkat nasional maupun internasional diberi tempat utama.[16] Pernyataan akhir kongres memberi mandat terbuka –tetapi kurang terperinci—kepada PDP untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan harus memberikan laporan mengenai hasil perjuangannya pada 1 Desember 2000. Pemberian mandat kepada PDP tersebut dinilai sebagai langkah maju dalam keorganisasian.

Sejumlah tuntutan yang pernah dirumuskan dalam Mubes Papua muncul kembali. Perlunya "pelurusan sejarah" yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di masa lampau, yakni peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada 1961, 1962 dan 1969, juga ditekankan dengan lebih jelas. Kongres akhirnya berakhir dengan penuh kegembiraan di bawah pengawasan ketat aparat keamanan yang tetap disiagakan.

4. Tanggapan terhadap Kongres

Dari reaksi yang muncul terhadap KRP II, khususnya yang datang dari pusat, jelas bahwa kongres ditanggapi secara negatif, baik oleh kalangan pemimpin politik di Jakarta maupun aparat keamanan. Hasil kongres ditolak, bahkan muncul kesan bahwa penolakan itu muncul sebelum pernyataan akhir diumumkan. Gerakan di Papua semakin ramai ditanggapi sebagai suatu gerakan separatis dan melanggar hukum.

Tanggapan demikian bisa dibaca sebagai tanda pertama adanya perubahan sikap dan iklim politik di pusat kekuasaan. Jika menjelang

---

[16] Pernyataan tersebut dapat dibaca selengkapnya dalam bagian lampiran.

kongres sikap para pemimpin politik di pusat masih lunak, bahkan simpatik, maka seusai kongres berubah secara radikal. Suara-suara untuk menghentikan gerakan separatis di Papua, bahkan kalau perlu menggunakan kekerasan, semakin hari semakin sering terdengar.[17]

Perubahan sikap ini sulit dipahami jika didasarkan melulu pada perkembangan baru di Papua. Karena, sebenarnya tidak terdapat suatu perkembangan yang benar-benar baru. Perubahan sikap ini mungkin bisa dipahami jika dilihat sebagai suatu pencerminan dari perebutan kuasa yang berlangsung di pusat kekuasaan. Dalam perebutan kuasa itu, persoalan Papua semakin sering digunakan sebagai komodoti politik. Orang semakin sering menilai gerakan di Papua sebagai gerakan separatis dan mengaitkannya langsung dengan bantuan keuangan dari Presiden untuk KRP II. Presiden dipersalahkan karena memupuk berkembangnya suatu gerakan subversif. Sikap negatif ini diperlihatkan sejumlah tokoh politik di pusat yang didukung oleh aparat TNI dan Polri yang bersama-sama membentuk kekuatan politik yang efektif. Tidak mengherankan jika hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan sejumlah tokoh Papua diganggu, bahkan dihalangi, sehingga dialog yang sebelumnya mudah dilakukan tidak dimungkinkan lagi setelah paruh pertama 2000.

5. Operasi Pengkondisian Wilayah Papua

Perubahan sikap politik pemerintah pusat semakin jelas terlihat setelah sebuah laporan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sempat dibocorkan.[18] Laporan itu menyangkut rapat koordinasi khusus penanganan masalah Irian Jaya yang dihadiri oleh Bakin, Bais TNI, Spam Mabes TNI-AD, Sub Kaster TNI, Sintel Mabes Polri, Kostrad, dan Kopassus. Rapat tersebut menyimpulkan:

- "Perkembangan kehidupan sosial-politik [...] pasca Kongres Rakyat Papua menunjukkan suhu yang meningkat sehingga sependapat untuk mengambil langkah konkret yang cepat dan tepat dalam mengantisipasi berkembangnya opini yang lebih meluas di kalangan masyarakat Irian Jaya khususnya, maupun di seluruh wilayah Indonesia."

---

[17] Lihat Bagian III buku ini yang menguraikan "Kebijakan Tak Tertulis", hlm. 226.
[18] Nota Dinas dengan nomor: 578/ND/KESBANG/VI/2000, tertanggal 8 Juni 2000.

- "Kondisi yang berkembang sekarang dalam masyarakat sampai ke tingkat pedesaan seakan diliputi *ephoria* kegembiraan dengan isu merdeka sedangkan kekuatan konspirasi kelompok yang ingin merdeka semakin solid dan berupaya keras untuk mensosialisaikan hasil Kongres di wilayah Irian Jaya, ke daerah-daerah lain di Indonesia bahkan dunia internasional."
- "Sependapat untuk membentuk tim atau semacam satuan tugas untuk menyikapi arah politik sebagian masyarakat Irian Jaya (Papua) yang ingin merdeka [...]"
- "Sasaran tugas tim akan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Irian Jaya yang didominasi oleh elemen adat, agama, suku dan elemen lainnya sehingga dalam rangkaian kegiatannya dapat bersifat terbuka maupun tertutup (operasi *clandestine*) [...]"

Dalam dokumen ini juga ditegaskan bahwa perlu adanya kesamaan sikap dan bahasa di kalangan pejabat, perlu payung hukum yang tegas untuk tindakan-tindakan represif, perlu memberi sanksi tegas kepada oknum pejabat Pemda yang sudah terkontaminasi isu merdeka, serta menetapkan sejumlah kelompok sasaran strategis.

Berkaitan dengan 'metoda operasi', dikemukakan bahwa terdapat *jalur operasi langsung* dan *operasi tidak langsung*. Yang *langsung* melingkupi kegiatan diplomasi, propaganda, publikasi, dan pengembangan jaringan komunikasi. Antara lain meliputi kegiatan apel akbar, kebulatan tekad, dan dialog interaktif. Sementara yang *tidak langsung* meliputi serangkaian kegiatan:

- Pembangunan dengan mengundang investor swasta.
- Pemberian sumbangan dana.
- Pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat setempat.
- Pengangkatan pahlawan nasional dari Irian Jaya.
- Pendayagunaan masyarakat setempat seoptimal mungkin dalam setiap kegiatan.
- Memberikan kedudukan pada jabatan pemerintah.
- Penyusunan dan pemasyarakatan sejarah perjuangan integrasi rakyat Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Operasi tersebut akan dijalankan secara *terbuka* sejauh menyangkut kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dan media massa. Tetapi akan dilakukan secara *tertutup* sejauh menyangkut kegiatan intelijen dan penggalangan tokoh-tokoh

masyarakat tertentu. Seluruh program ini ditetapkan akan dilaksanakan antara Juni 2000 sampai Mei 2001. Program yang diprakarsai oleh pusat itu antara lain diterjemahkan dalam operasi "Tuntas Matoa 2000" yang dilaksanakan Polda Irja.

Dari dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat, terutama aparat keamanan dan pertahanan, sangat cemas dengan perkembangan kehidupan sosial politik pasca KRP II. Bahkan dua hari sebelum kongres ditutup, yakni pada 2 Juni 2000, Menteri Dalam Negeri mulai meminta sejumlah unsur aparat keamanan untuk menangani permasalahan di Papua[19] seperti tertuang dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Kesbang dan Linmas Depdagri 8 Juni 2000.

Dalam sejumlah lampiran nota dinas tersebut digambarkan pula peta kekuatan di Papua, agenda politik para pejuang, lokasi posko dan tempat latihan (seperti di Bonggo, Kimaam, dan Arso), serta peta 'konspirasi politik Papua' lengkap dengan nama-nama tokoh masyarakat yang berperan dalam perjuangan atau dalam pembuatan opini publik di Papua. Sementara tuntutan merdeka dinilai sudah [1] kian mengkristal, [2] konsepsional, [3] sistematik, [4] konsisten, dan [5] tersosialisasi sampai ke masyarakat akar rumput.

Jelaslah bahwa dengan adanya program seperti tertuang dalam dokumen tersebut, kebebasan ekspresi masyarakat Papua akan semakin dibatasi dengan segala macam tindakan, baik melalui tindakan yang kondusif maupun tindakan yang represif. Pendek kata, sebuah kebijakan baru telah ditetapkan, dan mulai diterjemahkan dalam pernyataan-pernyataan politik yang keras dan disusul dengan tindakan-tindakan pada bulan-bulan berikutnya.

6. Rangkuman Perubahan Iklim

Di bawah ini merupakan unsur-unsur yang berkaitan erat dengan perubahan sikap di pusat kekuasaan:

- Gerasem di Papua diberi cap separatis dan tidak ada tanda-tanda bahwa tokoh-tokoh politik di pusat masih berniat untuk memahami permasalahan di Papua serta latar belakangnya secara obyektif.
- Peluang kalangan luar untuk memperoleh pemahaman mengenai

[19] Nota Dinas dengan nomor: 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000, tertanggal 8 Juni 2000.

persoalan di Papua semakin dipersempit dengan penyebarluasan ideologi-ideologi yang menyesatkan, seperti *"masalah di Papua diciptakan oleh suatu konspirasi internasional"*, dan *"masalah di Papua adalah masalah agama, yakni suatu konflik antara kaum Kristen dan kaum Muslim"*.

- Aparat keamanan di pusat kekuasaan bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri telah mengambil sikap untuk menunjukkan keperkasaannya melalui berbagai kegiatan, baik terbuka maupun tersembunyi.
- MPR menolak untuk mensyahkan perubahan nama Propinsi Irian Jaya menjadi Papua, walaupun nama ini sudah digunakan selama setengah tahun dan dimasyarakatkan oleh Presiden sejak 1 Januari 2000.
- Ada tuntutan yang semakin kuat dari pusat agar bendera Bintang Kejora diturunkan dan dilarang dikibarkan, walaupun telah diizinkan secara lisan oleh Presiden pada bulan-bulan sebelumnya.
- Adanya penambahan personil aparat TNI dan Polri di Papua secara berarti.
- Ruang gerak Presiden semakin dipersempit, sedangkan ruang gerak Wakil Presiden serta pendukungnya makin diperlebar.

7. Beberapa Refleksi Berkaitan dengan Gerasem Selama Paruh Kedua 2000

7.1. Perkembangan berikutnya

Seusai Kongres, anggota PDP mengunjungi berbagai daerah di Papua dengan tujuan memasyarakatkan hasil KRP II. Walaupun pertemuan-pertemuan di daerah dimaksudkan sebagai media untuk menyalurkan informasi, namun umumnya pertemuan itu dijadikan sarana untuk menyatakan dukungan dan penyampaian aspirasi.

Di samping itu PDP mulai melakukan lobi-lobi di tingkat nasional dan internasional untuk melaksanakan sebagian mandatnya. Di tingkat nasional mereka berusaha mendekati dan mensosialisasikan aspirasi masyarakat Papua kepada aktor-aktor politik di Jakarta, walaupun hasilnya kurang jelas karena faktor-faktor yang sudah diuraikan di atas. Hasil lobi di tingkat internasional juga sulit dinilai bobotnya.

Ada beberapa indikasi perkembangan yang muncul kemudian,

antara lain:

- Meningkatnya simpati dua negara tetangga, Nauru dan Vanuatu, terhadap perjuangan Papua di Wilayah Pasifik. Mereka mendukung tuntutan agar hak-hak dasar bangsa Papua diakui dan ditangani secara tepat.
- Wakil-wakil PDP dapat menghadiri pertemuan *South Pacific Forum* yang berlangsung di Kiribati pada Oktober 2000. Forum itu diakhiri dengan suatu pernyataan mendesak supaya digali cara-cara dan tindakan cepat untuk mencegah munculnya konflik regional (berkaitan dengan suasana politik di Fiji, Solomon Islands, dan Bougainville — namun Papua tidak disebut sebagai salah satu wilayah perhatian!). Forum juga menghimbau pemerintah RI untuk mengakui hak-hak dasar warganya dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.
- PBB ditekan melalui intervensi-intervensi delegasi dari Nauru dan Vanuatu, serta melalui kehadiran sejumlah anggota PDP dalam sidang PBB pada Oktober 2000, walaupun kehadiran mereka masih marginal.
- Muncul keinginan di beberapa negara untuk meneliti kembali kejadian-kejadian historis di Papua (selama 1961, 1962, dan 1969), bahkan pemerintah Belanda memerintahkan dilakukannya suatu penelitian resmi mengenai pelaksanaan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada 1969.
- Beberapa negara, antara lain Australia, Amerika Serikat, dan Belanda, secara resmi berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk mendukung usaha-usaha dari kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia.
- Boleh dikatakan bahwa perjuangan bangsa Papua semakin hari semakin diketahui oleh 'dunia luar'.
- Di Papua sendiri, sejumlah tokoh masyarakat mulai mengungkapkan keraguannya serta mempertanyakan maksud dan tujuan perjalanan anggota PDP ke luar negeri.
- Organisasi baru yang menamakan diri Front Nasional Papua (FNP) didirikan pada 22 Juni 2000. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh sejarah Papua, Herman Wayoi. Semula FNP diperkenalkan sebagai 'sayap politik' PDP, namun setelah dilakukan sebuah musyawarah pada 12 dan 13 September 2000, nama serta kegiatan FNP kurang begitu terdengar lagi.

7.2. Dampak pada masyarakat lokal di Papua

Dari berbagai kunjungan ke daerah pedalaman Papua selama bulan-bulan setelah KRP II, kami mendapat kesan bahwa masyarakat Papua kurang memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan politik yang sesungguhnya. Mereka masih berpegang pada harapan yang tinggi, yang sering terungkap dalam pernyataan, "Kita akan merdeka pada 1 Desember 2000." Kenyataan ini membenarkan dugaan kami bahwa usaha sosialisasi pasca kongres memang sangat terbatas – bahkan berefek negatif. Masyarakat hanya menangkap informasi mengenai kongres dan hasilnya secara sepotong-sepotong. Mereka dibiarkan dalam keadaan "menebak-nebak" apa yang sebenarnya yang akan terjadi di masa mendatang. Hampir tidak ada usaha untuk mengoreksi harapan mereka yang terlampau tinggi.

Dampak sosialisasi hasil kongres pada masyarakat di tingkat akar rumput dapat dirumuskan dalam beberapa 'unsur kunci' berikut ini:

- Mereka yakin bahwa kemerdekaan akan terwujud dalam waktu dekat.
- Yakin bahwa pihak luar negeri (terutama PBB) akan mengadakan intervensi secara aktif untuk mengembalikan kemerdekaan Papua.
- Yakin bahwa tawaran otonomi perlu ditolak karena merupakan tipuan saja (dianggap Pepera edisi ke-2).

Harapan terhadap lembaga seperti PBB tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang organisasi tersebut. Mereka hanya tahu bahwa PBB adalah lembaga yang berkuasa dan dapat dijadikan tempat berlindung. PBB dilihat sebagai dewa penyelamat. Keyakinan seperti ini mengakar sangat kuat. Tak aneh jika masyarakat mudah percaya pada omongan pemimpin mereka yang dengan mudah berharap lembaga tersebut akan menyelamatkan mereka.

Di samping itu, sosialisasi pasca kongres sangat mempertajam perbedaan antara "kelompok otonomi" dan "kelompok 'M'". Polarisasi emosional seperti ini berkembang dengan kuat dan menjadi sumber perpecahan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber konflik yang tidak menguntungkan bagi bangsa Papua sendiri. Tidak pernah ada prakarsa untuk mendiskusikan dan menempatkan arti dan isi kedua aspirasi yang berbeda itu secara benar. Kemerdekaan selalu dianggap yang paling baik dan tidak perlu memikirkan alternatif lain. Sikap demikian diperkuat oleh "bahasa kongres" dan "bahasa

PDP" yang cenderung tidak memberikan tempat untuk otonomi.

Keadaan jadi semakin rumit dengan tersebarnya isu penyusupan provokator dari Maluku di berbagai lapisan masyarakat. Di samping itu berkembang pula isu penyeludupan senjata dan pembentukan milisi. Sementara itu aparat keamanan mulai menunjukkan kekuatannya dengan menambah personil pasukan di Papua. Semula penambahan personil diterangkan oleh pihak yang berwenang sebagai "penggantian atau penyegaran rutin pasukan". Baru setelah terus dipertanyakan, akhirnya diakui bahwa penambahan jumlah personil[20] sengaja dilakukan, bahkan akan terus ditambah untuk "jaminan keamanan masyarakat".

7.3. Perkembangan pasca Sidang Tahunan MPR

Dapat disimpulkan bahwa Sidang Tahunan MPR (ST MPR) yang diselenggarakan pada Agustus 2000, menjadi titik balik politik (*a political turning point*) dalam perkembangan politik pada paruh kedua 2000. Dalam ST MPR permasalahan Papua tidak didekati dengan suatu pemahaman yang sungguh-sungguh, tetapi didekati sebagai gerakan lokal yang sangat mengganggu dan perlu dihentikan dengan berbagai cara. Penambahan personil aparat keamanan yang langsung diterjunkan setelah ST MPR, menjadi indikasi yang jelas ke arah itu.

Hadirnya aparat keamanan disertai kegiatan yang terarah pada empat titik perhatian: [1] penurunan bendera Bintang Kejora, [2] pembubaran Satgas Papua dan posko, [3] melumpuhkan PDP dan Panel (perwakilan PDP setempat), dan dengan demikian [4] mematikan Gerasem. Bulan-bulan berikutnya membuktikan bahwa kegiatan terarah itu menjadi titik awal terjadinya berbagai bentrokan tragis dan berdarah.

7.3.1. Bendera Bintang Kejora

Sejalan dengan sikap yang ditunjukkan para anggota MPR, pengibaran bendera Bintang Kejora menjadi isu yang hangat dibahas

---

[20] Daftar rinci penambahan pasukan dimuat mingguan *Tifa Papua* Th. 44, No. 30, 21-25 Agustus 2000, hlm. 5. TNI menambah personilnya sebanyak 1184 anggota dan Polri sebanyak 1700 anggota, yang disebar di Timika (TNI 651, Polri 250), Merauke (TNI 323 Polri 320), Biak (Polri 250), Fakfak (TNI 65, Polri 100), Sorong (TNI 42, Polri 200), Manokwari (Polri 250), Nabire (Polri 150), Wamena (Polri 150) and Serui (TNI 103, Polri 30).

dalam ST MPR. padahal selama setahun sebelumnya bendera Bintang Kejora dapat dikibarkan secara bebas, walau secara *de facto* tidak pernah mendapat izin resmi. Hanya saja pengibarannya harus lebih rendah dari bendera Merah Putih dan ukurannya harus lebih kecil. Di samping itu bendera Bintang Kejora menjadi hiasan populer pada kaos, gantungan kunci, dan topi. Masyarakat juga sudah terbiasa dengan penghormatan terhadap benderanya.

Di tengah-tengah suasana seperti itu muncul diskusi di kalangan pemerintah pusat mengenai makna pengibaran bendera yang sangat membingungkan masyarakat. Intinya diskusi itu mempersoalkan apakah pengibaran bendera itu sebagai suatu ungkapan politik atau ungkapan jati diri budaya? Namun bukan sesuatu yang mengherankan jika 'orang Jakarta' kemudian menyimpulkan bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora sebenarnya merupakan ungkapan bermotif politik. Karenanya pengibaran bendera bangsa Papua itu dianggap melanggar hukum dan perlu dilarang. Berdasarkan 'kesimpulan' tersebut, pada 23 September 2000 Kapolri — dalam acara pengangkatan dirinya — mengumumkan instruksi agar semua bendera Bintang Kejora yang dikibarkan diturunkan.

Perintah penurunan tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat Papua. Peristiwa itu juga mendorong PDP untuk membuka diskusi dengan Muspida (termasuk Kapolda) untuk mencari jalan kompromis. Akhirnya disepakati bahwa bendera tetap boleh dikibarkan sampai 3 Oktober 2000, hingga PDP bertemu dengan Presiden untuk membahas isi perintah Kapolri, yang rencananya berlangsung pada 19 Oktober 2000.[21]

Namun tiga hari kemudian Kapolres Jayawijaya, Letkol (Pol.) D. Suripatty, memerintahkan untuk menurunkan bendera Bintang Kejora secara paksa di Wamena. Tindakan tersebut kemudian mengakibatkan munculnya bentrokan berdarah antara masyarakat dan aparat keamanan. Dalam bentrokan tersebut 34 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Selain itu sejumlah orang ditahan dan diperlalukan tidak manusiawi oleh polisi. Ribuan orang lainnya, baik warga Papua maupun non-Papua, meninggalkan daerah kerusuhan dalam suasana traumatis, penuh ketakutan dan kecurigaan. Yang mengherankan, Kapolres menyatakan bahwa ia memerintahkan

[21] Hasil kesepakatan dapat dibaca selengkapnya pada bagian lampiran buku ini.

operasi tersebut setelah menerima perintah dari Kapolda, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas, yang tiga hari sebelumnya sebagai anggota Muspida ikut menyepakati kompromi dengan PDP.

Dari operasi yang dilakukan aparat pasca bentrokan di Wamena, menjadi nampak bahwa penurunan bendera sebenarnya hanya salah satu bagian saja dari agenda yang sepertinya sudah direncanakan. Agenda lainnya yang disembunyikan adalah membubarkan atau menyerang Posko, Panel, dan Satgas Papua yang secara organisatoris menjadi bagian dari Gerasem.

Untuk mengakhiri kekerasan seperti yang terjadi di Wamena, PDP sekali lagi membahas perkembangan situasi terakhir pada 7 Oktober 2000. Mereka kemudian memutuskan untuk mengirim permohonan kepada Presiden RI, yang isinya antara lain:[22]

- Agar diselenggarakan suatu pertemuan yang melibatkan aparat keamanan pusat, Pemda Papua, dan PDP untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora dan pemakaian nama Papua sebagai nama propinsi.
- Agar Presiden menyatakan Papua sebagai "zona damai".
- Agar semua pihak berkepentingan di pemerintah pusat ditekan untuk menghormati dan berpegang teguh pada hukum.
- Agar dijelaskan kepada masyarakat umum dengan jujur mengenai alasan mengapa begitu banyak personil keamanan yang ditugaskan di Papua.
- Agar hak sosial dan politik masyarakat Papua dilindungi dan keamanannya dijamin.

PDP juga memutuskan untuk mengirim delegasi ke Wamena untuk berdialog dengan masyarakat dan aparat keamanan setempat.

7.3.2. Satgas Papua, Posko, dan Panel

Sebenarnya niat pemerintah dan aparat keamanan untuk membubarkan Posko bukan sesuatu yang baru. Setidaknya pada 17 April 1999 Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) Hotman Siagian, telah mengeluarkan sebuah maklumat bernomor MK/01/IV/1999 yang berisi larangan untuk menyebarluaskan hasil Dialog Nasional dan pembubaran Posko. Posko dan Satgas Papua telah lama dijadikan sasaran aparat keamanan. Misalnya terbukti dengan jelas dalam

[22] Lihat pernyataan PDP No. A-01-190/PDP/B-IX.2000, 7 Oktober 2000.

konfrontasi yang terjadi di Sorong (Juli 1999), Nabire (Maret 2000), dan Fakfak (Maret 2000). Bentrokan insidentil juga terjadi di seluruh wilayah Papua.

Operasi yang diarahkan kepada Satgas Papua memang membingungkan. Terutama setelah Satgas Papua diizinkan untuk menyelenggarakan lokakarya di Jayapura pada 18 Agustus 2000. Lokakarya itu dihadiri wakil-wakil dari pemerintah sipil dan aparat kepolisian, termasuk Kapolda Brigjen S.Y. Wenas. Tujuan lokakarya itu juga sangat jelas, yakni untuk memantapkan struktur organisasi Satgas agar lebih jelas dan rapi. Pengakuan resmi diberikan secara terbuka oleh aparat keamanan dan sipil dengan mepresentasikan makalah dalam lokakarya tersebut. Jadi, sulit dimengerti jika sebulan kemudian Satgas Papua jadi salah satu sasaran utama dalam operasi-operasi kepolisian.

Sebelumnya masyarakat mengkhawatirkan jika kehadiran Satgas Papua dijadikan alasan aparat keamanan untuk melegitimasi kekuatan sejenis sebagai tandingan, seperti halnya legitimasi aparat terhadap Barisan Merah Putih. Dalam proses ini, kelompok-kelompok lain, termasuk OPM (Organisasi papua Merdeka), akan mudah dimanfaatkan dan dimotivasikan untuk dijadikan kekuatan tandingan. Karena, organisasi-organisasi itu merasa kurang diakui dan dihargai dalam organisasi perjuangan, sebagaimana diperlihatkan oleh PDP. Proses tersebut, walaupun dilakukan secara tersembunyi, cukup jadi alasan untuk menjelaskan mengapa terjadi bentrokan di Fakfak pada Maret 2000 dan di Bade pada September 2000.

Memang kadang-kadang muncul saran dari pihak-pihak yang bersimpati pada Gerasem agar Satgas Papua dengan inisiatif sendiri membubarkan diri. Tujuannya, agar aparat tidak punya legitimasi untuk bertindak keras terhadap gerakan di Papua. Namun apa yang ditakutkan akhirnya terjadi juga selama paruh kedua 2000. Aparat melakukan tindakan keras pada gerakan-gerakan di Papua dengan menjadikan keterlibatan anggota Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebsan Nasional (OPM/TPN) dan Satgas Papua sebagai alasan. Misalnya terjadi di Wamena (6 Oktober 2000), Merauke (4 November dan 2 Desember 2000), serta Jayapura-Abepura (7 Desember 2000).[23]

Peristiwa-peristiwa berdarah itu sendiri akhirnya banyak

---

[23] Harian *Cenderawasih Pos*, 5 Januari 2001.

meninggalkan pertanyaan. Investigasi yang transparan dan terbuka untuk menyelidiki peristiwa tersebut tidak pernah dilakukan.[24] Kenapa peristiwa itu terjadi, siapa saja aktor-aktornya, dan siapa yang berada di belakang peristiwa tersebut, menjadi pertanyaan yang tak terjawab. Wamena ditutup dan tidak dapat dikunjungi orang luar selama seminggu setelah peristiwa berdarah itu meletus. Bahkan pengisolasian itu dilakukan ketika bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan.

Efek dari peristiwa-peristiwa tersebut kemudian muncul dengan jelas:[25]

- Banyak orang menjadi korban. Jika tidak tewas atau terluka, mereka mengalami kerugian mental dan material.
- Kegiatan pendidikan merosot, bahkan berhenti sama sekali (lebih-lebih di Lembah Baliem). Akibatnya ribuan anak kehilangan peluang berkembang dan menyiapkan diri untuk masa depannya (ada yang menyebutnya sebagai *a lost generation* — sebuah generasi yang hilang).
- Banyak kegiatan umum yang macet, termasuk kegiatan ekonomis, yang akhirnya menyebabkan kurangnya bahan pangan.
- Hancurnya struktur organisasi gerakan Papua di tingkat akar rumput.
- Ribuan orang meninggalkan tempat tugas dan usahanya karena dihantui ketakutan akibat sering terjadinya penangkapan semena-mena dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Hak-hak dasar tidak diindahkan sama sekali. Akibatnya masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pihak penguasa dan memilih mencari tempat yang lebih aman (sekurang-kurangnya untuk sementara waktu).
- Banyak orang meninggalkan tempat-tempat yang dianggap "rawan", bahkan meninggalkan wilayah Papua karena dihantui ketakutan.
- Masyarakat yang berasal dari daerah Pegunungan Tengah (khususnya yang berasal dari daerah Jayawijaya) diberi cap "orang yang paling mengganggu dan bikin kacau". Mereka seringkali

---

[24] Baru pada awal 2001, suatu investigasi awal dilakukan oleh KPP HAM terhadap peristiwa di Jayapura.

[25] Untuk laporan lebih lengkap, lihat "Peristiwa Tragedi Kemanusiaan Wamena, 6 Oktober 2000" yang diterbitkan tim investigasi di bawah koordinasi SKP Keuskupan Jayapura. Laporan tersebut diterbitkan pada 27 Januari 2001.

dituding sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas berbagai kerusuhan, seperti dalam peristiwa yang terjadi di Abepura pada 7 Desember 2000. Mereka dijadikan 'mangsa' operasi aparat keamanan tanpa dibedakan dulu siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Stigmatisasi itu menjadi legitimasi bagi aparat untuk melakukan tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap mereka tanpa menghiraukan pertimbangan hukum dan kemanusiaan.

- Peristiwa berdarah itu juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memberikan saran kepada masyarakat non-Papua agar mempersenjatai diri. Ironisnya, dalam waktu bersamaan masyarakat tradisional dilarang untuk membawa senjata tradisionalnya, seperti busur dan anak panah. Mereka justru menjadi sasaran operasi 'senjata tajam' serta senjatanya diambil dan dimusnahkan.
- Konflik di Wamena secara keliru sering disebut sebagai "konflik antara bangsa Papua dan non-Papua". Gambaran yang tidak tepat dan tidak benar itu sangat mudah dipercaya oleh orang luar. Informasi yang menyesatkan tersebut juga mudah membawa orang sampai pada konflik horisontal, dan dijadikan alasan orang luar untuk mendirikan organisasi bagi komunitasnya sendiri, seperti "Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia Non-Papua" atau "Lembaga Swadaya Pengamanan Lingkungan".
- Sudah tentu pula bahwa kejadian-kejadian tersebut di atas menjadi dasar aparat keamanan untuk meningkatkan peran dan kegiatannya di tengah-tengah masyarakat.
- Akhirnya, Gerasem di Papua semakin hari semakin didiskreditkan di mata orang luar karena namanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kerusuhan berdarah.

7.3.3. Pemimpin-pemimpin Papua dituduh makar dan ditahan

Menjelang perayaan peringatan 1 Desember 2000, empat pemimpin inti Gerasem dipanggil untuk diinterogasi. Mereka kemudian dijadikan tersangka dan ditahan sambil menunggu proses pengadilan karena dituduh terlibat kegiatan yang bersifat makar. Tuduhan tersebut berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan, seperti pertemuan di rumah Theys Eluay pada November 1999, Mubes Papua pada Februari 2000, dan Kongres Masyarakat Papua II pada Mei-Juni 2000. Termasuk yang ditahan

adalah Don Flassy, yang sebelumnya dinyatakan tidak bersalah dan bebas tanpa syarat dalam suatu proses hukum pada awal 2000. Kenapa para pemimpin ditahan lagi? Pertanyaan itu menjadi buah bibir banyak orang dan belum terjawab hingga kini.

❖ *Menuju 1 Desember 2000*

Tindakan penahanan terjadi menjelang 1 Desember 2000. Tanggal ini berkaitan dengan beberapa peristiwa penting: [1] Hari ulang tahun proses awal pemerdekaan yang diprakarsai pemerintah kolonial Belanda pada 1961; [2] Hari ulang tahun diizinkannya pengibaran bendera Bintang Kejora untuk pertama kali oleh pemerintah Indonesia pada 1999; [3] Hari yang ditentukan Kongres Rakyat Papua II bagi PDP untuk melaporkan pertangungjawaban kegiatan pasca kongres; [4] Hari yang diharapkan masyarakat Papua sebagai hari terwujudnya kemerdekaan secara resmi.

Menjelang 1 Desember 2000 suasana di Jayapura dan sekitarnya menjadi semakin tegang. Siapapun tidak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi. Bagaimana reaksi yang mungkin muncul jika masyarakat Papua mengetahui bahwa kemerdekaan tidak terwujud? Apa yang bisa diharapkan dari pertanggungjawaban PDP? Apakah hasil yang dilaporkan akan memuaskan banyak pihak? Banyak orang menjadi gelisah. Apalagi setelah muncul tanggapan yang kurang positif atas hasil kesepakatan yang dicapai PDP dengan pihak Muspida pada Oktober 2000 (menjelang peristiwa di Wamena) dan pada November 2000.

Kemudian muncullah apa yang dinamakan "Panitia Kemerdekaan" pada pertengahan November 2000. Asal-usulnya tidak terlalu jelas, namun pendiriannya bisa dipastikan merupakan reaksi atas kompromi yang diterima PDP dalam perundingan dengan Muspida pada 9 November 2000. Kesepakatan itu di antaranya mencakup: [1] Segala masalah serta keamanan yang berkaitan dengan kedudukan PDP dan peranannya di tengah masyarakat Papua akan menjadi perhatian bersama antara Pemda dan PDP; [2] Bendera Bintang Kejora – yang pada saat itu masih berkibar di lima kabupaten: Jayapura, Yapen-Waropen, Merauke, Puncak Jaya, dan Manokwari – mulai 1 Desember hanya diizinkan berkibar di depan rumah Ketua Lembaga Adat di kelima daerah itu, dan dilarang di sembilan daerah lainnya; [3] Mulai 2 Desember 2000 markas Satgas Papua di Jayapura

(Taman Imbi) akan dikosongkan dan bendera Bintang Kejora yang berkibar di depannya akan diturunkan pada 1 Desember 2000.[26]

Awalnya kesepakatan ini kurang dapat diterima oleh beberapa unsur Gerasem, namun akhirnya ditaati oleh Satgas Papua serta kalangan PDP di berbagai daerah.

❖ *Suasana 1 Desember 2000*

Akhirnya perayaan peringatan 1 Desember berlangsung dalam suasana yang tegang, walaupun tidak menimbulkan kerusuhan. Pasukan Brimob berkemah di Taman Imbi Jayapura, persis di depan bekas gedung Nieuw Guinea Raad yang bersejarah, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat Satgas Papua dan pusat kegiatan budaya masyarakat (Dewan Kesenian Irian jaya/DKIJ). Seperti halnya di Jayapura, di Sorong pasukan Brimob juga berkemah di pinggir jalan raya, tepat di depan pusat Satgas Papua setempat.

Sempat terjadi kemelut ketika bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di depan gedung DKIJ Jayapura diturunkan. Keesokan harinya gedung itu dikosongkan secara paksa oleh aparat, dan Satgas Papua harus pindah ke Sentani (komplek rumah Theys H. Eluay). Di seluruh wilayah Papua keadaan tetap tenang tanpa insiden yang berarti.

Kekacauan baru terjadi pada hari-hari berikutnya. Peristiwa yang paling menggoncangkan terjadi di Merauke pada 2 Desember 2000 dan di Abepura pada 7 Desember 2000. Tercatat sekitar 400 orang (42 orang di antaranya berasal dari Merauke) mengungsi ke PNG melalui Jayapura. Kedua peristiwa berdarah itu disusul oleh tindakan kekerasan aparat keamanan yang tidak proporsional, yang memunculkan kemarahan dan ketidakberdayaan masyarakat.

Reaksi aparat keamanan dalam peristiwa di Merauke dan Abepura, ditambah peristiwa di Wamena (Oktober 2000) yang masih segar dalam ingatan, membuat luka batin masyarakat Papua semakin parah. Pengalaman-pengalaman pahit itu berturut-turut menambah ingatan kolektif mereka dan disimpan diam-diam (*memoria passionis*) sampai menjadi sumber motivasi bagi perjuangan di masa mendatang.

---

[26] Teks selengkapnya bisa dibaca pada bagian lampiran buku ini.

7.3.4. Titik awal radikalisasi perjuangan

Suara-suara dari pihak yang kurang puas dengan hasil-hasil perjuangan semakin hari semakin nyaring terdengar. Banyak pihak-pihak yang sejak awal mengharapkan agar aspirasi "M" (merdeka) diperjuangkan dengan lebih keras. Mereka mengandaikan cara tersebut lebih efektif daripada jalan dialog. Setelah melihat hasil perjuangan kurang kentara dan tindakan aparat keamanan semakin tidak wajar, mereka merasa bahwa sekaranglah saatnya untuk banting setir. Pihak-pihak inilah yang suaranya turut melatarbelakangi munculnya "Panitia Kemerdekaan".

Wajar jika dalam suasana yang tidak menentu suara dari pihak yang radikal lebih nyaring dan lebih didengar. Ungkapan kritis mereka juga mudah menyentuh hati para pejuang yang tergabung dalam organisasi seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka), TPN (Tentara Pembebasan Nasional), atau AMP (Aliansi Mahasiswa Papua). Dengan demikian dukungan sangat mudah diperoleh. Kelompok ini pula yang mendorong lahirnya organisasi baru seperti DeMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka) yang mengambil sikap lebih agresif. Di samping itu disinyalir terdapat pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh wakil-wakil dari kelompok garis keras, antara lain di Manokwari pada 20-21 Agustus 2000, serta Rapat Konsolidasi Pemuda Papua di Vanimo yang berlangsung pertengahan kedua November 2000.

Tentu saja yang menjadi salah satu eksponen kelompok garis radikal adalah Panitia Kemerdekaan. Panitia ini mulai merumuskan sejumlah kegiatan, antara lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan peringatan 1 Desember 2000. Di antaranya mereka merencanakan program pengungsian sejumlah warga Papua ke Papua New Guinea (PNG). Boleh dikatakan bahwa munculnya panitia ini menjadi tanda pengradikalisasian Gerasem. Radikalisasi gerakan ini cukup memprihatinkan kelompok pejuang yang tetap ingin memilih jalan damai melalui dialog (termasuk dialog politik) yang terbuka.

Pada gilirannya, aparat keamanan mulai menunjukkan kekuatannya di Jayapura dan sekitarnya. Sudah barang tentu *show off force* ini tidak menyumbang pada rasa aman dan tenang di kalangan masyarakat. Apalagi setelah aparat menunjukkan kekuatannya secara tidak proporsional melalui manuver pesawat tempur di udara Papua,

dan penerjunan pasukan payung dari helikopter di Lembah Baliem (Aikama, Pikhe) pada 2 November 2000.

7.3.5. Suara damai ditekan

Para pemimpin Gerasem ditangkap. Anggota PDP yang masih bebas juga diancam akan ditahan, sehingga mereka akhirnya memilih untuk membisu. Salah satu yang masih tetap dipercaya dan dijadikan pegangan oleh masyarakat adalah lembaga-lembaga pejuang HAM dan Gereja (agama), walaupun protes dari lembaga-lembaga tersebut seringkali tidak dihargai oleh aparat keamanan.

Untuk membatasi kewibawaan lembaga pejuang HAM dan Gereja, sebuah pandangan dan penilaian yang sangat menyesatkan mulai disebarluaskan oleh pihak yang berwajib. Dalam pandangan itu disebutkan bahwa perjuangan lembaga-lembaga pejuang HAM dan Gereja (agama) sebenarnya tidak benar dan tidak murni. Menurut pandangan itu, Gereja dan lembaga lainnya hanya memakai isu HAM, agama, atau isu adat sebagai kedok untuk memperjuangkan kemerdekaan politik.

Dengan menyebarluaskan pandangan sesat itu, pihak berwajib menjalankan suatu permainan yang sangat berbahaya untuk mendiskreditkan sejumlah lembaga di mata masyarakat. Tidak mengherankan jika pandangan seperti itu dalam waktu relatif singkat tersebar luas di kalangan masyarakat, karena pihak berwajib mengerahkan seluruh kadernya. Akhirnya, lembaga-lembaga HAM dan Gereja (agama-agama) mulai disudutkan.

KESIMPULAN AKHIR TAHUN

Dapat disimpulkan bahwa tahun 2000 diakhiri dengan ketakutan dan kekecewaan besar masyarakat. Masyarakat juga tidak memperoleh titik terang, apa yang bisa diharapkan pada tahun berikutnya. Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid pada hari Natal juga tidak dapat meringankan beban masyarakat yang sangat berat.

Secara singkat suasana akhir 2000 dapat dirangkum sebagai berikut:

❖ Peristiwa-peristiwa yang muncul telah membangkitkan kemarahan

dan ketakutan besar di seluruh Propinsi Papua, sekaligus membuat masyarakat merasa tak berdaya.

- Kehadiran aparat TNI dan Polri yang menonjol telah mengikis kebebasan gerakan dan pengungkapan aspirasi masyarakat Papua.
- Harapan positif agar aspirasi masyarakat didengar telah terkubur dan masyarakat tidak tahu lagi apa yang bisa diharapkan.
- Sulit diramalkan apakah nanti masih akan ada ruang untuk suatu proses demokratisasi. Proses demokrasi yang diprakarsai selama dua tahun di seluruh Republik Indonesia dengan semangat besar dan memberikan angin segar, nampaknya sudah berakhir. Apakah yang kita saksikan ini adalah "AKHIR musim semi demokrasi"? Apakah wajar pendapat kritis dan aspiratif dinilai sebagai makar dan melanggar hukum? Lalu hukum siapa yang digunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak dapat dihindari di akhir 2000.
- PDP sebagai pelopor gerakan aspiratif melalui jalan damai sudah tidak ada lagi. Daya upayanya telah dipatahkan. Lihatlah sejumlah proses peradilan yang sangat bermuatan politik (seperti di Jayapura, Wamena, dan Merauke) terhadap para anggota PDP yang dapat kita saksikan selama 2001.
- Lembaga-lembaga perjuangan HAM merasa bahwa ruang bicara sudah sangat dibatasi, walaupun Gereja terus berusaha agar dialog tetap dapat dijalankan dengan damai.
- Perlu dinyatakan bahwa pemerintah sipil secara *de facto* tidak memilik kuasa apapun terhadap operasi-operasi aparat keamanan dan pertahanan yang sangat merugikan masyarakat.
- Pemerintah sedang memberikan perhatian khusus pada pengembangan konsep otonomi khusus — wewenang pemerintah daerah diperluas secara berarti dan sesuai dengan kebutuhan di Papua — sebagai tanggapan atas aspirasi-aspirasi yang muncul selama dua tahun terakhir. Dapat diramalkan bahwa pemerintah akan sulit memperoleh dukungan dari masyarakat luas untuk melaksanakan program tersebut, karena kredibilitasnya telah menurun drastis. Selain itu polarisasi antara 'kelompok O (otonomi)' dan 'kelompok M (merdeka)' sudah sampai pada suatu titik yang tampaknya sulit untuk berbalik (*point of no return*).
- Kemungkinan besar masyarakat Papua akan mulai menunjukkan sikap acuh-tak-acuh dan apatis, karena mereka melihat bahwa

masalah mereka tidak lagi didengarkan, serta harapan mereka tak lagi ditanggapi.

- Proses radikalisasi gerakan perjuangan sudah mulai kentara dan akan turut menentukan suasana kehidupan sosial-politik di Papua selama 2001.

Sudah tentu gambaran suasana kehidupan masyarakat pada akhir 2000 terlihat sangat suram. Namun demikian, masih ada sekelompok orang yang berharap agar masyarakat Papua menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya secara damai, hingga martabatnya pulih dan diakui kembali.



Sisa-sisa kerusuhan di Desa Wouma, 6 Oktober 2000.



Salah seorang korban kerusuhan di Desa Wouma, 6 Oktober 2000.



Kerusuhan di Desa Wouma yang terjadi pada 6 Oktober 2000, bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga harta benda milik warga.



Evakuasi korban kerusuhan, 7 Oktober 2000.





Bendera Bintang Kejora dikibarkan sejajar dengan bendera Merah Putih di Taman Imbi Jayapura, 17 Oktober 2000.

Bagian 3
Kondisi Hak Asasi Manusia

Pada bagian ini akan diuraikan situasi hak asasi manusia di Papua selama 2000. Pembahasannya akan dibatasi pada segi tanggung jawab negara dalam mengusahakan kesejahteraan umum (*bonum commune*) — yang tak lain merupakan hak-hak ekonomi, sosial, budaya — dan melindungi hak-hak sipil-politik. Batasan ini diambil dari UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang dijadikan kriteria dalam menilai peristiwa-peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, dan dinamika situasi masyarakat selama 2000 di Papua. Selain menggunakan UU tersebut, analisis ini juga menggunakan perangkat Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik dan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.[1]

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam mengusahakan kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi diatur dalam pasal 71 UU No. 39/1999:

> Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan yang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Ketentuan itu diperkuat dengan pasal 72 UU No. 39/1999 yang berbunyi:

---

[1] Kedua kovenan itu disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966 dan berlaku 10 tahun sesudahnya, yakni 23 Maret 1976. Indonesia belum meratifikasi kedua kovenan tersebut.

> "Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Berdasarkan batasan di atas, pemerintah tidak hanya dapat diminta pertanggungjawabannya atas peristiwa-peristiwa yang diuraikan di bawah ini tetapi juga dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Jika ditempatkan dalam capaian perangkat hukum HAM yang dihasilkan hingga 2000, terdapat langkah maju yang dibuat oleh pemerintah dengan adanya dua undang-undang baru: UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000.[2]

Dengan UU No. 39/1999, masyarakat dan pemerintah memiliki landasan hukum operasional dalam berbicara mengenai hak asasi manusia. Lebih dari itu, dengan UU No. 39/1999 Komnas HAM sebagai lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk mengembangkan pelaksanaan hak asasi manusia dikukuhkan kedudukannya sebagai "lembaga mandiri yang setara dengan lembaga negara lainnya".[3] Lembaga ini memiliki kewenangan hingga tingkat penyelidikan berdasarkan sebuah undang-undang (bukan lagi Keputusan Presiden). Langkah maju ini diikuti dengan kekuatan hukum yang terdapat dalam UU No. 26/2000, yang untuk pertama kalinya terbuka peluang bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tindak kekerasan yang digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Secara konkret masyarakat melalui Komnas HAM dapat menyelidiki Polri sebagai aparat penegak hukum dan TNI sebagai aparat keamanan negara secara *pro iustitia*.[4]

---

[2] Meski merupakan langkah maju, kedua undang-undang tersebut perlu segera diamandemen. Misalnya, dalam UU 26/2000 pasal 18 ayat 1 disebutkan hanya Komnas HAM yang berwenang menyelidiki dan menyimpulkan (pasal 20 ayat 1) ada tidaknya pelanggaran berat HAM. Bunyi pasal ini akan mempersulit tuntutan keadilan yang disuarakan oleh masyarakat korban karena untuk membawanya ke Pengadilan HAM hanya bisa melalui rekomendasi Komnas HAM. Contoh lainnya adalah pelaksanaan prinsip retroaktif yang terkesan dikompromikan dengan kepentingan-kepentingan politik di DPR-RI, sehingga pembentukan pengadilan HAM *ad-hoc* hanya bisa dilakukan berdasarkan usulan DPR-RI (pasal 43 ayat 2).

[3] Lihat ketentuan umum pasal 1 no. 7 UU No. 39/1999.

[4] Sebelum diresmikannya UU No. 26/2000 ini, penyelidikan yang memiliki bobot hukum di muka pengadilan (*pro iustitia*) hanya ada di tangan kepolisian, polisi militer, kejaksaan, dan oditur militer. Karena itu Komnas HAM pada masa sebelumnya hanya mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah

FAKTA DAN ANALISIS SITUASI

Gambaran fakta berikut analisisnya akan menjadi tolok ukur yang nyata untuk menentukan sejauh mana pemerintah menepati kewajiban dan tanggungjawabnya di bidang hak asasi manusia, yang terangkum dalam bidang kesejahteraan umum dan hak-hak sipil dan politik. Dalam masing-masing bidang fakta dan analisis akan diuraikan gambaran faktual, inti permasalahan, gambaran korban, dan akhirnya pihak-pihak yang menjadi pemegang kunci peristiwa.

1. Kesejahteraan Umum

Pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab negara di Papua terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat pada intinya bisa dilihat dari kemampuan pemerintah menyelenggarakan dua hal: [1] pemerintahan yang bersih, terkontrol, dan transparan (*clean government*), dan [2] pemerintahan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat (*public servant*). Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah di Papua tidak bisa dilepaskan dari konteks perubahan rezim. Yakni dari rezim Orde Baru ke rezim demokratis yang menjanjikan tatanan politik yang lebih transparan dan keadaan sosial yang lebih adil,[5] tetapi sekaligus dibayang-bayangi oleh kepentingan rezim lama yang hendak mempertahankan kekuasaannya.

1.1. Lima masalah pokok

Ada lima masalah pokok yang menjadi persoalan mendasar di Papua berkaitan dengan kewajiban negara dalam menciptakan kesejahteraan umum. Yakni transmigrasi, korupsi, pengangkatan pegawai, hak ulayat, serta masalah fasilitas umum dan sosial.

---

mengenai kasus yang diselidikinya. Rekomendasi itu tidak memiliki kekuatan paksa secara hukum sehingga kepastian hukumnya tidak terjamin. Dengan demikian kepentingan korban tidak memiliki jalan penyelesaian secara hukum yang menjawab tuntutan keadilan.

[5] Lihat TAP MPR No. VII/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.

Gambaran Faktual

Transmigrasi	• Kasus tuntutan transmigran SP VII dan VIII Bonggo atas lahan pertanian, infrastruktur, dan fasilitas sosial yang buruk, tidak mendapat tanggapan wajar dari pemerintah (28/2, 27-28/3, 4/4, 3/5, 20-24/7). • Penangkapan sewenang-wenang terhadap empat orang warga transmigran oleh Polres Jayapura (30/8). • Tuntutan transmigran SP IV Kaureh atas infrastruktur yang tidak memadai (29/2).
Korupsi	• Penyelewengan dana PMTAS Puncak Jaya (26/1). • Penggunaan dana *crash program* perlu diawasi ketat (21/8). • Kasus dugaan korupsi dana JPS Kesehatan di Abmisibil (22/9, 4/10). • Menurut Caretaker Gubernur Irja, dana *crash program* tahap I tidak tepat sasaran (1/10). • Kepala dinas Kesehatan Tk. I Irja diperiksa karena dugaan korupsi (4/10). • Penyalahgunaan dana JPS bidang kesehatan di 4 Puskesmas Manokwari (1/10). • Kkasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Tk. I Irja ditangani oleh Irwilprop (4/10, 6/10). • Sanksi penurunan jabatan dan pemotongan gaji dijatuhkan oleh Bupati Manokwari kepada enam Camat di Kabupaten Manokwari (10/10). • Dana *crash program* disalahgunakan untuk studi banding oleh DPRD Kota Jayapura (18/10). • Kasus dugaan korupsi di Bapedalda (11/12). • Dana *crash program* diduga disalahgunakan di Manokwari (9/12). • Kasus pemecatan tiga pejabat Pemda Fak-fak (21/12).
Pengangkatan Pegawai	Kasus "Formasi CPNS 2000" diwarnai dengan permintaan dari LMA Malamoi (31/1) dan Pemda Tk. I Irja (9/2), penolakan (30/1), usul penundaan oleh Ketua DPRD Manokwari (3/2), serta penipuan dan suap (berdasarkan keterangan Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Hukum dan Perundang-undangan) (8/3).
Hak Ulayat	• Warga Koya Timur Jayapura menuntut ganti rugi atas tanah adat yang dialokasikan untuk lahan transmigrasi (13/1). • Kasus Danau Wanagong di Timika (7/4, 11/5). • Kasus gugatan Masyarakat Adat Moi di Sorong (30-31/1, 18/2, 21/2).

	• Gugatan warga Kayu Pulo menyangkut tanah lokasi kantor DPRD Tk. I di Jayapura (3/8). • Anggota DPRD Kabupaten Jayapura mengusulkan adanya panitia penyelesaian tanah adat yang melibatkan semua unsur (19/10). • Nota kesepahaman (MOU) ditandatangani antara PT Freeport Indonesia dengan Lemasa dan Lemasko (27/12).
Fasilitas Umum dan Sosial	• Camat Tigi mengeluh atas minimnya sarana pendidikan dan kesehatan di Tigi (17/2). • Sebanyak 96 orang PNS Kecamatan Okbibab mengancam mogok karena jatah beras tidak beres (17/2). • Pendidikan yang merosot dan kekuragan tenaga dokter di Baliem akibat peristiwa kekerasan (8/10). • Kasus kemacetan PDAM (14/12).

1.1.1. Program transmigrasi

Pada masa Orde Baru, pembicaraan kritis mengenai program transmigrasi sangat ditabukan. Akibatnya tidak pernah terjadi koreksi terhadap paket kebijakan tersebut, apalagi adanya perubahan radikal yang menguntungkan masyarakat. Kasus-kasus di SP VII dan VIII Armopa—Bonggo menjadi model yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan program transmigrasi di Papua.

Ada beberapa kenyataan yang dialami oleh para transmigran di daerah tersebut:

- Para transmigran tidak memperoleh informasi yang lengkap dan objektif mengenai lahan baru yang akan ditempatinya.
- Lahan transmigrasi tidak layak pakai untuk lahan pertanian, padahal transmigrasi yang diprogramkan adalah transmigrasi pertanian. Lahan di lokasi Bonggo adalah tanah asam dan berawa, sehingga tidak layak untuk ditanami. Kenyataan ini dikuatkan dengan kesaksian direktur CV Rhonita yang membangun pemukiman di SP VIII. Ia menyatakan bahwa konsultan yang didatangkan dari Jakarta tidak mengetahui kondisi di lokasi itu sehingga sistem *drainase* tidak dimasukkan dalam rencana pembangunan. Wajar jika lahan di situ tidak subur karena tergenang air. Ketidaklayakan lokasi ternyata juga diakui secara resmi

oleh Pejabat Sementara Gubernur Irja, Musiran Darmosuwito S.I.P. saat ia menjelaskan latar belakang pembangunan SP VII dan VIII Armopa, Bonggo, kepada Menteri Transmigrasi dan PPH secara tertulis.[6]

- Infrastruktur seperti jalan, jembatan, *drainase*, sarana air bersih, dan fasilitas umum tidak dibangun secara layak. Akibatnya lokasi transmigrasi itu tidak memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang nyata. Dalam kasus Bonggo, kekurangan mendasar ini baru direncanakan kemudian setelah ada pengaduan dari warga transmigran.[7]
- Penempatan transmigran umumnya tidak melalui pengenalan budaya setempat. Akibatnya warga transmigran dengan penduduk asli terpisah secara kultural.

Karena kenyataan-kenyataan pahit itu, warga transmigrasi Bonggo dan Kaureh kemudian menuntut keadilan ke DPRD Tk.I Papua. Mereka menuntut agar dibangun infrastruktur yang memadai, di samping adanya tuntuan agar mereka dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing. Khusus menyangkut transmigran SP VII dan VIII Bonggo, mereka memperjuangkan perkara tersebut sepanjang 2000 bersama dengan LBH Jayapura kepada pihak Departemen Transmigrasi, DPRD Tk.I, Pemerintah Daerah Tk. I, sampai ke Menteri Transmigrasi.

Dalam menanggapi tuntutan warga transmigran, mula-mula Kanwil Departemen Transmigrasi (Deptrans) berjanji untuk memperbaiki lokasi transmigrasi dengan paket *crash program.* Sementara itu warga ditampung di rumah transito Sentani dengan jaminan pangan dan medis dari Kanwil Deptrans. Namun tuntutan agar warga dipulangkan ke daerah asalnya tidak dipenuhi dengan alasan Deptrans tidak memiliki program untuk itu. Warga lalu menyampaikan tuntutannya ke DPRD Tk. I Irja yang semula mendukung tuntutan mereka. Tetapi dukungan ini berbalik setelah

---

[6] Lihat surat Pjs. Gubernur Irja, Musiran Darmosuwito, S.I.P. kepada Mentrans dan PPH, no. 475-1/2094/SET, tanggal 4 Juli 2000, perihal: Pengaduan Pelaksanaan Transmigrasi di SP VII dan VIII Armopa, Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura.

[7] Lihat *Crash Program Pengembangan Kawasan Bonggo* yang disusun Kanwil Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irja, 5 Mei 2000, Di dalamnya memuat rencana perbaikan kondisi lahan pemukiman transmigrasi.

DPRD mengadakan pertemuan dengan Kanwil Deptrans. Dewan akhirnya mendukung rencana *crash program* Deptrans dan menolak tuntutan warga untuk dipulangkan ke daerah asalnya.[8]

Perjuangan warga transmigran yang didampingi LBH Jayapura tidak berhenti di situ. Mereka lalu mengadukan nasibnya ke Menteri Transmigrasi dan PPH di Jakarta. Dari pertemuan langsung dengan Menteri pada 26 Mei 2000 diperoleh kepastian bahwa Deptrans dan PPH akan mengirim tim peneliti yang akan turun ke lokasi transmigrasi.[9]

Deptrans dan PPH memenuhi janjinya. Dari hasil penelitian di lokasi transmigrasi terbukti bahwa apa yang diadukan warga ternyata benar.[10] Namun kesimpulan itu tidak mengubah kenyataan di lapangan. Kemungkinan besar yang jadi penyebabnya adalah adanya surat dari *Caretaker* Gubernur Irja yang mengukuhkan program Kanwil Deptrans dan PPH Propinsi Irja.[11]

Warga transmigran kembali memperjuangkan nasibnya ke DPRD Tk.I Irja. Mereka berkemah di sana dan minta tuntutannya diperhatikan. Tetapi tindakan ini ditanggapi dengan pengusiran warga dari kantor DPRD pada 24 Juli 2000 pukul 02.00 WIT dini hari, yang dilakukan oleh anggota satuan Kepolisian Resort Jayapura. Tekanan terhadap warga transmigran tidak berhenti di situ. Pengusiran tersebut

---

[8] Sikap DPRD Tk. I bisa dibaca dalam "Hasil Pembahasan Permasalahan UPT Armopa VII dan VIII" yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Tk.I Irja, Nataniel Kaiway, dan Kakanwil Deptrans dan PPH, Budi Sinulingga, Mei 2000 (tanpa tanggal).

[9] Pertemuan antara menteri transmigrasi dan PPH, Al Hilal Hamdi, dengan kelompok LSM yang mewakili warga transmigran: YLBHI, ISJ, LBH Jayapura, JK-LPK, Elsam, dan Els-HAM Irja. Pertemuan itu dilangsungkan di kantor Mentrans dan PPH, Jl. Pahlawan No. 7 Kalibata, Jakarta.

[10] Kunjungan tim staf ahli Mentrans dan PPH ke lokasi SP VII dan VIII Armopa, Bonggo, terjadi pada 10-12 Juni 2000.

[11] Surat Pjs. Gubernur Irja, Musiran Darmosuwito, S.I.P. kepada Mentrans dan PPH mengenai "pengaduan pelaksanaan transmigrasi di SP VII dan VIII Armopa, Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura", no. 475-1/2094/SET, tanggal 4 Juli 2000. Surat ini dengan panjang lebar menguraikan kedudukan kasus transmigran Bonggo dengan bersandar pada pendapat bahwa (1) warga transmigran harus kembali ke lokasi transmigrasi karena lokasi transmigrasi Armopa sangat subur dan tanamannya sangat baik, (2) akan ada perbaikan lokasi melalui *crash program* dari Kanwil Deptrans dan PPH Irja, (3) pengaduan warga didalangi dan dijadikan komoditas politik oleh LBH Jayapura dan Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan, (4) korban yang meninggal di lokasi transmigrasi bukan disebabkan oleh kelaparan tetapi karena penyakit bawaan, malaria, melahirkan bayi prematur, dan dipatok ular.

disusul dengan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat Polres Jayapura terhadap empat warga transmigran yang dituduh menghasut serta melanggar pasal 160 KUHP jo. Pasal 18 UU RI No.3 tahun 1973. Mereka adalah:

- Agus Leu, ditangkap pada 27 Agustus 2000, dengan surat penahanan yang baru dikeluarkan pada 28 Agustus 2000 bernomor Pol. B/299/VIII/2000/Serse.
- Wawan, ditangkap pada 27 Agustus 2000, tanpa surat penangkapan dan penahanan.
- Abu Hasan, ditangkap pada 28 Agustus 2000, dengan surat penahanan yang baru dikeluarkan pada 31 Agustus 2000 bernomor Pol. B/608/VIII/2000/Serse.
- Suminto Antonius, ditangkap pada 30 Agustus 2000, dengan surat penahanan yang baru dikeluarkan pada 31 Agustus 2000 bernomor Pol. B/609/VIII/2000/Serse.

Perjuangan warga terus berlanjut — juga setelah keempat orang itu dibebaskan. Kini mereka bertenda di sekitar halaman kantor LBH Jayapura. Tuntutannya tetap sama, yakni menuntut keadilan dan minta dipulangkan ke daerah asal. Sementara tuntutan itu belum dikabulkan, status transmigran dicabut dari warga dan Kanwil Deptrans dan PPH melepaskan tanggungjawabnya. Pencabutan status itu dilakukan ketika Pemda Tk. I Irja belum mengambil langkah penyelesaian yang menyeluruh terhadap kasus ini.

1.1.2. Korupsi

Kasus-kasus korupsi yang muncul mencerminkan luasnya jangkauan pengaruh yang dicakup, baik secara geografis, jenjang pemerintahan, maupun secara sektoral. Secara geografis, kasus-kasus korupsi terjadi mulai dari pedalaman hingga perkotaan. Secara administrasi pemerintahan, kasus tersebut muncul mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga ibukota propinsi. Secara sektoral, kasus korupsi meliputi bidang kesehatan masyarakat, pendidikan formal, pemerintahan, infrastruktur, dan prasarana wilayah.

Kasus-kasus korupsi yang dilaporkan juga mencerminkan model praktik pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat propinsi. Kasus-kasus tersebut sebenarnya langsung mempengaruhi

kesejahteraan masyarakat di tingkat paling dasar, tetapi dianggap hal yang kurang perlu untuk diangkat atau dilaporkan. Praktik pemerintahan yang korup tersebut biasanya bertalian kepentingan antara jenjang yang satu dengan jenjang lainnya, sehingga keluhan dan bahkan gugatan dari masyarakat biasanya tenggelam dalam jenjang birokrasi yang panjang.

Sebagai contoh, kasus dugaan korupsi dana JPS (Jaring Pengaman Sosial) bidang kesehatan 1999-2000, dana PPKM (Proyek Peningkatan Kesehatan Masyarakat), dana operasional Puskesmas, dan dana JPKM (Jaring Pengaman Keluarga Miskin) di Puskesmas Abmisibil — yang jumlah totalnya mencapai Rp 53.446.000 — telah diangkat oleh Kelompok Peduli Masyarakat Okbibab sejak September 2000.[12] Dilihat dari jumlah uang yang diduga diselewengkan memang tidak luar biasa. Tetapi jika ditinjau dari tujuan program JPS, asal usul dana JPS, dan dampak yang ditimbulkan di tingkat masyarakat pedalaman, tentu akan lain persoalannya.

Ditinjau dari tujuan program JPS, dana tersebut seharusnya digunakan untuk mempertahankan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kalangan keluarga miskin tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan kesehatan serta status gizinya.[13] Mengingat pentingnya program ini, tidak ada alasan sedikitpun untuk menyelewengkan dana tersebut untuk tujuan lain.

Sementara jika ditinjau dari segi asal-muasalnya, dana program JPS 2000 tak lain merupakan pinjaman dari Bank Dunia (*World Bank*) dan bukan uang dari negeri sendiri. Pinjaman untuk program JPS 2000 nilainya mencapai US$ 600 juta, dan US$ 300 juta di antaranya telah dicairkan pada 28 Januari 2000.[14] Karena merupakan utang, maka konsekuensinya uang itu harus dikembalikan beserta bunganya. Jika pada kenyataannya rakyat (seperti di Abmisibil) tidak menikmati

---

[12] Laporan "Kasus Korupsi Dana JPS Bidang Kesehatan, Dana PPKM, Dana Operasional Puskesmas, Dana JPKM, Puskesmas Abmisibil Kecamatan Okbibab, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua", disusun oleh Kelompok Peduli Masyarakat Okbibab, Oktober 2000.

[13] Penjelasan Sekretariat Nasional Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) dalam brosur "Program JPS Bidang Kesehatan (JPS-BK)".

[14] Lihat makalah "Tolak Hutang SSNAL-JPS, Ganti dengan Hibah", Jakarta: 4 Oktober 2000. Makalah ini disusun oleh INFID sebagai tanggapan terhadap pertemuan CGI pada 17-18 Oktober 2000 di Tokyo, Jepang. Isinya menguraikan secara singkat kegagalan program JPS akibat birokrasi pemerintah yang ber-KKN.

manfaat dari dana tersebut, maka sungguh tidak etis bila pemerintah tetap menyerap dana masyarakat untuk membayar utang luar negeri itu.

Ditinjau dari segi dampak, juga sama buruknya. Daerah pedalaman di Papua memiliki banyak keterbatasan akses, seperti akses transportasi, komunikasi, kesehatan, dan terpenting akses bantuan hukum yang amat berbeda dengan lingkup perkotaan. Uang tersebut seharusnya diperuntukan buat gaji para petugas kesehatan yang sudah bekerja dengan segala keterbatasan itu. Kenyataannya uang yang merupakan nafkah hidup mereka itu ternyata tidak bisa mereka nikmati.

Seperti telah disebutkan, penyelewengan ini sebenarnya sudah diangkat oleh Kelompok Peduli Masyarakat Okbibab. Tetapi tanggapan yang wajar dan proses hukum tidak pernah ada. Dengan penundaan penanganan perkara ini, menunjukkan bahwa pemerintah — dalam hal ini Kanwil Kesehatan Propinsi Irja — tidak mau tahu dengan hasil kerja keras para mantri, perawat, atau bidan desa. Lebih dari itu, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Abmisibil semakin terganggu karena kinerja para petugas kesehatan mau tidak mau dipengaruhi oleh hambatan gaji yang tidak mereka terima.

1.1.3. Pengangkatan pegawai baru

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru atau yang lebih dikenal dengan nama "Formasi 2000" dan formasi tambahannya, merupakan langkah pemerintah untuk menyerap angkatan kerja. Kebijakan ini ditanggapi dengan beragam pendapat oleh berbagai kalangan masyarakat. Sebagian menganggap Formasi PNS tak lain adalah gula-gula politik agar masyarakat tidak lagi menyuarakan aspirasi "M" (merdeka). Sebagian lagi menganggap upaya ini sebagai wujud penghargaan terhadap putera daerah. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai ladang KKN. Pendapat masyarakat yang negatif itu memang cukup berdasar, karena dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya Formasi PNS selalu diwarnai kemelut yang menandakan adanya sesuatu yang kurang beres.

Kebijakan tersebut memang perlu ditinjau secara kritis dengan menempatkannya dalam konteks pengembangan masyarakat. Formasi PNS pada intinya merupakan pengembangan sektor negara karena tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga untuk jenjang-jenjang

birokrasi. Penguatan sektor negara tanpa diimbangi oleh pengembangan sektor swasta, sebenarnya memperlemah keberdayaan masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah. Selain itu juga akan makin memperbesar biaya pembayaran gaji pegawai.

Jika diteliti lebih mendalam, di Papua secara *de facto* tidak ada pengembangan sektor swasta yang menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Misalnya untuk bidang konstruksi, perdagangan, jasa, industri rumah tangga, pariwisata, perkebunan rakyat, dan sebagainya. Padahal, pengembangan sektor swasta jauh lebih menuntut perhatian, keuletan, dan daya saing jika dibandingkan dengan sektor negara. Selain itu dampaknya akan jauh lebih berdaya guna bagi keberdayaan masyarakat. Selama ini sektor swasta lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya kesempatan itu jatuh pada pihak yang bermodal kuat, memiliki jalur informasi pada pusat-pusat kebijakan, serta memiliki akses kepada lalu-lintas barang dan jasa yang berskala nasional maupun internasional. Padahal jika ingin mengembangkan masyarakat Papua — apalagi dalam kerangka otonomi khusus — Pemda seharusnya mengembangkan sektor swasta jika tidak mau wilayahnya hanya dijadikan tempat pemasaran barang dan jasa.

1.1.4. Hak ulayat

Kasus-kasus tanah adat kurang begitu terangkat di tengah dinamika aspirasi "M" selama 2000. Padahal persoalan ini banyak muncul dan merebak di berbagai tempat di Papua. Jika dirunut dengan teliti, pengambil-alihan tanah-tanah adat secara sewenang-wenang sebenarnya merupakan salah satu akar masalah yang menjadi penyulut merebaknya aspirasi "M". Mengapa demikian? Karena sistem hukum negara tidak pernah mengakomodasi paham hukum adat dalam hukum negara, sehingga jatidiri masyarakat yang antara lain terungkap dalam hak ulayat tidak pernah dihargai. Perasaan terpinggirkan ini cukup banyak terungkap dalam berbagai tuntutan atas tanah, seperti diuraikan di bawah ini.

❖ *Kasus Tanah Adat Masyarakat Moi, Sorong*

Masyarakat Adat Moi adalah pemilik tanah adat Sorong yang salah satu bagiannya digunakan untuk lokasi pertambangan minyak Pertamina. Menurut pendapat masyarakat adat, Pertamina telah bertahun-tahun memanfaatkan tanah mereka tanpa imbalan yang

berarti untuk pengembangan masyarakat Moi. Oleh sebab itu, melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, mereka menuntut penghargaan yang lebih berarti dari Pertamina.

Tuntutan itu mula-mula dilakukan dengan jalan memblokir lokasi industri Pertamina yang akhirnya membuat pihak Pertamina bersedia untuk berunding. Karena sifat industri Pertamina berskala nasional, perundingan antara Pertamina dengan LMA Malamoi dilakukan di Jakarta dengan didampingi LSM-LSM nasional. Perundingan berjalan cukup tegang dan alot sebelum akhirnya disepakati Nota Kesepahaman (MOU) antara Pertamina dan LMA Malamoi. MOU itu di antara isinya menyatakan bahwa Pertamina akan memberi ganti rugi tanah, beasiswa, dan pembangunan fasilitas sosial untuk masyarakat Adat Malamoi.

❖ *Kasus Cekungan Wanagong, Timika*

Cekungan ini merupakan tempat penimbunan batuan PT Freeport Indonesia (PTFI). Tanggul cekungan itu sudah dua kali pecah dan mengakibatkan jatuhnya korban manusia dan binatang. Kementerian Lingkungan Hidup akhirnya melarang pemakaian danau tersebut kecuali PTFI memenuhi dua syarat. *Pertama,* melakukan penelitian bermutu yang dilakukan oleh instansi ahli. *Kedua,* harus dibuat Nota Kesepahaman (MOU) dengan masyarakat adat Desa Waa, Desa Arowanop, dan Desa Tsinga, yang memiliki hak atas wilayah Cekungan Wanagong itu. Syarat kedua ini terus dikejar PTFI sebelum 1 Januari 2001 karena adanya perubahan kebijakan berkaitan dengan otonomi daerah.

Apa arti penting cekungan itu bagi PTFI dan bagi masyarakat adat? Bagi masyarakat adat, Danau Wanagong adalah tempat sakral yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Akan tetapi, penghayatan masyarakat adat ini sudah bertahun-tahun tidak diindahkan oleh PTFI. Bagi PTFI cekungan tersebut merupakan alternatif terakhir untuk proses pembuangan limbah produksinya, karena jika melakukan penimbunan di tempat lain justru akan menimbulkan masalah pencemaran tambahan yang sangat besar bagi daerah aliran sungai di sekitarnya. Sementara proses penimbunan limbah mutlak diperlukan dalam rantai produksi pertambangan sehingga proses ini harus dijaga kelangsungannya. Dengan demikian bisa dipahami jika PTFI betul-betul mengejar target untuk

mewujudkan nota kesepahaman itu.

Pada tahap *pertama*, beberapa anggota masyarakat adat secara mendadak diundang oleh PTFI untuk bertemu di Jakarta pada 7 Desember 2000. Dalam pertemuan ini disosialisasikan hasil penelitian ilmiah dari ITB dan kesepakatan dasar antara PTFI dengan wakil masyarakat adat. Kesepakatan itu didasarkan pada janji pihak PTFI untuk memperhatikan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Langkah *kedua*, dilaksanakan pertemuan lanjutan antara masyarakat adat dengan PTFI pada 19 - 20 Desember 2000 di Desa Banti. Dalam pertemuan tersebut PTFI menghendaki agar MOU bisa ditandatangani saat itu juga. Karena masyarakat adat masih bingung dan masih meragukan bunyi MOU, penandatanganannya terpaksa ditunda sampai 27 Desember 2000. Pada tanggal yang disepakati itu, PTFI ternyata tidak memfokuskan penjelasan MOU pada kepentingan Cekungan Wanagong dan hak-hak masyarakat adat, melainkan pada segi pembangunannya.

Dengan demikian inti masalah sengaja dikaburkan oleh PTFI serta masyarakat terjebak pada segi yang sebenarnya sampingan saja, yakni segi pembangunan fisik desa-desa di sekitar Cekungan Wanagong. Tidak ada satupun lembaga yang punya kesempatan untuk memberikan informasi kritis kepada masyarakat adat mengenai persoalan itu sampai MOU ditandatangani. Dalam persepsi sebagian masyarakat, MOU adalah proyek pembangunan tambahan. Sebagian lagi menganggap bahwa isi MOU itu membingungkan. Namun bagi masyarakat yang memahami duduk persoalannya, isi MOU dinilai telah merendahkan harga diri masyarakat adat. Sebaliknya, bagi PTFI MOU menjadi bukti legal yang dapat memenuhi tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga mereka memiliki izin untuk menjalankan usahanya.

1.1.5. Fasilitas umum dan sosial: kemacetan PDAM, masalah pendidikan, kesehatan primer

Kasus ini menjadi model bagaimana instansi pemerintah menjalankan layanan dalam menyediakan fasilitas umum. Dalam kasus pelayanan PDAM misalnya, bukan rahasia lagi jika instansi itu seakan-akan kebal terhadap kritik dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bergabagi keluhan masyarakat hanya ditanggapi dengan

jawaban seperti "kesulitan teknis belum teratasi, keterbatasan peralatan, sedang ada masalah dengan pemilik tanah adat", dan sebagainya.

Inti masalah dari kasus ini adalah bahwa hak-hak konsumen belum lazim dihargai. Ini tidak hanya berlaku di wilayah Papua, tetapi juga di tingkat nasional. Masalah ini muncul karena sejumlah kelemahan: (1) Belum terumuskannya perangkat hukum untuk mengatur masalah tersebut hingga pada 2000; (2) Gaya pelayanan instansi pemerintah; (3) Masyarakat tidak banyak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, seperti hak atas layanan barang dan jasa yang seimbang dengan harga yang dibayarkan; serta (4) Belum berkembangnya LSM yang bisa mendampingi masyarakat dalam menuntut haknya sebagai konsumen. Karena masalah-masalah inilah posisi tawar masyarakat menjadi lemah saat berhadapan dengan instansi yang melayani penyediaan fasilitas umum.

Masalah serupa juga menghinggapi layanan fasilitas sosial, khususnya dalam pelayanan kesehatan primer dan pendidikan. Misalnya, kesulitan sarana dan tenaga medis begitu terasa di pedalaman. Bahkan pejabat pemerintah sendiri mengeluhkan kenyataan itu, seperti yang diungkapkan Camat Tigi, Kabupaten Paniai. Ungkapan senada juga muncul di Okbibab dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Sementara di bidang pendidikan tidak kalah buruknya. Kemerosotan layanan pendidikan terjadi terutama karena munculnya dampak buruk dari kekerasan seperti yang terjadi di Wamena pasca kerusuhan 6 Oktober 2000, di samping banyaknya guru dan siswa yang terlibat kegiatan Satgas Papua. Tingkat kekerasan yang begitu tinggi telah menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan rusak dan hancur. Selain itu banyak guru yang lari mengungsi atau pindah ke daerah lain. Akibatnya, bahaya hilangnya sebuah generasi *(lost generation)* bukan lagi ancaman, melainkan telah menjadi sebuah kenyataan.

1.2. Gambaran korban

Korban yang menjadi tumbal dari lima masalah di atas meliputi hampir semua lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman. Jika dirinci berdasarkan masalah yang dihadapi, secara sederhana bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Gambaran Korban Bidang Kesejahteraan Umum

	MASALAH	STATUS SOSIAL			LETAK GEOGRAFIS	
		Bawah	Menengah	Atas	Pedalaman	Perkotaan
1.	Transmigrasi	√			√	
2.	Korupsi	√	√		√	√
3.	Hak ulayat	√			√	√
4.	Pengangkatan pegawai	√	√		√	√
5.	Fasilitas Umum & sosial	√	√	√	√	√

Karena masalah-masalah itu langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tentu saja pihak yang paling rentan adalah masyarakat lapisan bawah. Dalam tabel di atas bisa dibaca dengan jelas bahwa lima masalah pokok di bidang kesejahteraan umum itu diderita oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah. Sementara itu kalangan masyarakat ekonomi menengah menjadi korban dalam tiga masalah (korupsi, pengangkatan pegawai, serta fasilitas umum dan sosial). Sedangkan warga masyarakat kelas atas umumnya mengalami masalah yang berkaitan dengan fasilitas umum seperti PDAM, karena dalam layanan fasilitas sosial kelompok ini mampu mencari alternatif.

Ditinjau dari segi geografis, penduduk pedalaman mengalami lima masalah. Sedangkan penduduk perkotaan mengalami empat masalah. Dari lima masalah pokok itu ternyata empat masalah (korupsi, hak ulayat, pengangkatan pegawai, serta fasilitas umum dan sosial) diderita baik oleh penduduk pedalaman maupun perkotaan. Empat masalah ini menjadi masalah harian yang sudah kronis dan penyelesaiannya kerapkali berada di luar jangkauan masyarakat.

1.3. Peran pemegang kunci peristiwa

Karena kewajiban dan tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum ada di tangan pemerintah, maka sorotan pertama diarahkan kepada penyelenggara negara, baik di tingkat daerah maupun pusat. Sorotan kedua diarahkan kepada DPRD sebagai wakil rakyat sekaligus sebagai lembaga pengawas pemerintah. Terakhir sorotan diarahkan kepada pihak-pihak perantara, para kritisi, dan

pemerhati yang mengambil posisi berada di pihak rakyat, yakni LSM, kelompok agama, dan masyarakat adat.

1.3.1. Pemerintah

Dari uraian di atas, kinerja pemerintah selama 2000 di Tanah Papua dapat disimpulkan seperti berikut ini.

❖ *Gaya penguasa*

Dari cara penanganan masalah yang muncul, pemerintah tetap menempatkan dirinya sebagai penguasa yang berhadapan dengan rakyat. Rakyat diperlakukan sebagai pihak yang perlu dikuasai dan ditundukkan — bahkan kalau perlu dengan kekerasan. Minta pertanggungjawaban dari penguasa yang masih menggunakan gaya ala Orde Baru adalah hal yang tidak masuk akal. Pertanggungjawaban hanya bisa dituntut dari rakyat oleh sang penguasa. Penguasa hanya bisa dimintai nasihat, petunjuk, kebijakan, dan perintah, sedangkan rakyat hanya bisa melaksanakannya. Dengan demikian patut dipertanyakan secara kritis jika pemerintah sekarang mengklim dirinya sebagai pemerintahan reformasi.

❖ *Kebal salah dan kebal hukum* (impunity)

Dalam paparan kasus di atas juga dengan jelas bisa dilihat bahwa pemerintah bertindak sebagai pihak yang kebal salah dan kebal hukum. Pengaduan, gugatan, bahkan unjuk rasa dari masyarakat tidak mampu mengusik etika politisnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan yang tidak memuaskan dan menyengsarakan rakyat. Atasan yang mendapat laporan mengenai tingkah laku anak buahnya yang diduga terlibat KKN, tidak segera mengambil langkah penyelidikan sepatutnya. Sebaliknya, pengaduan masyarakat dibiarkan. Bahkan pejabat yang diduga korup justru tetap memegang kedudukan atau naik pangkat. Jelas sekali bahwa hukum seakan-akan tidak mampu menjamah pejabat yang ber-KKN.

❖ *Pola mencari kambing hitam*

Dalam kasus transmigrasi, ada hal yang menarik untuk dicermati. Pemerintah tidak hanya mengelak dari kesalahannya, tetapi juga mempersalahkan masyarakat. Masyarakat yang mengadu dituduh sudah "terprovokasi, digerakkan oleh pihak ketiga dan dihasut

provokator". Dasar pikiran di balik ungkapan itu sebenarnya adalah bahwa *"rakyat itu bodoh dan tidak memiliki pikiran, kemauan, dan kemampuan sendiri. Mereka seperti boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan pihak lain. Jadi pasti pihak lain yang menggerakkan mereka"*.

Cara berpikir seperti ini kentara sekali menggunakan pendekatan Orde Baru, yang terus-menerus mengatakan hal yang sama ketika menghadapi kritik dari kelompok-kelompok pro-demokrasi. Dengan memelihara dan mengembangkan pendekatan itu, pemerintah secara terus-menerus telah memperlemah tingkat keberdayaan masyarakat dan memperbodoh mereka. Akan dibawa ke mana masyarakat Papua jika suara kritisnya selalu dibungkam, diberi stigma 'provokator', atau dijadikan kambing hitam dari kesalahan yang seharusnya dipikul pemerintah?

❖ *Penggunaan kekerasan*

Yang mengejutkan, pemerintah seringkali menggunakan kekerasan dalam menghadapi warga tak bersenjata yang sedang mengadukan nasibnya. Pengusiran warga transmigrasi dari kantor DPRD yang dilakukan oleh pemerintah bersama anggota dewan dengan menggunakan kekuatan polisi, merupakan bukti bahwa penggunaan kekerasan tidak hanya digunakan di bidang politik, tetapi juga di bidang kesejahteraan sosial. Cara-cara demikian semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan profesional untuk menangani benturan kepentingan dengan cara berunding. Sikap ini — sekali lagi — tidak lepas dari filsafat dasar yang diyakini mereka bahwa rakyat bodoh dan hanya bisa ditangani dengan senjata, bukan bahasa. Jika pemerintah mengandalkan kekerasan, siapa lagi yang bisa menolak penggunaan kekerasan untuk memecahkan masalah?

❖ *Keberdayaan masyarakat diperlemah*

Sepanjang 2000, belum nampak tanda-tanda bahwa pemerintah telah mengembangkan pemberdayaan masyarakat Papua. Secara *de facto* pengembangan sektor swasta juga amat lemah. Padahal sektor tersebut sangat menentukan daya saing masyarakat Papua dalam konteks persaingan global. Jika sektor ini diabaikan, maka sulit bagi masyarakat Papua untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Tanpa

daya saing yang dilandasi ketrampilan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggungjawab, keberdayaan masyarakat akan semakin lemah.

1.3.2. Peran DPRD

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tugas pokok mengawasi jalannya pemerintahan sebagai wujud dari kekuasaan rakyat. Lembaga ini juga harus menyusun peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan kerja pemerintah dan masyarakat. Telaah terhadap kinerja DPRD selama 2000, akan didasarkan pada tolok ukur tersebut.

❖ *Gaya penguasa*

Dari fakta-fakta yang muncul selama 2000, para wakil rakyat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial justru menggunakan gaya penguasa. Gaya ini sangat menonjol ketika DPRD menghadapi kelompok masyarakat yang sedang berada dalam posisi lemah. Dalam menghadapi masyarakat yang mengadukan nasib, seperti warga transmigran dan pemilik tanah adat, para wakil rakyat selalu mengambil sikap mengatur dan memerintah, daripada mendengarkan, berunding, atau menampung keluhan mereka secara adil.

Sementara itu dalam menghadapi perkara-perkara KKN, DPRD lebih memilih sikap diam, seolah-olah tidak mau tahu apa yang terjadi. Tentu saja sikap seperti itu tidak sejalan dengan tugas utamanya sebagai pengawas jalannya pemerintahan. DPRD seharusnya segera menanggapi suara-suara yang disampaikan masyarakat, yang mengadukan dugaan KKN oleh pejabat pemerintah di berbagai tingkat.

❖ *Belum berpihak kepada rakyat*

Para anggota dewan belum mampu memenuhi perannya sebagai wakil rakyat yang mengedepankan kepentingan masyarakat, khususnya yang mengalami ketidakadilan. Dalam penanganan masalah transmigrasi misalnya, para wakil rakyat justru berpihak pada kepentingan pemerintah, meskipun jelas-jelas bahwa mereka sedang menghadapi fakta korban.

Namun ketika menghadapi gejolak aspirasi "M" (merdeka), sikap para wakil rakyat cenderung akomodatif. Mengapa mereka menggunakan pendekatan yang berbeda untuk masalah ketidakadilan yang

sama? Kenyataan tersebut ada baiknya diteropong dari sistem pemilu yang berlaku dewasa ini. Faktanya, banyak calon anggota legislatif yang cenderung berusaha mengumpulkan suara massa sebanyak-banyaknya, daripada memikirkan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat di depan para pemilihnya. Dengan sistem pemilu seperti ini, wakil rakyat —yang notabene anggota partai politik — akan sangat memperhatikan isu-isu politik sentral dan kelompok massa strategis sebagai dua faktor utama untuk memenangkan pemilu. Karena itu mereka sangat jeli dalam menangkap dan memanfaatkan isu-isu politis.

Berdasarkan kerangka pikir seperti itu, masalah transmigrasi, KKN, tanah adat, dan fasilitas umum di Papua, bukanlah isu-isu politik sentral dan memiliki kelompok massa strategis. Lain persoalannya dengan isu Gerasem, yang jauh lebih berdaya tawar politis. Demikian pula massa yang menuntut keadilan di bidang kesejahteraan sosial, merupakan massa yang tidak memiliki daya tawar politik dan nilai keuntungan politis.

Jika para wakil rakyat belum juga menangani masalah ketidakadilan dari sudut korban, apa fungsi wakil rakyat bagi rakyat pemilihnya?

❖ *Penggunaan kekerasan*

Sama halnya dengan pemerintah, DPRD seringkali menghadapi masalah ketidakadilan dengan pendekatan kekerasan. Sikap tersebut misalnya terlihat dengan jelas dalam peristiwa pengusiran warga transmigran oleh Polres Jayapura atas permintaan anggota DPRD. Kenyataan ini menunjukkan bahwa DPRD telah memberikan legitimasi bahwa pendekatan kekerasan sah digunakan untuk menangani masalah kesejahteraan. Jika ditinjau dari fungsi dasarnya sebagai lembaga pembuat undang-undang, jelas sekali bahwa penggunaan kekerasan yang diambil DPRD bertentangan dengan hakikatnya sebagai lembaga pembuat kebijakan-kebijakan hukum. Jika lembaga pembuat produk hukum sudah menghalalkan kekerasan, maka yang menjadi pertanyaan besar adalah untuk apa dan untuk siapa produk hukum itu dibuat?

1.3.3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sebagai organisasi non-pemerintah (ornop), LSM menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol kebijakan pemerintah dan memperkuat

keberdayaan masyarakat. Peran ini mengemuka dalam menanggapi sebagian masalah di atas. Dalam masalah transmigrasi misalnya, LBH Jayapura dan LSM-LSM di tingkat nasional mendampingi masyarakat sejak gugatan awal hingga berhadapan dengan Kanwil Deptrans dan PPH, Pemda, DPRD, serta Menteri Transmigrasi dan PPH. Upaya hukum tidak mudah dilakukan oleh LSM karena sering ditafsirkan sebagai upaya pihak ketiga untuk memprovokasi masyarakat.

Dalam masalah hak ulayat, LSM-LSM membantu masyarakat menghadapi perusahaan multinasional seperti di Sorong dan Timika. Mengingat perkara hak ulayat berkaitan dengan kepentingan modal internasional, LSM yang menangani pada umumnya berasal dari tingkat nasional (Jakarta). Dengan demikian dalam menangani perkara, mereka bisa langsung berhadapan dengan pembuat kebijakan di tingkat pusat. Selain itu, mereka juga memiliki akses informasi yang kaya dan memiliki jaringan advokasi dunia. Dengan demikian daya tawar LSM-LSM ini cukup kuat ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan modal dunia.

Namun demikian ada juga keterbatasannya. LSM-LSM tersebut tidak bisa mengikuti perkembangan situasi masyarakat dari hari ke hari karena kantor dan segala kegiatan rutin mereka berada di Jakarta. Hal ini seringkali menjadi hambatan kerjasama antara masyarakat adat dengan LSM-LSM nasional yang belum memiliki cabang atau rekan kerja dalam satu bidang perhatian dan keahlian di Papua.

Bagaimana dengan masalah-masalah lainnya? Harus diakui bahwa keragaman dan spesifikasi LSM di Papua belum mampu menjangkau masalah-masalah penting yang berkaitan dengan kesejahteraan umum. Masalah-masalah KKN, hak konsumen, kemerosotan pendidikan, serta kekurangan sarana dan tenaga kesehatan, belum ditangani oleh LSM yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Bidang-bidang ini makin penting untuk dikembangkan sebagai bagian dari advokasi masyarakat ketika berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung mempengaruhi hidup masyarakat sehari-hari, baik di pedalaman maupun di perkotaan.

1.3.4. Peran para pemimpin agama

Di bidang kesejahteraan umum, peran para pemimpin agama selama 2000 tidaklah menonjol. Para pemimpin agama umumnya

berperan dalam hal mediasi antara pemerintah dan masyarakat atau LSM. Secara *de facto* peran mediasi tersebut kebanyakan berada di wilayah hak-hak sipil dan politik.

1.3.5. Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA)

Peran lembaga adat pada umumnya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak ulayat. Berdasarkan catatan kami, lembaga adat yang berperan dalam pembelaan masyarakat selama 2000 adalah Lembaga Adat Suku Malamoi di Sorong, serta Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Adat Suku Kamoro (Lemasko) yang keduanya ada di Timika.

Lembaga Adat Suku Moi berperan aktif bersama LSM-LSM nasional dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi ketika berhadapan dengan Pertamina. Perjuangan ini membuahkan hasil dalam suatu MOU yang menguntungkan pihak masyarakat adat. Sementara Lemasa dan Lemasko sudah bertahun-tahun berhadapan dengan PT Freeport Indonesia dalam banyak perkara. Khusus dalam perkara Cekungan Wanagong, PTFI telah mengecoh kedua lembaga adat itu sedemikian rupa. Akibatnya latar belakang masalah, posisi tawar masyarakat adat, dan segala konsekuensi dari MOU tidak dipahami secara jernih oleh masyarakat, termasuk oleh kedua lembaga adat itu.

Yang menarik untuk dicermati adalah peran lembaga adat itu sendiri. Pada masa Orde Baru, lembaga adat didirikan oleh pemerintah untuk mendukung Golkar saat Pemilu, atau mendukung kebijakan pembangunan di desa-desa. Dengan demikian lembaga adat berperan sebagai "stempel suara pemerintah". Pasca Orde Baru, lembaga-lembaga adat "plat merah" kebanyakan mati atau tidak berfungsi lagi. Yang masih bertahan adalah lembaga-lembaga adat yang didirikan sendiri oleh masyarakat adat.

Tiga lembaga adat di atas adalah bagian dari segelintir lembaga adat yang masih bertahan. Namun demikian, dari sekelumit proses perjuangan lembaga adat berhadapan dengan pihak pemilik modal ataupun pemerintah, bisa disimpulkan bahwa lembaga adat belum cukup canggih dalam menangani segala aspek dan konsekuensi dari sebuah perundingan. Apalagi ketika menghadapi perundingan dengan jaringan modal atau kekuasaan negara yang sangat rapi, berkeahlian tinggi, dan memiliki berbagai akses penting.

Satu-satunya modal kuat yang dimiliki lembaga adat adalah legitimasi masyarakat. Sementara kekompakan organisasi, kemahiran berunding, dan keluasan wawasan mereka masih harus dikembangkan. Pertanyaannya: pihak manakah yang bersedia bekerjasama dengan lembaga-lembaga adat untuk mengembangkan kemampuan mereka? Juga sejauh mana keterbukaan lembaga-lembaga adat untuk melihat peluang-peluang yang perlu dikembangkan? Lebih jauh dari itu, bagaimanakah kemajuan lembaga-lembaga adat dalam mengimbangi lajunya kecanggihan pemodal dan kekuasaan negara?

2. Hak-hak Sipil dan Politik

Perlindungan dan pengembangan hak-hak sipil dan politik di Papua selama 2000 amat berkaitan dengan dinamika sosial-politik di Papua yang kompleks, bergejolak, serta berkaitan dengan sejumlah aspek dasar bidang kesejahteraan umum. Upaya ini juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di tingkat pusat, dan belum didukung oleh kerangka hukum yang memadai.

Kompleksitas dinamika sosial-politik di Papua, *pertama-tama* bisa dipetakan berdasarkan grafik perkembangan Gerasem yang semakin meluas, terorganisir, berpengaruh, dan melibatkan semua unsur dalam masyarakat.[15] Gerasem tidak hanya melulu sebuah kemelut politik, tetapi juga berpengaruh langsung pada tingkat ekonomi masyarakat sehari-hari. *Segi kedua,* masalah Gerasem di Papua langsung bertalian amat erat dengan kekuasaan dan pemerintahan negara yang memiliki sejarah tersendiri.[16] *Segi ketiga,* dinamika sosial politik itu menjadi begitu bergejolak karena tidak adanya kerangka hukum yang secara sah dan berwibawa menjadi dasar penanganan masalah. Karena tiga unsur itulah, dinamika sosial politik Papua sangat kompleks dan seringkali diwarnai kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat negara.

---

[15] Uraian lengkap mengenai perkembangan Gerasem bisa dilihat pada Bagian II.
[16] Uraian mengenai akar masalah Papua yang kami istilahkan sebagai 'memoria passionis' dapat dibaca selengkapnya pada buku *Memoria Passionis di Papua, Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999,* Jakarta: SKP Keuskupan Jayapura dan LSPP, 2001, hlm. 65-78.

Gambaran Faktual

Penaikan Bendera	• Bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih di Kemtuk Gresi-Jayapura (7/1), Serui (8/1), Manokwari (9/1), Sorong (18/1); Jayapura, Biak, Merauke, Manokwari, Sorong (1/7); Serui (18/4). • Peringatan tanpa penaikan bendera terjadi di Jayapura, Manokwari, Wamena, Sorong, Merauke, Fak-fak, Biak (1/5). • Bendera Bintang Kejora dikibarkan di depan Gereja Imanuel Boswessen Sorong (22/8); Jayapura, Fak-fak, Biak, Manokwari, Timika, Merauke (1-2/12).
Kekerasan Negara	• Kasus penembakan terhadap warga masyarakat di Nabire (28/2). • Operasi penurunan bendera Bintang Kejora di Sorong (28/7 dan 22/8). • Operasi penurunan bendera Bintang Kejora di Wamena (6/10). • Operasi penurunan bendera Bintang Kejora di Jayapura (1/12). • Kekerasan polisi terhadap masyarakat di Merauke (4-12/11, 2/12). • Operasi penyerangan polisi terhadap mahasiswa dan penduduk sipil di sekitar Abepura (7/12).
Kekerasan Massa	• Pengeroyokan Bupati Puarada di Fak-fak (19/3). • Perkelahian dan pembakaran pasar Entrop-Jayapura (26/3). • Pembunuhan terhadap warga pencari gaharu di Kali Kopi-Timika (30/3), Wamena (18/5), Sorong (19/5). • Pengeroyokan sopir truk oleh Satgas Koteka hingga meninggal di Jayapura (11/8). • Pemblokiran di Wamena (19/8). • Satgas Papua mewajibkan anak sekolah untuk memberi hormat di Wamena (22/8). • Pemblokiran kampus Uncen di Abepura (2/12). • Penyerangan Polsek Abepura (7/12). • Pembunuhan dan penganiayaan di Skouw-Jayapura (9/12). • Penyerangan Pos Polisi di Tor Atas (25/12).
Pengungsi Internal *(Internally displaced people)*	• Pengungsi dari Maluku ditolak di Sorong (28/7), Manokwari (29/7), dan akhirnya diterima setelah ada perundingan di Jayapura (30/7, 1/8, 5/8). • Pengungsian akibat peristiwa Wamena (6/10), Jayapura (17/12), dan Merauke (4/11, 2/12). • Orang Biak kembali ke kampungnya dari Maluku (17/12).

2.1. Tindak Kekerasan

2.1.1. Tindak kekerasan oleh masyarakat

Berkaitan dengan persoalan ini, pembahasan akan dibatasi pada tindak kekerasan yang (diduga) bermotif politis. Sedangkan tindak kekerasan yang bersifat kriminal tidak akan disinggung karena berada di luar cakupan pembahasan buku ini.

Selama 2000, terdapat sejumlah kasus yang menyiratkan (bahkan secara jelas) bermuatan politis. Kasus-kasus tersebut adalah:

- Pengeroyokan Bupati Puarada di Fakfak (19 Maret);
- Penyerangan terhadap penduduk sipil di Wamena (6 Oktober);
- Penyerangan terhadap penduduk sipil di Merauke (4 September dan 2 Desember);
- Penyerangan Polsek Abepura (7 Desember);
- Penyerangan terhadap anggota TNI di Tiom (15 Desember); serta
- Penyerangan pos polisi di Tor Atas (25 Desember).

Kasus penyerangan di atas bukanlah kasus kriminal biasa, karena yang jadi sasarannya adalah aparat pemerintah, instansi polisi, atau militer. Penyerangan itu juga berkaitan dengan pengibaran bendera, atau berkaitan dengan operasi polisi atau militer. Dengan demikian, kasus-kasus tersebut sangat beralasan untuk disebut sebagai tindakan bermotif politis.

Walaupun kasus-kasus itu merupakan tindakan bermotif politis, perlu dibedakan antara penyerangan terhadap penduduk sipil oleh aparat negara dan penyerangan yang ditujukan kepada aparat negara (baik sipil maupun militer) oleh masyarakat. Pembedaan ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa di Papua kekerasan horizontal terjadi hanya setelah ada penyerangan lebih dulu dari pihak aparat keamanan kepada kelompok masyarakat atau Satgas Papua.

Penyerangan terhadap penduduk sipil bukanlah target utama atau langkah terarah yang direncanakan, melainkan dampak dari kekerasan yang telah lebih dulu dipicu oleh aparat negara. Pola ini terjadi di Wamena dan Merauke. Lain halnya dengan penyerangan terhadap pos-pos polisi atau tentara. Jelas bahwa sasaran-sasaran yang dianggap lambang-lambang kekuasaan negara itu menjadi target utama tindak kekerasan. Kenyataan ini kadangkala kurang dipahami oleh publik, karena informasi ini kurang terangkat di media massa,

atau terdistorsi oleh pernyataan pejabat-pejabat yang lebih mendapat tempat di media massa.

2.1.2. Tindak kekerasan negara

Dalam catatan peristiwa 2000, hampir semua kekerasan negara dilakukan berkaitan dengan meningkatnya dinamika Gerasem yang disertai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di berbagai tempat di Papua. Berbeda dengan kekerasan kriminal yang dilakukan warga masyarakat, kekerasan negara yang dilakukan TNI dan Polri tidak terjadi secara spontan, lokal, tanpa tujuan, atau tak berdasar.

Untuk memahami pola pendekatan keamanan di Papua, terlebih dahulu perlu ditelaah sejumlah kebijakan pemerintah dan kepolisian dalam menyikapi perkembangan Gerasem di Papua. Arti "kebijakan" dalam hal ini kami pahami berdasarkan pengertian yang lazim dalam pengadilan hak asasi manusia nasional maupun internasional. Dalam paham pengadilan HAM, kebijakan dipahami dalam dua pengertian. *Pertama,* semua dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang; dan yang *kedua* semua tindakan negara yang selalu diulang dengan pola yang sama dalam menghadapi pola kejadian yang serupa.[17]

2.1.3. Kebijakan tertulis

Kebijakan tertulis yang jadi pedoman tindakan pemerintah, Polri, dan TNI sekurang-kurangnya terdiri dari dokumen-dokumen berikut ini:

- Nota Dinas Dirjen Kesbang dan Linmas kepada Mendagri dengan nomor 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000

Dokumen ini merupakan hasil rapat koordinasi khusus Dirjen Kesbang dan Limas Depdagri pada 8 Juni 2000 untuk menghadapi situasi di Papua. Rapat ini melibatkan unsur dari Bakin, Bais TNI, Spam Mabes AD, Kaster TNI, Sintel Mabes Polri, Kostrad, dan

---

[17] Paham yang sama digunakan dalam pengadilan HAM internasional yang menangani kasus Yugoslavia dan Rwanda. Lihat Simon Chesterman, "An altogether different order: defining the elements of crimes against humanity", dalam *Duke Journals of Comparative and International Law*, No. 10, tahun 2000, hlm. 370-390.

Kopassus. Dokumen tersebut merupakan tanggapan pemerintah pusat setelah keluarnya Resolusi Kongres Rakyat Papua II yang hendak memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di dalam dokumen tersebut diuraikan secara rinci dasar, tujuan, tugas pokok, sasaran operasi, pelaksana, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, metoda operasi, sifat operasi, dan rencana kegiatan.

Dalam dokumen itu disebutkan:

> Rangkaian operasi pengkondisian wilayah dan pengembangan jaringan komunikasi dimaksud, bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Propinsi Irian Jaya (Papua) pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Upaya diplomasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan politis dari dunia internasional atas kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penciptaan situasi dan kondisi kondusif tersebut, diharapkan roda pemerintahan dan pembangunan di Irian Jaya (Papua) dapat berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah Indonesia; baik bagi rakyat Indonesia maupun dunia internasional.

Berdasarkan tujuan tersebut, operasi penanganan Papua terdiri dari tiga langkah yang dilakukan serentak: (1) pengkondisian wilayah, (2) pengembangan jaringan komunikasi, dan (3) upaya diplomasi. Dua langkah terarah ke dalam negeri demi terciptanya keamanan sehingga kegiatan pemerintah dan kehidupan ekonomi berjalan lancar. Langkah ketiga dimaksudkan sebagai upaya meraih dukungan dari dunia internasional agar tetap mendukung NKRI.

Tujuan tersebut dibebankan pada enam instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri (khusus untuk operasi diplomasi), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Muspida Propinsi Irian Jaya (Papua) dan propinsi-propinsi lainnya.

Melihat cakupan lembaga yang dilibatkan, tanggapan pemerintah pusat itu rupanya tidak main-main. Karena, keenam lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang menangani dinamika kehidupan sosial-politik di Indonesia dalam semua bidang kehidupan. Menjadi jelas bahwa pemerintah betul-betul ingin menutup setiap ruang gerak bagi pertumbuhan Gerasem di Papua. Selain itu, pemerintah juga melibatkan empat kelompok yang memiliki kemampuan

mempengaruhi masyarakat luas. Mereka adalah kelompok media massa, tokoh agama dan tokoh masyarakat asal Papua, anggota Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung NKRI, serta kalangan LSM.

Kegiatan operasi pengkondisian dan penggalangan tersebut terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Juni sampai Agustus 2000 dalam bentuk kegiatan persiapan, penjajakan, dan konsolidasi. Tahap kedua dilaksanakan pada September 2000 sampai Mei 2001 dalam bentuk kegiatan operasi teknis.

❖ Keputusan DPRD Tk. I Irja tentang Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua

Keputusan DPRD Tk. I bernomor 7/DPRD/2000 mengenai pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua dikeluarkan pada 16 Agustus 2000. Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan beberapa hal. *Pertama* berdasarkan pertimbangan "berbagai aspirasi masyarakat yang menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua". *Kedua* berdasarkan dua surat Gubernur Irja yang mendukung perubahan nama propinsi. Masing-masing surat No. 120/928/SET tanggal 8 April 2000 perlihal perubahan nama Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua, dan No. 125/2407/SET tertanggal 20 Juli 2000 perihal usulan penggantian nama Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua. *Ketiga*, adanya laporan panitia khusus (DPRD TK. I) Pengembalian Nama Irian Jaya menjadi Papua yang disampaikan pada rapat paripurna khusus pada 16 Agustus 2000. *Keempat* berdasarkan kesepakatan para anggota DPRD sendiri dalam rapat paripurna pada 16 Agustus 2000.

Ada dua hal penting yang perlu dicatat. *Pertama*, dalam konsideran "mengingat " terdapat lima butir keputusan hukum. Dua butir di antaranya berupa undang-undang yang mengatur pembentukan propinsi dan kabupaten di Irian Jaya dan perubahan nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Berdasarkan tata perundangan Indonesia, keputusan DPRD Tk. I ada di bawah keputusan DPR-RI. Sehingga dari segi hukum, keputusan itu tidak membawa konsekuensi hukum apa-apa. *Kedua*, keputusan DPRD tidak lengkap dan cermat, karena tidak menjelaskan apakah nama Papua diberlakukan untuk nama propinsi atau nama populer saja yang tidak memiliki daya ikat hukum.

❖ Kesepakatan Muspida Tk. Irja dengan Presidium pada 3 Oktober 2000[18]

Kesepakatan ini merupakan hasil pembicaraan antara Muspida Tk. I Irja dengan Presidium Dewan Papua (PDP) dalam masalah penurunan bendera Bintang Kejora di seluruh wilayah Papua. Perundingan tersebut mencapai kesepakatan bahwa:

1) Batas waktu penurunan bendera Bintang Kejora diperpanjang dari 5 Oktober 2000 sampai 19 Oktober 2000. Namun penetapan tanggal tersebut bukan merupakan harga mati.
2) PDP dan Muspida Propinsi Irian Jaya masing-masing akan menghadap Presiden untuk meminta petunjuk mengenai masalah pengibaran bendera Bintang Kejora.

Dengan kesepakatan ini proses penurunan bendera Bintang Kejora diharapkan dapat dilaksanakan secara damai dan tanpa kekerasan.

❖ Dokumen "Pendekatan Kasih Sayang"

Sebenarnya dokumen tersebut berjudul "Telaahan Staf Polda Irian Jaya tentang Upaya Polda Menanggulangi Kegiatan Separatis Papua Merdeka dalam Rangka Supremasi Hukum". Dokumen itu ditandatangani Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas selaku Kapolda Irja pada 2 November 2000. Isinya merupakan analisis Polda yang ditujukan kepada Kapolri mengenai perkembangan Gerasem sejak 12 November 1999, Mubes Papua pada Februari 2000, Kongres Rakyat Papua II pada Juni 2000, dan lobi PDP ke luar negeri. Menanggapi perkembangan tersebut Polda Irja pada intinya menetapkan tiga langkah: pre-emptif, preventif, dan represif.

Pendekatan Kasih Sayang merupakan bagian dari langkah pertama (langkah *pre-emptif*). Upaya yang dilakukan di antaranya adalah menjalin hubungan baik dengan para pemimpin agama, pemimpin masyarakat, dan PDP, serta memprioritaskan putera daerah dalam penerimaan anggota Polri.

Sementara tindakan preventif merupakan tindakan berjaga-jaga di wilayah Polres yang dianggap rawan, pengamanan pelabuhan

---

[18] Teks selengkapnya dapat dibaca pada bagian lampiran.

dengan razia miras (minuman keras) dan senjata tajam, serta pengawasan kegiatan sosialisasi hasil Mubes dan Kongres Rakyat Papua.

Tindakan represif meliputi operasi terhadap miras, senjata tajam, senjata api, dan narkoba, operasi terhadap penyegelan (pemalangan) dan pungli, penyidikan terhadap tokoh PDP yang diduga melakukan makar; operasi penurunan bendera Papua, pembubaran Satgas Papua, pembubaran lokasi latihan militer TPN (Tentara Pembebasan Nasional) di Merauke dan Jayapura, serta menangkap dan mendeportasi warga negara asing yang bersimpati pada kegiatan separatis.

Dengan demikian, pendekatan "kasih sayang" sebenarnya bagian kecil saja dari seluruh operasi Polda. Lebih dari sekedar analisis, dokumen ini juga memberi pegangan rinci untuk seluruh jajaran Polri di wilayah Polda Irja mengenai bagaimana menangani Gerasem. Karena itu segala tindakan Polri memiliki pola komando yang jelas.

Hal penting lainnya yang patut dicatat dari dokumen tersebut adalah tanggapan Polda Irja terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai mempersulit kedudukan aparat keamanan. Kebijakan tersebut antara lain pencabutan DOM (Daerah Operasi Militer) di Irian Jaya yang menyudutkan TNI, sumbangan satu milyar rupiah dari Presiden untuk Kongres Rakyat Papua II, pernyataan Presiden yang membolehkan bendera Bintang Kejora dikibarkan, serta diberikannya kesempatan kepada PDP untuk mengadakan sosialisasi hasil-hasil kongres.

Bagian terakhir dokumen tersebut menjelaskan alternatif jalan pemecahan masalah menurut Polda Irja yang diusulkan kepada Mabes Polri. *Pertama*, jalan hukum murni, dengan konsekuensi adanya benturan dengan masyarakat dan kemungkinan jatuhnya korban jiwa maupun materiil yang cukup besar, khususnya saat menghadapi Gerasem. *Kedua*, penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan kultural. Hanya saja alternatif ini akan makan waktu lama dan sulit diterapkan pada Gerasem, karena PDP dinilai bermuka dua. *Ketiga*, pendekatan hukum disertai pendekatan sosiologis dan kultural, dengan syarat penegakkan hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan, jajaran polda harus dibekali pengetahuan budaya, serta harus didukung instansi lain. Polda Irja mengusulkan pilihan ketiga, dengan nama "Pendekatan Kasih Sayang".

❖ Rencana Operasi "Tuntas Matoa 2000"

Bersamaan dengan tanggal keluarnya dokumen "Pendekatan Kasih Sayang", Polda Irian Jaya juga mengeluarkan dokumen rencana operasi "Tuntas Matoa 2000" dengan No. Pol.: R/Renops/XI/2000" tanggal 2 November 2000. Rencana operasi ini pada intinya merupakan tindak lanjut dari "Pendekatan Kasih Sayang". Dalam bagian analisis situasi, Polda Irja dengan amat jelas menyatakan tiga hal. *Pertama*, lobi elit politik Papua ke Vanuatu, Nauru, dan Kongres Amerika Serikat dianggap "telah berhasil memberikan keyakinan kepada masyarakat Papua bahwa kemerdekaan Negara Papua Barat akan segera terwujud". *Kedua*, langkah aparat keamanan terhadap Gerasem tidak didukung oleh pemerintah pusat yang dinilai "sangat akomodatif dan toleran dengan memposisikan permasalahan aspirasi Papua Merdeka dalam wacana demokratisasi". *Ketiga*, "operasi penurunan bendera dan senjata tajam yang menimbulkan bentrokan fisik dan korban jiwa dinilai telah diperalat oleh kelompok pendukung Papua Merdeka. Operasi itu dijadikan momentum penting untuk mendesak pemerintah dan DPR agar menarik pasukan Brimob dan TNI non-organik keluar dari Irja karena dianggap telah melanggar HAM. Selain itu, tindakan penegakan supremasi hukum oleh aparat kepolisian dianggap sebagai bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan berdemokrasi..."

Berdasarkan analisis itulah, Polda Irja merencanakan Operasi Tuntas Matoa yang berlangsung selama 90 hari. Tujuannya antara lain (1) "...membatasi ruang gerak dan mematahkan kegiatan kelompok separatis/simpatisannya yang menjurus pada pemisahan diri dari wilayah NKRI"; (2) "Mencegah terbentuknya pemerintahan transisi dan sejenisnya yang dibentuk oleh kelompok elit politik dan simpatisannya"; (3) Berjalannya dinamika kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan operasi itu Polda Irja melibatkan 10 jajaran Polres di seluruh Papua, mengerahkan seluruh kekuatan BKO Polri dan TNI, serta seluruh fungsi dalam jajaran Polda Irja.

Dibandingkan dengan "Pendekatan Kasih Sayang", tujuan operasi ini jauh lebih tegas. Begitu juga dengan sasarannya. Ada empat sasaran operasi itu, yakni: (1) Penjagaan tempat-tempat kegiatan separatis; (2) Dilakukan tindakan hukum terhadap kelompok yang

nyata-nyata melakukan kejahatan dan tindak pidana; (3) Kelompok separatis, simpatisan, dan anggota Polri yang terlibat diselidiki dan dilakukan penggalangan; (4) Terhadap kelompok masyarakat yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI akan ditangani dengan penerangan melalui media massa.

❖ Kesepakatan Muspida Tk. I dengan PDP pada 9 November 2000 mengenai Pembatasan Pengibaran Bendera Bintang Kejora.[19]

1. Masalah politik dan keamanan yang menyangkut posisi dan peran PDP di Propinsi Irian Jaya ditangani oleh Muspida dan PDP dalam hubungan kemitraan dengan pendekatan musyawarah dan dialogis.
2. Bendera Bintang Kejora hanya diperbolehkan berkibar di lima kabupaten, yaitu Jayapura, Yapen Waropen, Merauke, Puncak Jaya dan Manokwari, mulai 1 Desember 2000 dan hanya boleh berkibar satu bendera di rumah Ketua Lembaga Masyarakat Adat. Sedangkan di sembilan kabupaten lainnya tidak boleh dikibarkan.
3. Mulai 2 Desember 2000 Posko Satgas Papua dan bendera Bintang Kejora yang berada di Gedung Dewan Kesenian Irian Jaya sudah harus dipindahkan ke rumah Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua.

❖ Maklumat Kapolda 12 November 2000 untuk Membubarkan Satgas Papua

Maklumat No. Pol. MAK/02/XII/2000 dikeluarkan oleh Kapolda Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas. Maklumat itu berisi larangan terhadap berbagai bentuk organisasi bersenjata yang mengarah pada tindakan separatis, seperti TPN dan sejenisnya.

Berdasarkan dokumen-dokumen itulah aparat kepolisian, dengan dibantu TNI, menangani masalah politik yang berkembang di Papua, khususnya yang berkaitan dengan Gerasem.

---

[19] Teks selengkapnya dapat dibaca pada bagian lampiran.

2.1.4. Kebijakan tidak tertulis

Yang dimaksud kebijakan tidak tertulis adalah: (1) kebijakan lisan para pejabat tinggi negara, pimpinan Polri, dan komandan TNI yang memiliki kewenangan, serta (2) pola bertindak pejabat negara, aparat kepolisian, dan TNI dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan paparan fakta selama 2000, terdapat sejumlah kebijakan tak tertulis yang bersifat mendasar seperti berikut ini.

- Peringatan dari Mendagri Soerjadi Soedirja agar tokoh Papua tidak memproklamasikan Papua Merdeka pada 1 Desember. Jika peringatan ini tidak diindahkan maka mereka akan berhadapan dengan aparat keamanan (22 Februari).
- Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Nabire (28 Februari).
- Kesediaan Presiden Abdurrahman Wahid untuk membuka Kongres Rakyat Papua II (23 Maret).
- Sumbangan Presiden Abdurrahman Wahid sebesar Rp 1 milyar untuk dana Kongres Rakyat Papua II.
- Permintaan Ketua DPR-RI, Akbar Tandjung, kepada Presiden dan Panglima TNI agar mengambil tindakan tegas bila Kongres Rakyat Papua II mendeklarasikan kemerdekaan Papua (4 Juni).
- Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Sorong (27 Juli).
- Operasi polisi dalam menurunkan bendera Papua di Sorong (22 Agustus).
- Briefing Kapolri, Jenderal S. Bimantoro, terhadap Kapolda Irja agar menindak tegas Gerasem (29 September).
- Operasi polisi dalam menurunkan bendera Papua di Wamena (6 Oktober).
- Perintah Kapolres Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Daud Sihombing, agar Satgas Papua mengosongkan Gedung Kesenian Irian Jaya di Jayapura (30 Oktober).
- Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Merauke (11 April).
- Penolakan Menteri Koordinator Sosial, Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, terhadap pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua (30 Nopember).
- Operasi polisi dalam menurunkan bendera Bintang Kejora di Jayapura (1 Desember).

- ❖ Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Merauke (2 Desember).
- ❖ Operasi penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di asrama Abepura dan pemukiman Kotaraja (7 Desember).
- ❖ Permintaan Presiden Abdurrahman Wahid agar Ketua PDP, Theys H. Eluay, dibebaskan (25 Desember).

Kebijakan tak tertulis di atas, seringkali mendatangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara selama 2000. Dari fakta-fakta yang ada, kekerasan tersebut dengan sangat jelas dapat digolongkan: (1) penyerangan terhadap penduduk sipil, dan (2) pengibaran bendera.

2.1.5. Penyerangan terhadap penduduk sipil

Nabire – Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Nabire terjadi pada 28 Februari sampai 4 Maret 2000. Bentrokan terjadi setelah sekitar 400 orang penjaga bendera Bintang Kejora di Nabire bertemu dengan rombongan Brimob. Dalam peristiwa itu Manase Erari, yang berusaha untuk menenangkan situasi, ditembak oleh Brimob dari jarak dekat. Warga memprotes Polres Nabire atas penembakan itu. Brimob juga menembak Maximus Bunay di punggungnya hingga tewas. Keesokan harinya Willem Manimwarba, yang menjadi saksi mata penembakan Manase Erari, juga ditembak di Taman Gizi, Nabire. Korban meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire karena kehabisan darah. Korban lainnya, Yance Pekei, mengalami penyiksaan dengan cara dihekter telinganya setelah ditangkap aparat. Selain itu jari-jari tangannya diikat dengan plastik yang kemudian dibakar, disundut, dipukul dengan popor senapan, mulutnya dimasuki laras pistol, dan disetrum.[20]

Sorong – Dalam peristiwa Sorong pada 27 Juli 2000, aparat Brimob dan TNI-AL melepaskan tembakan ketika membubarkan aksi ratusan orang yang menolak kedatangan pengungsi dari Maluku. Peristiwa itu mengakibatkan 13 orang mengalami luka tembak, serta seorang di

---

[20] "Laporan Situasional Nabire, Kabupaten Nabire: Peristiwa 28 Februari 2000 sebelum dan sesudahnya", Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura, Juni 2000.

antaranya ditangkap dan dipukuli hingga mengalami luka-luka. Brimob kemudian menyerang pos-pos Satgas Papua dan menangkap enam orang anggotanya. Pada 28 Juli 2000, aparat Brimob juga mengadakan pawai keliling kota Sorong dengan melepaskan tembakan ke udara. Aksi ini membuat suasana kota Sorong mencekam.

Merauke – Peristiwa Merauke terjadi pada 4 November 2000. Peristiwa itu dipicu oleh pertengkaran dua keluarga yang melibatkan sanak saudaranya masing-masing. Seorang anggota Brimob berusaha melerai perkelahian itu. Tetapi usaha tersebut rupanya tidak diterima pihak-pihak yang berkelahi sehingga mereka memukul anggota Brimob tersebut. Akibat pemukulan itu, aparat Brimob dengan menggunakan tiga truk mendatangi pihak-pihak yang berkelahi. Mereka melakukan penangkapan dan penganiayaan. Tindakan itu membangkitkan kemarahan warga Papua. Mereka balik melakukan tindak kekerasan terhadap warga non-Papua dan mengakibatkan gelombang pengungsian. Tindak kekerasan ini kembali dibalas aparat keamanan dengan terus melakukan penangkapan, penahanan, penganiayaan, serta penembakan sewenang-wenang. Pertikaian berlanjut hingga 12 November 2000. Akibat peristiwa ini, sembilan orang meninggal dunia dan 46 orang mengalami luka luka berat dan ringan.[21]

Jakarta – Pada 1 Desember 2000, mahasiswa Papua di Jakarta memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua ke-39 dan melakukan aksi unjukrasa di depan Kedubes Belanda dan Amerika. Aksi ini awalnya berlangsung dengan damai. Namun kemudian terjadi bentrokan antara para pengunjukrasa dengan kepolisian yang bermaksud membubarkannya. Dalam peristiwa tersebut Polda Metro Jaya menangkap tujuh orang pengunjuk rasa. Tiga di antaranya kemudian dibebaskan, sementara empat orang lainnya tetap ditahan. Mereka yang ditahan adalah Matias Rumbrapuk, Laun Wenda, Hans Gobay, dan Yosef Wenda. Selama di tahanan mereka mengalami penyiksaan, perlakuan diskriminatif, dan dituduh melakukan tindakan makar.

Abepura – Pada 7 Desember 2000, sekitar pukul 01.30 WIT, terjadi

---

[21] Laporan LBH Pos Merauke, "Pembantaian Orang Papua oleh Aparat Polisi/ Brimob dan Eksesnya terhadap Orang Non-Papua di Kota Merauke".

penyerangan Polsek Abepura oleh sekelompok massa tak dikenal. Penyerangan itu mengakibatkan Bripka Petrus Epaa meninggal dunia dan tiga anggota polisi lainnya luka-luka, yakni Briptu Darmo, Bripka Mesak Kareni, dan Bripka Yoyok Sugiarto. Selain itu terjadi juga penyerangan terhadap Kantor Dinas Otonom Kotaraja dan pembakaran ruko di Abepura. Kepolisian Resort Jayapura kemudian melakukan operasi pengejaran di bawah pimpinan Kapolres Jayapura, AKBP Drs. Daud Sihombing, S.H. pada pukul 02.00 WIT. Pengejaran diarahkan ke tiga asrama mahasiswa di Abepura (Asrama IMI, Asrama Ninmin, dan Asrama Yapen-Waropen) serta ke pemukiman penduduk di Jl. Baru Kotaraja, Skyline, dan Abepantai. Dalam operasi itu puluhan orang ditangkap, ditahan, serta disiksa di Polres Jayapura dan Polsek Abepura karena dituduh sebagai pelaku penyerangan. Dua pelajar laki-laki yang ikut ditahan, Joni Karunggu dan Orry Doronggi, meninggal dunia dalam tahanan Polres Jayapura, serta seorang pelajar lainnya, Elkius Suhuniap, ditembak mati oleh Satuan Brimob di Skyline.

Jika dilihat dari kerangka hak-hak sipil dan politik, penyerangan terhadap penduduk sipil itu didasari oleh dua asumsi polisi terhadap kelompok masyarakat Papua. Asumsi *pertama*, polisi menggolongkan masyarakat Papua sebagai kelompok separatis dan simpatisannya. Masyarakat asal Pegunungan Tengah bahkan diberi stigma yang lebih tajam, yakni "penyerang". Dalam dokumen resmi Departemen Dalam Negeri maupun kepolisian, kelompok separatis ini dinilai tidak perlu lagi diajak bicara atau berunding, melainkan harus segera ditindak secara tegas. Karena itu bisa dipahami jika upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, baik oleh Pemda maupun oleh Presiden — dengan mengajak berunding, membuat kesepakatan, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua — dinilai terlalu toleran dan akomodatif. Sikap dan tindakan keras pihak kepolisian juga didasari oleh asumsi *kedua,* bahwa isu HAM dan demokrasi dijadikan dalih oleh kelompok pro-demokrasi dan kelompok separatis untuk membela kepentingan politiknya ketika aparat keamanan bertindak keras terhadap mereka.

Dengan dua asumsi tersebut, baik penilaian polisi terhadap masyarakat Papua maupun informasi intelijen, sudah terdistorsi dan tidak pandang bulu lagi dalam bertindak. Kasus-kasus di atas membuktikan bahwa polisi telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang tidak terbukti memiliki kaitan dengan gerakan politik tertentu, atau penduduk sipil yang tidak melakukan kekerasan

bersenjata dengan pola yang sama. Terhadap mereka polisi telah melakukan penganiayaan, pembunuhan, penyiksaan, perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, dan menimbulkan suasana ketakutan. Dampak dari penyerangan polisi itu tidak berhenti pada jatuhnya korban luka-luka maupun meninggal dunia, tapi juga meluas pada pengungsian kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak aman.

2.1.6. Kekerasan yang berkaitan denganpengibaran bendera Bintang Kejora

Merauke – Pada 16 Februari 2000, aparat kepolisian melepaskan tembakan ke arah massa untuk menghentikan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora. Akibatnya seorang pelajar SMU, Paskalis Butayob, meninggal dunia dengan luka di punggung dan dada. Dua orang lainnya, Petrus Ketam dan Lazarus Kawakok, mengalami luka parah hingga harus dirawat di RSUD Merauke. Menurut temuan dokter, mereka ditembak dengan peluru tajam.

Sorong – Pada 22 Agustus 2000, aparat kepolisian melepaskan tembakan secara beruntun ketika membubarkan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Gereja Imanuel Boswesen, Kampung Baru, Sorong. Pengibaran itu dilakukan oleh sekitar 60 orang dari Pulau Waigeo Utara. Massa yang ketakutan akhirnya membubarkan diri. Dalam peristiwa ini tiga orang tertembak dan meninggal dunia, 15 orang hilang, dan 12 lainnya mengalami luka tembak. Aparat Brimob kemudian menangkap 36 orang warga, dan 28 orang di antaranya kemudian ditahan. Menurut penuturan salah seorang korban, setelah ditahan mereka kemudian dimasukkan ke dalam ruangan kecil dan kotor secara bersamaan. Mereka yang ditahan dituduh telah melanggar pasal 106 dan 114 KUHP mengenai usaha pemisahan wilayah.

Wamena – Peristiwa Wamena yang terjadi pada 6 Oktober 2000 memiliki keistimewaan. Operasi penurunan bendera yang dipimpin Kapolres Suripatty sebenarnya telah menyalahi kesepakatan antara Muspida Tk. I Irja dengan tokoh-tokoh Gerasem. Dalam kesepakatan itu dinyatakan bahwa penurunan bendera Bintang Kejora akan dilakukan pada 19 Oktober 2000. Itupun bukan harga mati. Kapolda

Irja, Brigjen (Pol.) S.Y. Wenas yang ikut dalam menyusun kesepakan, justru menjadi orang yang memerintahkan operasi penurunan itu. Operasi tersebut berdampak sangat besar karena membangkitkan kekerasan horisontal antara masyarakat Papua dengan non-Papua. Akibatnya 34 orang meninggal dunia, 88 orang luka-luka, 13.466 orang menjadi pengungsi internal (*Internally Displaced People* — IDP), 83 orang ditangkap dan disiksa dalam tahanan, serta 22 orang diproses secara hukum.

Dampak yang lebih jauh dari peristiwa ini adalah terjadinya perpecahan di antara masyarakat, serta lumpuhnya sektor ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan dalam jangka panjang.[22] Yang mengherankan adalah kebijakan pemerintah daerah untuk mengisolasi daerah kerusuhan selama satu minggu. Bahkan bantuan kemanusiaan-pun dilarang masuk. Selain itu tidak ada upaya investigasi menyeluruh terhadap peristiwa itu untuk mencari kebenaran. Akibatnya persepsi yang ditampilkan di media massa (terutama media massa nasional) dibelokkan dari konflik vertikal menjadi konflik horisontal yang diwarnai unsur agama. Kunjungan Komnas HAM ke tempat kejadian juga hanya sebatas pemantauan lapangan.

Jayapura – Tidak terjadi kekerasan dalam peristiwa penurunan bendera Bintang Kejora di depan Gedung Kesenian Irian Jaya, pada 1 Desember 2000. Dalam peristiwa itu pihak PDP terus mencoba membujuk kepolisian dan massa (yang tak bersenjata) untuk menahan diri. Sementara aparat kepolisian saat itu telah siap melakukan upaya paksa dengan senjata. Namun pada hari berikutnya, 2 Desember 2000, empat anggota Satgas Papua pengibar bendera Bintang Kejora, yakni Hery Pele (23 tahun), Jimmy Doyapo (19 tahun), Yunus Hujabi (24 tahun), dan Yehuda Soronto (41 tahun) yang memimpin barisan, ditangkap dan ditahan di Polres Jayapura.

Merauke – Pada 2 Desember 2000, sekitar pukul 06.00 WIT, terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Pemda Merauke oleh sekelompok massa. Karena pengibaran itu terjadi di luar kesepakatan

---

[22] Lihat "Peristiwa Tragedi Kemanusiaan Wamena, 6 Oktober 2000", laporan Investigasi Tim Kemanusiaan Wamena yang dikoordinasikan oleh SKP Keuskupan Jayapura bersama LBH Jayapura, Els-HAM Papua, dan Kontras Papua, 27Januari 2001.

Muspida, pihak kepolisian berusaha menurunkan bendera tersebut. Namun akhirnya massa sendiri yang menurunkannya sekitar pukul 08.45 WIT dan kemudian berangsur-angsur membubarkan diri. Tak lama kemudian, datang sekitar 100 orang massa dari Kampung Kuda Mati dengan bersenjatakan busur, tombak, dan parang. Mereka merobek bendera Merah Putih yang berkibar di depan Kantor Dinas Pariwisata Merauke dan menyerang aparat kepolisian yang sedang berjaga di depan Kantor Bupati. Aparat kepolisian segera mengeluarkan tembakan. Akibatnya enam orang meninggal seketika, dua lainnya meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta tiga lainnya mengalami luka berat, termasuk seorang anggota Dalmas (Pengendali Massa). Kapolres Merauke, Superintendent Polisi Drs. Agus Mulyono, mengatakan bahwa situasi bisa dikendalikan dan 12 orang anggota Satgas Papua serta Ketua Panel Merauke, Januarius Wiwaron, ditahan.

Jika dilihat dari kacamata susunan perundangan negara, operasi penurunan bendera merupakan kesalahan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Sebab, Presiden sendiri sebagai kepala pemerintahan sudah mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora dan tidak pernah mencabut izin tersebut. Polisi selaku aparat keamanan yang berada di bawah perintah Presiden, tidak berhak bergerak di luar perintah itu, apalagi melawan kebijakan Presiden yang mengizikan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Sementara jika dilihat dari segi hak-hak sipil dan politik, pengibaran bendera Papua tidak pernah dipahami sebagai ungkapan protes masyarakat yang memiliki sejarah penderitaan yang panjang. Pengibaran bendera segera dicap sebagai tindakan makar yang sebenarnya harus dibuktikan lebih dulu di pengadilan. Aparat keamanan dan pertahanan justru mengadalkan kekerasan senjata untuk menyerang kelompok massa sehingga mendatangkan perlawanan. Perlawanan itu melegitimasi Polri dan TNI untuk melawan balik kelompok massa bersenjata. Padahal pihak yang pertama menyerang bukanlah masyarakat.

Tindak kekerasan ini terus menerus dilakukan karena polisi dan tentara memiliki asumsi dasar bahwa pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora adalah kelompok separatis yang harus 'dibatasi ruang geraknya dan dipatahkan'. Tidak mengherankan jika tindak kekerasan tersebut dirancang dengan rapi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

propinsi. Tindak kekerasan itu, juga disertai penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan kilat, serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Pola tindak kekerasan negara tersebut bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi pola yang berulang dan tidak pernah ada proses peradilan terhadapnya. Sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa negara memang menyetujui tindakan tersebut.

Unsur-unsur tindak kekerasan negara dapat disusun menjadi satu kesatuan:

- Kekerasan tersebut diarahkan kepada penduduk sipil.
- Meliputi pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penciptaan suasana takut yang menyebabkan timbulnya pengungsian, baik lintas batas maupun internal.
- Dilakukan oleh polisi dan atau tentara.
- Terjadi secara berulang dengan pola yang tetap.
- Mempergunakan segala sumber daya, baik umum maupun perorangan.
- Tidak pernah dikoreksi dalam suatu proses hukum.
- Dirancang secara rapi dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan di tingkat negara.

Unsur-unsur itu akhirnya membentuk satu kesimpulan, bahwa telah terjadi tindak pelanggaran berat HAM, yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Unsur-unsur di atas tak lain adalah unsur-unsur yang dikemukakan dalam pasal 9 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Karena memenuhi unsur pelanggaran berat HAM, tindak kekerasan negara tersebut memiliki tingkat keseriusan yang amat tinggi. Karena, dalam pemahaman HAM internasional dewasa ini, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindak pidana paling serius dan menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk menanganinya bila negara yang bersangkutan tidak mengambil langkah penanganan hukum yang memenuhi standar mahkamah pidana internasional.[23]

[23] Prinsip ini merupakan salah satu prinsip penting dalam penanganan pelanggaran berat HAM, yang juga sering disebut dengan istilah *obligatio erga omnes*, yang berarti kewajiban sedemikian rupa dan mengikat semua orang untuk ikut menanganinya.

2.2. Gambaran korban

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama 2000, korban tindak kekerasan di Papua dapat dipilah-pilah berdasarkan jenis dan keadaannya. Berdasarkan jenis atau golongan korban, tindak kekerasan di Papua telah mengakibatkan:

a) *Korban meninggal*: peristiwa Nabire (28 Februari – 4 Maret 2000) 3 orang, peristiwa Wamena (6 Oktober 2000) 34 orang, peristiwa Sorong (27 Juli 2000) 3 orang, peristiwa Abepura (7 Desember 2000) 3 orang. Sementara korban meninggal dalam peristiwa Merauke: 1 orang pada Februari 2000, 9 orang pada 4 November 2000, dan 8 orang pada 2 Desember 2000.

b) *Korban luka-luka*: korban luka-luka dalam berbagai peristiwa politik selama 2000 sulit didata secara tepat. Soalnya tidak semua korban dibawa ke rumah sakit ataupun dilaporkan kepada LSM, media massa, lembaga keagamaan, atau instansi pemerintah. Catatan di bawah ini didasarkan pada jumlah korban yang dilaporkan: peristiwa Nabire (28 Februari-4 Maret 2000) 17 orang, peristiwa Sorong (27 Juli 2000) 13 orang dan (22 Agustus 2000) 22 orang, peristiwa Wamena (6 Oktober 2000) 88 orang, peristiwa Merauke (4 November 2000) 46 orang dan (2 Desember 2000) 3 orang.

c) *Pengungsi*: kelompok korban ini dibedakan dalam dua golongan, yakni pengungsi lintas batas (*refugee*) dan pengungsi internal (*Internally Displaced People*).

- *Pengungsi Lintas Batas* (ke Papua New Guinea/PNG): Pengungsian tersebut sebenarnya bukan merupakan hal baru, khususnya di daerah perbatasan RI-PNG. Gelombang pengungsian itu merupakan pengulangan (dalam skala kecil) dari peristiwa pengungsian besar-besaran pada 1980-an.[24] Selama 2000, pengungsian ke PNG berkaitan erat dengan peristiwa penurunan bendera Bintang Kejora yang menimbulkan bentrokan fisik antara Satgas Papua dengan Polri/TNI.

---

[24] Penelitian singkat mengenai latarbelakang, proses pengungsian ke PNG, dan keadaan setelah 10 tahun lebih kembali ke Papua telah dilakukan SKP Keuskupan Jayapura atas permintaan UNHCR. Hasilnya dituangkan dalam laporan "Returnees from Papua New Guinea to Irian Jaya, dealing in particular with returnees to Waropko-Mindiptana area", Jayapura: Januari 1999.

Menurut catatan, para pengungsi yang melintasi perbatasan PNG berasal dari Jayapura dan Merauke. Dari Jayapura berjumlah 372 orang dan berada di kota Vanimo, serta dari Merauke berjumlah sekitar 42 orang dan berada di Kunji.[25]

- *Pengungsi Internal* (*Internally Displaced People* — IDP): Pengungsi internal adalah korban yang paling sering ditemukan di berbagai tempat di Papua. Tetapi wilayah penyebarannya, jumlah dan keadaannya, sulit untuk diidentifikasi secara tepat. Kebanyakan dari mereka biasanya mengungsi ke hutan yang merupakan tempat untuk mencari makan, atau kembali ke kampung asal. Data yang lengkap sulit diperoleh karena pengungsian ini tidak dilaporkan, baik oleh masyarakat sendiri, media massa, LSM, Gereja (kalangan agama), maupun oleh pemerintah. Pengungsi internal yang berasal dari luar Papua biasanya datang dari Maluku dan Maluku Utara. Kelompok ini kebanyakan singgah di Sorong dan Jayapura. Pengungsi internal yang berasal dari Papua sendiri tersebar di daerah yang mengalami insiden kekerasan seperti di Sorong, Jayapura, Wamena, dan Merauke. Kebanyakan dari pengungsi ini adalah kelompok perempuan dan anak-anak (Papua dan non-Papua), kelompok PNS (Papua maupun non-Papua), atau kelompok pedagang (mayoritas non-Papua).

❖ *Menimpa semua golongan masyarakat*

Dengan jelas kita melihat bahwa kekerasan tidak pandang bulu dalam meminta korban. Baik anak-anak, laki-laki, perempuan, dari macam-macam agama serta suku di Papua dan non-Papua, maupun dari orang berpangkat sampai masyarakat biasa. Sementara itu opini publik sering kali dibelokkan oleh berita-berita sepintas dari media massa yang menyebutkan bahwa yang menjadi korban kekerasan hanyalah salah satu kelompok saja.

❖ *Keterbatasan penanganan pasca advokasi*

Dalam kasus-kasus kekerasan negara, dalam menyuarakan

---

[25] Laporan dari Gereja Katolik Keuskupan Daru-Kiunga, "Displaced people in the Western Province of PNG", yang disusun pastor Jacques Gross cm, 14 Januari 2001.

masalahnya korban biasanya didampingi oleh LSM atau Gereja. Namun usaha LSM dan Gereja tetap terbatas, baik dari segi jangkauan wilayah maupun jangkauan masalah. Bantuan advokasi biasanya diberikan pada saat terjadi insiden yang situasinya memang menuntut hal itu. Kelanjutan penanganan korban biasanya kurang tertangani karena: (1) munculnya insiden kekerasan baru di berbagai wilayah Papua, (2) keterbatasan keahlian LSM dan Gereja untuk menangani trauma para korban, dan (3) keterbatasan jangkauan lokasi.

❖ *Intervensi kemanusiaan dihambat*

Yang patut dicatat dalam kasus-kasus kekerasan negara adalah adanya upaya untuk menghambat intervensi kemanusiaan bagi para korban, seperti yang terjadi di Wamena. Setelah terjadi insiden, wilayah tersebut oleh Bupati Jayawijaya diisolasi. Akibatnya kaum korban mengalami tindak kekerasan ganda. Selain mengalami kekerasan fisik, mereka juga mengalami trauma karena tidak diperbolehkan pergi dari lokasi kejadian. Lebih jauh dari itu, bantuan-bantuan dari lembaga kemanusiaanpun, seperti bantuan medis, pangan, sanitasi, dan perlengkapan darurat lainnya, juga tidak boleh diberikan. Akibatnya penderitaan korban tidak dapat dikurangi dengan wajar. Ironisnya sebagian hambatan itu justru datang dari pihak pemerintah.

❖ *Status hukum pengungsi tidak diakui*

Kaum korban yang nyata-nyata menjadi pengungsi ternyata tidak ditangani secara wajar berdasarkan sistem penanganan pengungsi internasional. Ditinjau dari sejarah kemanusiaan di Papua, baik pengungsi lintas batas maupun internal, status hukumnya dihindari untuk diakui pemerintah. Contoh yang jelas telah diperlihatkan oleh Departemen Luar Negeri pada 1982, saat terjadi pengungsian besar-besaran di wilayah Muyu, Kabupaten Merauke. Garis kebijakan itu ternyata terus dipertahankan hingga sekarang.

Pengungsi yang melintas ke PNG (*refugee*) terus menerus diberi istilah *border-crosser* (pelintas batas tradisional). Karena status hukumnya tidak jelas, intervensi internasional yang mutlak diperlukan tidak bisa dilakukan. Akibatnya kaum pengungsi yang mengalami tekanan fisik dan mental, harus menanggung beban ganda. Di satu pihak mereka dibiarkan oleh pemerintah Indonesia, dan di lain pihak mereka dihalangi secara hukum dari intervensi masyarakat internasional.

Sementara menyangkut pengungsi internal, secara hukum internasional mereka ada di bawah tanggungjawab dan kewenangan negara bersangkutan, walaupun ada hak dari masyarakat internasional untuk menawarkan bantuan kemanusiaan. Gelombang pengungsi jenis ini memang tidak hanya terjadi di Papua, melainkan hampir di seluruh Indonesia. Terhadap pengungsi internal, pemerintah juga tidak mampu menanganinya dengan baik. Para pengungsi tersebut sering kali hanya ditangani oleh lembaga-lembaga agama.

Pengungsi internal di Papua yang datang dari luar, seperti dari Maluku dan Maluku Utara, lebih sulit lagi ditangani. Yang jadi sebabnya adalah, masyarakat sering mencurigai adanya penyusup di antara para pengungsi. Kecurigaan ini tentu saja menjadi beban tambahan bagi kaum pengungsi.

❖ *Proses hukum terhadap pelaku diterapkan berbeda-beda*

Dalam kasus-kasus kekerasan negara, dengan jelas dapat dilihat bahwa para pelaku tidak pernah diproses secara hukum. Karena kenyataan inilah, masyarakat Papua maupun masyarakat Internasional akhirnya menilai bahwa pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan itu ternyata kebal salah dan kebal hukum. Mereka tidak hanya tetap bisa bebas bergerak, tetapi jenjang kariernya — baik sipil maupun militer — juga terus naik. Sebaliknya, kekerasan masyarakat selalu ditindak secara tegas dan kerap kali dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan aparat yang melampaui batas hukum. Karena ketimpangan ini, proses penyelesaian masalah mengalami hambatan serius, sehingga perspektif korban terhadap proses tersebut betul-betul diruntuhkan.

❖ *Stigmatisasi terhadap kelompok Pegunungan Tengah*

Selama 2000 juga muncul cap-cap atau stigma politik baru. Misalnya yang diberikan kepada kelompok masyarakat Papua asal Pegunungan Tengah, yang dicap sebagai pembuat keonaran. Cap ini diberikan kepada mereka setelah tragedi kemanusiaan di Wamena meletus pada 6 Oktober 2000, dan setelah terjadi penyerangan terhadap Polsek Abepura pada 7 Desember 2000. Cap tersebut merupakan stigma politik, karena diberikan secara sepihak oleh aparat keamanan melalui media massa, tanpa adanya bukti-bukti yang kuat atau melalui vonis pengadilan.

berikut ini adalah daftar peristiwa yang terjadi di Papua selama masa reformasi 1998-2000, untuk melengkapi gambaran mengenai korban.

Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Reformasi

No.	Kasus	Penanganan	Hasil	Keterangan
1.	Peristiwa penembakan Steven Suripatty, 4 Juli 1998.	Pomdam VIII/ Trikora	Tidak ada kelanjutan	Pomdamberjanji akan mengusut tuntas peristiwa penembakan tersebut.
2.	Penembakan terhadap pengunjukrasa di Biak oleh aparat TNI, 6 Juli 1998.	Investigasi awal dilakukan Komnas HAM	Tidak ada kelanjutan	Komnas HAM berjanji akan mengadakan investigasi menyeluruh.
3.	Laporan operasi militer pasca pembebasan sandera di Mapnduma, Mei 1996.	DPR-RI dan Komnas HAM berjanji menindaklanjuti laporan itu.	Tidak ada	Laporan disusun oleh Els-HAM Irja.
4.	Peristiwa kekerasan di Pegunungan Bintang, 1999.	Pangdam VIII/ Trikora mengirim Tim Perwira untuk melakukan investigasi	•Pergantian personil Polri dan militer. •Permintaan maaf. •Perubahan perilaku Polri dan militer.	Hasil ini melegakan masyarakat Pegunungan Bintang.
5.	Operasi penurunan bendera Bintang Kejora di Timika, 2 Desember 1999.	Kapolda Irja	Tidak jelas	Kapolda berjanji menindak anak buahnya yang menggunakan peluru tajam.
6.	Operasi penurunan bendera Bintang Kejora di Merauke, 16 Februari 2000.	Tidak ada.	Tidak ada.	

7.	Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Nabire, 28 Februari – 4 Maret 2000.	Tidak ada.	Tidak ada.	
8.	Penembakan yang dilakukan polisi dan TNI-AL terhadap penduduk sipil di Sorong, 27 Juli 2000.	Tidak ada	Tidak ada	
9.	Operasi penurunan bendera Bintang Kejora di Sorong, 22 Agustus 2000.	Tidak ada	Tidak ada	
10.	Operasi penurunan bendera Bintang Kejora di Wamena, 6 Oktober 2000.	Kunjungan Komnas HAM ke Wamena.	Tidak ada kelanjutan	Pemda Kabupaten Jayawijaya mengisolasi wilayah kejadian.
11.	Penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Merauke, 4 November 2000.	Tidak ada	Tidak ada	
12.	Laporan keadaan hak asasi manusia di Paniai kepada Pangdam XVII/ Trikora, 25 November 2000.	Tidak ada	Tidak ada	Laporan ditandatangani Uskup Jayapura, Ketua Sinode GKI, dan Ketua Sinode GKII.
13.	Penangkapan dan penahanan terhadap empat mahasiswa Papua yang berunjukrasa di Jakarta, 1 Desember 2000.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Sedang berjalan	Empat mahasiswa didampingi tim pembela hukum yang tergabung dalam TIVA Papua.
14.	Penembakan terhadap penduduk sipil di Merauke, 2 Desember 2000.	Tidak ada.	Tidak ada.	
15.	Operasi penyerangan polisi terhadap penduduk sipil di Abepura, 7 Desember 2000.	KPP HAM Papua	Sedang berjalan	

2.3. *Unsur pemegang peran kunci*

Berbeda dengan bidang kesejahteraan umum yang penanganannya dilakukan oleh pemerintah, bidang hak-hak sipil dan politik di Papua secara praktis ditangani oleh Polri dan TNI. Karena itu, sorotan

pertama-tama akan ditujukan kepada dua instansi tersebut.

2.3.1. TNI dan Polri

Sejak Agustus 2000, struktur TNI dan Polri dipisahkan secara resmi berdasarkan Ketetapan MPR No. V/MPR/2000. Menurut ketetapan tersebut, Polri berada langsung di bawah komando Presiden dan tidak lagi bernaung di bawah Mabes TNI. Karena itu status Polri juga berubah dari militer menjadi sipil.

Berdasarkan keputusan politik tersebut, Polri mengambil tempat terdepan dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Polisi juga menduduki tempat utama dalam menghadapi Gerasem, kaum korban, serta kebijakan-kebijakan politik dan keamanan.

Namun ada pola-pola tindakan Polisi yang perlu dicatat di sini, setelah instansi itu terpisah dari TNI.

❖ *Mengutamakan pendekatan kekerasan*

Walaupun wujudnya telah menjadi bagian dari masyarakat sipil, pendekatan Polri dalam menghadapi gejolak sosial politik di Papua masih belum berubah, yakni pendekatan kekerasan. Pola ini dengan jelas terlihat dari kebijakan-kebijakan politik dan keamanan yang melibatkan Polisi, serta dari deretan operasi yang dilakukannya. Polisi belum mampu mengembangkan cara-cara penanganan massa yang tidak bercorak militeristik.

Memang selama paruh kedua 2000, Kapolda sering kali menonjolkan "Pendekatan Kasih Sayang". Tetapi jika diteliti lebih jauh dari dokumen-dokumen yang ada, pendekatan tersebut lebih bersifat represif ketimbang persuasif. Dari kebijakan keamanan yang dijalankan Polda Irja, secara eksplisit berkali-kali diungkapkan bahwa Polri memiliki keterbatasan dalam memahami wacana cita-cita demokrasi dan paham hak asasi manusia. Kedua persoalan itu dinilai sebagai penghambat polisi dalam bertindak. Padahal, dengan pemahaman mendalam mengenai gagasan demokrasi dan hak asasi manusia, profesionalisme Polri justru akan semakin meningkat.
Keterbatasan pehamanan Polri terhadap situasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mengenai kultur masyarakat Papua. Sangat sedikit – untuk tidak menyebut tidak ada sama sekali — pedoman operasi Polri yang mencantumkan pemahaman budaya secara

memadai agar langkah-langkah pengamanan tidak dilaksanakan secara berlebihan. Dapat dibayangkan, jika perwira tinggi saja (yang menyusun rencana-rencana operasi) pemahamannya sangat terbatas terhadap demokrasi, HAM, dan budaya, bagaimana sempitnya pemahaman terhadap persoalan itu di tingkat prajurit?

❖ *Termakan pertikaian politik di tingkat pusat*

Penting juga dicatat bahwa selama 2000 secara lembaga Polri tidak lepas dari pertikaian aktor politik di tingkat pusat, yang membawa akibat serius dalam operasi-operasi di lapangan. Dari dokumen kebijakan yang telah dianalisis pada bagian terdahulu, pertikaian tersebut dengan jelas terlihat ketika Polda Irja mengkritik kebijakan pemerintah yang mau berdialog dengan masyarakat mengenai aspirasi "M". Sikap ini dinilai sebagai sikap yang terlalu akomodatif dan toleran.

Hal ini sangat mengejutkan. *Pertama* karena Polisi sebagai institusi yang ada di bawah komando Presiden, seharusnya tinggal menjalankan perintah saja. *Kedua*, kritik tersebut datang dari Polda, bukan langsung dari Mabes Polri. Dengan demikian garis komando tidak sepenuhnya dijalankan. Kritik Polda itu nadanya tidak jauh berbeda dengan pendapat ketua DPR-RI atau tokoh politik lain di tingkat pusat, yang menyarankan adanya tindakan represif terhadap Gerasem.

❖ *Pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan*

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama 2000 dan merujuk pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, sulit menghindari kesimpulan bahwa TNI dan Polri adalah pelaku utama tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski secara hukum harus didahului proses pengusutan *pro iustitia* oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), tetapi unsur-unsur yang memenuhi definisi kejahatan kemanusiaan secara teoretis terpenuhi. Dugaan tindak pidana ini tidak main-main dan memiliki dampak yang luar biasa. Soalnya masyarakat internasional dewasa ini makin kritis dan peduli dengan tindak pidana pelanggaran berat HAM[26] yang sering kali mengaitkannya dengan kebijakan bantuan finansial dan tekanan politis.

---

[26] Kepedulian masyarakat internasional bisa dipelajari dari didirkannya dua mahkamah pidana internasional untuk Rwanda dan Yugoslavia.

❖ *Kebal salah dan kebal hukum* (impunity)

Meski cenderung klise, penilaian bahwa aparat keamanan bebas dari jerat hukum dan kesalahan (*impunity*) mau tidak mau tetap harus dikatakan. Dalam uraian fakta-fakta kekerasan negara di atas — bahkan yang tergolong sebagai pelanggaran berat HAM, yakni tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan — tak ada satupun yang masuk ke pengadilan, apalagi pengadilan HAM. Adanya kekebalan tersebut sekurang-kurangnya menunjukkan dua hal. *Pertama*, tindakan Polri dan TNI direstui oleh negara, serta *kedua*, lemahnya sistem demokrasi dan peradilan di republik ini. Kedua kesimpulan tersebut tidak hanya berlaku di Papua, tetapi juga di berbagai tempat di Indonesia.

Adanya UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000 memang memberi peluang hukum untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi proses pengadilan HAM sendiri sangat ditentukan oleh struktur politik yang berlaku di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, dan lembaga tertinggi negara. Selama 2000, perhatian, wacana, dan energi aktor-aktor politik di Jakarta lebih banyak terkonsentrasi pada kemelut-kemelut politik, daripada memikirkan kepentingan korban.

2.3.2. Pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten

Sepanjang 2000, pemerintah baik di pusat maupun di daerah terlibat dalam berbagai perundingan untuk menangani masalah Papua, khususnya di bidang hak-hak sipil dan politik. Presiden dan Pemda Tk. I umumnya bersikap akomodatif terhadap Gerasem, dan menempatkan masalah tersebut dalam kerangka wacana demokrasi dan HAM. Walaupun tidak mengizinkan wilayah Papua terpisah dari NKRI, tetapi jelas juga bahwa keduanya telah membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua dari setiap golongan.

Keterbukaan ini ternyata tidak diikuti kalangan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang memang memiliki konflik kepentingan dengan presiden. Bahkan sikap akomodatif Presdien dipolitisir menjadi mesiu untuk pertikaian politik. Akibatnya persoalan yang dialami masyarakat Papua bukan mengarah pada terbentuknya kerangka penyelesaian hukum dan politik, sebaliknya semakin keruh dan terombang-ambing.

Pemda Tk. I sebagai instansi yang langsung berhadapan, melihat, dan mengalami semua dinamika masalah Papua, berusaha mengambil

langkah-langkah penanganan secara efektif. Misalnya bersama Muspida melakukan dua kesepakatan dengan PDP (3 Oktober dan 9 November 2000), sebagai upaya untuk mengatasi gejolak masyarakat secara hukum dan politis — langkah yang belum pernah diambil oleh pemerintah pusat! Namun langkah yang cukup signifikan itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah Papua, karena dimensi kenegaraan yang terkandung dalam masalah tersebut berada di tingkat kewenangan negara, bukan propinsi.

Kebijakan Pemda Tk. II Kabupaten Jayawijaya yang melakukan isolasi wilayah untuk mencegah orang pergi dari Wamena pasca insiden berdarah di daerah tersebut, secara khusus perlu dibahas di sini. Kebijakan ini telah melanggar semua prinsip hak asasi manusia, yang tujuan utamanya melindungi hidup seseorang dan memberikan rasa aman. Ketika warga masyarakat merasa terancam dan negara tidak mampu memberikan jaminan keamanan yang efektif, wajarlah jika kemudian mereka mencari tempat perlindungan yang aman, dan hal ini dijamin oleh segala perangkat hukum hak asasi manusia.[27] Prinsip inilah yang tidak diindahkan Pemda Tk.II Kabupaten Jayawijaya, dengan menghalangi kebebasan penduduk untuk mencari perlindungan.

2.3.3. DPR Pusat dan DPRD Tk. I

Menghadapi situasi di Papua, sikap dan tindakan yang diambil DPR Pusat berbeda dengan DPRD di daerah. DPR Pusat dengan tegas memberikan peluang bagi terjadinya tindak kekerasan di Papua oleh Polri dan TNI. Selain itu, berdasarkan kepentingan partai politiknya masing-masing, masalah izin pengibaran bendera dan bantuan finansial untuk Kongres Rakyat Papua, telah dijadikan komoditi politik oleh mereka untuk mempersalahkan Presiden. Hampir tidak pernah dibicarakan di DPR-RI mengenai nasib kaum korban yang meninggal, luka-luka, dan yang menjadi pengungsi, baik di negeri sendiri maupun di negeri lain.

Sementara DPRD Tk. I Irja jauh lebih berani membuka dirinya untuk berdialog dengan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak sipil dan politik. Walaupun ketika menghadapi masalah di bidang

---

[27] Acuan tentang hak hidup dan memperoleh rasa aman misalnya bisa dilihat dalam pasal 9, 27, 30, 35 UU No. 39/1999 tentang HAM.

kesejahteraan umum, sikap DPRD kurang berpihak pada rakyatnya sendiri.

Ada beberapa hal penting yang telah dilakukan DPRD Tk. I Irja. Di antaranya mengganti nama Irja menjadi Papua, pembentukan Komisi F yang menangani bidang HAM dan lingkungan hidup, pembentukan pansus yang bertugas meneliti Gerasem, serta melakukan perundingan di tingkat Muspida untuk menangani masalah pengibaran bendera Bintang Kejora secara damai. Upaya-upaya tersebut memang patut digarisbawahi, walaupun sikap kritis perlu juga ditujukan pada lembaga itu. Misalnya terhadap tindak lanjut dari penggantian nama Irja yang ternyata tidak berdampak pada struktur resmi negara. Mana sikap DPRD ketika keputusan mereka ditolak oleh Menko Polsoskam?

Yang juga perlu dipertanyakan adalah sikap dan tindakan DPRD terhadap korban kekerasan negara dan pelakunya. Walaupun di lembaga itu sudah terbentuk Komisi F yang menangani persoalan HAM, sepanjang 2000 tidak pernah tercatat adanya upaya DPRD Tk. I Irja untuk mendorong dilakukannya pengusutan kasus-kasus kekerasan negara. Memang beberapa kali dibentuk tim investigasi, tetapi hasilnya tidak jelas. Peluang DPRD untuk mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* kepada DPR-RI, juga belum pernah dimunculkan.

2.3.4. Satgas Papua[28]

Satgas Papua selama 2000 tampil secara aktif, militeristik, dan menjangkau semua lapisan masyarakat Papua baik di perkotaan maupun di pedalaman. Dalam Gerasem, Satgas Papua mengambil peran yang cukup menentukan, sekaligus menjadi pintu masuk bagi tindak kekerasan, baik dari luar maupun dari dalam. Hal itu pula yang melatarbelakangi pecahnya kekerasan di Nabire pada 28 Februari 2000 atau di Wamena pada 6 Oktober 2000. Kehadiran Satgas dengan segala eksesnya, diperalat sedemikian rupa untuk melegitimasi operasi penyerangan oleh aparat keamanan. Dalam konteks penegakan hak asasi manusia, kehadiran satuan-satuan semi militer nampaknya perlu dipertimbangkan secara kritis.

---

[28] Uraian ini selengkapnya dibahas pada Bagian II buku ini.

2.3.5. Presidium Dewan Papua[29]

Dilihat dari bidang hak sipil dan politik, peran PDP telah menggoreskan peristiwa-peristiwa penting sepanjang 2000. Khususnya saat merumuskan kesepakatan-kesepakatan dengan Muspida dalam persoalan pengibaran bendera Papua dan ketika berdialog dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam kedua peristiwa itu, PDP bersama Pemda Tk. I dan Presiden, mengambil langkah untuk menangani Gerasem melalui mekanisme hukum dan politis. Langkah ini sebenarnya mampu menghindarkan pecahnya kekerasan dan jatuhnya korban seandainya Polisi menepati aturan main yang telah ditetapkan bersama.

2.3.6. Gerakan TPN/OPM[30]

Gerakan Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional (OPM/TPN) kembali muncul ke permukaan dalam berbagai peristiwa yang diliput media massa. Berikut ini adalah beberapa pernyataan mereka yang kiranya bisa digunakan untuk mencermati sikap, pikiran, serta tindakan kelompok tersebut.

- 13 Mei 2000: Dewan Nasional Papua Barat Basis Kerom menyampaikan pernyataan politik yang menggugat keabsahan pemerintah RI serta mendukung rencana Kongres Papua.
- 3 Oktober 2000: Bernard Mawen mengirim surat kepada Pangdam XVII/ Trikora agar segera menangani secara tuntas Posko-posko Satgas Papua dan PDP.
- 12 Oktober 2000: Simon P. Sapioper mengeluarkan pernyataan resmi tidak mendukung hari Solidaritas Papua yang diselenggarakan PaVo di Belanda.
- 26 November 2000: Matias Wenda mengeluarkan surat perintah oerasi untuk menyerang pos-pos militer tanpa merusak fasilitas umum.
- 10 Desember 2000: Matias Wenda mengirim surat kepada Uskup Vanimo yang isinya membicarakan tindakan kekerasan Polisi dan TNI terhadap rakyat Papua.
- 30 Desember 2000: Matias Wenda mengeluarkan surat

---

[29] Uraian ini selengkapnya dibahas pada Bagian II buku ini.
[30] Uraian ini selengkapnya dibahas pada Bagian II buku ini

pernyataan dan keputusan untuk mengutuk pihak yang disebut pengkhianat, menghimbau agar tidak bekerjasama dengan Indonesia, dan agar PDP dibubarkan setelah 1 Desember 2000.

2.3.7. Unsur pejuang HAM

Kalangan LSM di Papua memainkan peran sebagai pihak yang melakukan advokasi dan pembelaan hukum (litigasi) di bidang hak sipil dan politik. Kepedulian mereka ditunjukkan dalam berbagai peristiwa kekerasan negara. Misalnya dengan membentuk tim yang menangani korban di Sorong, Nabire, Wamena, Jayapura, dan Merauke. Usaha tersebut biasanya dijalankan bersama pihak Gereja yang lazimnya menjadi tempat bicara kaum korban. Advokasi dan litigasi ini sangat membantu masyarakat untuk menyuarakan suaranya jauh melintasi batas negara, sehingga sejarah korban tidak sekedar menjadi ingatan masyarakat, melainkan menjadi ingatan publik. Upaya-uapaya tersebut di antaranya:

- Usaha advokasi kasus Nabire yang dilaporkan SKP Keuskupan Jayapura bersama Els-HAM Papua dan Amnesty International.
- Usaha penanganan kasus Wamena, 6 Oktober 2000, yang dilakukan oleh Tim Kemanusiaan untuk Wamena (tim gabungan yang terdiri dari SKP Keuskupan Jayapura, Els-HAM Papua, LBH Jayapura, Kontras Papua) dan secara insidental dibantu oleh UNICEF Jayapura untuk penanganan bantuan darurat.
- Usaha penanganan kasus Merauke, 4 November dan 2 Desember 2000, yang dilakukan oleh Tim Advokasi Peduli HAM Merauke yang merupakan gabungan LBH Merauke dengan Gereja-Gereja.
- Usaha penanganan kasus demo mahasiswa Papua (1 Desember 2000) di Jakarta yang dilakukan oleh TIVA (Tim Advokasi HAM) Papua (kerjasama dengan Institut Sosial Jakarta, LBH Jakarta, dan ELSAM).
- Usaha penanganan kasus Abepura, 7 Desember 2000, yang dilakukan oleh Els-HAM Papua bekerjasama dengan Gereja-Gereja di Jayapura.

Walaupun ada beberapa langkah penting yang telah dilakukan dan tentunya membantu masyarakat, namun perlu disadari bahwa segi penanganan lanjutan (pasca trauma) dan tahap penyelesaian

masalah pelanggaran HAM belum banyak ditangani. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan:

- Selama 2000, banyaknya kasus yang muncul secara beruntun dan tersebar, yang membuat perhatian, persediaan tenaga, dan intensitas penanganan masalah menjadi terbagi-bagi. Hal ini lebih terasa di wilayah selatan Papua (Merauke-Agats) yang hampir tidak memiliki LSM di bidang hak asasi manusia selain pos kontak LSM Jayapura.
- Jumlah LSM serta personil yang bergerak di bidang HAM sangat terbatas dan umumnya terpusat di Jayapura. Akibatnya langkah penanganan tidak bisa lebih jauh daripada advokasi dan litigasi. Itupun merupakan langkah yang tidak ringan dan penuh risiko.
- Kerjasama di antara kalangan LSM kadang-kadang terhambat oleh kepentingan lembaga masing-masing, sehingga kinerja mereka untuk kepentingan masyarakat ikut terganggu.
- Tidak semua Gereja (kalangan agama) memiliki bidang pelayanan hak asasi manusia secara memadai, yang mampu bekerjasama secara teknis dan profesional dengan kalangan LSM.
- Penanganan trauma dan litigasi tingkat lanjut memerlukan keahlian tersendiri yang belum terlalu berkembang, bahkan di tingkat nasional sekalipun.

Selain kalangan LSM dan Gereja (agama), perlu juga dicatat peran Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di tingkat negara untuk menangani masalah hak-hak asasi manusia, termasuk hak sipil dan politik, berdasarkan UU No. 39/1999. Komnas HAM berperan penting setelah disyahkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Undang-undang tersebut merupakan salah satu terobosan untuk memutus rantai kebal salah dan kebal hukum (*impunity*) di Indonesia umumnya, dan di Papua pada khususnya. Dengan UU ini, pelanggaran berat HAM dapat diadili berdasarkan perangkat HAM internasional yang diadopsi oleh produk hukum tersebut.

Bagaimana kinerja Komnas HAM di tingkat praksis? Komnas HAM hanya tercatat sekali saja menanggapi kasus kekerasan di Papua, yakni pada peristiwa Wamena, 6 Oktober 2000. Itupun hanya berupa kunjungan ke tempat kejadian dan mengeluarkan surat dengan nada

menyesalkan, mencela inkonsistensi kebijakan pemerintah, serta meminta pemerintah mengambil langkah hukum bagi semua pihak yang terlibat secara bijaksana.[31] Kemampuan Komnas HAM ternyata sangat terbatas dibandingkan harapan dan perkembangan dinamika masyarakat di Papua. Memang pernah dibicarakan secara agak serius pikiran untuk mendirikan perwakilan Komnas HAM di Papua. Hanya saja, gagasan ini belum membuahkan kenyataan.

2.3.8. Unsur perantara

Kalangan agama di Tanah Papua berusaha mengembangkan peran sebagai perantara, upaya advokasi, dan pemberian bantuan darurat saat terjadi tindak kekerasan di berbagai tempat. Tercatat ada sembilan seruan dari kelompok agama Kristen atau Islam untuk mengajak semua pihak mencari jalan keluar dari segala kebuntuan atau suasana kekerasan.

(1) 27 Juni 2000: Pimpinan Gereja Katolik di Papua melakukan pertemuan dengan Presiden Abdurrahman Wahid untuk membicarakan persoalan Papua.
(2) 3-9 September 2000: UEM dan GKI Irja mengeluarkan seruan berkaitan dengan terjadinya peristiwa Manokwari.
(3) 9 Oktober 2000: muncul seruan atas terjadinya peristiwa kekerasan di Wamena pada 6 Oktober 2000.
(4) 30 November 2000: seruan perdamaian oleh 11 petugas Gereja dan pelayan umat.
(5) 5 Desember 2000: BP Am Sinode mengeluarkan surat agar penahanan terhadap Pdt. Herman Awom ditangguhkan.
(6) 16 Desember 2000: Uskup Jayapura dan Ketua Sinode GKI Irja menyerukan kepada Komnas HAM berkaitan dengan suasana kekerasan dan intimidasi setelah 7 Desember 2000.
(7) 20 Desember 2000: Komunitas Islam Asli di Irian Jaya mengeluarkan pokok-pokok pikiran alternatif dalam menyelesaikan persoalan di Irian Jaya yang diserahkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid.
(8) 24 Desember 2000: GKII, GIDI, PGBI mengeluarkan seruan agar kejadian pasca 7 Desember 2000 ditanggapi.

---

[31] Lihat laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2000.

(9) 30 Desember 2000: Pimpinan gereja mengeluarkan rekomendasi untuk penyelesaian masalah di Papua yang diserahkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam upaya advokasi dan pemberian bantuan darurat, kalangan agama biasanya mendukung dan bekerjasama dengan kalangan LSM untuk mengangkat perkara kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat. Bagaimana dampaknya? Mengingat lembaga-lembaga agama bukanlah lembaga kekuasaan, melainkan lembaga moral, tentulah kekuatan yang dimilikinya adalah kekuatan moral. Seruan moral ini kerapkali mendorong pihak-pihak yang bertikai menahan diri atau membatasi tindakannya yang agresif. Namun demikian, dalam suasana yang penuh konflik dan kekerasan, tidak ada jaminan bahwa suara moral itu akan terus didengarkan.

Bagian 4
Mencari Jalan Keluar

Bagian penutup ini berusaha menyodorkan beberapa gagasan yang mungkin bisa dikembangkan untuk mencari jalan keluar dari suasana memprihatinkan di Papua, khususnya selama 2000. Dengan uraian ini kami mengajak segenap pihak yang berkepentingan untuk ambil bagian dalam menciptakan suasana yang lebih manusiawi dan adil di Papua, melalui mekanisme hukum dan demokrasi.

Uraian ini dipilah menjadi dua bagian. *Pertama*, gagasan di bidang sosial-politik; dan *kedua*, gagasan di bidang hak asasi manusia.

GAGASAN SOSIAL POLITIK

Pada Bagian II telah diuraikan mengenai unsur-unsur yang membentuk dan menggerakkan dinamika sosial-politik di Papua selama 2000. Dinamika tersebut nampaknya akan terus berlanjut, terutama bila unsur-unsur yang dominan — seperti aktor-aktor politik dan kepentingan yang diperjuangkannya — semakin berbenturan. Pokok-pokok pikiran berikut ini kami tawarkan sebagai upaya untuk menembus kebuntuan politik, berdasarkan kenyataan-kenyataan yang muncul selama 2000.

Pokok pikiran tersebut adalah:

1. Memantapkan struktur organisasi gerakan rakyat Papua.
2. Menyebarkan informasi mengenai Gerasem secara bertanggung-jawab.
3. Mengembangkan pendidikan penyadaran kepada masyarakat.

4. Mencegah upaya pembentukan milisi.
5. Mengembangkan wacana pemerdekaan.

1. Memantapkan Struktur Organisasi Gerakan Rakyat Papua

Dalam hal kelembagaan, ada kemajuan berarti dalam perjuangan rakyat Papua pada 2000, yakni dengan terbentuknya Presidium Dewan Papua (PDP) yang hingga kini dipercaya sebagai wadah yang mampu memperjuangkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Dengan beberapa Panel (perwakilan) di daerah, PDP — dengan tanpa mengabaikan peran organ-organ lainnya yang juga memperjuangkan aspirasi yang sama walaupun dengan cara yang berbeda-beda — menjadi titik sentral Gerasem selama 2000.
Sebagai organ kunci perjuangan, PDP nampaknya akan tetap mewarnai perjuangan masyarakat Papua dalam beberapa tahun ke depan. Perkiraan ini juga diperkuat oleh mandat yang diberikan rakyat Papua melalui Kongres Rakyat Papua 2000. Dengan demikian, kehadirannya akan tetap menjadi sentral, di samping diharapkan menjadi wujud gerakan rakyat oleh berbagai lapisan masyarakat.

Yang harus jadi perhatian adalah kelanjutan kinerja PDP dengan kepercayaan rakyat yang begitu besar. Kinerja tersebut akan tergantung pada dinamika internal PDP sendiri dan kondisi politik Indonesia. Keduanya secara bersamaan akan menantang PDP untuk menentukan sikapnya.

Secara internal, PDP ditantang untuk menjadi organisasi profesional yang sekaligus mempunyai ciri kerakyatan. Sebagaimana lazimnya organisasi, PDP harus merumuskan visi dan misinya sebagai penjabaran mandat yang diberikan oleh Kongres Rakyat Papua (KRP) II. Selain itu, PDP harus membuat program kerja yang strategis dan berkelanjutan, menyusun pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas, juga dituntut fleksibel dalam membentuk tim-tim kecil sesuai kebutuhan insidental.

Rakyat Papua juga mengharapkan agar PDP sebagai organisasi kerakyatan membangun sistem komunikasi yang lancar dengan masyarakatnya. Sejauh mana kepentingan rakyat dapat dilayani oleh para pemimpin PDP, dan sejauh mana PDP dapat mempertanggung-jawabkan kegiatannya kepada rakyat, akan menjadi tolok ukur

keberhasilan organisasi kerakyatan itu. Alasannya, semakin rakyat tidak mengerti apa yang diperbuat pemimpinnya, maka gerakan itu akan semakin berubah menjadi birokrasi.

Selain tantangan dari dalam, PDP juga akan tetap mendapat tantangan dan hambatan hebat dari perkembangan politik di Indonesia. Penahanan dan pengadilan terhadap anggota PDP di penghujung 2000 menjadi bukti yang jelas. Selain itu, dinamika politik di Jakarta secara *de facto* juga telah menyerap perhatian, waktu, dan tenaga PDP, terutama dalam melakukan lobi-lobi politik, pembelaan-pembelaan, dan perundingan. Hal-hal demikian memang tidak bisa dihindari oleh sebuah gerakan politik.

Namun jika kembali kepada mandat yang diberikan KRP II, gerakan PDP ke atas perlu diimbangi dengan gerakan yang mengakar pada rakyat sebagai sumber kekuatan dan pihak yang paling kuat menyimpan ingatan penderitaan. Karena itu pemantapan struktur dan cara kerja PDP ke daerah-daerah terpencil menjadi agenda yang sangat penting. Bukan saja untuk memperteguh perannya sebagai gerakan rakyat yang menuntut suatu perubahan yang menyeluruh di Papua, tetapi juga untuk menghindari elitisme dan habisnya energi untuk kepentingan eksternal.

Jika mengamati perkembangan situasi selama 2000, yang juga ditandai dengan mulai melemahnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap peran PDP, maka kebutuhan untuk melakukan gerakan ke bawah semakin mendesak. Gerakan itu juga menjadi penting sebagai wujud pertanggungjawaban PDP atas mandat yang telah diberikan rakyat. Irama, semangat, dan isi hati rakyat perlu dijaga dalam menempuh perjuangan yang masih panjang.

Pemantapan peran PDP juga akan terbantu oleh dibukanya dialog yang teratur dengan komponen masyarakat lainnya, terutama yang ada di Papua sendiri. Kompenen-komponen tersebut mungkin berbeda pendapat dengan PDP. Namun perbedaan itu tidak perlu menjadi penghambat terjadinya sebuah dialog. Justru melalui dialog dengan komponen yang berbeda pendapat, PDP dapat memperkaya dan mempertajam visi serta wawasannya. Selain itu juga dapat memperteguh citranya sebagai gerakan rakyat yang tetap menempuh jalan damai dan dialog.

Perlu juga dicatat bahwa pilihan 'jalan damai dan dialog' seperti yang dimandatkan KRP II, nampaknya akan semakin ditantang oleh

munculnya gerakan-gerakan radikal yang mempertanyakan dayaguna jalur tersebut.

2. Menyebarkan Informasi Tentang Gerasem Secara Bertanggungjawab

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu, penyebaran informasi memainkan peran penting dalam gejolak perkembangan sosial politik selama 2000. Yang patut menjadi perhatian adalah kurangnya informasi mengenai perkembangan Gerasem di tingkat akar rumput. Masyarakat di lapisan paling bawah memang kurang memiliki akses pada jalur-jalur yang menentukan dinamika sosial politik di Papua.

Pemahaman mengenai Gerasem yang sepotong-potong (bahkan sama sekali tidak benar) di kebanyakan masyarakat Papua, telah menciptakan **harapan yang terlalu besar dan melampaui kenyataan yang sebenarnya**. Harapan terhadap kemerdekaan Papua misalnya, tidak jarang diyakini seolah-olah sudah ada di depan mata. Harapan itu semakin menebal ketika penderitaan datang bertubi-tubi akibat penindasan, juga karena adanya konsep 'keselamatan/cargois' yang sudah lama hidup dalam alam pikiran masyarakat Papua.

Persoalan-persoalan tersebut muncul karena informasi mengenai gerakan aspiratif itu tidak disampaikan secara riil hingga ke pelosok Papua. Informasi yang riil hanya menjadi konsumsi elit-elit tertentu atau mereka yang mengangkat dirinya sebagai agen gerakan "M" di masyarakat. Banyak kehancuran yang diakibatkan oleh harapan-harapan yang terlalu tinggi dan tanpa didasari kebenaran itu. Misalnya muncul bahaya kelaparan karena banyak orang meninggalkan pekerjaannya di kebun. Proses belajar mengajar di sekolah terhenti sehingga hilangnya generasi (*lost generation*) Papua menjadi nyata. Suasana seperti itu dewasa ini menjadi keseharian di daerah-daerah terpencil.

Mengingat kondisi seperti itu, agenda penyebaran informasi tentang seluk beluk Gerasem dan wacana yang mengiringinya, sekarang ini menjadi sangat penting. Agenda tersebut menjadi tanggungjawab siapa saja yang menjadi pelopor utama gerakan kerakyatan itu. Langkah-langkah konkret perlu dilakukan secepatnya

untuk menurunkan harapan-harapan akan "kemerdekaan" yang terlalu melambung tinggi. Agenda sosialisasi itu juga bisa dipercayakan kepada unsur-unsur masyarakat yang sudah lama mempunyai akar dan memiliki jaringan komunikasi konvensional hingga ke tingkat akar rumput, seperti gereja dan LSM. Unsur-unsur ini harus bahu-membahu untuk mengantar masyarakat Papua menjadi komunitas yang mampu mengambil alternatif terbaik dan bisa merumuskan masa depannya sendiri.

Selain untuk membantu masyarakat bersikap realistis, sosialisasi juga berguna untuk:

- Mendiskusikan bentuk dan makna kemerdekaan yang dicita-citakan;
- Menyamakan persepsi untuk menghindari upaya pemecah-belahan masyarakat yang akan membawa dampak buruk dan merugikan gerakan kerakyatan di Papua secara keseluruhan;
- Menanamkan konsep dan arah gerakan aspiratif yang sedang diperjuangkan (prinsip perjuangan dengan jalan damai dan dialog sebagaimana yang dimandatkan KRP II, sejauh ini belum menjadi pegangan bersama komponen gerakan);
- Melindungi gerakan kerakyatan dengan jalan dialog dan damai dari kelompok-kelompok yang mau mengambil jalan pintas (radikalisasi), hanya karena mereka merasa tidak puas terhadap elemen gerakan yang sedang bekerja.

3. Mengembangkan Pendidikan Penyadaran Kepada Masyarakat

Penyebarluasan informasi atau sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai media komunikasi. Salah satu cara yang efektif adalah menggunakan media yang cocok dengan suasana dan kebutuhan masyarakat. Di Papua sudah lama berlaku pola komunikasi yang berbau komando dan indoktrinasi, serta mengabaikan potensi yang hidup dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu gaya ceramah, pidato, kampanye, atau pengerahan massa tidak cocok lagi.

Pendidikan penyadaran menjadi salah satu jalan terobosan yang bisa dilakukan untuk menyebarkan informasi dan mengumpulkan aspirasi rakyat. Cara ini juga akan berguna untuk merumuskan strategi gerakan dalam mencapai kebebasan yang lebih menyeluruh.

Pendidikan penyadaran tidak hanya terbatas pada kursus atau pelatihan singkat dengan agenda yang sudah terumus – yang memang penting, tetapi juga bisa dalam bentuk diskusi atau pertukaran wacana. Dalam diskusi, peserta secara bersama-sama bisa menggali tantangan dan peluang masa kini serta masa mendatang bagi perjuangan di Papua.

Pada prinsipnya pendidikan penyadaran berusaha mengajak pihak-pihak yang berkepentingan untuk secara saksama mengenal perkembangan yang sedang berlangsung, yang kemudian dijadikan pijakan dalam merumuskan masa depan yang diinginkan. Proses ini akan menjadi diskusi terbuka dalam membicarakan agenda-agenda yang tersimpan di masyarakat. Proses selanjutnya akan terjadi di dalam diri mereka sendiri yang memiliki 'memori hidup' yang sangat kaya. Proses penyadaran menjadi aktual dewasa ini karena masyarakat Papua sedang menghadapi masa transisi di berbagai bidang, terutama di bidang budaya.

Media massa juga menduduki tempat yang penting dalam membangun proses penyadaran masyarakat itu. Dia ditantang untuk mampu menfaatkan peluang ini secara memadai. Demikian pula kalangan LSM, agama dan masyarakat adat yang memiliki jalur komunikasi hingga di tingkat akar rumput. Mereka ditantang lebih jauh untuk menjalankan proses penyadaran itu di masa-masa mendatang karena cepatnya dinamika kepentingan politik sering kali jauh melebihi daya serap masyarakat biasa. Terakhir, pemerintah yang saat ini berkuasa dan mengklaim dirinya berbeda dengan Orde Baru, dituntut untuk lebih mendengarkan suara rakyat daripada mendikte mereka.

4. Mencegah Upaya Membangun Milisi

Kehadiran kelompok-kelompok paramiliter, atau lebih dikenal dengan satgas (satuan tugas) yang menggabungkan gaya militer dan sipil (milisi), seperti Barisan Merah Putih, Satgas Papua, dan Satgas Koteka,[1] banyak mewarnai konflik di Papua sepanjang 2000. Konflik-konflik itu banyak menimbulkan kerugian moril dan materil, serta menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Papua.

[1] Uraian tentang Satgas Papua dapat dibaca pada Bagian II buku ini.

Dalam budaya politik Indonesia, kehadiran kelompok-kelompok semi milter seperti itu bukan sesuatu yang baru. Misalnya pernah tercatat ada Satgas PDI Perjuangan, Banser NU, Kamra, Hansip, Laskar Jihad, Pemuda Pancasila, atau kelompok-kelompok milisi radikal di Timor Timur seperti Besi Merah Putih, Mahidi, Aitarak, Alfa, dan sebagainya.[2] Sebagai kelompok semi-militer, apapun namanya, satgas-satgas tersebut memang sangat menonjolkan pendekatan militeristik. Misalnya ditunjukkan dengan struktur komando, keseragaman, kekuatan fisik, kekuatan senjata, dan kekerasan.

Kehadiran kelompok-kelompok semi-militer seperti itu anehnya dibiarkan oleh pemerintah. Maka, patut diduga bahwa pemerintah sengaja melakukan 'kebijakan' pembiaran terhadap kelompok-kelompok tersebut. Pembiaran ini seolah-olah dimaksudkan untuk melegitimasi tindakan keras Polri dan TNI sebagai aparat negara, yang dapat menggunakan kekerasan secara sah. 'Kebijakan' ini menjadi sangat kentara di Timor Timur pasca jajak pendapat, ketika milisi-milisi di sana menjadi monster yang dahsyat dan tak terkendali dalam gerakan pembumi-hangusan. Belajar dari pengalaman pahit tersebut, nampaknya diperlukan sikap kritis dalam menanggapi kehadiran kelompok paramiliter itu. Apalagi jika Gerasem di Papua ingin tetap menempuh jalan damai dan dialog sebagai pilihan.

Dari fakta-fakta yang ada, diketahui bahwa kehidupan sosial politik di Papua selama 2000 lebih memprihatinkan dibanding tahun sebelumnya. Penyerangan yang dilakukan masyarakat sipil terjadi berulang-ulang, baik terhadap aparat keamanan maupun terhadap kelompok masyarakat lainnya. Pola kekerasan yang melibatkan massa bersenjata dan terarah, terutama sangat menonjol pada paruh kedua 2000.

Selain mudah diikuti oleh kelompok masyarakat yang telah lama menderita, pola kekerasan seperti ini juga mengundang operasi militer dan atau kepolisian untuk balik menyerang dengan cara yang sama kerasnya.[3] Kondisi ini tentu menjadi lampu merah bagi pihak yang

---

[2] Yayasan HAK di Dili mendokumentasikan pertumbuhan milisi di Timor Timur dalam Laporan Tahunan 1999 yang berjudul "Rekapitulasi Unsur Perlawanan Wilayah Propinsi Timor Timur Periode 1997/1998", April 1998.

[3] Gambaran mengenai pola lingkaran kekerasan vertikal di Indonesia dapat dilihat dalam masalah Aceh dewasa ini seperti diteliti oleh *Human Rights Watch* dalam "The War in Aceh", Vol. 13, No.4 (C), August 2001.

tidak mengharapkan meningkatnya dan meluasnya kekerasan secara massal dan bersenjata.

5. Mengembangkan Wacana Pemerdekaan

Ketika aspirasi "M" (merdeka) telah menjadi cita-cita hampir sebagian besar masyarakat, publik Papua nampaknya mutlak perlu diperkenalkan dan diajak untuk memahami secara baik wacana pemerdekaan[4] yang berkembang seiring dengan aspirasi tersebut. Karena, ada kesan kuat bahwa wacana pemerdekaan di kalangan masyarakat telah dipersempit dan dibekukan menjadi dua kubu: kubu "M" (merdeka) dan kubu "O" (otonomi). Misalnya, program pengembangan sumber daya manusia, atau tawaran-tawaran lain yang berusaha menangani keberdayaan masyarakat di bidang kultural dan ekonomi, sering kali langsung dicap sebagai otonomi. Walaupun tawaran otonomi khusus dari pemerintah belum disahkan.

Kenyataan demikian kurang menunjukkan refleksi yang terbuka, apalagi menunjukkan dialog kemasyarakatan yang pluralistik. Sebagaimana telah didiskusikan dalam bagian terdahulu, aspirasi "M" sebenarnya masih terbuka untuk dirumuskan dengan lebih terperinci dan canggih. Sebab, aspirasi tersebut sejatinya belum mengarah pada salah satu format politik dan hukum yang definitif.

Aspirasi "M" sebenarya adalah wacana tentang kebebasan atau pemerdekaan yang mengandung tiga unsur pokok:

1. Pelurusan sejarah melalui suatu dialog politik (status politik dibicarakan);
2. Pembebasan dari segala bentuk penindasan; dan
3. Perwujudan suatu pola pembangunan yang memberdayakan masyarakat Papua.

Ketiga aspek ini tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi, serta perlu diperjuangkan secara serentak. Tindakan yang langsung mengarah pada salah satu unsur saja tidak harus ditolak, karena masih berhubungan secara tidak langsung dengan unsur lainnya.

---

[4] Dengan istilah 'pemerdekaan' kami hendak mencakup berbagai upaya atau gerakan pembebasan yang tidak semata-mata terjadi dalam bidang politik/ ketatanegaraan seperti termuat dalam kata 'kemerdekaan' atau 'merdeka'.

Unsur pertama, pelurusan sejarah, merupakan wacana pemerdekaan dalam dimensi politik dan ketatanegaraan. Unsur ini secara hakiki dapat menjernihkan salah satu akar masalah persoalan di Papua, yakni sejarah pada 1960-an. Upaya fundamental tersebut tentu tidak mudah dilakukan mengingat kekuatan politik di tingkat pusat dewasa ini terlanjur sepaham dalam menilai masalah Papua, yakni sebagai separatisme.

Unsur kedua adalah wacana pembebasan dalam dimensi sosio-kultural. Segi ini mencakup pembebasan dari segala tindakan penindasan dan pengembangan jatidiri masyarakat Papua, melalui pembentukan sumber daya manusia yang yang sehat, berkualitas, dan cerdas, serta berakar pada tradisi kultural. Pengembangan jatidiri ini, dalam kondisi politik bagaimanapun, mutlak dikembangkan secara terus menerus. Karena, jika suatu bangsa ingin tetap lestari, maka perlu mengembangkan generasi mudanya yang bermutu.

Unsur ketiga, yakni pembangunan yang memberdayakan, adalah wacana pemerdekaan dalam dimensi sosio-ekonomi. Segi inipun perlu dikembangkan secara canggih dan berkelanjutan. Infrastruktur ekonomi, sistem transportasi antar daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor swasta, merupakan bagian-bagian yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Papua sendiri.

Dengan memahami unsur-unsur tersebut, diharapkan tidak terjadi polarisasi, pengabaian, atau pemisahan dimensi kultural, dimensi ekonomi, atau dimensi sosial dari dimensi politik.

Muncul pertanyaan: langkah atau kebijakan apa yang dapat mewujudkan satu atau lebih dari ketiga unsur tadi? Jawaban apapun yang bersifat positif patut diterima, walaupun hanya menjawab sebagian saja dari unsur-unsur tersebut. Kebijakan yang hanya menjawab 'sebagian' aspirasi masyarakat, tidak perlu dijadikan alasan untuk mengurangi perjuangan yang terfokus pada aspirasi lainnya. Atau konkretnya, suatu perbaikan dalam pola pembangunan tidak perlu ditolak supaya dialog politik tetap berlangsung. Sebaliknya jika dialog pelurusan sejarah terlaksana, unsur kultural dan sosial tetap harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat. Dengan demikian polarisasi atau pengkotak-kotakan dalam 'kubu O' dan 'kubu M' harus dihindari, karena akan mematikan segala dinamika perjuangan yang terbuka dan wajar.

Dialog yang konstruktif dan inklusif serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat juga harus diberi tempat dalam wacana pemerdekaan. Dialog diharapkan menjadi media yang mampu meredam konflik yang membawa kerugian besar bagi kehidupan masyarakat Papua, hanya karena masing-masing pihak berpegang teguh pada kebenarannya sendiri.

KONDISI HAK ASASI MANUSIA

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, perlindungan, pemajuan, serta pemulihan di bidang hak-hak asasi manusia akan sangat tergantung pada kemauan politik (*political will*) pemerintah, sebagaimana digariskan UU No. 39/1999 pasal 71 dan 72. Dari catatan peristiwa selama 2000, baik yang menyangkut lima pokok masalah di bidang hak-hak ekonomi sosial dan budaya, maupun tindakan kekerasan di bidang sipil dan politik, menunjukkan bahwa kondisi HAM di Papua belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan.

Berikut ini, akan dicoba ditawarkan sejumlah jalan keluar yang diharapkan bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi persoalan-persoalan di bidang HAM.

1. Menghapus sentralisme penyelenggaraan pemerintahan.
2. Menciptakan sistem kontrol yang efektif dari masyarakat terhadap pemerintah.
3. Menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
4. Mengganti pola represif dengan pola dialog.

1. Menghapuskan Sentralisme Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada masa Orde Baru (Orba), pemerintah pusat mengendalikan segala-galanya. Sementara pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi dan petunjuk saja. Bagaimana setelah Orba tumbang dan memasuki era reformasi? Secara *de facto* pemerintah daerah di Papua, baik di tingkat propinsi, kabupaten, maupun tingkat desa, hampir tidak memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Birokrasi di daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di Jakarta. Akibatnya pemerintah di daerah tidak pernah terlatih untuk mengembangkan

kemampuan sendiri dalam menyelesaikan berbagai kasus. Dengan demikian adanya UU Otonomi Daerah akan menjadi batu uji yang perlu dicermati secara kritis: apakah pelaksanaannya akan memberi ciri yang berbeda dengan Orba atau tidak?

Dalam konteks budaya Papua, sudah saatnya dewasa ini dikembangkan pola pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mengadopsi nilai-nilai yang berlaku di Papua. Misalnya dalam menangani hak ulayat. Masalah ini berakar pada konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan pemilik modal akibat paradigma yang berbeda. Terutama dalam hal kepemilikan sumber daya alam yang berupa tanah dan atau tambang.

Jika hendak menyelesaikan masalah ini dengan jalur hukum dan mekanisme demokratis, pemerintah perlu membuat terobosan baru. Yakni dengan mengadopsi hak ulayat sebagai bentuk kepemilikan kolektif — yang lazim berlaku dalam masyarakat adat di seluruh Papua — ke dalam sistem perundang-undangan yang ada saat ini. Baik yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, sistem kepemilikan, maupun yang menyangkut perpajakan. Dengan demikian akan tercapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pemilik modal, dan pemerintah. Kepastian hukum pada ketiga bidang tersebut sangat mendesak dikaji ulang untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, kelancaraan penyelenggaraan negara, serta kepastian berinvestasi.

2. Menciptakan Sistem Kontrol yang Efektif Terhadap Pemerintah

Kontrol atau pengawasan dari masyarakat atas jalannya penyelenggaraan negara di Papua, akan menjadi ukuran sejauh mana sistem demokrasi dijalankan. Pengawasan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa melalui lembaga legislatif (DPRD), lembaga masyarakat adat, kalangan agama, pers, maupun LSM. Pengawasan harus dilakukan terhadap kewajiban negara dalam menyelenggarakan, memajukan, dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan sipil-politik.

Secara formal, pengawasan jalannya pemerintahan seharusnya dilakukan oleh DPR atau DPRD. Tetapi di Papua secara *de facto* fungsi ini belum dijalankan dengan baik. Sementara itu pengawasan yang

dilakukan masyarakat melalui jalur-jalur non-pemerintah (agama, pers, LSM, lembaga masyarakat adat), justru oleh penguasa dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Padahal sistem demokrasi membenarkan hal ini, ketimbang sistem pengawasan yang menggunakan pengerahan massa besar-besaran.

Sikap pemerintah seperti itu menandakan masih digunakannya gaya pendekatan keamanan yang cenderung represif sebagai warisan Orba. Jika pemerintah berniat baik ingin membebaskan diri dari pengaruh seperti itu, maka perlu membuka diri terhadap kritik. Selain itu harus menindak aparat birokrasi yang terlibat KKN, serta mencermati keluhan berbagai kelompok masyarakat sebagai wujud demokratisasi yang sedang didengung-dengungkan sebagai simbol reformasi di Indonesia, termasuk di tanah Papua.

Masyarakat perlu diberi pemahaman (atau semacam penyadaran politik) bahwa mereka berhak untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme hukum dan demokrasi. Sehingga upaya memaksakan pendapat melalui pengerahan massa yang cenderung sulit dikendalikan, dapat dihindari. Misalnya, dugaan KKN yang dilaporkan masyarakat seharusnya cepat ditangani pemerintah sesuai dengan sistem yang ada. Keluhan masyarakat yang muncul terus-menerus mengenai buruknya layanan fasilitas umum dan sosial, perlu diteliti dan ditindaklanjuti secara proporsional.

Di samping itu, rakyat juga berhak untuk melakukan konsultasi jika suatu kebijakan yang dibuat pemerintah pada akhirnya berbenturan dengan haknya selaku warga negara. Misalnya, keputusan pemerintah mengizinkan investor pertambangan untuk menanamkan modalnya, sewajarnya dikonsultasikan terlebih dulu dengan masyarakat pemilik hak ulayat lahan yang akan dijadikan lokasi eksploitasi. Termasuk mendiskusikan apa saja manfaat yang nanti bisa diperoleh warga apabila usaha yang diizinkan itu mulai beroperasi. Upaya-upaya seperti di atas, perlahan-lahan tentu akan mengubah suasana sehari-hari masyarakat di Papua.

3. Menangani Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa "pelanggaran HAM" merupakan kosa kata yang sudah melekat dengan nama Papua, dan memiliki usia yang sama tuanya dengan sejarah integrasi wilayah ini

ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan perubahan politik di republik ini, muncul harapan baru di tengah-tengah masyarakat Papua bahwa berbagai masalah yang selama ini terjadi dan telah membentuk ingatan kolektif bangsa Papua, akan cepat diselesaikan. Harapan tersebut misalnya muncul bersamaan dengan adanya permintaan maaf Presiden Abdurrahman Wahid, pemulihan nama "Papua", serta terbentuknya UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Tetapi fakta yang muncul justru jauh dari harapan masyarakat. Arus reformasi yang digulirkan mahasiswa pada 1998 seolah-olah tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada penguasa di Jakarta. Berbagai peristiwa berdarah muncul ke permukaan dan memakan korban yang tidak sedikit. Pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu harus ditambah lagi dengan yang terjadi di era reformasi,[5] menumpuk, serta sebagian besar tidak ditangani secara hukum.

Yang perlu dicatat adalah ketika sebuah kasus muncul, seringkali proses hukum hanya dikenakan terhadap warga masyarakat saja. Sementara aparat Polri/TNI yang terlibat dalam kasus tersebut sama sekali tidak disentuh. Akhirnya muncul pertanyaan klasik di hati masyarakat, "Hukum ada di mana? Hukum hanya buat *kitorang* sajakah?"

Pertanyaan sederhana ini nampaknya perlu dicermati sungguh-sungguh, khususnya ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang tergolong sebagai tindak pidana kejahatan melawan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Sekarang ini negara sedang di hadapkan pada pilihan yang kritis. Apakah hendak memutus kaitan dengan kekerasan negara di masa lalu, atau mau memulai masa baru yang berbeda dengan Orba yang sekarang seakan-akan dijadikan tempat melempar semua kesalahan. Satu-satunya jalan untuk memutus keterikatan tersebut adalah melalui pengadilan HAM maupun pengadilan HAM *ad hoc*. Ingatan masyarakat yang luka tidak bisa dihapuskan. Luka itu hanya bisa disembuhkan dengan penegakan keadilan terhadap pihak yang selama ini kebal salah dan kebal hukum.

---

[5] Daftar kasus yang muncul pada 1998-2000 dapat dilihat dalam Bagian III buku ini. Catatan lebih terperinci mengenai uraian singkat tentang penyelesaian kasus-kasus dapat dibaca dalam *Memoria Passionis di Papua: Gambaran Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999*, Jakarta: SKP Keuskupan Jayapura dan LSPP, hlm. 80.

Karena itu menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari bahwa pemerintah harus sesegera mungkin mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang sudah terjadi berulang kali. Selain itu harus ada perombakan lembaga-lembaga penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) agar lebih memahami suara masyarakat. Karena perangkat hukumnya sudah tersedia, Komnas HAM tinggal membuka langkah penyelidikan secara *pro iustitia* terhadap kasus-kasus yang sudah didokumentasikan hingga 2000. Kasus-kasus tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* oleh DPR-RI dan Presiden.

Terhadap kasus-kasus yang tak terdokumentasikan, perlu diambil bentuk-bentuk penegakan keadilan yang mampu menjawab tuntutan keadilan dari rakyat Papua. Misalnya melalui pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan peringatan resmi tragedi-tragedi kemanusiaan di Papua. Upaya ini diharapkan dapat mengobati luka yang sangat dalam serta membangkitkan kembali harga diri masyarakat Papua yang sudah lama terkubur akibat hak asasinya dilanggar. Tanpa langkah yang benar-benar nyata dari pemerintah, simpati akan segera berubah menjadi antipati.

4. Mengganti Pola Represif dengan Pola Dialog

Walaupun status DOM telah dicabut sejak 5 Oktober 1998, namun berdasarkan data-data dan analisis seperti yang diuraikan pada bagian terdahulu, pola represif tetap digunakan dan dikembangkan pemerintah dan aparat TNI/Polri dalam menangani konflik di Papua. Meluasnya tindak kekerasan yang dipicu oleh operasi-operasi polisi dan militer membuktikan bahwa pendekatan represif tidak menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah. Sebaliknya, pendekatan represif – baik secara terbuka maupun tertutup (operasi *clandestine*) seperti terungkap dalam berbagai dokumen pemerintah dan kepolisian – telah mempertinggi tingkat kekerasan di Papua selama paruh kedua 2000. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah kecil maupun besar, justru secara ironis dinilai tidak memberi rasa aman.

Tidak dapat disangkal bahwa Polri (sebagai aparat sipil penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat) dan TNI (sebagai aparat pertahanan negara dari intervensi asing) sangat diperlukan kehadirannya. Berdasarkan fungsi-fungsinya itu – seperti telah

digariskan dalam TAP MPR – kedua lembaga tersebut harus mengembangkan dirinya menjadi lembaga yang betul-betul profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung warga negara. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana-sarana yang memadai agar profesionalisme Polri dan TNI dalam melindungi warga negaranya terus meningkat. Oleh karena itu, paradigma represi perlu segera diganti dengan paradigma kemanusiaan. Masyarakat Papua bukan musuh yang harus diperangi, melainkan warga negara yang harus diajak berdialog.

Dalam tingkat yang lebih luas, pendekatan represif juga perlu dihapus dari kamus lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Di tingkat MPR, perlu diadakan pembahasan khusus mengenai masalah Papua bersama-sama dengan masalah di daerah lain yang terus mengalami konflik seperti Aceh, Kalimantan, dan Maluku. Pembahasan khusus seperti itu akan membuka peluang terbentuknya perangkat hukum (dan politis) untuk sebuah dialog kenegaraan yang mengikat semua pihak yang berkepentingan. Perangkat dialog semacam itulah yang diperlukan bagi wacana penyelesaian masalah Papua, sebagai tindak lanjut dari wacana rekonsiliasi yang telah dirumuskan oleh MPR. Ketetapan ini perlu segera dijabarkan dalam perangkat undang-undang yang lebih operasional.

Lampiran

Lampiran 1

KOMUNIKE POLITIK PAPUA MUSYAWARAH BESAR PAPUA 2000 DI SENTANI, PORT NUMBAY 26 FEBRUARI 2000

Kami rakyat Papua yang bermusyawarah pada 23 - 26 Februari 2000 telah membicarakan dan telah menggumuli hak-hak politik serta keadilan dan kemanusiaan rakyat Papua sebagai bangsa, dengan ini menyampaikan komunike politik bangsa Papua sebagai berikut:

1. Bangsa Papua menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang telah menunjukkan perhatiannya untuk mendengar jeritan hati rakyat Papua mengenai identitas diri kami sebagai bangsa Papua, sehingga menetapkan perubahan nama Irian menjadi Papua pada 31 Desember 1999. Oleh karena itu, kami akan seterusnya dan selamanya menggunakan nama Papua sebagai sebutan untuk mengganti nama Irian.

   Penghargaan yang sama kami sampaikan juga kepada Presiden RI ketiga, B.J. Habibie, yang telah menerima rakyat Papua untuk berdialog pada 26 Februari 1999 di Istana Negara, Jakarta.

2. Rakyat Papua menyesalkan dan menganggap tidak sah peralihan kedaulatan bangsa Papua dari Belanda melalui PBB kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. Penyerahan kedaulatan bangsa Papua tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Rakyat dan Dewan Nasional Papua Barat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menetukan nasib bangsa Papua.

3. Bahwa sebagai konsekwensi dari tidak sahnya peralihan kedaulatan rakyat bangsa Papua oleh Belanda melalui PBB kepada Indonesia, maka rakyat Papua dengan tegas menolak hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan *New York Agreement*, 15 Agustus 1962.

Penolakan seluruh hasil Pepera yang diselenggarakan dan dimenangkan oleh Indonesia pada 1969 berdasarkan alasan sebagai berikut:

3.1. Pelaksanaan Pepera tidak sesuai dengan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, pasal 18 butir D, yang berbunyi "menetapkan kebebasan memilih semua orang dewasa pria dan wanita dan bahwa dalam melaksanakan *act of self determination* harus sesuai dengan tata kebiasaan atau praktek Internasional," atau *one man one vote.*

3.2. Pemerintah Indonesia melaksanakan *self act of determination* yang disebut Pepera dengan cara meniadakan hak-hak dan kebiasaan politik rakyat Papua, dengan mengintimidasi secara politik dan militer, menangkap, memenjarakan dan membunuh rakyat Papua yang menentang cara-cara Indonesia dalam melaksanakan Pepera yang tidak sesuai dengan jiwa *New York Agreement.*

3.3. Bahwa 1.026 orang yang dipilih Indonesia yang menentukan hasil Pepera sebagai kemenangan Indonesia adalah segelintir rakyat Papua. Hanya 0,8% dari 800.000 rakyat Papua. Mayoritas rakyat Papua yakni 99,2% yang karena diintimidasi tidak memberikan hak suara.

4. Bahwa kami bangsa Papua setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan Pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, (bandingkan butir 3) dan setelah 36 tahun berada dalam Negara RI, mengalami perlakuan-perlakuan yang keji dan tidak manusiawi: pelanggaran HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinanan, serta keadilan sosial dan hukum yang mengarah pada *etnic* dan kultur *genoside* bangsa Papua. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka kami menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka — terpisah dari negara RI, kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961, sebagaimana sudah disampaikan oleh bangsa Papua kepada Presiden BJ Habibie beserta para menteri Kabinet Reformasi Indonesia pada 26 Februari 1999 di Istana Negara, Jakarta.

5. Dalam rangka mewujudkan kehendak bangsa Papua untuk merdeka terpisah dari negara RI (sesuai butir 4), kami akan menempuh jalan dialog dengan cara-cara damai dan demokratis untuk mendapatkan pengakuan pemerintah Indonesia dan bangsa-bangsa lain.

6. Sehubungan dengan pengakuan kedaulatan hak-hak rakyat Papua sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

7. Komunike Politik ini kami sampaikan dengan hormat kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, pemerintah Amerika Serikat dan PBB yang telah meniadakan hak-hak politik bangsa Papua. Juga disampaikan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia untuk ikut mengetahui alasan-alasan dan mendukung kehendak bangsa Papua.

Atas nama Musyawarah Besar Bangsa Papua
Sentani, 23 - 26 Februari 2000

Theys Hiyo Eluay
Pimpinan Besar Bangsa Papua

Tom Beanal
Pimpinan Besar Bangsa Papua

Peserta Mubes Papua 23 - 26 Februari 2000

Lampiran 2

KONGRES RAKYAT PAPUA II

Resolusi

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa Desember 1948, Alinea I Mukadimah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1514 (XV) 14 Desember 1960 mengenai jaminan pemberian kemerdekaan kepada rakyat dan wilayah-wilayah jajahan, Manifesto Politik Komite Nasional Papua tanggal 19 Oktober 1961, pengakuan Presiden Soekarno atas keberadaan Negara Papua Barat yang tercetus melalui Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961, Surat Kongres Amerika Serikat tanggal 22 Mei 1998, Pertanyataan Tim 100 Masyarakat Papua Barat pada tanggal 26 Februari 1999 kepada Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya, dan hasil-hasil Kongres II Papua Juni 2000 terutama keinginan kuat dari seluruh rakyat dan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rakyat bangsa Papua melalui Kongres II Papua 2000 menegaskan kepada Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, bahwa:

1. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.
2. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak *New York Agreement* 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.
3. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil Pepera karena dilaksanakan di bawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan amoral di luar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu Bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.

4. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.
5. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan internasional.
6. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.

Proses perundingan politik untuk penyelesaian masalah-masalah di atas dilakukan secara jujur, damai, dan demokratis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Rakyat Papua melalui Kongres II memberi mandat sepenuhnya kepada Presidium Dewan Papua untuk:

1. Memperjuangkan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Papua Barat serta pengusutan dan pengadilan para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat.
2. Segera membentuk suatu tim independen yang akan melakukan perundingan damai dengan Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan PBB untuk suatu referendum pengakuan kedaulatan rakyat dan bangsa Papua.
3. Mengupayakan sumber-sumber yang tersedia di tanah Papua yang tidak bersifat mengikat untuk membiayai pencapaian tujuan perjuangan.
4. Melalui Panel Kongres II, rakyat Papua Barat memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presidium Dewan Papua.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana termaktub di atas pada 1 Desember 2000.

Penyelesaian masalah status politik Papua Barat secara adil dan demokratis harus dilakukan antara wakil-wakil sah bangsa Papua

dengan pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan pengalaman Bangsa Papua selama 38 tahun hidup di bawah penindasan dan kekerasan pemerintah Republik Indonesia, maka Kongres II Papua 2000 menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi bangsa Papua.

Kongres II Papua 2000 menyerukan kepada rakyat Papua untuk menghargai dan menjamin hak-hak sipil setiap penduduk tanah Papua, termasuk kaum minoritas. Selain itu, Kongres II Papua Barat juga menyerukan kepada rakyat Papua untuk bersifat ramah dan mendukung kegiatan investasi di tanah Papua sepanjang kegiatan investasi tersebut memenuhi hak-hak pemilik adat dan ramah terhadap lingkungan dan kebudayaan masyarakat Papua.

Resolusi ini secara benar dan sungguh-sungguh dibuat dalam Kongres Papua 2000 yang melibatkan 501 orang perwakilan sah masyarakat Papua Barat dari seluruh penjuru Tanah Papua dan luar negeri, serta dihadiri pula oleh 21.000 orang Papua dan non-Papua. Kongres ini merupakan wahana demokrasi tertinggi rakyat Papua, dan dengan demikian merupakan satu-satunya instansi pengambilan keputusan politik bangsa Papua yang sah.

Kongres Papua 2000 menegaskan sekali lagi kepada bangsa-bangsa dunia bahwa berdasarkan kajian pelurusan sejarah, bangsa Papua sudah merdeka sejak 1 Desember 1961. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Resolusi ini secara resmi disampaikan dengan hormat kepada pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Belanda, pemerintah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta bangsa-bangsa dan masyarakat dunia.

Syukur Bagi-MU Tuhan

Port Numbay, 4 Juni 2000

Pimpinan Sidang Kongres II Papua,

ttd.	ttd.	ttd.
Thaha M. Alhamid	Tt. Aronggear, S.E.	Pdt. Herman Awom, S.Th.
Ketua	Wakil Ketua	Sekertaris
ttd.	ttd.	ttd.
Franzalbert Yoku	Decky Wanggin, B.A.	Dra. Fera Kambu
Anggota	Anggota	Anggota
ttd.		ttd.
Sam Manami Satia		Adolof Fonataba
Anggota		Anggota

Lampiran 3

NOTULEN PERTEMUAN ANTARA MUSPIDA PROPINSI IRIAN JAYA DENGAN PRESIDIUM DEWAN PAPUA DI GEDUNG NEGARA 3 OKTOBER 2000

Pendahuluan

Pada 3 Oktober 2000 pukul 18:00 sampai 19.45 WIT di Gedung Negara Dok V Jayapura telah dilaksanakan pertemuan antara Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Propinsi Irian Jaya dengan Presidium Dewan Papua (PDP).

Dari Muspida Propinsi Irian Jaya hadir:
1. Pangdam XVII Trikora
2. Gubernur Propinsi Irian Jaya
3. Kapolda Irian Jaya
4. Danlantamal V Maluku Irian Jaya
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Irian Jaya

Dari Presidium Dewan Papua hadir:
1. Theys Hiyo Eluay (Ketua PDP)
2. Pdt. Herman Awom, S.Th.
3. Ny. Beatrix Koibur
4. Drs. Willy Mandowen
5. Drs. Don Flassy, M.A.

Kronologi Kegiatan

a. Pukul 18.15 WIT pertemua dibuka oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya. Gubernur menyampaikan selamat sore dan selamat datang

kembali di Indonesia bagi anggota Presidium Dewan Papua yang baru melakukan lawatan ke Luar Negeri. Seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur beberapa hari sebelumnya, mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak/Ibu dari PDP kepada Panglima Kodam XVII/Trikora atau Kapolda.

b. Penyampaian Drs. Willy Mandowen :

1. Surat Kapolres pertemuan Bapak Kapolda dan juga merespon pertemuan Kapolri, September 2000 di Jakarta dengan Wakil Presiden tentang pelarangan pengibaran bendera Bintang Fajar Papua dan kemarin Bapak Theys, terima kasih atas koordinasinya yang baik. Pihak-pihak yang lain, memberikan teks kepada kami sehingga kami mengkoordinasikan dengan Bapak Kapolda, sehingga kami anggota Presidium ada kesepakatan dan tidak ada masalah setelah pulang dari luar negeri kami seyogyanya akan bertemu dengan Menkosospolkam dan kami akan memahami. Menkosospolkam juga minta maaf karena berada di NTT karena kaitannya dengan kasus Atambua. Komitmen dari PDP melaksanakan pertemuan sendiri sebelum melaksanakan pertemuan dengan Muspida, sehingga tahapan pertahapan penyelesaian masalah yang dijumpai jangan dipahami sepihak dengan sejumlah pejabat yang ada di dalam lingkaran Kabinet yang baru dan kita tunda sampai beberapa hari lagi kita laksanakannya kalau tidak ada halangan kami minta waktu tanggal 9 Oktober 2000 Pak.

2. Pertemuan dengan Menko Polsoskam itu, di dalamnya soal bendera, soal nama kami ingin pertegas kembali. Dulu Presiden melalui Pak Marsilam Simanjuntak telah mengumumkan secara resmi bahwa tuntutan bagi masyarakat itu adalah HAM. Kapolres seolah menyerang dan menurunkan bendera secara paksa sehingga terjadi korban masyarakat yang menghalau. Katakanlah batas waktunya tanggal 5 Oktober 2000, kami diberikan batas waktu oleh Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan. Hal ini perlu sehingga masyarakat dapat memahami seperti Bapak Presiden mengatakan kalau memang perlu dibicarakan atau ada keputusan yang semisalnya diterjemahkan dalam hukum TNI dan proporsional. Kalau tidak

Bapak Kapolri jangan sepihak melakukan sesuatu yang pada akhirnya menurunkan kridibilitas pemerintah di masyarakat, sehingga masyarakat kita mengkait-kaitkan rakyat, sekarang itulah yang menjadi inti atau garis besar pokok permasalahan. Sudah ada pertemuan dengan Muspida untuk menyatakan sambutan pada tanggal 1 Desember 2000. Banyak sekali persepsi yang keliru, termasuk terhadap hasil-hasil Kongres Papua. Mereka pikir sudah merdeka padahal di dalam resolusi itu sebenarnya ada tertulis hanya evaluasi terhadap proses damai perjuangan Papua Merdeka. Apakah dilakukan secara dialog politis, inilah yang saya kira menjadi bagian penting dalam pembicaraan nanti dengan Bapak-bapak Muspida sehubungan dengan Papua Barat sehingga menjadi pemahaman bersama kita, sama-sama mengantisipasi kita lihat dengan soal bendera kalau diturunkan secara paksa maka akan menyebabkan proses dialog ini, akan terhambat. Demikian Bapak-bapak sekalian.

c. Theys Hiyo Eluay menyampaikan:
   1. Mengenai surat Presidium merestui, ada petunjuk jadi jangan ada tindakan dari Polri.
   2. Bendera Bintang Kejora di setiap Kabupaten, dikibarkan bersama bendera Merah Putih dan kalau diturunkan masyarakat akan mengamuk:
      a) Mengenai lambang Papua dan bendera Papua masyarakat akan berbondong-bondong ke seluruh Polsek dan Polres untuk minta dijelaskan karena ini menyangkut harga diri. Dan yang kedua kalau bukan itu maka kita mengungsi secara besar-besaran, kita tinggalkan Papua dari Kabupaten Merauke, Jayawijaya dan Jayapura mengungsi secara besar-besaran.
      b) Agak penasaran tentang tindak lanjut maka kami minta kepada pemerintah untuk memberikan waktu untuk bertemu dengan Bapak Presiden karena beliaulah selanjutnya memberi kejelasan tentang bagaimana model Papua ini yang bagaimana. Nah inilah rencana kita.
      c) Bapak Panglima, Bapak Gubernur bersama jajaran Muspida, surat Bapak Kapolres ditujukan Bapak Kapolda, pelaksanaannya ditangguhkan sehingga rakyat tidak panik dengan adanya penambahan Pasukan, terutama Polisi karena kami merasa

di sini aman dan jangan ada dusta di antara kita, artinya kalau kondisi kita aman sekali, tidak perlu ada penambahan pasukan. Ini kalau Bapak-bapak Muspida mau mendengar suara rakyat karena bagaimanapun juga Bapak-bapak adalah pelayan-pelayan rakyat tetapi tidak apa-apa.

d) Mengenai nama Papua tidak ada hubungannya dengan Papua Merdeka, karena kalau dipanggil Irian merasa berdosa, karena dia bukan orang Jawa, tidak karena dia orang Irian merasa tidak dihargai karena dia mempunyai harga diri dan tidak ada anti Nederland dan kalau bendera Papua turun maka Merah Putih juga harus turun.

d. Pdt. Hermanus Awom Menyampaikan:

1. Supaya ada Notulen tertulis setiap pertemuan tentang kesepakatan tanggal 19 Agustus 2000. Setiap ada kejadian harus ada koordinasi seperti tanggal 22 Agustus 2000.
2. Supaya perintah penuruan bendera disosialisaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada korban lagi, sebab masyarakat sudah dikelilingi pasukan.
3. Permintaan penambahan militer ada ditangan siapa supaya masyarakat jangan dibunuh lagi, peristiwa Hamadi penurunan bendera dengan tidak sopan. Theys Eluay siap kalau tanggal 12 membubarkan Dewan Papua Irja, selanjutnya Gubernur supaya dibuat kronologi selanjutnya disebarkan kepada PDP.

e. Kapolda Irja Menyampaikan:

1) Tanggal 26 September 2000 serah terima Kapolri dan tanggal 27 September 2000 Kapolri bemberi brifing khusus kepada Aceh, Irian dan Maluku top dilaksanakan pendekatan melalui kasih sayang, tindak tegas penurunan bendera.
2) Brifing harus dilaksanakan, untuk diberikan kejelasan sambil berusaha menjelaskan pendekatan kasih sayang kepada beliau-beliau di Pusat, serta ancaman Kapolres masih perlu disosialisasikan bukan merupakan harga mati.
3) Setiap pertemuan dalam membahas kasus-kasus supaya dibahas secara kasuistis. Penurunan bendera di Hamadi sudah didahului dengan pengiriman surat teguran namun tidak ditanggapi.
4) Upaya yang dilakukan oleh apkam (aparat keamanan) adalah

pendekatan dengan melakukan dialog agar bendera tersebut diturunkan atau tetap berdiri dan kemudian ditunda 2 (dua) minggu sambil kedua belah pihak memberikan penjelasan kepada Presiden (5 – 7 – 2000).

5) Kasus Sorong – pdt. Mambrasar melaporkan ke Kapolres tentang penaikan bendera Papua di gerejanya. Polisi datang langsung diserbu oleh masyarakat, sehingga harus mempertahankan diri.
6) Supaya tidak ada korban harus ada yang dikorbankan (kompromi).

f. Gubernur Propinsi Irian Jaya menyampaikan peristiwa Sorong September 2000, polisi diancam akan dibacok karenanya melakukan pembelaan diri.

g. Pangdam XVII / Trikora Menyampaikan:
1) Ada pihak-pihak tertentu yang mau mencoba merusak kekompakan.
2) Surat yang ada tidak sesuai dengan pola dan tulisan militer, kalau ada kecurigaan dapat diadakan dialog secara damai.
3) Tidak ada penambahan pasukan yang ada hanya pergantian pasukan karena sudah 10 bulan, jadi memang perlu diganti.

h. Kajati Irian Jaya menyampaikan: kita mengharapkan kedamaian di daerah ini dan jangan terus melakukan pelanggaran, apabila ada pelanggaran perlu segera ditindak lanjuti.

i. Gubernur Propinsi Irian Jaya menyampaikan:
1) Penundaan penurunan bendera selama dua minggu.
2) PDP supaya menyampaikan kepada mayarakat yang ada di daerah-daerah tentang bendera Bintang Kejora.
3) Pelantikan Gubernur, diperkirakan tidak mungkin tanggal 10 Oktober 2000.
4) Pengungsi Ambon yang sudah kembali supaya dilaporkan Pdt. Hermanus Awom.

j. Drs. Don Flassy, M.A. menanyakan, ada apa pesawat terbang rendah sehingga membuat panik masyarakat.

k. Pangdam XVII/Trikora menyampaikan pesawat tersebut mendeteksi pelanggaran dengan menggunakan radar dan masyarakat menanggapi keberadaan pesawat itu seolah-olah ada apa-apa.

l. Pdt. Hermanus Awom menyampaikan:
   1) Kasus penurunan bendera di Hamadi PDP tidak diberitahukan dan PDP juga tidak turun untuk mensosialisasikan.
   2) Diberikan perpanjangan waktu 2 (dua) minggu untuk maksud tersebut tidak mungkin, sebaiknya waktu perpanjang karena tidak mudah untuk bertemu dengan Presiden.
   3) Letak geografi daerah yang sulit sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan masyarakat.

m. Kapolda Irian Jaya menyampaikan: rencana perpanjangan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2000, bukan harga mati masih bisa dibicarakan lagi nanti.

n. Drs. Willy Mandowen menyampaikan: sosialisasi perlu waktu untuk bendera tidak boleh dijadikan alasan untuk membunuh.

o. Gubernur Irian Jaya menyampaikan:
   1) Tanggal 1 Desember 2000 damai (tidak ada apa-apa), perlu dimuat di media cetak agar masyarakat mengetahuinya.
   2) Hak politik, diselesaikan secara damai serta pembangunan dilaksanakan disosialisasikan kepada berbagai pihak sehingga mereka mengetahui.

p. Rektor Uncen menyampaikan sebagai berikut:
   1) Perlu diberikan informasi kepada mayarakat tentang apa yang sudah disepakati di tingkat pimpinan (penjelasan pemerintah yang baik kepada masyarakat).
   2) Ada pihak yang ingin memaksakan kehendaknya untuk merusak komunikasi yang ada.

Kesimpulan

1) Batas waktu penurunan bendera Bintang Kejora diperpanjang dari

5 Oktober 2000 sampai 19 Oktober 2000, namun tanggal dimaksud bukan merupakan harga mati.

2) Presidium Dewan Papua dan Muspida Propinsi Irian Jaya masing-masing akan menghadap Presiden untuk meminta petunjuk tentang masalah pengibaran bendera Papua.

Jayapura, 7 Oktober 2000
Notulis

ttd.
Ir. Sabirin Harahap, M.Mt.

Lampiran 4

POKOK-POKOK PIKIRAN GEREJA-GEREJA DI PAPUA MENGENAI TRAGEDI KEMANUSIAAN DI WAMENA, 6 OKTOBER 2000

I. Sikap Dasar Gereja:

1. Gereja-gereja di Papua menanggapi dinamika kehidupan masyarakat di Tanah Papua dalam semangat penggembalaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan perdamaian Injili. Karena itu Gereja-gereja tidak ambil bagian dalam politik kekuasaan.
2. Gereja-gereja di Papua senantiasa mendorong sikap dialog sejati antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan masyarakat yang hidup dan bertumbuh di tanah Papua ini. Karenanya Gereja-gereja sangat tidak mendukung sikap dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun juga.
3. Gereja-gereja di Papua berusaha sekuat tenaga untuk mendorong penyelesaian berbagai masalah fundamental di Papua melalui jalan perundingan yang didasarkan pada prinsip kesederajatan, penghargaan terhadap semua pihak termasuk yang berbeda pendapat, kesediaan mendengarkan, penghormatan serta perlindungan terhadap insan ciptaan Allah tertinggi yakni manusia.

II. Sikap Terhadap Tragedi kemanusiaan Wamena:

1. menyatakan bahwa peristiwa Wamena adalah sungguh-sungguh tragedi kemanusiaan yang menggoreskan noda hitam bagi sejarah umat manusia di Tanah Papua ini; dan bukan semata-mata bentrokan kekerasan antara masyarakat dengan aparat keamanan atau antara warga masyarakat sipil sendiri.
2. menyatakan keprihatinan sangat mendalam atas jatuhnya puluhan korban jiwa di kedua belah pihak: baik masyarakat

maupun aparat keamanan, khususnya pihak masyarakat terlebih kaum perempuan dan anak-anak dari golongan manapun yang tidak terlibat dan tidak berdosa.

3. merasa sangat prihatin karena harkat dan martabat manusia yang menjadi bagian dari inti nilai-nilai Injili belum menjadi pijakan bagi setiap langkah, bagi setiap pihak di Tanah Papua ini; dan masih menjadi semboyan dan slogan-slogan semata-mata.
4. menyayangkan penggunaan kekerasan yang luar biasa dalam tragedi tersebut oleh pihak-pihak yang terlibat: baik aparat keamanan maupun masyarakat.
5. meminta pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat dalam tragedi kemanusiaan tersebut dalam wujud penyelesaian masalah secara adil, manusiawi, konkret, dan damai.

III. Saran dan Seruan Gereja:

1. Mendesak semua pihak yang terlibat dalam tragedi kemanusiaan di Wamena segera **MENGHENTIKAN SETIAP BENTUK KEKERASAN**: penembakan, penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan, pembakaran, intimidasi, dan bentuk-bentuk kekerasan non-fisik lainnya.
2. Dengan sangat meminta keterbukaan hati dari setiap pihak yang terlibat: Presidium Dewan Papua, Pemerintah Daerah Tk.I maupun Tk.II, Polri dan TNI, DPRD Tk. I dan Tk.II, dan segenap lapisan masyarakat untuk menahan diri dan bersedia berunding bersama untuk mencapai jalan penyelesaian yang terhormat, adil, manusiawi, dan memakai jalan-jalan damai.
3. Dengan sangat meminta keterbukaan hati seluruh masyarakat yang tinggal di Tanah Papua ini untuk menahan diri, tidak termakan oleh informasi yang tidak akurat, tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan di media massa yang memperkeruh suasana; melainkan mengambil langkah-langkah yang realistik untuk menjadikan Tanah Papua ini sebagai Tanah Damai.
4. Meminta dengan sangat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Tim Independen lainnya yang dipercaya oleh semua pihak agar segera mengadakan investigasi yang menyeluruh atas tragedi yang terjadi dan mempublikasikan temuannya secara luas dalam waktu singkat.

5. meminta dengan sangat Presiden dan Wakil Presiden RI agar mengambil langkah-langkah yang serius, segera, bijaksana, dan tepat guna, agar segala kepentingan masyarakat yang tinggal di Tanah Papua mampu diakomodasi dalam kebijakan politik yang menjawab kebutuhan fundamental segenap lapisan masyarakat sehingga Tanah Papua tidak menjadi ajang permainan politik oleh pihak manapun.
6. Meminta kepada setiap pihak yang terlibat dalam tragedi Wamena agar memberikan jaminan keamanan yang efektif dan nyata bagi setiap pekerja kemanusiaan yang menolong kaum korban dan pengungsi. Karena itu, Gereja-gereja mendorong dibentuknya tim medis yang segera mampu menangani kaum korban dan pengungsi yang menderita dan tengah mengalami ketakutan mendalam.
7. Meminta kepada setiap pihak yang terlibat untuk segera mengambil langkah konkrit dan efektif untuk memulihkan situasi traumatis yang melingkupi wilayah Baliem.
8. Meminta kesediaan media massa baik cetak maupun elektronik untuk menghentikan pemberitaan informasi yang tidak tepat, tendensius dan kurang profesional guna menghindarkan segala bentuk bias kepentingan kelompok, kepentingan suku, kepentingan agama, kepentingan finansial, dan kepentingan politik yang hanya akan memperkeruh suasana.

Demikianlah Pernyataan Gereja-Gereja di Tanah Papua dalam menanggapi tragedi kemanusiaan Wamena, 6 Oktober 2000. Semoga Tuhan Yang Mahaadil dan Mahakasih senantiasa menunjukkan jalan terang-Nya kepada setiap insan yang berkehendak baik.

Dikeluarkan di Jayapura, 9 Oktober 2000

ttd.	ttd.
Pdt. Herman Saud, M.th.	Pastor Jack Mote, pr.
Ketua Sinode GKI	Wakil Uskup Jayapura

ttd.
Pdt. John Gobay, S.Th.
Ketua Sinode GKII

ttd.
Pdt. Sofyan Joman, B.Sc. S.Th.
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Baptis

ttd.
Pdt. Mestian Towolom, S.Th.
Ketua Sinode Gereja GIDI

Lampiran 5

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA DENGAN PRESIDIUM DEWAN PAPUA 9 NOPEMBER 2000

Setelah melalui musyawarah dan dialog secara mendalam dengan didasari rasa saling menghargai dan menghormati, Musyawarah Pimpinan Daerah Propinsi Irian Jaya dengan Presidium Dewan Papua menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah politik dan keamanan yang menyangkut posisi dan peran Presidium Dewan Papua (PDP) di Propinsi Irian Jaya ditangani oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Propinsi Irian Jaya dan Dewan Presidium Papua (PDP) dalam hubungan kemitraan serta dengan pendekatan musyawarah dan dialogis.

2. Bahwa bendera Bintang Kejora yang sampai saat ini masih berkibar di 5 (lima) kabupaten yaitu Jayapura, Yapen Waropen, Merauke, Puncak Jaya dan Manokwari mulai 1 Desember 2000 di masing-masing kabupaten hanya diperbolehkan berkibar satu yakni di rumah Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Sedangkan di sembilan kabupaten lainnya tidak dikibarkan.

3. Mulai 2 Desember 2000 Posko Satgas dan bendera Bintang Kejora yang berada di Gedung Kesenian Iran Jaya sudah dipindahkan ke rumah Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua.

Demikian surat kesepakatan bersama ini ditandatangani untuk disebarluaskan kepada masyarakat

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 9 Nopember 2000

Musyawarah Pimpinan Daerah Propinsi Irian Jaya	Presidium Dewan Papua
ttd.	ttd.
1. Musiran Darmosuwito, S.I.P. PJs. Gubernur Propinsi Irja	1. Theys H. Eluay Ketua Presidium Dewan Papua
ttd.	ttd.
2. Albert Inkiriwang Mayjen TNI Pangdam XVII/ Trikora	2. Thom Beanal Wakil Ketua PDP
ttd.	ttd.
3. S.Y. Wenas Brigjen Pol. Kapolda Irja	3. Drs. Willy Mandowen Mediator (Foreri)
ttd.	ttd.
4. Bismar Mannu, S.H. Kajati Irja	4. Thaha Alhamid Sekretaris Jenderal PDP
ttd.	ttd.
5. Nathaniel Kaiway Ketua DPRD propinsi Irja	5. Agus Alua Sekretaris PDP

ttd.

6. Fanky Kayhatu
   Laksamana Pertama
   Danlantamal V/Maluku-Irja

ttd.

7. Drs. Isak Ayomi
   Pembantu Rektor I
   Universitas Cendrawasih

ttd.

6. Ny. Beatrix Koibur
   Anggota PDP

ttd.

7. M.Y. Tanawani
   Ketua LMA Yawa

Lampiran 6

POKOK-POKOK PEMIKIRAN ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI IRIAN JAYA, 20 DESEMBER 2000

Sebagai komunitas umat Islam Asli Irian Jaya, kami menilai bahwa fenomena disintegrasi bangsa yang terjadi di Irian Jaya akhir-akhir ini, nampaknya semakin hari semakin menguat merasuk di hati rakyat Irian Jaya. Isu kemerdekaan akhirnya tidak sekedar hanya dipandang sebagai wacana kultural atau protes terhadap ketidakpuasan pemerintah selama ini, namun telah bergeser menjadi agenda sentral perjuangan politik.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, tim dari komunitas Muslim asal Irian Jaya yang terdiri dari H. Sofyan Wanggai (koordinator), Muzakir Asso, Velix Vernando Wanggai, Said Asso, dan Tony Victor Wanggai telah mengadakan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid sebagai kepala negara pada Rabu, 20 Desember 2000, pukul 11.30 - 12.15 WIB bertempat di Istana Negara Jakarta.

Suasana dalam audiensi berlangsung dengan serius, hangat, namun santai. H. Sofyan Wanggai menyampaikan pokok-pokok pemikiran alternatif dalam menyelesaikan persoalan yang saat ini sedang terjadi di Irian Jaya. Bapak Presiden mendengar dengan serius, serta menanggapi beberapa hal, terutama menyangkut kebijakan pemerintah dalam menyikapi konstelasi sosial politik di Irian Jaya saat ini.

I. Pokok-pokok Pembicaraan

Pertama-tama, H. Sofyan Wanggai menyampaikan mengapa isu merdeka saat ini menjadi kesadaran politik baru di berbagai kalangan masyarakat Irian Jaya? Sehubungan dengan hal ini, komunitas Muslim

asal Irian Jaya memandang bahwa kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Irian Jaya sudah terakumulasi begitu lama, sehingga proses penyelesaian harus dilaksanakan secara hati-hati, bertahap, humanis dan persuasif.

Dalam kaitan itu, komunitas asli Irian Jaya mengusulkan kepada Bapak Presiden agar:

1. Penangan persoalan Iran Jaya harus menggunakan mekanisme dialogis yang sejati antara pemerintah, TNI/Polri, MPR/DPR, dengan tokoh-tokoh PDP, maupun dengan semua komponen masyarakat Irian Jaya yang majemuk secara adil dan bermartabat.
2. Fenomena aspirasi merdeka saat ini janganlah hanya dilihat dari kacamata pelanggaran hukum saja, namun perlu ditekankan penyelesaian politis melalui dialog sejati dengan semua komponen masyarakat, sehingga menghasilkan konsensus-konsensus sejati.
3. Penangan penyelesaian persoalan Irian Jaya harus diarahkan terhadap penyelesaian mendasar (substantif) yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Irian Jaya. Selanjutnya diikuti oleh pemecahan yang bersifat simbolis yang dapat membangkitkan kebanggaan dan identitas masyarakat Irian Jaya.
   Terkait dengan hal ini, maka diharapkan pemerintah dapat menempuh langkah-langkah :
   a. Merombak secara komprehensif pendekatan, strategi, dan kebijaksanaan (*policy choice*) yang dilaksanakan di Irian Jaya selama ini. Mengingat selama ini pembangunan di Irian Jaya sangat terkesan ego sektoral dan sentralistis.
   b. Melakukan Renegosiasi kontrak-kontrak karya, maupun kontrak-kontrak investor lainnya (pertambangan, kehutanan, perikanan, perkebunan, yang selama ini merugikan hak-hak masyarakat adat di Irian).
   c. Membentuk komisi penegakan Hukum dan HAM di Irian Jaya, yang merupakan perwujudan dari amanat GBHN 1999, dalam butir khusus tentang penanganan masalah Propinsi Irian Jaya. Mengapa di Timor Timur, pemerintah begitu cepat membentuk komisi pencari fakta dan penegakan HAM, begitu pula dengan kasus Tanjung Priok, namun dengan Irian Jaya pemerintah tidak membentuknya?
   d. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Iran Jaya,

pemerintah perlu untuk memutuskan segera, apakah pemerintah memilih pemekaran Propinsi Irian Jaya sesuai UU No. 45/1999 (3 propinsi). Sampai saat ini tidak ada ketegasan dari pemerintah. Mengingat kedua hal ini memiliki asumsi dasar yang berbeda bahkan paradoks.

e. Kami memandang bahwa hakikat desentralisasi di Irian Jaya diarahkan bagi: 1) pemberian ruang publik bagi semua masyarakat asli yang majemuk untuk mengelola rumah tangga secara mandiri; 2) penghormatan bagi budaya lokal dan hak-hak masyarakat adat; 3) menata dan membentuk sistem dan struktur politik lokal dengan semangat desentralistik; 4) pendistribusian keadilan dan kesejahteraan; 5) peningkatan semangat ke-Irian-an dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, dari persoalan *cultural gap* yang terjadi selama ini.

4. Menyangkut langkah-lagkah pemerintah yang bersifat simbolistik, kami mengusulkan agar:
   a. Pemerintah membebaskan tokoh-tokoh Presidium Dewan Papua (PDP) maupun elite-elite Papua lainnya;
   b. Pemerintah perlu membentuk Dewan Penasehat Daerah (DPD) yang merupakan lembaga penasehat di daerah (seperti DPA) yang mengakomodasi tokoh-tokoh pejuang, tokoh adat, tokoh agama, dan komponen masyarakat Irian Jaya lainnya. DPD sebagai mitra dan partner;
   c. Pemerintah perlu mencetak uang baru dengan simbol tokoh pejuang Irian, misalnya pahlawan almarhum Bapak Dimara.
   d. Pemerintah perlu mengekspos dan mengangkat kebudayaan dan identitas manusia Papua dalam panggung nasional/keindonesian;
   e. Dalam panggung Internasional, pemerintah perlu menjajaki forum kerja sama Kepulauan Pasifik, di mana Irian Jaya dijadikan pintu depan bagi kerja sama kebudayaan, sosial, ekonomi, maupun pembangunan. Persamaan ras maupun kecekungan Pasifik merupakan alasan yang kuat untuk membentuk forum tersebut.

II. Tanggapan Presiden

1. Bapak Presiden sangat setuju dan mengulangi lagi kebijakannya bahwa tokoh-tokoh PDP dan elite-elite Papua lainnya agar

dibebaskan, sehingga mereka menikmati suasana perayaan Natal, Idulfitri 2000, serta Tahun Baru 2001 dan dapat berkumpul dengan keluarga. Perayaan hari raya akan menjadi momentum penyelesaian humanis dan persuasif.

2. Bapak Presiden menjanjikan bahwa dalam beberapa hari ini akan ada kebijaksanaan dari pemerintah, setelah koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, keputusan pembebasan akan didengar sebelum Natal dan Idul Fitri 2000. Menyangkut hal ini Bapak Presiden secara jujur mengakui memang terdapat perbedaan pendangan atau dualisme dalam menangani pembebasan tokoh-tokoh PDP.
3. Bapak Presiden juga menyatakan bahwa dalam proses pemecahan masalah Irian Jaya melalui dialog akan mendengar, memperhatikan, dan mengikutsertakan semua komponen masyarakat Irian yang majemuk secara adil. Perbedaan etnis agama dan budaya merupakan potensi kekayaan budaya yang harus dilestarikan dalam kehidupan kemasyarakatan di Tanah Papua.
4. Dalam konteks dialog ini Bapak Presiden menyampaikan bahwa pada 24 Desember 2000 ia akan berada di Timika untuk menghadiri seminar pemberdayaan SDM Irian Jaya dan jika memungkinkan akan berada di Jayapura pada 25 Desember 2000 untuk perayaan Natal bersama. Demikian *press release* ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

H. Sofyan Wanggai
(Koordinator)

Profil
SKP Keuskupan Jayapura

PENDAHULUAN

SKP adalah bagian integral dari Sekretariat Keuskupan Jayapura dan berdiri sejak Juli 1998. Sekarang ini ditangani oleh dua bruder OFM (Theo van den Broek, OFM dan Budi Hernawan, OFM) dan seorang awam, Frederika Korain. SKP bekerja dan bertanggungjawab langsung kepada Uskup Jayapura, Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar, OFM.

Kegiatan SKP meliputi empat aspek besar: (1) melaporkan pelanggaran HAM, (2) mensosialisasikan pemahaman HAM, (3) mengupayakan jalan keluar, dan (4) berperan serta dalan jaringan kerja yang lebih luas.

1. Melaporkan Pelanggaran HAM

Bagi siapa pun yang mengetahui serba-sedikit situasi di Tanah Papua, bukan rahasia lagi kalau masyarakat asli Tanah Papua menderita akibat sering terjadinya manipulasi politik dan kekerasan. Setelah kehilangan statusnya sebagai jajahan Belanda pada 1962, Papua menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia lewat manipulasi politik internasional dan secara dramatis habislah harapan untuk menjadi negeri merdeka. Walaupun diadakan referendum di bawah pengawasan PBB pada 1969, tetapi rakyat Papua tidak memiliki pilihan sama sekali. Aksi pengkhianatan internasional ini menyisakan pengalaman mendalam, kalau bukan traumatis, dan terpatri di dalam

hati masyarakat Papua. Integrasi ini diikuti oleh pengalaman penindasan lebih dari 30 tahun, termasuk pembunuhan semena-mena, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Singkatnya, masyarakat Papua merasa semua ini sudah cukup!

Walaupun banyak penderitaan yang tidak terungkapkan, mengingat hampir tidak tersedia dokumentasi yang sistematis, sejumlah pengalaman terbaru terdokumentasikan dalam seri laporan pelanggaran HAM. Pendokumentasian ini dipicu oleh sebuah laporan Keuskupan Jayapura pada Agustus 1995 (sebuah laporan dipublikasikan di bawah tanggungjawab mantan Uskup Mgr. Herman Münninghoff OFM), yang umumnya terfokus pada pelanggaran HAM di area pertambangan di Timika (perusahaan Freeport McMoran). Sejak itu beberapa laporan diterbitkan atau disunting oleh SKP di samping Els-HAM (sebuah organisasi nonpemerintah [Ornop] HAM yang seringkali menjadi mitra SKP).

SKP akan terus melaporkan pelanggaran HAM. Dengan caranya sendiri SKP berusaha untuk memikat perhatian orang terhadap bentuk represi agar menjadi lebih jelas, bahwa pelanggaran-pelanggaran itu tidak bisa dilihat sebagai kasus-kasus terpisah semata atau sebagai buah laku jahat individual. Semua ini bagian dari pola struktural.

SKP tetap berusaha mencermati semua hal tersebut sebagai pelanggaran HAM yang lebih luas. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pemaparan pelanggaran HAM tidak hanya terfokus pada pembunuhan, penyiksaan, dan semacamnya, tetapi juga terfokus pada aneka ragam intimidasi atau pengekangan hak seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan berusaha, berbicara, praktik agama, ekspresi budaya, dan semacamnya.

2. Menyosialisasikan Pemahaman Pelanggaran HAM

Situasi sosial-politik Indonesia secara umum dan situasi di Tanah Papua khususnya menjadi sangat kompleks beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut hampir tidak dipahami sebagian penduduk Papua. Rakyat seringkali puas hanya dengan informasi sepotong-sepotong yang dijejalkan oleh media massa lokal. Hal ini juga berlaku, khususnya, bagi pekerja Gereja dan masyarakat terdidik lainnya di pulau Papua yang relatif terasing. Karena itu, SKP terlibat dalam beberapa upaya untuk mensosialisasikan pemahaman SKP terhadap

perkembangan Papua.

Di samping sejumlah pertemuan di lingkungan Jayapura, semua kunjungan lapangan dihabiskan untuk mendiskusikan situasi, menyalurkan informasi sebagai upaya penduduk mengakrabi berbagai masalah dan melengkapi informasi yang seringkali tidak lengkap yang mereka miliki dan gunakan sebagai acuan pandangan dan aksi. Fungsi sosialisasi yang sama kita berikan saat menerbitkan laporan di media nasional maupun lokal. Terbitan yang paling terkenal adalah Dialog Nasional yang berjudul *Memoria Passionis*. Lewat publikasi ini kami berusaha untuk menggambarkan problem Tanah Papua dalam perspektif memori kolektif korban.

Pada paruh kedua 1999 SKP mulai mengembangkan kursus HAM. Upaya ini terkait dengan kebutuhan untuk membangun lingkaran penduduk lokal dari berbagai wilayah yang berbeda yang berguna untuk menangani soal-soal HAM. Ada kebutuhan nyata untuk mengembangakan kursus yang terfokus pada situasi khusus dan latar belakang budaya Tanah Papua. Karena itu, walaupun dimulai dengan materi umum kami berharap secara bertahap melengkapi bahan yang dipakai dengan tema lokal. Untuk sementara unsur utama kursus ini (paling tidak lokakarya empat hari) membahas (1) pemahaman umum HAM, (2) pemahaman mengenai perkembangan di Tanah Papua yang berhubungan dengan soal-soal HAM yang dirasakan penduduk setempat, (3) membangun kemampuan untuk melaporkan pelanggaran HAM, (4) cara untuk mengarah ke jalan keluar, termasuk pemahaman akan pendekatan rekonsiliasi, dan (5) soal-soal HAM yang berkaitan dengan soal gender.

Soal kunci lainnya adalah masalah HAM yang berhubungan dengan soal tanah, tetapi bagian itu masih harus dikembangkan dan saat ini SKP mengandalkkan Ornop lain untuk mengisi kekosongan tersebut.

3. Upaya-upaya Penyelesaian

Mengangkat pelanggaran HAM hanyalah salah satu misi pendirian SKP, lainnya adalah upaya untuk mencari jalan keluar. Kami sangat yakin bahwa mengungkapkan problem atau pelanggaran HAM tanpa komitmen untuk mencari jalan keluar adalah suatu kegiatan yang aneh dan berisiko kontra-produktif. Di satu sisi pemaparan

semacam itu adalah hal penting, karena setiap jalan keluar harus berangkat dari pemahaman yang cermat dan mengenali apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, pemaparan ini berisiko menyebabkan para pelanggar HAM lebih defensif, atau lebih parah lagi, menjadi lebih agresif, khususnya ketika tidak ada jalan yang ditawarkan untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang telah dilakukan.

Berdasarkan keyakinan yang disebut di atas, SKP bertekad untuk mengembangkan di antara pihak-pihak yang terlibat, dan kalau mungkin mencari jalan "rekonsiliasi" tanpa mengendurkan upaya agar keadilan (sosial) dijalankan. Komitmen ini memotivasi SKP untuk mengambil peran "penekan" untuk membuat dialog tetap hidup.

Sejalan dengan komitmen untuk mencari solusi, SKP juga menggunakan media yang tersedia untuk memperluas dan menyuarakan pendapat SKP. Kami menghasilkan sejumlah artikel yang membahas terutama membahas kebutuhan dialog dan rekonsilaiasi sambil menyarankan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Upaya-upaya yang berhubungan dengan menumbuhkan iklim rekonsiliasi akan menjadi salah satu prioritas utama SKP di masa datang. Di satu sisi, ini berarti staf SKP dituntut memperdalam pemahaman tentang "tujuan utama rekonsiliasi" dan di sisi lain dituntut untuk menemukan cara untuk mensosialisasikan pengertian ini. Dengan begitu kami berharap secara perlahan akan terbuka kemungkinan untuk dialog lebih lanjut dan "mengobati luka-luka".

4. Berpartisipasi dalam Jaringan Kerja yang Lebih Luas

Misi keterlibatan SKP tidak bisa dilakukan tanpa bergabung dengan masyarakat dan organisasi lain. Kenyataan yang dijadikan titik fokus terlalu besar dan terlalu rumit, di samping terlalu struktural untuk ditangani sendirian. Karena itu, sejak awal, SKP ingin menjadi bagian dari jaringan kerja yang efektif dan mampu dikerjakan.

KESIMPULAN

Jelas apa yang harus dikembangkan. Kendati demikian kami belum banyak memahami masalah yang sesungguhnya kami hadapi. Meski demikian, kami merasa bukan hanya perlu tetapi merupakan

keharusan Gereja untuk terlibat dalam misi ini agar hak-hak dasar masyarakat diakui, dihormati, dan diutamakan. Kami juga mengalami sendiri bahwa masyarakat sangat mengharapkan Gereja mampu mengambil sikap dalam perjuangan dan penderitaan mereka; lebih-lebih belakangan masyarakat Tanah Papua menaruh kepercayaan besar pada Gereja, dan pada Gereja inilah mereka merasa "diakui dan dihormati sebagai manusia sejati".

Jayapura, 24 Januari 2001

Theo van den Broek ofm
Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian

Terbitan-terbitan SKP Keuskupan Jayapura:

Laporan Umum
SKP menerbitkan dua seri laporan:
1. Seri Memoria Passionis.
2. Seri Catatan Sosio-Politik tentang Perkembangan Terkini di Papua.

Seri Memoria Passionis
No. 1. *Agenda Rekonsiliasi Irian Jaya* (September 1998, 7 halaman)
No. 2. *Hak-Hak Asasi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi Irian Jaya* (Oktober 1998, 20 halaman)
No. 3. *Mereka yang Kembali dari Papua New Gunea ke Irian Jaya: Laporan survei yang membahas orang yang kembali ke wilayah Waropko-Mindiptana* (Januari 1999, 32 halaman).
No. 4. *Dialog Nasional Papua: Sebuah kisah "Memoria Passionis"* (Maret 1999, 10 halaman).
No.5. *Dampak Kehadiran Aparat Keamanan bagi Situasi Kemasyarakatan dan HAM di Wilayah Pegunungan Bintang, Tahun 1998–Awal 1999* (Juli 1999, 19 halaman).
No.6. *Aspirasi "Merdeka" Masyarakat Tanah Papua dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia Awal Tahun 2000: Suatu peta sosio-politik* (Februari 2000, 25 halaman).

No. 7. *Laporan Situasional Nabire Kabupaten Paniai: Peristiwa 28 Februari serta sebelum dan sesudahnya* (Juli 2000, 20 halaman).

No. 8. *Sketsa Sejarah Perlawanan dan Penderitaan Masyarakat Paniai: Sebuah laporan lanjutan*; laporan pertama Oktober 1998: Memoria Passionis No. 2 (November 2000, 23 halaman).

No. 9. *Kondisi HAM serta Perkembangan Gerakan Aspirasi Merdeka di Tanah Papua: Gambaran 1999*; kronologi peristiwa pada 1999 ditambah dengan analisis.

No. 10 *Kondisi Sosial-Politik dan Hak Asasi Manusia: Gambaran 2000;* kronologi peristiwa pada 2000 ditambah analisis.

Seri Catatan Sosio-Politik

No. 1. *Irian Jaya Pasca-Soeharto: Perspektif Menuju Rekonsiliasi* (Juli 1999, 8 halaman).

No. 2. *Pengibaran Bendera Papua Khususnya Perayaan 1 Desember 1999* (Desember 1999, 13 halaman).

No. 3. *Catatan Perkembangan Terkini di Papua Pasca-Mubes* (April 2000, 16 halaman).

No. 4. *Catatan Perkembangan Terkini di Papua: Kongres Papua II* (Januari 2001).

Makalah dan Artikel

1. *Laporan Tahunan 1999*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Januari 2000, 10 halaman.
2. *Acuan Latihan Permasalahan dan Rekonsiliasi: Sebuah rangkuman lokakarya analisis masalah dan rekonsiliasi di Papua*, April 2000, 16 halaman. Versi Inggris: "*Reflection Framework on Socio-Political Problems and Process Towards Reconciliation*".
3. *"Effek Obano"*, artikel tentang harapan yang menyesatkan. Dimuat mingguan *Tifa Papua*,.
4. *Ada Apa di Jakarta*, artikel mengenai reaksi Jakarta terhadap Kongres Papua dimuat *Suara Pembaruan*, Juni 2000.
5. *Gambaran Permasalahan di Papua*, Juni 2000, 14 halaman (sebuah makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan tatap muka dengan Presiden di Jakarta) . Versi Inggris: "*The Problems*

in Papua", 27 Juni 2000, 10 halaman.

6. *Rekonsiliasi dan Penciptaan Perdamaian: Konteks Papua Barat*, September 2000, 8 halaman (makalah yang dipresentasikan pada *workshop* "Peran Gereja dalam Advokasi HAM di Biak").
7. *Seruan kepada Komisi Nasional HAM* (seruan sehubungan dengan peristiwa berdarah di Jayapura setelah 7 Desember 2000). Versi Inggris: "Church Appeal", 16 Desember 2000.
8. *Laporan Tahunan 2000*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Januari 2001, 10 halaman.
9. *Peristiwa Tragedi Kemanusiaan Wamena 6 Oktober 2000; Sebelum dan Sesudahnya*, laporan investigasi oleh Tim Kemanusiaan Wamena di bawah koordinasi SKP, Januari 2001, 109 halaman.
10. *Bagaimana Kita Sebagai Gereja di Tanah Papua Menempatkan Diri dalam Situasi Konflik dan Kekerasan*, oleh J. Budi Hernawan ofm, 4 Februari 2001, 12 halaman.
11. "*Papua Ko, Mo Kemanakah*", artikel mengenai Otonomi Khusus, dimuat di mingguan *Tifa Papua*, Maret 2001, Th. 45, No. 07 dan 08, 5 halaman.
12. *Beberapa Catatan Terhadap Kondisi Sosio-Politik Mutakhir di Papua*, oleh J. Budi Hernawan ofm, Juni 2001, 8 halaman (makalah yang disajikan pada *Workshop* "Perencanaan Kontingensi Regional" yang diselenggarakan UNHCR di Jakarta).
13. "*Papua Nowadays: Peace Building and Interreligious Co-Operation*", oleh Theo van den Broek ofm, Oktober 2001, 6 halaman (kontribusi untuk diskusi pada Konferensi Menuju Praktik Membangun Perdamaian yang Lebih Baik, di Soesterberg, Belanda).

Perjalanan tahun 2000 di Papua diwarnai berbagai peristiwa yang tak terbayangkan. Peristiwa Musyawarah Besar (Mubes) Papua dan Kongres Rakyat Papua II adalah dua tonggak sejarah terpenting dalam tahun tersebut, yang telah menyedot perhatian dari pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai dari Papua, Jakarta, hingga dunia internasional. Kedua peristiwa tersebut hanya mungkin terjadi dalam era pemerintahan Indonesia yang bergerak pada sistem yang demokratis.

Namun, selama tahun 2000, di Papua juga tercatat pola-pola kebijakan negara yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Papua masih belum meningkat secara memadai. Rangkaian tindakan kekerasan, baik yang dilakukan masyarakat maupun aparat negara, tetap berlangsung tanpa mampu dijangkau jerat hukum.

Buku ini merangkum situasi sosial politik dan kondisi HAM di Papua secara kronologis selama tahun 2000. Di samping itu menyajikan dokumen-dokumen terpilih yang telah mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Dengan sajian seperti itu, buku ini mencoba memberikan pemahaman mengenai seluk beluk perkembangan sosial politik dan HAM di Papua secara lebih dekat.

ISBN 979-9381-18-5

Foto Sampul: Rully Kesuma/TEMPO